

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

TAHUN 2025-2029



*"BERSAMA MEMBAWA SELAYAR
MAJU DAN SEJAHTERA"*



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2

- (1) RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i pendahuluan;
 - b. bab ii gambaran umum Daerah;
 - c. bab iii visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab iv program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - e. bab v penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

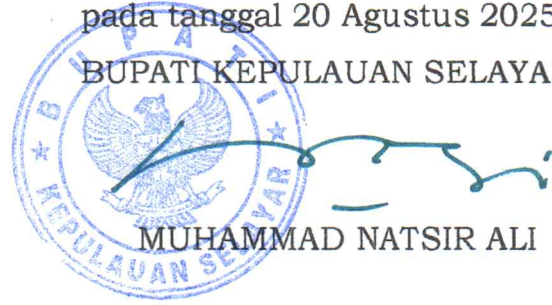
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025
NOMOR 138

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.02.033.25

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 dapat terselesaikan. Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 ini disusun dengan pendekatan teknokratik sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pada analisis data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan sektoral Perangkat Daerah serta informasi terkait lainnya yang akurat. Kemudian data dan informasi tersebut dikonstruksikan menjadi isu strategis yang diasumsikan akan dihadapi selama periode pembangunan tahun 2025-2029. Selanjutnya disusun dengan pendekatan *top down* dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan pendekatan *bottom up* dan partisipatif dengan memasukkan berbagai masukan *stakeholder* pembangunan melalui Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD. Pendekatan yang dilaksanakan kemudian dikolaborasikan dengan pendekatan politis berupa visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 ini dilandasi bahwa RPJMD yang disusun tidak terpisahkan dari dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2045 periode pertama pembangunan dengan Visi: **“Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang disajikan dalam dokumen ini berpedoman pada dokumen RPJPD dimaksud. Secara umum, Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dalam 5 bab sebagai berikut: **Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. **Bab II Gambaran Umum Daerah**, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah. **Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat visi, misi dan tujuan dan sasaran RPJMD, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan sasaran. **Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, memuat program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Indikator Kinerja Daerah (IKD), target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target SDGs/TPB dan **Bab V Penutup**, pendanaan pembangunan,

komunikasi publik, pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi arah pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun kedepan (tahun 2025-2029).

Benteng, 20 Agustus 2025


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR VIII

DAFTAR ISI X

DAFTAR TABEL XVIII

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3. Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya..... 9

1.4. Maksud dan Tujuan..... 11

1.5. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 13

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 13

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 13

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif 13

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi 16

2.1.1.2.1. Kondisi Topografi..... 16

2.1.1.2.2. Kondisi Geologi..... 16

2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi 17

2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi..... 17

2.1.1.3. Kondisi Penggunaan Lahan 18

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah 21

2.1.1.4.1. Rencana Struktur Ruang..... 23

2.1.1.4.2. Kawasan Strategis Kabupaten..... 26

2.1.1.4.3. Kawasan Perikanan 28

2.1.1.4.4. Kawasan Pertanian..... 28

2.1.1.4.5. Kawasan Perkebunan 29

2.1.1.4.6. Kawasan Peternakan 29

2.1.1.4.7. Kawasan Pariwisata..... 30

2.1.1.4.8. Kawasan Pertambangan dan Energi 30

2.1.1.4.9. Kawasan Peruntukan Industri 30

2.1.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ... 31

2.1.1.5.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup..... 31

2.1.1.5.1.1. Ambang Batas dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup Penyediaan Air 31

2.1.1.5.1.2. Ambang Batas dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan
..... 32

2.1.1.5.1.3. Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 32

2.1.1.5.2. Jasa Ekosistem Penyedia Air..... 33

2.1.1.5.3. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan 33

2.1.1.5.4.	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir.....	34
2.1.1.5.5.	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	34
2.1.1.5.6.	Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Banjir	35
2.1.1.5.7.	Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Longsor.....	35
2.1.1.5.8.	Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	35
2.1.1.6.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	36
2.1.1.6.1.	Konsumsi Listrik Per Kapita.....	36
2.1.1.6.2.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	37
2.1.1.6.3.	Kapasitas Air Baku.....	41
2.1.1.6.4.	Indeks Ketahanan Pangan	43
2.1.1.6.5.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.	44
2.1.1.6.6.	Skor Pola Pangan Harapan	45
2.1.1.7.	Lingkungan Hidup Berkualitas	46
2.1.1.7.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	46
2.1.1.7.2.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman...	47
2.1.1.7.3.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	49
2.1.1.7.4.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.....	49
2.1.1.7.5.	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia.....	50
2.1.1.7.6.	Indeks Pertanaman (IP) Padi	51
2.1.1.7.7.	Proporsi Sawah Irigasi	52
2.1.1.7.8.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.....	53
2.1.1.7.9.	Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga	54
2.1.1.8.	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	55
2.1.1.8.1.	Penurunan Intensitas GRK	55
2.1.1.8.2.	Indeks Risiko Bencana.....	56
2.1.1.9.	Aspek Demografi	57
2.1.1.9.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	57
2.1.1.9.2.	Kepadatan Penduduk	59
2.1.1.9.3.	Rasio Jenis Kelamin	59
2.1.1.9.4.	Struktur Usia	60
2.1.1.9.5.	Proyeksi dan Analisis Penduduk	62
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	63
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi.....	63
2.1.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	63
2.1.2.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	65
2.1.2.1.3.	PDRB Perkapita.....	68
2.1.2.1.4.	Indeks Gini	69

2.1.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	71
2.1.2.1.6.	Tingkat Kemiskinan.....	73
2.1.2.1.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	74
2.1.2.2.	Kesehatan untuk Semua	76
2.1.2.2.1.	Usia Harapan Hidup.....	76
2.1.2.2.2.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan...	76
2.1.2.2.3.	Jumlah Kematian Ibu	77
2.1.2.2.4.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	78
2.1.2.2.5.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate).....	79
2.1.2.2.6.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	81
2.1.2.2.7.	Prevalensi Stunting.....	81
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	83
2.1.2.3.1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	83
2.1.2.3.2.	Angka Melek Huruf.....	84
2.1.2.3.3.	Nilai Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada Asesmen Tingkat Nasional	85
2.1.2.3.4.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten	86
2.1.2.3.5.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	88
2.1.2.3.6.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan.....	89
2.1.2.3.7.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	90
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	91
2.1.2.4.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	91
2.1.2.4.2.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	92
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	93
2.1.2.5.1.	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas	93
2.1.2.5.2.	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	94
2.1.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif.....	95
2.1.2.6.1.	Indeks Perlindungan Anak	95
2.1.2.6.2.	Indeks Pembangunan Keluarga.....	96
2.1.2.6.3.	Indeks Ketimpangan Gender	97
2.1.2.6.4.	Indeks Pembangunan Gender	98

2.1.2.6.5.	Indeks Pemberdayaan Gender.....	100
2.1.2.6.6.	Indeks Pembangunan Pemuda	101
2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah	103
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	103
2.1.3.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	103
2.1.3.1.2.	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan ...	104
2.1.3.1.3.	Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	104
2.1.3.1.4.	Rasio Ketergantungan.....	105
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	106
2.1.3.2.1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	106
2.1.3.2.2.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum...	107
2.1.3.2.3.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik.....	107
2.1.3.2.4.	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif.....	108
2.1.3.2.5.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah.....	109
2.1.3.2.6.	Persentase Koperasi Sehat	110
2.1.3.2.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	111
2.1.3.2.8.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	112
2.1.3.2.9.	Return on Aset (ROA) BUMD.....	113
2.1.3.2.10.	Produktivitas Padi	114
2.1.3.2.11.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.....	115
2.1.3.2.12.	Indeks Kapabilitas Inovasi	116
2.1.3.2.13.	Indeks Inovasi Daerah	117
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.....	118
2.1.3.3.1.	Indeks Ekonomi Hijau	118
2.1.3.3.2.	Indeks Ekonomi Biru.....	119
2.1.3.4.	Transformasi Digital	120
2.1.3.4.1.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi.....	120
2.1.3.4.2.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia.....	121
2.1.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	122
2.1.3.5.1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	122
2.1.3.5.2.	Ekspor Barang dan Jasa.....	123
2.1.3.5.3.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	124
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	125
2.1.3.6.1.	Indeks Infrastruktur	125
2.1.3.6.2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak .	126
2.1.3.6.3.	Persentase Desa Mandiri.....	129

2.1.3.6.4.	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	131
2.1.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro.....	133
2.1.3.7.1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	133
2.1.3.7.2.	Tingkat Inflasi Gabungan.....	134
2.1.3.7.3.	Pertumbuhan Investasi Daerah	135
2.1.3.7.4.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	137
2.1.3.7.5.	Indeks Akses Keuangan Daerah	139
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	140
2.1.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif.....	140
2.1.4.1.1.	Indeks Reformasi Hukum	140
2.1.4.1.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	141
2.1.4.1.3.	Indeks Pelayanan Publik.....	143
2.1.4.1.4.	Indeks Survei Penilaian Integritas	145
2.1.4.1.5.	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	146
2.1.4.1.6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	147
2.1.4.1.7.	Indeks Maturitas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	149
2.1.4.2.	Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Sustansial.....	150
2.1.4.2.1.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah.....	150
2.1.4.2.2.	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	150
2.1.4.2.3.	Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD.....	151
2.1.4.2.4.	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	152
2.1.4.2.5.	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani... ..	153
2.1.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	154
2.1.4.3.1.	Indeks Daya Saing Daerah.....	154
2.1.4.3.2.	Jumlah Kerjasama antar Daerah	155
2.1.4.4.	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah.....	156
2.1.4.4.1.	Pendidikan	156
2.1.4.4.2.	Bidang Kesehatan.....	158
2.1.4.4.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161
2.1.4.4.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	164
2.1.4.4.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	166

2.1.4.4.6.	Sosial.....	168
2.1.4.4.7.	Tenaga Kerja	170
2.1.4.4.8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	172
2.1.4.4.9.	Ketahanan Pangan	174
2.1.4.4.10.	Pertanahan	176
2.1.4.4.11.	Lingkungan Hidup.....	178
2.1.4.4.12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	180
2.1.4.4.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	182
2.1.4.4.14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	184
2.1.4.4.15.	Perhubungan	186
2.1.4.4.16.	Komunikasi dan Informatika.....	188
2.1.4.4.17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	190
2.1.4.4.18.	Penanaman Modal.....	192
2.1.4.4.19.	Kepemudaan dan Olahraga.....	194
2.1.4.4.20.	Statistik	196
2.1.4.4.21.	Persandian	198
2.1.4.4.22.	Kebudayaan	198
2.1.4.4.23.	Perpustakaan	200
2.1.4.4.24.	Kearsipan.....	202
2.1.4.4.25.	Pariwisata	204
2.1.4.4.26.	Pertanian	206
2.1.4.4.27.	Perdagangan	210
2.1.4.4.28.	Perindustrian	212
2.1.4.4.29.	Kelautan dan Perikanan	214
2.1.4.4.30.	Sekretariat Daerah	217
2.1.4.4.31.	Sekretariat Dewan	219
2.1.4.4.32.	Perencanaan Pembangunan.....	219
2.1.4.4.33.	Keuangan.....	220
2.1.4.4.34.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	223
2.1.4.4.35.	Penelitian dan Pengembangan.....	224
2.1.4.4.36.	Transparansi dan Partisipasi Publik.....	224
2.1.4.4.37.	Pengawasan	225
2.1.4.4.38.	Kecamatan	226
2.1.4.4.39.	Kesatuan Bangsa dan Politik	228
2.1.5.	Analisis Capaian Indikator Kinerja Daerah.....	230
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah	265
2.2.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	265
2.2.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	266
2.2.1.2.	Neraca Daerah	271

2.2.1.3.	Aset Daerah	274
2.2.1.4.	Kewajiban	274
2.2.1.5.	Ekuitas Dana	275
2.2.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	275
2.2.2.1.	Kebijakan Pendapatan Daerah	276
2.2.2.2.	Kebijakan Belanja Daerah: Proporsi Penggunaan Anggaran	278
2.2.2.3.	Analisis Pembiayaan.....	281
2.2.3.	Analisis Keuangan Daerah.....	285
2.2.3.1.	Analisis Fiskal Daerah.....	285
2.2.3.2.	Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB	292
2.2.4.	Rasio Keuangan	296
2.2.4.1.	Rasio Likuiditas	296
2.2.4.2.	Rasio Solvabilitas	297
2.2.4.3.	Rasio Utang	298
2.2.5.	Dana Bagi Hasil	299
2.2.6.	Kerangka Pendanaan	301
2.2.6.1.	Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah	302
2.2.6.2.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	304
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis	320
2.3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	321
2.3.2.	Isu Strategis	334
2.3.2.1.	Isu Strategis Global	334
2.3.2.2.	Isu Strategis Nasional.....	334
2.3.2.3.	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan	344
2.3.2.4.	Isu Strategis Daerah.....	360
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBAGUNAN DAERAH.....	370
3.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	370
3.1.1.	Visi.....	370
3.1.2.	Misi	373
3.1.3.	Tujuan dan Sasaran.....	379
3.2.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..	385
3.2.1.	Strategi.....	385
3.2.2.	Arah Kebijakan	394
3.2.3.	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	397
3.3.	Arah Pembangunan Kewilayahan	425
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	462
4.1.	Program Perangkat Daerah.....	462
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	524
4.2.1.	Indikator Makro	524

4.2.2. Indikator Kinerja Utama 525

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah..... 525

4.2.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 556

4.2.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Developmen Goals..... 561

BAB V PENUTUP 573

5.1. Pendanaan Pembangunan..... 573

5.2. Komunikasi Publik..... 574

5.3. Pedoman Transisi 574

5.4. Kaidah Pelaksanaan..... 574

5.5. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi..... 575

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar..... 13

Tabel 2. 2 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 18

Tabel 2. 3 Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 19

Tabel 2. 4 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 39

Tabel 2. 5 Sumber Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar 42

Tabel 2. 6 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ... 49

Tabel 2. 7 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah (% Ruta) 50

Tabel 2. 8 Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar 56

Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 58

Tabel 2. 10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 59

Tabel 2. 11 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 .. 60

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 60

Tabel 2. 13 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024..... 62

Tabel 2. 14 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029..... 62

Tabel 2. 15 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 66

Tabel 2. 16 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 67

Tabel 2. 17 Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024..... 72

Tabel 2. 18 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Jenis Penghasilan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023..... 93

Tabel 2. 19 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 103

Tabel 2. 20 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... 104

Tabel 2. 21 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 104

Tabel 2. 22 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 105

Tabel 2. 23 Nilai Realisasi Dan Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 136

Tabel 2. 24 Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 152

Tabel 2. 25 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar 152

Tabel 2. 26 Jumlah Kerjasama dan Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.... 155

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar 157

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 159

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 162

Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 165

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 167

Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 169

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 171

Tabel 2. 34 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 173

Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Bidang Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 175

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 177

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar 179

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 181

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 183

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 185

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 187

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 189

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 191

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 193

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 195

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 197

Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Bidang Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 198

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 199

Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 201

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 203

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 205

Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 207

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 211

Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 213

Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 215

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 218

Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 219

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 220

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 222

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 223

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 224

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 225

Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 226

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 227

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 229

Tabel 2. 66 Hasil Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 233

Tabel 2. 67 Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024 235

Tabel 2. 68 Analisis Capaian Indikator SPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024..... 250

Tabel 2. 68 Capaian Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 253

Tabel 2. 70 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024 267

Tabel 2. 71 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024 273

Tabel 2. 72 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024 279

Tabel 2. 73 Perhitungan Surplus/ Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024..... 282

Tabel 2. 74	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024.....	283
Tabel 2. 75	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024.....	284
Tabel 2. 76	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	286
Tabel 2. 77	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	287
Tabel 2. 78	Rasio Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	288
Tabel 2. 79	Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	289
Tabel 2. 80	Rasio Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	291
Tabel 2. 81	Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	292
Tabel 2. 82	Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	294
Tabel 2. 83	Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	295
Tabel 2. 84	Rasio Lancar Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	296
Tabel 2. 85	Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	297
Tabel 2. 86	Rasio Utang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	299
Tabel 2. 87	Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	300
Tabel 2. 88	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030	302
Tabel 2. 89	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030.....	307
Tabel 2. 90	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030.....	311
Tabel 2. 91	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030.....	318
Tabel 2. 92	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar...	329
Tabel 2. 93	Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.....	368
Tabel 3. 1	Keterkaitan Sasaran Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045	372
Tabel 3. 2	Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	373
Tabel 3. 3	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029.....	376
Tabel 3. 4	Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030.....	381
Tabel 3. 5	Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	386

Tabel 3. 6 Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030 394

Tabel 3. 7 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2030 395

Tabel 3. 8 Program Prioritas Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 400

Tabel 3. 9 Program Kerja dan Kegiatan Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 401

Tabel 3. 10 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 409

Tabel 3. 11 Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 411

Tabel 3. 12 Highlight Intervensi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMN Tahun 2025-2029 425

Tabel 3. 13 Highlight Intervensi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2025-2029 433

Tabel 3. 14 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Daratan..... 444

Tabel 3. 15 Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Kepulauan 455

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030 463

Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 524

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 525

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 526

Tabel 4. 5 Penetapan Target Indikator SPM kabupaten Kepulauan SeLayar tahun 2025-2030 557

Tabel 4. 6 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 562

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 36

Grafik 2. 2 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.... 38

Grafik 2. 3 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 38

Grafik 2. 4 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 41

Grafik 2. 5 Kapasitas Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 (m³/detik)..... 42

Grafik 2. 6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 44

Grafik 2. 7 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 44

Grafik 2. 8 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 45

Grafik 2. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... 46

Grafik 2. 10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 47

Grafik 2. 11 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021 51

Grafik 2. 12 Capaian Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 52

Grafik 2. 13 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022 53

Grafik 2. 14 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 53

Grafik 2. 15 Konsumsi Ikan Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 55

Grafik 2. 16 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023..... 55

Grafik 2. 17 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024..... 57

Grafik 2. 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020- 2024..... 58

Grafik 2. 19 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 61

Grafik 2. 20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 64

Grafik 2. 21 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024..... 68

Grafik 2. 22 PDRB Per Kapita Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 69

Grafik 2. 23 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 70

Grafik 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 71

Grafik 2. 25	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2020-2024	73
Grafik 2. 26	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2020-2024	75
Grafik 2. 27	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	76
Grafik 2. 28	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	77
Grafik 2. 29	Jumlah Kematian Ibu per 100 Ribu Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	78
Grafik 2. 30	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	79
Grafik 2. 31	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	80
Grafik 2. 32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023	81
Grafik 2. 33	Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	82
Grafik 2. 34	Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024	84
Grafik 2. 35	Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	85
Grafik 2. 36	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022	86
Grafik 2. 37	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024	86
Grafik 2. 38	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024	89
Grafik 2. 39	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024	90
Grafik 2. 40	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	91
Grafik 2. 41	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Informal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	92
Grafik 2. 42	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	93
Grafik 2. 43	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	94
Grafik 2. 44	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023	96
Grafik 2. 45	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	97
Grafik 2. 46	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	98

Grafik 2. 47 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 99

Grafik 2. 48 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 100

Grafik 2. 49 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023 101

Grafik 2. 50 Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023 102

Grafik 2. 51 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 106

Grafik 2. 52 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 107

Grafik 2. 53 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 108

Grafik 2. 54 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023 109

Grafik 2. 55 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 110

Grafik 2. 56 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 111

Grafik 2. 57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 112

Grafik 2. 58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 113

Grafik 2. 59 *Return On Asset (ROA)* BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 114

Grafik 2. 60 *Return On Asset (ROA)* Masing-masing BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 114

Grafik 2. 61 Produktivitas Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 115

Grafik 2. 62 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 116

Grafik 2. 63 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 117

Grafik 2. 64 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 117

Grafik 2. 65 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022 119

Grafik 2. 66 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 120

Grafik 2. 67 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2022-2024 122

Grafik 2. 68 Capaian Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 122

Grafik 2. 69 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 123

Grafik 2. 70 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 124

Grafik 2. 71 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 125

Grafik 2. 72 Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 126

Grafik 2. 73 Rincian Capaian Setiap Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 – 2024 126

Grafik 2. 74 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024..... 127

Grafik 2. 75 Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar 128

Grafik 2. 76 Proporsi Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar 128

Grafik 2. 77 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 129

Grafik 2. 78 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 132

Grafik 2. 79 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 133

Grafik 2. 80 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 134

Grafik 2. 81 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 138

Grafik 2. 82 Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 140

Grafik 2. 83 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024 141

Grafik 2. 84 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 143

Grafik 2. 85 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024..... 145

Grafik 2. 86 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 146

Grafik 2. 87 Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 147

Grafik 2. 88 Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 148

Grafik 2. 89 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 151

Grafik 2. 90 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 153

Grafik 2. 91 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024 155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnya 11

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 15

Gambar 2. 2 Peta Tutupan Lahan Kab. Kepulauan Selayar..... 20

Gambar 2. 3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar..... 24

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). Pembangunan juga pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana, baik oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana itu tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis karena masing-masing daerah memiliki sumberdaya yang berbeda, masalah, dan tantangan yang berbeda pula.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memahami sepenuhnya bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah kepulauan yang memiliki posisi geografis sangat strategis di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi pintu gerbang menuju Kawasan Timur Indonesia serta penghubung antara Pulau Sulawesi dan Pulau Flores. Letak ini menjadikan Selayar berpotensi besar sebagai simpul logistik, perdagangan, dan transportasi laut antarwilayah. Kabupaten Kepulauan Selayar dianugerahi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Perairan Selayar yang termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle*) menjadikan wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati laut, termasuk potensi perikanan tangkap, budidaya laut, serta pariwisata bahari. Taman Nasional Takabonerate yang merupakan atol terbesar ketiga di dunia merupakan ikon pariwisata internasional yang menyimpan potensi ekowisata kelas dunia.

Sektor pertanian, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi unggulan di bidang hortikultura, perkebunan kelapa, dan komoditas lokal lainnya yang terus dikembangkan. Selain itu, kekayaan budaya lokal, nilai-nilai adat istiadat, serta semangat kearifan lokal masyarakat Kepulauan Selayar merupakan modal sosial penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sisi energi terbarukan, potensi energi surya, angin, dan arus laut memberikan peluang besar bagi pengembangan energi hijau di

masa depan. Kondisi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk transisi energi dan pengembangan ekonomi biru. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki posisi strategis sebagai daerah yang dapat mengembangkan ekonomi maritim, pariwisata berkelanjutan, serta sentra pertumbuhan baru di Kawasan Selatan Sulawesi. Optimalisasi potensi strategis ini, perlu didukung dengan penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik, akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk melakukan pembangunan dengan berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan. Hasil pembangunan selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari kualitas hidup manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar yang semakin membaik pada tahun 2024 yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar, telah mencapai 71,98; Persentase penduduk miskin turun signifikan hingga menjadi 10,79 persen; Angka pengangguran menjadi 2,05 persen; Pendapatan per kapita terus meningkat hingga mencapai Rp. 58.290.000; Indeks Gini mencapai 0,329 semakin kecil; Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga mencapai 3,33 persen.

Keberhasilan pembangunan yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya, perlu terus dioptimalkan dengan memperhatikan dinamika dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar terutama tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas layanan dasar dan infrastruktur wilayah. Selain itu, dinamika global seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi turut memberikan pengaruh terhadap arah pembangunan ke depan.

Memperhatikan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 20 tahun ke depan, memperhitungkan potensi dan kemampuan daerah serta berbagai faktor strategis lainnya, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, yaitu: **“Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**. Dengan sasaran pokok visi di tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan per kapita dilihat dari PDRB per kapita sebesar 146,13 juta rupiah (penyesuaian 74,07 juta rupiah), Indeks Ekonomi Biru Indonesia berada pada angka 151,93, (penyesuaian 91,93) dan kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 4,80 persen;

2. Terwujudnya sasaran pengetasan kemiskinan dan ketimpangan yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,31 persen (penyesuaian 8,67-7,67 persen), tingkat kemiskinan menurun pada angka 9,25 persen (penyesuaian 5,90 persen), Indeks Gini sebesar 0,317 (penyesuaian 0,298), dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,34 persen (penyesuaian 1,29 persen);
3. Terwujudnya sasaran peningkatan daya saing daerah yang dilihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 44,26 (Inovatif) (penyesuaian 68,40) dan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,99 (penyesuaian 4,62);
4. Terwujudnya sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,43 (penyesuaian 74,39); serta
5. Terwujudnya sasaran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK tahunan sebesar 41,27 persen (penyesuaian 37,97 persen) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,32 (Baik) (penyesuaian 75,71 (Baik)).

Tantangan pembangunan ini patut menjadi perhatian dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, sebagai tahap *Penataan dan Penguatan Landasan Transformasi*. Penataan dan penguatan landasan transformasi ini akan diwujudkan pada periode pemerintahan Bapak **H. MUHAMMAD NATSIR ALI** dan **DRS. H. MUHTAR, MM**, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia, dengan mengoptimalkan potensi dan menyikapi tantangan pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan, dan memperhatikan keberlanjutan yang mengedepankan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; peningkatan pendapatan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan mendorong perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai komitmen nasional dan global.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mendasari RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025– 2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, RPJMN tahun 2025 – 2029, dan menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih, serta merupakan wujud pengejawantahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan bahwa setiap daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dokumen RPJMD ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *top-down-bottom-up*, serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tahapan penyusunannya dimulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi vertikal ke pemerintah provinsi, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD, evaluasi pemerintah provinsi, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJMD, dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini selanjutnya akan berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan, dan diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki panduan yang jelas dan terarah dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 - 2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
17. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
18. Undang-undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

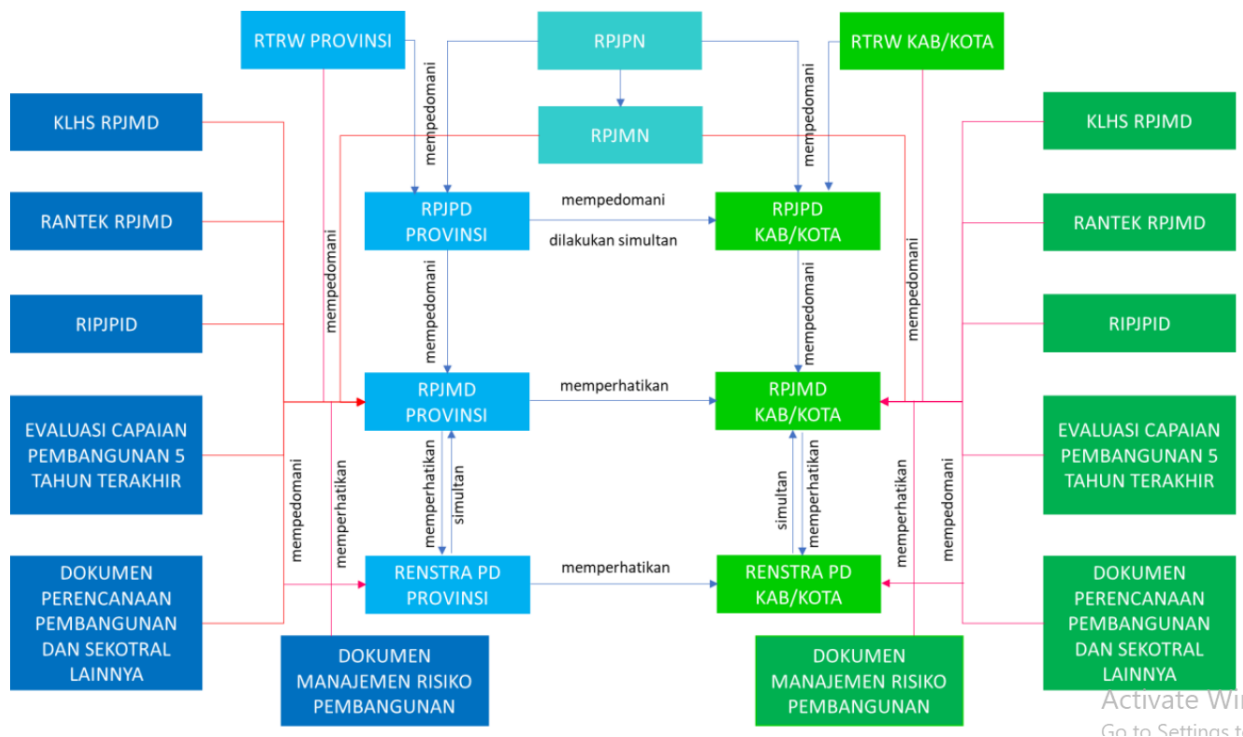
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135).

1.3. Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu lima tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029.
2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 mempedomani RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, khususnya tahap pertama *Penataan dan Penguatan Landasan Transformasi*. Dokumen RPJMD yang disusun selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berjangka waktu satu tahun. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya.
3. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029.
4. Draft Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044, yang mengatur tata ruang wilayah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029.
5. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024 serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029.
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, digambarkan pada **Gambar 1.1.**



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnya
Sumber: Inmendagri Nomor 2 tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjadi arahan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2025-2029.

Sementara tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyelaraskan RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun;
5. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD;
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dan masyarakat dan dengan kabupaten atau provinsi yang berbatasan/berdekatan;

7. Memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
8. Menjadi instrument bagi DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;
9. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN;
10. Menyediakan arah kebijakan pembangunan daerah yang jelas dan terarah;
11. Merumuskan program-program pembangunan yang prioritas dan realistis;
12. Menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar secara efektif dan efisien;
13. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah; dan
14. Menyediakan instrumen penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, memuat visi, misi dan tujuan dan sasaran RPJMD, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan sasaran.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Indikator Kinerja Daerah (IKD), target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target SDGs/TPB

Bab V Penutup, memuat pendanaan pembangunan, komunikasi publik, pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik berupa gugus kepulauan terletak antara 5°40' - 7°35' LS dan 120°15' - 122°30' BT dengan panjang garis pantai 670 km. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2.2138 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah sebesar 1.163.383 km² dan jumlah pulau sebanyak 123 pulau.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur

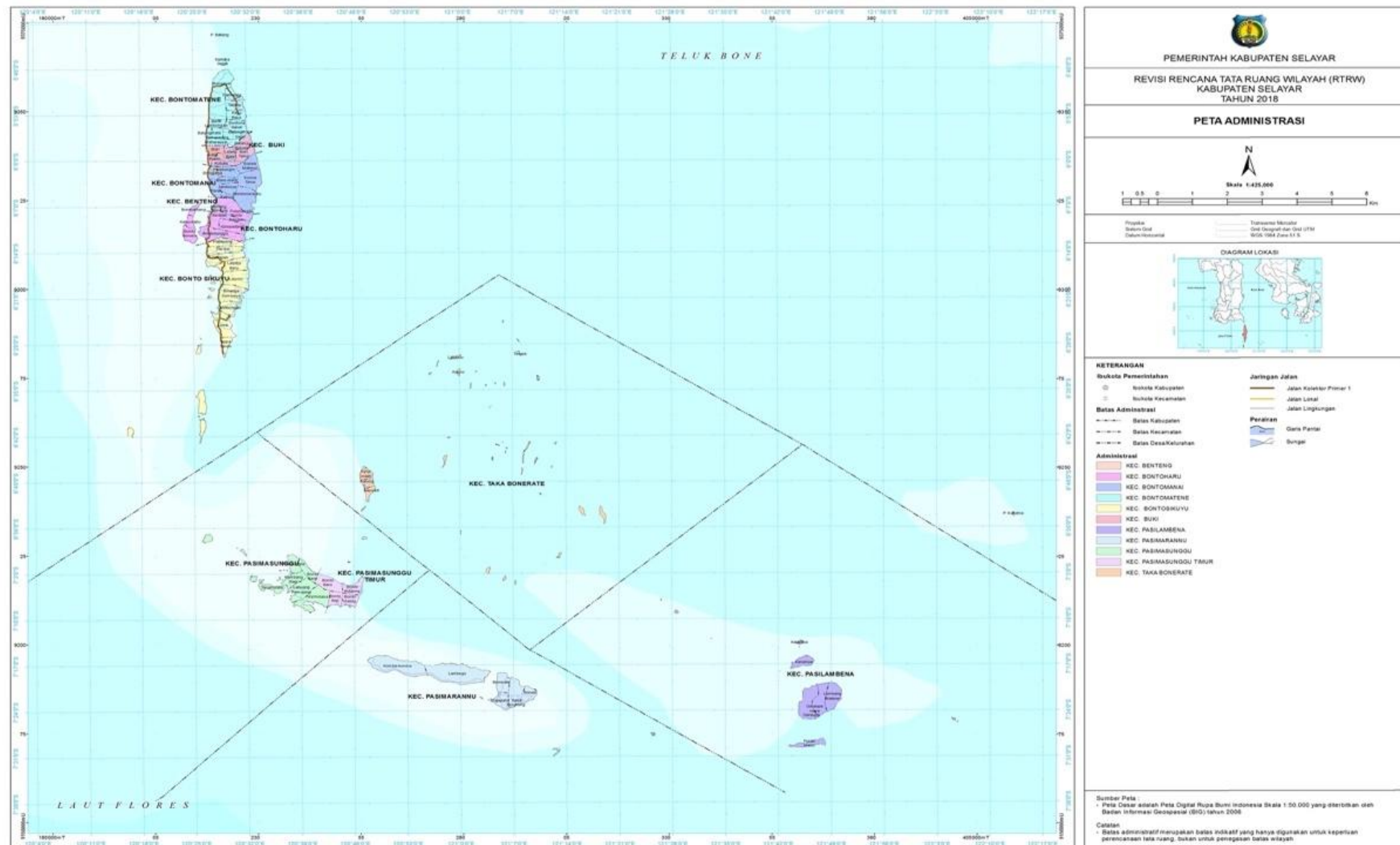
Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.1.** Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, terlihat pada **Gambar 2.1.**

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Pasimarannu	195,33
2	Pasilambena	114,88
3	Pasimasunggu	131,8
4	Taka Bonerate	49,3
5	Pasimasunggu Timur	67,14

No	Kecamatan	Luas (km ²)
6	Bontosikuyu	248,22
7	Bontoharu	128,12
8	Benteng	24,63
9	Bontomanai	136,42
10	Bontomatene	193,05
11	Buki	68,14
	Kepulauan Selayar	1.357,03

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 - 2032

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi, terdiri atas lahan datar hingga lahan miring. Fisiografi Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan struktur geologi, dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi: (1) satuan morfologi daratan *alluvial* pantai, (2) satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan (3) satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi daratan *alluvial* pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar dan terbentuk dari endapan pasir, lempungan pantai, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sementara itu, satuan morfologi perbukitan bergelombang dan perbukitan dengan lereng terjal dominan terdapat di bagian barat dengan ketinggian 356 hingga 657 meter di atas permukaan laut. Beberapa puncak di antaranya diantaranya adalah Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini tersusun atas endapan hasil aktivitas vulkanik seperti breksi, lafa, konglomerat, tufa yang bercampur dengan batuan sedimen laut.

Kelas kelerengan di Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15 persen). Semakin ke Selatan kelerengan cenderung meningkat. Di Kecamatan Bontosikuyu, lereng sangat terjal (>40 persen) mencakup sekitar 43,97 persen dari total luas wilayah kecamatan. Di Kecamatan Bontoharu persentasenya mencapai 33,12 persen, sedangkan di Kecamatan Bontomatene hanya sekitar 4,21 persen.

2.1.1.2.2. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil di wilayah administratif kabupaten. Geologi Pulau Selayar berhubungan erat dengan geologi wilayah selatan Sulawesi Selatan. Sementara itu, geologi pulau-pulau kecil di Laut Flores diduga berkaitan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang di Pulau Selayar berasal dari Formasi Camba yang berumur *Miosen* Tengah hingga Akhir. Bagian bawah dari formasi ini terdiri atas breksi, lava, konglomerat dan tufa yang diselingi oleh batuan sedimen laut. Penyebaran batuan ini dominan di bagian tengah pulau dengan arah utara-selatan. Di atas Formasi Camba terdapat Formasi Walanae yang berasosiasi dengan batu gamping Selayar. Formasi ini terdiri atas batu pasir, batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping serta berumur *Miosen* Tengah hingga *Pliosen*.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya tersusun dari terumbu karang, meskipun beberapa pulau, seperti Pulau Jampea dan Kayuadi, menunjukkan komposisi batuan beku dari kerak benua. Ciri-ciri

geologis ini menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai menjadi obyek penelitian geologi yang menarik. Batuan penyusun Pulau Selayar umumnya lemah hingga sedang dengan kemiringan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan.

2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat dipengaruhi oleh iklim dan geologinya. Sungai-sungai di pulau ini, memiliki debit yang kecil karena daerah aliran yang sempit dan sistem pengaliran yang langsung menuju laut. Batuan dasar yang berkelurusan (*straight*) rendah, serta curah hujan yang tidak tinggi turut membatasi debit air. Formasi Walanae di bagian tengah pulau mengandung ekuifer tertekan (*aresian aquifes*) dengan debit kecil hingga sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (*watertable groundwater*) ditemukan pada endapan alluvial, pantai, dan lembah-lembah batuan Formasi Camba. Kedalaman muka air tanah bervariasi pada endapan alluvial dan pantai, berkisar antara 5-6 meter, serta terpengaruh oleh intrusi air laut. Air tanah juga mengalir melalui rekahan dan rongga pelarutan pada batu gamping, membentuk sungai bawah tanah, seperti di Tajuiya dan Tamasongia. Sumber air ini terbatas dan hampir seluruhnya telah dimanfaatkan. Beberapa mata air tersebut berada di Batangmata Sapo, Lembang-lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan debit antara 1-4 liter/detik.

Sistem hidrogeologi menunjukkan aliran menuju laut, dengan potensi air terbatas akibat sempitnya DAS dan area tangkapan (*catchment area*). Oleh karena itu, lahan di kawasan resapan air dibatasi penggunaannya untuk konservasi dan penggalian air tanah, terutama di bagian utara.

2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, letak geografis dan pertemuan arus udara. Berdasarkan data tahun 2024 dari beberapa stasiun di Kabupaten Kepulauan Selayar, tercatat rata-rata jumlah hari hujan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 12 hari per bulan dan rata-rata curah hujan sebesar 148,00 mm dibanding dengan tahun 2023, yang mencatat rata-rata hari hujan sebesar 10 hari dengan rata-rata curah hujan sebesar 106,6 mm. Berikut disajikan jumlah hari hujan dan curah hujan berdasarkan data BPS dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tertera pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2. 2
Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	13	415	30	839,9	14	146,9	9	88,0	16	118,1
Februari	12	364	20	397	15	257,1	17	211,8	14	128,4
Maret	7	121	23	626,3	14	162,8	12	141,3	21	230,0
April	7	214	11	294	11	102,6	17	167,5	23	425,7
Mei	7	268	11	78,1	13	124,4	10	176,0	14	110,4
Juni	4	106	14	87	20	199,8	9	97,8	11	103,7
Juli	-	-	9	77,3	12	116,4	14	127,6	6	76,4
Agustus	2	4	8	104,2	4	23,4	3	5,5	2	3,7
September	5	137	11	82,5	4	10,5	2	4,8	1	2,7
Oktober	3	111	17	245,4	7	60,5	0	0	5	47,3
November	5	82	26	542	7	44,4	9	74,8	12	142,9
Desember	16	439	28	860,3	12	200,8	14	184,0	19	386,6
Rata-rata	7	188,42	17	352,8	11	120,78	10	106,6	12	148,0

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data BPS lima tahun terakhir (**Tabel 2.2**) bulan-bulan basah (≥ 100 mm) terjadi antara Bulan Januari-Juli dan Desember. Bulan Oktober tergolong lembab (60-100 mm), sementara Bulan Agustus-September dan November termasuk bulan kering (< 60 mm).

2.1.1.3. Kondisi Penggunaan Lahan

Gambaran umum kondisi penggunaan lahan Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi distribusi penggunaan lahan, kondisi penggunaan lahan menurut jenisnya, kondisi penggunaan lahan kawasan terbangun, penggunaan lahan kawasan non terbangun, dan penggunaan lahan menurut fungsinya.

1) Distribusi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dibagi menurut fungsi dan jenisnya. Penggunaan lahan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan, jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya seperti sungai, rawa dan danau).

2) Kondisi Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya

Salah satu aspek yang dikaji dalam melihat potensi fisik dasar adalah penggunaan lahan eksisting pada suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan merupakan gambaran dari pemanfaatan lahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut dapat dilihat luas penggunaan lahan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Selengkapnya mengenai luasan perubahan tutupan lahan tertera pada **Tabel 2.3** dan gambar peta tutupan lahan terlihat pada **Gambar 2.2** berikut ini.

Tabel 2. 3
Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Penutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)			Perubahan Tutupan Lahan (Ha)	
	Tahun 2009	Tahun 2015	Tahun 2023	2009-2015	2015-2023
Bandara	0,00	39,16	38,00	39,16	-1,16
Hutan Lahan Kering Primer	218,11	137,45	39,30	-80,67	-98,15
Hutan Lahan Kering Sekunder	16.657,68	17.371,64	17.821,22	713,96	-449,58
Hutan Mangrove Primer	280,17	259,23	222,79	-20,95	-36,44
Hutan Mangrove Sekunder	333,33	285,52	546,53	-47,80	261,01
Hutan Tanaman	1.154,52	1.155,04	0,00	0,52	-1.155,04
Padang Rumput	13.324,88	10.099,39	663,22	-3.225,50	-9.436,17
Perkebunan	1.770,93	1.576,71	1.949,24	-194,22	372,53
Permukiman	553,52	526,27	1.154,11	-27,24	627,84
Pertanian Lahan Kering	3.686,15	13.333,44	1.290,46	9.647,29	-12.042,98
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	29.721,95	19.984,47	84.648,50	-9.737,48	64.664,03
Sawah	57,06	56,86	1.200,39	-0,21	1.143,54
Semak Belukar	46.359,56	46.023,88	6.697,95	-335,68	-39.325,93
Tambak	526,26	245,13	933,63	-281,13	688,50
Tanah Terbuk	89,39	72,60	73,66	-16,79	1,06
Tubuh Air	2.536,97	6.103,70	2.335,27	3.566,73	-3.768,43

Sumber: BPKHTL Wilayah VII Makassar

Berdasarkan data sebaran tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2029, Semak belukar merupakan tutupan lahan terluas dengan luas mencapai 46.359,56 Ha. Pada tahun 2023, perubahan paling signifikan terlihat pada Pertanian Lahan Kering Campur Semak, yang meningkat secara drastis menjadi 84.648,50 Ha, mencatat kenaikan terbesar sebesar 64.664,03 ha (324 persen) dibandingkan tahun 2015. Sebaliknya, Hutan Tanaman mengalami penurunan drastis hingga mencapai 0 Ha, menjadikannya salah satu tutupan lahan yang hilang sepenuhnya. Jika dilihat perubahan pada tahun 2009-2015, Pertanian Lahan Kering mencatat kenaikan terbesar dengan peningkatan sebesar 9.647,29 Ha (262 persen). Sebaliknya, Padang Rumput mengalami penurunan terbesar, berkurang sebanyak 3.225,50 Ha (24 persen). Hutan tanaman mengalami perubahan terkecil, bertambah 0,52 Ha (0 persen). Pada periode tahun 2015-2023, sawah mencatat kenaikan terbesar dengan peningkatan sebesar 1.143,54 Ha (2011 persen). Sebaliknya, Semak Belukar mengalami penurunan terbesar dengan pengurangan 39.325, 93 Ha (85 persen). Adapun perubahan terkecil terjadi pada bandara/pelabuhan, yang hanya mengalami penurunan sebesar 1,16 Ha (3 persen). Tubuh Air juga mengalami perubahan signifikan dengan penurunan sebesar 3.768,43 Ha (62 persen) dari total pada tahun 2015.

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas yang masih terbatas, yang berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan. Namun demikian dalam konteks pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi ini justru memiliki nilai strategis tersendiri.

Secara geografis, Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III. Keunggulan ini diperkuat oleh garis pantainya yang sebagian besar berbatasan dengan laut dalam (*depth sea*), yang selama ini menjadi jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil untuk dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pengembangan wilayah Selayar, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya, juga didukung oleh potensi sumberdaya alam yang besar, khususnya sektor perminyakan di bagian utara (blok utara Pulau Selayar), serta sektor perikanan dan pariwisata di bagian utara, tengah dan selatan Pulau Selayar, dan wilayah Taman Nasional Laut Takabonerate.

Sehubungan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan utara Pulau Selayar dinilai memiliki peranan penting dalam mentransformasikan Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi daerah yang maju dan mandiri. Transformasi ini dapat dimulai dengan mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat industri perikanan, kawasan pengembangan pariwisata dan pusat distribusi logistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2042, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- b. Kawasan Industri Perikanan Terpadu di pesisir pantai Teluk Bone yang mencakup Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembentukan kawasan strategis ini berfungsi sebagai katalisator dalam percepatan transaksi ekonomi, khususnya meningkatkan arus barang dan jasa. Kawasan utara Pulau Selayar yang dirancang sebagai kawasan industri dan pusat distribusi barang dan jasa Kawasan Timur Indonesia (KTI) diharapkan mampu mengatasi persoalan logistik, seperti minimnya pasokan barang

tingginya harga dan inflasi yang disebabkan oleh sistem logistik yang belum efektif dan efisien.

Dalam upaya pemerataan pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), diperlukan langkah konkret yang terkoordinasi dengan baik untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan investasi di wilayah ini. Kawasan utara Pulau Selayar yang memiliki potensi sumber daya minyak, sangat tepat untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri Perminyakan Terpadu. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar, 2009). Oleh karena itu, pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan industri perminyakan menjadi kebutuhan mendesak guna mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kawasan strategis yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan darat. Dengan gugusan pulau-pulau tropis yang memesona, hutan tropis yang masih alami, serta terumbu karang yang sehat, wilayah ini menjadi habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk spesies langka dan endemik.

Pengakuan internasional terhadap pentingnya wilayah ini semakin kuat ketika UNESCO menetapkan Kepulauan Selayar sebagai bagian dari Cagar Biosfer Dunia pada tanggal 28 Oktober 2015 melalui program *Man and the Biosphere* (MAB). Penetapan ini mencakup wilayah Taman Nasional Takabonerate, yang dikenal memiliki atol terbesar ketiga di dunia dan merupakan kawasan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati laut. Status sebagai cagar biosfer membawa mandat besar bagi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui sektor perikanan ramah lingkungan dan ekowisata bahari.

Cagar biosfer Takabonerate, Kepulauan Selayar menjadi contoh nyata bagaimana keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Pemerintah daerah bersama masyarakat adat, komunitas lokal, dan mitra pembangunan terus berupaya menjaga harmoni antara manusia dan alam melalui berbagai program seperti pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan, penguatan kelembagaan desa konservasi, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Penetapan kawasan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan Selayar selama sepuluh tahun terakhir ini tentunya telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar, peningkatan pendapatan daerah/negara, peningkatan keberlangsungan sumber daya alam dan ekosistem/lingkungan hidup serta terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan kondisi yang luar biasa dalam hal sumber daya alam yang memadukan wisata bawah laut, terumbu karang dan bentang alam bawah laut dengan keanekaragaman hayati serta warisan budaya berupa kuliner yang khas, musik dan tradisi. Aksesibilitas selama 10 tahun terakhir sudah dapat diakses dengan mudah melalui transportasi laut dan udara. Transportasi udara telah dibangun Bandar Udara H. Aroepala sebagai bandara perintis dan Bandar Udara Kayuadi sebagai bandara karapan. Sarana dan prasarana transportasi laut telah dibangun pelabuhan-pelabuhan di setiap pulau yang rutin dikunjungi Kapal Penumpang (PELNI dan Fery ASDP), dan kapal tradisional dan modern. Perkembangan akomodasi sangat pesat, saat ini terdapat 26 hotel / penginapan beberapa diantaranya berstandar nasional. Sarana prasaran penunjang lainnya yang telah di bangun berupa pusat informasi, museum budaya Tanadoang dan Gong Nekara; sarana dan prasarana menyelam berupa pemetaan titik selam, fasilitas kapal dan peralatan selam; infrastruktur di kawasan konservasi berupa menara pantau, pos jaga dan dermaga

2.1.1.4.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Ilustrasi rencana tersebut terlihat pada **Gambar 2.3**.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Kepulauan Selayar), berada di Benteng. Upaya untuk mengintegrasikan seluruh wilayah kabupaten ke dalam satu kesatuan wilayah yang utuh, diperlukan pengembangan sistem pusat pemukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pemukiman PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa, terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Batangmata di Kecamatan Bontomatene;
- b. Pusat Pelayanan Kawasan Batang di Kecamatan Taka Bonerate;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan Bontobangun di Kecamatan Bontoharu;
- e. Pusat Pelayanan Kawasan Polebungin di Kecamatan Bontomanai;
- f. Pusat Pelayanan Kawasan Kembang Ragi di Kecamatan Pasimasunggu;
- g. Pusat Pelayanan Kawasan Bontobulaeng di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- h. Pusat Pelayanan Kawasan Harapan di Kecamatan Bontosikuyu;
- i. Pusat Pelayanan Kawasan Buki di Kecamatan Buki; dan
- j. Pusat Pelayanan Kawasan Kalaotoa di Kecamatan Pasilambena.

Sedangkan PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa kegiatan antar desa. PPL yang dimaksud terdiri atas :

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontosunggu di Kecamatan Bontoharu;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Barugaiya di Kecamatan Bontomanai;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bonea Timur di Kecamatan Bontomanai;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Appatanah di Kecamatan Bontosikuyu;
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowa di Kecamatan Bontosikuyu;
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Bongaiya di Kecamatan Bontomatene;
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Onto di Kecamatan Bontomatene;
- h. Pusat Pelayanan Lingkungan Jinato di Kecamatan Taka Bonerate;
- i. Pusat Pelayanan Lingkungan Tambuna di Kecamatan Taka Bonerate;
- j. Pusat Pelayanan Lingkungan Rajuni di Kecamatan Taka Bonerate;
- k. Pusat Pelayanan Lingkungan Karumpa di Kecamatan Pasilambena;
- l. Pusat Pelayanan Lingkungan Pulo Madu di Kecamatan Pasilambena;
- m. Pusat Pelayanan Lingkungan Lembang Mate'ne di Kecamatan Pasilambena;
- n. Pusat Pelayanan Lingkungan Lambego di Kecamatan Pasimarannu;
- o. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontomalling di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontobaru di Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan
- q. Pusat Pelayanan Lingkungan Batangmata Sapo di Kecamatan Bontomatene.

2.1.1.4.2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten yang dikembangkan terdiri atas :

- a. Kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

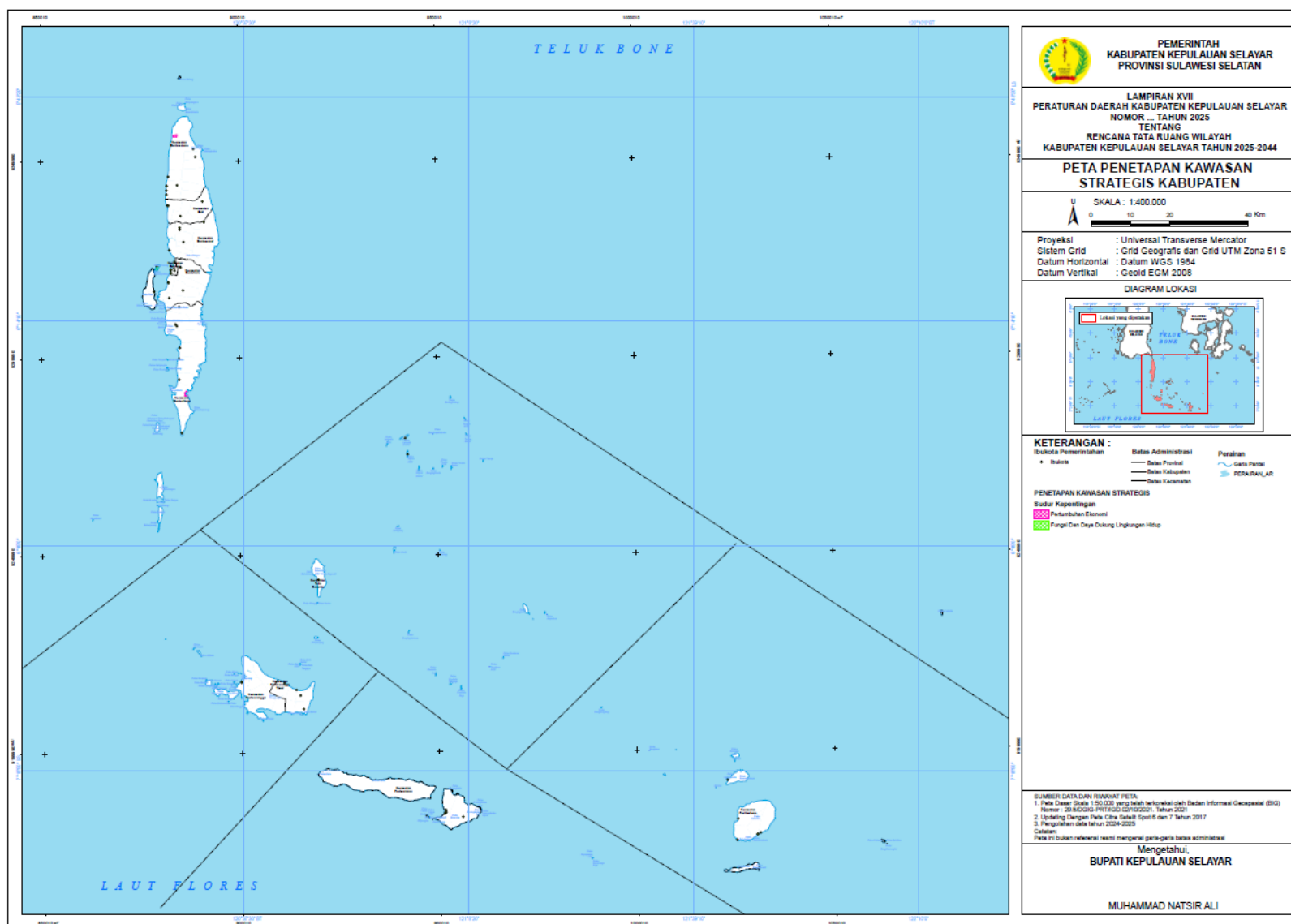
Kawasan strategis provinsi, terdiri atas:

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- b. Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar di Kecamatan Bontosikuyu.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

- a. Kawasan Industri Perikanan Terpadu Hangkoang di Kecamatan Bontosikuyu; dan
- b. Kawasan Industri Selayar di Kecamatan Bontomatene.

Kawasan strategis ini ditetapkan secara visual terlihat pada **Gambar 2.4.**



Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar
Sumber: Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2044

2.1.1.4.3. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap tersebar di beberapa perairan wilayah kepulauan, khususnya di:

- a. Kecamatan Bontosikuyu;
- b. Kecamatan Benteng; dan
- c. Kecamatan Taka Bonerate.

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup budidaya laut (*mariculture*) dan budidaya air payau (*brackish cultivation*). Lokasi pengembangan perikanan budidaya tersebar di:

- a. Kecamatan Bontoharu;
- b. Kecamatan Bontomanai;
- c. Kecamatan Bontomatene;
- d. Kecamatan Bontosikuyu;
- e. Kecamatan Pasilambena;
- f. Kecamatan Pasimarannu;
- g. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- h. Kecamatan Pasimasunggu; dan
- i. Kecamatan Taka Bonerate.

2.1.1.4.4. Kawasan Pertanian

2.1.1.4.4.1. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan terdiri atas sawah lahan basah dan lahan kering tersebar di :

- a. Kecamatan Bontoharu;
- b. Kecamatan Bontomanai;
- c. Kecamatan Pasimasunggu;
- d. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- e. Kecamatan Bontosikuyu; dan
- f. Kecamatan Taka Bonerate.

Selain itu, terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang tersebar di :

- a. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- b. Kecamatan Pasimasunggu;
- c. Kecamatan Bontosikuyu;
- d. Kecamatan Bontomanai; dan
- e. Kecamatan Bontoharu.

2.1.1.4.4.2. Kawasan Holtikultura

Fungsi kawasan hortikultura yaitu menghasilkan hasil pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduk bagi masyarakat. Kawasan hortikultura tersebar di :

- a. Kecamatan Bontomatene;
- b. Kecamatan Bontosikuyu;
- c. Kecamatan Pasimarannu;
- d. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- e. Kecamatan Pasimasunggu;
- f. Kecamatan Bontoharu;
- g. Kecamatan Pasilambena;
- h. Kecamatan Buki;
- i. Kecamatan Taka Bonerate; dan
- j. Kecamatan Bontomanai.

2.1.1.4.4.3. Kawasan Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Selayar adalah Kelapa, yang telah lama dikembangkan sebagai bagian dari budaya lokal. Selain Kelapa, terdapat komoditas lain, seperti Jambu Mente, Cengkeh, Kemiri, Pala, Melinjo dan Jeruk Keprok. Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di :

- a. Kecamatan Benteng;
- b. Kecamatan Bontosikuyu;
- c. Kecamatan Bontomanai;
- d. Kecamatan Bontoharu;
- e. Kecamatan Bontomatene;
- f. Kecamatan Buki;
- g. Kecamatan Pasilambena;
- h. Kecamatan Pasimarannu;
- i. Kecamatan Pasimasunggu;
- j. Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- k. Kecamatan Taka Bonerate; dan
- l. Pulau Betang.

2.1.1.4.4.4. Kawasan Peternakan

Usaha peternakan di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ternak besar dan kecil (Sapi, Kuda, Kerbau, Kambing, dan Domba) serta ternak unggas (Ayam Buras, Ras, dan Itik). Kawasan peternakan tersebar di :

- a. Kecamatan Pasimasunggu; dan
- b. Kecamatan Pasimarannu.

2.1.1.4.5. Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar difokuskan pada pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dan wilayah sekitarnya. Kawasan pariwisata tersebar di :

- a. Kecamatan Bontoharu;
- b. Kecamatan Bontomanai;
- c. Kecamatan Bontomatene;
- d. Kecamatan Bontosikuyu;
- e. Kecamatan Buki;
- f. Kecamatan Pasilambena;
- g. Kecamatan Pasimarannu;
- h. Kecamatan Taka Bonerate;
- i. Kecamatan Pasimasunggu;
- j. Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan
- k. Pulau Betang.

2.1.1.4.6. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dalam bentuk padat, cair, atau gas, sebagaimana pada peta atau data geologi. Kawasan ini menjadi lokasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang. Lokasi dapat berada di daratan maupun perairan, dan tidak terbatas pada kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Kawasan pertambangan mencerminkan sebaran potensi bahan tambang di bawah permukaan tanah yang diproyeksikan ke permukaan, sehingga mempengaruhi pemanfaatan lahan di atasnya. Kawasan energi di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik berlokasi di :

- a. Kecamatan Bontomanai;
- b. Kecamatan Pasilambena;
- c. Kecamatan Pasimarannu;
- d. Kecamatan Pasimasunggu; dan
- e. Kecamatan Taka Bonerate.

2.1.1.4.7. Kawasan Peruntukan Industri

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sektor ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menggerakkan sektor-sektor pembangunan lainnya. Kawasan

peruntukan industri tersebar di:

- a. Kecamatan Bontosikuyu; dan
- b. Kecamatan Bontomatene.

2.1.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.5.1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Metode distribusi berbasis *grid* digunakan untuk menganalisis Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) dalam penyedia pangan dan penyedia air di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.1.5.1.1. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) dalam penyedia air dianalisis secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. perhitungan ketersediaan air;
- b. perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik;
- c. perhitungan ambang batas penduduk; dan
- d. penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid.

Ketersediaan air Kabupaten Kepulauan Selayar bersumber dari SK. No. 146/MENLHK/2023 yang kemudian, didistribusikan ke setiap kecamatan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (IJEPA) sebagai bobot. Kebutuhan air dibedakan menjadi dua jenis:

- a. kebutuhan air lahan, dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan (sawah, lahan kering, perkebunan, dan tambak).
- b. kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak sebesar 43,2 m³/kapita/tahun, dikalikan faktor pengaman (*safety factor*) sebesar 2.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 hingga tahun 2029 masih mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan air domestik maupun pertanian. Pada tahun 2023 kecamatan dengan ketersediaan air tertinggi adalah Kecamatan Bontosikuyu, yaitu sebesar 594.579.402,10 m³/tahun. Sementara kebutuhan air (domestik dan lahan) hanya sebesar 206.942.308,05 m³/tahun, sehingga terdapat surplus sebesar 387.637.094,06 m³/tahun. Sebaliknya, Kecamatan Benteng menjadi wilayah dengan ketersediaan air terendah, yaitu sebesar 16.311.717,65 m³/tahun, sementara kebutuhan air mencapai 21.911.013,94 m³/tahun. Hal ini menyebabkan defisit air sebesar 5.599.296,30 m³/tahun. Pada tahun 2029, proyeksi kebutuhan air total (domestik dan lahan) di seluruh kabupaten mencapai 942.056.364,67 m³/tahun, sedangkan

selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air masih menunjukkan surplus sebesar 2.294.101.888,41 m³/tahun. Artinya status DDLH penyedia air secara umum belum terlampaui.

2.1.1.5.1.2. Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

DDLH penyedia pangan dihitung secara kuantitatif dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing *grid*. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan produksi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (Kkal). Data didistribusikan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPPB). Sementara kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap *grid* dikalikan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/orang/hari.

Berdasarkan data tahun 2023 total ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 7.181.010.874 Kkal dengan kebutuhan pangan sebesar 305.515.004 Kkal. Hal ini menghasilkan surplus sebesar 6.875.495.869 Kkal. Kecamatan Pasimasunggu memiliki ketersediaan pangan tertinggi, yaitu 1.013.827.215 Kkal dengan surplus sebesar 984.662.464 Kkal. Kecamatan Bontosikuyu juga menunjukkan surplus tertinggi sebesar 1.160.839.657 Kkal. Sementara itu, Kecamatan Benteng mengalami defisit sebesar 22.107.290 Kkal.

Pada tahun 2029, situasi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar semakin membaik dengan total ketersediaan pangan yang tetap tinggi, mencapai 7.181.010.874 Kkal, dengan peningkatan kebutuhan menjadi 367.447.905 Kkal. Surplus yang dihasilkan sebesar 6.813.562.968 Kkal. Kecamatan Pasimasunggu dan Bontosikuyu tetap menjadi penyumbang surplus terbesar (1.150.926.007 Kkal. Dan 1.195.304.158 Kkal). Namun, Kecamatan Benteng kembali mengalami defisit yang meningkat menjadi 23.216.690 Kkal, menunjukkan tantangan berkelanjutan di wilayah tersebut.

2.1.1.5.1.3. Kinerja Layanan Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem (JE) adalah manfaat atau layanan yang diberikan oleh suatu ekosistem kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Terdapat tujuh jenis jasa ekosistem yang dianalisis, yaitu:

- a. jasa ekosistem penyedia air;
- b. jasa ekosistem penyedia pangan;
- c. jasa ekosistem pengaturan tata air;
- d. jasa ekosistem pengaturan iklim;

- e. jasa ekosistem pengaturan mitigasi banjir;
- f. jasa ekosistem pengaturan mitigasi longsor; dan
- g. jasa ekosistem pengaturan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Setiap jenis jasa dikategorikan ke dalam lima klasifikasi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

2.1.1.5.2. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Ekosistem penyediaan air dari berbagai sumber termasuk air permukaan, air tanah (*akuifer*) dan air hujan yang digunakan untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Kapasitas penyimpanan air dipengaruhi oleh curah hujan dan karakteristik tanah atau batuan serta kondisi bentang lahan.

Hasil analisis menunjukkan variasi spasial pada distribusi jasa ekosistem penyedia air antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar:

- a. kategori Sangat Rendah: luas terbesar di Kecamatan Bontosikuyu, (314,88 ha), terkecil di Kecamatan Buki (39,17 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas di Kecamatan Pasimarannu (17.165,91 Ha), terkecil di Kecamatan Benteng (322,33 Ha).
- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (11.360,54 Ha), terkecil di Kecamatan Pasilambena (5,37 Ha).
- d. kategori Tinggi: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (515,38 Ha), terkecil di Kecamatan Bontomanai (1,89 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas Kecamatan Bontomanai (4,59 Ha), terkecil di Kecamatan Bontoharu (2,19 Ha).

2.1.1.5.3. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Ekosistem berperan dalam menyediakan bahan pangan dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak, untuk konsumsi manusia. Jenis pangan dimaksud meliputi: Beras, Jagung, Ketela, Gandum, Sagu, Buah-buahan, Ikan, Daging, Telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Hasil analisis, menunjukkan variasi distribusi antar kecamatan :

- a. kategori Sangat Rendah: terluas di Kecamatan Benteng (168,77 Ha), terkecil di Kecamatan Buki (16,34 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas Kecamatan Pasimarannu (5.221,45 Ha), terkecil di Kecamatan Buki (106,04 Ha).

- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (16.096,19 Ha), terkecil di Kecamatan Pasimasunggu Timur (726,11 Ha).
- d. kategori Tinggi : terluas di Kecamatan Bontomatene (10.621,97 Ha), terkecil di Kecamatan Benteng (3,50 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas di Kecamatan Pasimasunggu (1.125,38 Ha), terkecil di Kecamatan Taka Bonerate (6,82 Ha).

2.1.1.5.4. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam *hidrosfer* yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*), berperan dalam pengaturan tata air termasuk pengendalian banjir, dan penyimpanan air. Faktor yang memengaruhi antara lain tutupan lahan dan fisiografi wilayah.

Hasil analisis distribusi antar kecamatan :

- a. kategori Sangat Rendah: terluas di Kecamatan Pasilambena (7.822,22 Ha), terkecil di Kecamatan Bontoharu (72,07 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas di Kecamatan Pasimarannu (5.019,64 Ha), terkecil di Kecamatan Taka Bonerate (465,47 Ha).
- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (16.282,43 Ha), terkecil di Kecamatan Pasilambena (5,37 Ha).
- d. kategori Tinggi: terluas di Kecamatan Pasimarannu (5.752,24 Ha), terkecil di Kecamatan Bontoharu (0,79 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas di Kecamatan Bontomatene (2.376,89 Ha), terkecil di Kecamatan Pasimasunggu (17,71 Ha).

2.1.1.5.5. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Ekosistem berfungsi dalam pengaturan iklim, melalui pengendalian suhu, kelembaban dan hujan, angin, serta penyerapan karbon dan pengurangan gas rumah kaca. Berdasarkan hasil analisis distribusi menunjukkan variasi antar kecamatan :

- a. kategori Sangat Rendah: terluas di Kecamatan Bontoharu (93,43 Ha), terkecil di Kecamatan Bontosikuyu (23,53 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas di Kecamatan Pasimasunggu Timur (1.357,75 Ha), terkecil di Kecamatan Buki (122,38 Ha).
- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (10.577,11 Ha), terkecil Kecamatan Benteng (58,94 Ha).
- d. kategori Tinggi: terluas di Kecamatan Pasimarannu (16.358,81 Ha), terkecil di Kecamatan Taka Bonerate (465,47 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas di Kecamatan Bontomatene (2.376,89 Ha), terkecil di Kecamatan Bontoharu (72,07 Ha).

2.1.1.5.6. Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Banjir

Ekosistem berperan dalam mitigasi banjir, melalui fungsi pengendalian dan perlindungan berbasis infrastruktur alami. Hasil analisis sebaran antar kecamatan:

- a. kategori Sangat Rendah: terluas di Kecamatan Pasimasunggu Timur (1.353,91 Ha), terkecil di Kecamatan Bontomatene (35,88 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas di Kecamatan Pasilambena (7.697,71 Ha), terkecil di Kecamatan Buki (265,67 Ha).
- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (15.929,23 Ha), terkecil di Kecamatan Taka Bonerate (465,47 Ha).
- d. kategori Tinggi: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (904,61 Ha), terkecil di Kecamatan Bontomanai (4,90 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas di Kecamatan Bontomatene (2.371,85 Ha), terkecil di Kecamatan Pasimasunggu Timur (94,88 Ha).

2.1.1.5.7. Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Longsor

Ekosistem mendukung pengurangan risiko bencana tanah longsor melalui fungsi perlindungan alami dari vegetasi dan morfologi lahan. Hasil analisis, distribusi jasa ekosistem mitigasi bencana longsor, antar kecamatan :

- a. kategori Sangat Rendah: terluas di Kecamatan Bontoharu (93,43 Ha), terkecil di Kecamatan Bontosikuyu (23,53 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (645,79 Ha), terkecil di Kecamatan Buki (122,38 Ha).
- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (17.788,03 Ha), terkecil Kecamatan Taka Bonerate (2.922,80 Ha).
- d. kategori Tinggi: terluas di Kecamatan Pasimarannu (4.911,33 Ha), terkecil di Kecamatan Benteng (0,86 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas di Kecamatan Bontomatene (2.401,92 Ha), terkecil di Kecamatan Taka Bonerate (6,82 Ha).

2.1.1.5.8. Jasa Ekosistem Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Jasa ekosistem ini berkaitan dengan kemampuan lingkungan dalam mencegah dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Hasil analisis, distribusi antar kecamatan :

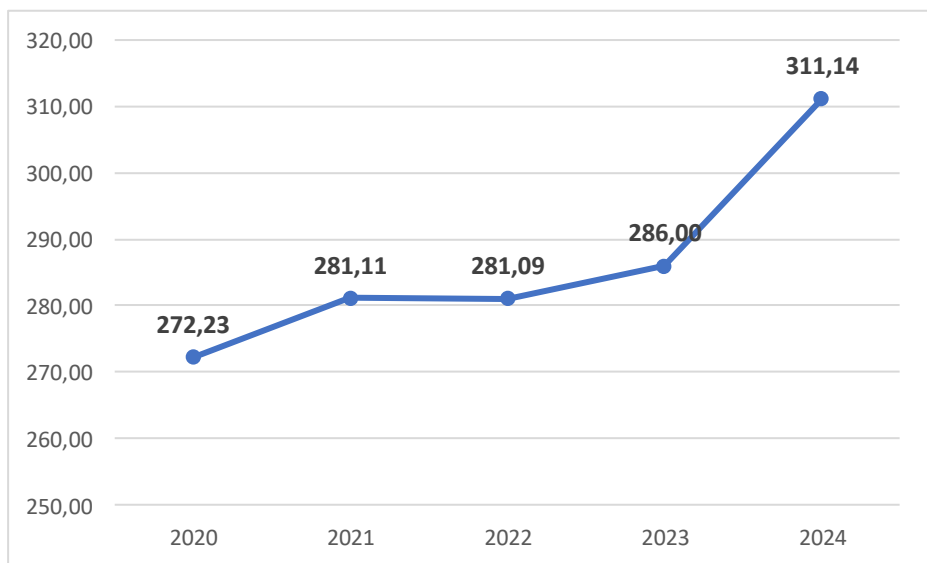
- a. kategori Sangat Rendah: terluas di Kecamatan Benteng (5,43 Ha), terkecil di Kecamatan Bontosikuyu (2,83 Ha).
- b. kategori Rendah: terluas di Kecamatan Buki (2.699,19 Ha), terkecil di Kecamatan Benteng (0,30 Ha).

- c. kategori Sedang: terluas di Kecamatan Bontomatene (10.435,93 Ha), terkecil di Kecamatan Benteng (2,64 Ha).
- d. kategori Tinggi: terluas di Kecamatan Pasimarannu (14.793,81 Ha), terkecil di Kecamatan Pasimasunggu Timur (2.059,43 Ha).
- e. kategori Sangat Tinggi: terluas di Kecamatan Bontosikuyu (1.413,41 Ha), terkecil di Kecamatan Buki (103,59 Ha). Data ini menunjukkan kontribusi penting dari setiap kecamatan dalam mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan.

2.1.1.6. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.6.1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat, sekaligus peningkatan intensitas kegiatan ekonomi yang semakin bergantung pada energi listrik. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi karena bertambahnya jumlah pelanggan baru, tetapi juga akibat perubahan pola konsumsi listrik masyarakat yang semakin beragam. Konsumsi energi listrik rumah tangga per kapita mengalami peningkatan rata-rata peningkatan sebesar 6,00 hingga 10,00 persen selama lima tahun terakhir. Detail konsumsi listrik per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.1**.



Grafik 2. 1 Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Salah satu faktor utama pendorong kenaikan konsumsi listrik adalah semakin luasnya jaringan elektrifikasi yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil. Dengan semakin tingginya rasio elektrifikasi, semakin banyak rumah tangga yang dapat menikmati

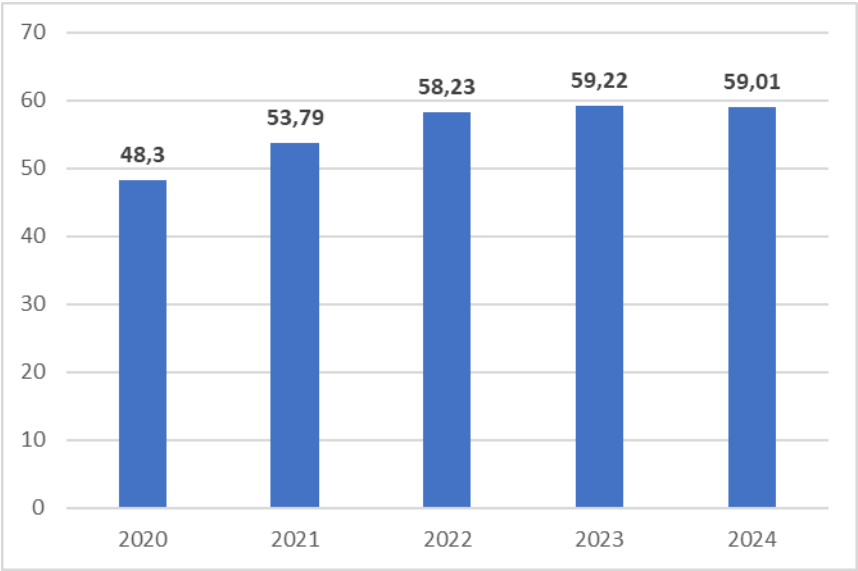
listrik secara reguler. Peningkatan ini dipicu oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menjangkau wilayah kepulauan, seperti Pulau Jampea dan Pulau Bonerate telah menikmati jaringan listrik PLN. Pada tahun 2023, empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dibangun, yaitu di Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena, dan wilayah daratan Selayar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi masyarakat turut mendorong peningkatan kepemilikan barang elektronik rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, hingga pendingin udara.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita juga terkait dengan meningkatnya kebutuhan energi di sektor pelayanan publik. Rumah sakit, sekolah, serta kantor pemerintahan semakin mengandalkan perangkat elektronik dan sistem digital untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pola hidup masyarakat pun semakin berubah, ditandai dengan meningkatnya penggunaan perangkat komunikasi dan digital, serta aktivitas rumah tangga yang lebih banyak memanfaatkan listrik pada malam hari.

Dengan demikian, tren peningkatan konsumsi listrik per kapita di Kepulauan Selayar merupakan cerminan dari semakin baiknya akses energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya sektor-sektor unggulan daerah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa listrik telah menjadi infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat

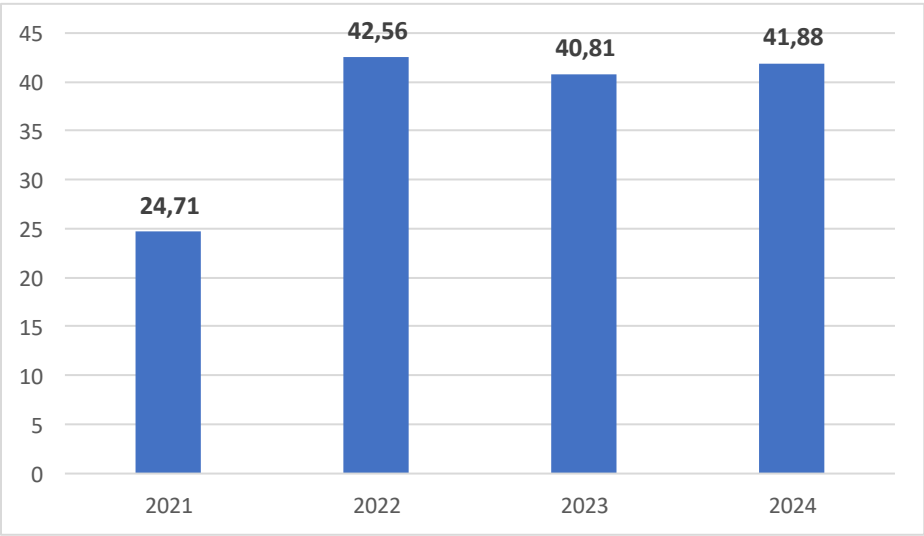
2.1.1.6.2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Penyediaan air minum aman merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai daerah kepulauan, ketersediaan air minum aman bagi masyarakat belum optimal. Hal ini disebabkan, letak geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan beberapa diantaranya tidak memiliki sumber air (sumber air tadah hujan). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di pulau-pulau kecil dengan membangun embung, sumur dan melalui penyulingan air laut ataupun pembangunan arsinum di beberapa wilayah. Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.2.**



Grafik 2. 2 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data pada **Grafik 2.2**, terlihat dari 59,01 persen masyarakat yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2024, terdapat sekitar 41 persen rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan. Hal ini disebabkan PDAM sebagai perusahaan daerah atau lembaga yang menyediakan akses air minum perpipaan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Capaian indikator persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan meningkat pada tahun 2024 disebabkan kualitas air yang disediakan oleh PDAM sudah menunjukkan kualitas air yang sesuai standar yang dipersyaratkan untuk konsumsi. Capaian indikator dimaksud terlihat pada **Grafik 2.3**.



Grafik 2. 3 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024
Sumber Data: SIMSPAM, 2025

Ketahanan air Kabupaten Kepulauan Selayar juga dapat diukur dengan indikator akses rumah tangga terhadap akses air minum layak. Pada tahun 2024, akses rumah tangga terhadap akses air minum layak Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 46,74 persen. Jika diurai berdasarkan capaian setiap desa, sebagian besar desa masih memiliki capaian di bawah 50 persen. Capaian setiap desa dimaksud selengkapnya tertera pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2. 4
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	AKSES RT TERHADAP AIR MINUM LAYAK	KATEGORI
BENTENG	BENTENG	45,47	RENDAH
	BENTENG SELATAN	94,75	BAIK
	BENTENG UTARA	40,41	RENDAH
BONTOHARU	BONTOSUNGGU	86,3	BAIK
	BONTOBORUSU	18,99	RENDAH
	BONTOLEBANG	1,5	RENDAH
	BONTOTANGNGA	133,55	BAIK
	KAHU-KAHU	12,13	RENDAH
	KALEPADANG	42,52	RENDAH
	BONTOBANGUN	117,86	BAIK
	PUTABANGUN	61,17	SEDANG
	PAMATATA	140,84	BAIK
BONTOMATENE	TANETE	59,74	SEDANG
	BUNGAIYA	92,65	BAIK
	KAYU BAUK	288,2	BAIK
	BARAT LAMBONGAN	172,16	BAIK
	BONTONA SALUK	83,86	BAIK
	ONTO	76,01	SEDANG
	MAHARAYYA	31,53	RENDAH
	MENARA INDAH	0	RENDAH
	TAMALANREA	6,38	RENDAH
	BATANGMATA	10,1	RENDAH
	BATANGMATA SAPO	0	RENDAH
BUKI	BUKI	37,37	RENDAH
	LALANG BATA	51,83	SEDANG
	BALANG BUTUNG	16,19	RENDAH
	KOHALA	95,82	BAIK
	BONTOLEMPANGAN	7,1	RENDAH
	MEKAR INDAH	32,43	RENDAH
	BUKI TIMUR	3,87	RENDAH
	PARAK	83,01	BAIK
BONTOMANAI	BARUGAIYA	71,12	SEDANG
	JAMBUIYA	48,39	RENDAH
	MARE-MARE	44	RENDAH
	POLEBUNGING	106,43	BAIK
	BONEA MAKMUR	18,64	RENDAH

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	AKSES RT TERHADAP AIR MINUM LAYAK	KATEGORI
	BONTOMARANNU	29,53	RENDAH
	BONEA TIMUR	70,98	SEDANG
	BONTOKORAANG	70,07	SEDANG
	KABURU	109,17	BAIK
BONTOSIKUYU	HARAPAN	81,29	BAIK
	PATIKARYA	80,93	BAIK
	PATILERENG	45,5	RENDAH
	LAIYOLO BARU	30,69	RENDAH
	LAIYOLO	0	RENDAH
	LANTIBONGAN	48,98	RENDAH
	BINANGA SOMBALYA	85,67	BAIK
	LOWA	86,17	BAIK
	APPATANAH	103,4	BAIK
	TAMBOLONGAN	23,4	RENDAH
	POLASSI	47,72	RENDAH
	KHUSUS BAHULUANG	31,44	RENDAH
PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	24,7	RENDAH
	MA'MINASA	4,16	RENDAH
	TANAMALALA	22,13	RENDAH
	LABUANG PAMAJANG	31,18	RENDAH
	MASSUNGKE	24,93	RENDAH
	BONTOSAILE	26,83	RENDAH
	TELUK KAMPE	36,43	RENDAH
	BONERATE	31,85	RENDAH
	MAJAPAHIT	1,26	RENDAH
	BATU BINGKUNG	29,13	RENDAH
	BONEA	28,53	RENDAH
	LAMBEGO	72,63	SEDANG
	KOMBA-KOMBA	40,69	RENDAH
	SAMBALI	21,08	RENDAH
	LAMANTU	7,79	RENDAH
TAKA BONERATE	KAYUADI	4,73	RENDAH
	BATANG	3,54	RENDAH
	NYIUR INDAH	23,6	RENDAH
	TAMBUNA	0	RENDAH
	JINATO	11,63	RENDAH
	RAJUNI	0	RENDAH
	LATONDU	0	RENDAH
	TARUPA	0	RENDAH
	KHUSUS PASITALLU	0	RENDAH
	KALAOTOA	26,12	RENDAH
PASILAMBENA	GARAUPA	24,43	RENDAH
	LEMBANG MATENE	27,67	RENDAH
	PULO MADU	43,4	RENDAH
	KARUMPA	0	RENDAH
	GARAUPA RAYA	26,74	RENDAH
PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOBULAENG	1,9	RENDAH
	BONTOBARU	48,45	RENDAH

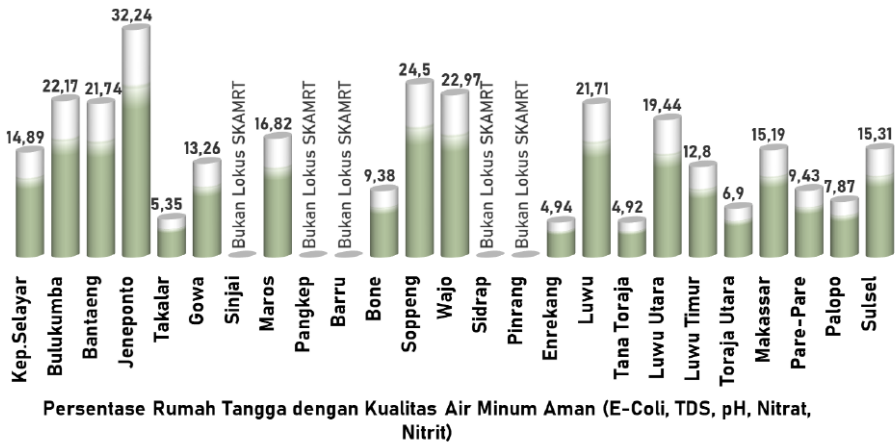
NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	AKSES RT TERHADAP AIR MINUM LAYAK	KATEGORI
	BONTOMALLING	0	RENDAH
	LEMBANG BAJI	36,91	RENDAH
	BONTOJATI	53,05	SEDANG
	UJUNG	28,84	RENDAH
KEPULAUAN SELAYAR		46,74	

Sumber: SIMSPAM, 2025

Tabel 2.4 di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat 61 desa atau sekitar 69,32 persen desa yang masih memiliki capaian dibawah 50 persen, namun terdapat 18 desa atau sekitar 20,45 persen desa yang telah memiliki capaian diatas 80 persen. Terdapat 3 kecamatan yang seluruh desanya masih memiliki capaian akses air minum layak kurang dari 50 persen, yaitu Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Taka Bonerate, dan Kecamatan Pasilambena.

Selanjutnya, persentase akses air minum aman perpipaan Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada angka 14,89 persen masih lebih baik dari beberapa kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan, ini disebabkan pengelolaan air yang dikelola PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menunjukkan kualitas air yang sesuai standar yang dipersyaratkan untuk konsumsi. Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum aman kabupaten / kota terlihat pada **Grafik 2.4**.

**Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**



Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)

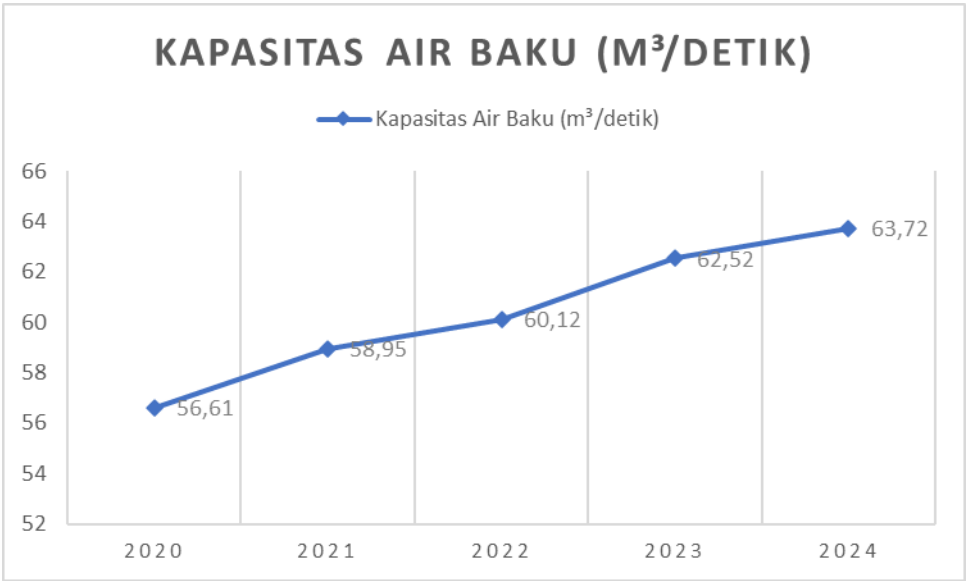
Grafik 2. 4 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sumber Data: Ranperda RPJMD Prop. Sulawesi Selatan, 2025

2.1.1.6.3. Kapasitas Air Baku

Ketersediaan air baku memiliki peranan penting bagi pemenuhan air minum, pertanian, industri, dan kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan sumber-sumber air baku sangat diperlukan untuk menjaga kapasitas air baku yang ideal bagi masyarakat. Kapasitas air

baku Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan beberapa bendungan serta jaringan irigasi di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian kapasitas air baku Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.5**.



Grafik 2. 5 Kapasitas Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 (m³/detik)
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Air baku umumnya diperoleh dari berbagai sumber, seperti : mata air, sungai, dan air tanah, tergantung pada kondisi hidrologis dan geografis wilayah. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, sumber utama air baku berasal dari beberapa mata air alami yang tersebar di kawasan perbukitan. Mata air tersebut merupakan hasil dari infiltrasi air hujan yang tersimpan dalam lapisan akuifer dan kemudian keluar ke permukaan melalui rekahan tanah atau batuan. Beberapa mata air utama yang dimanfaatkan pada Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.5** berikut:

Tabel 2. 5
Sumber Air Baku Kabupaten Kepulauan Selayar

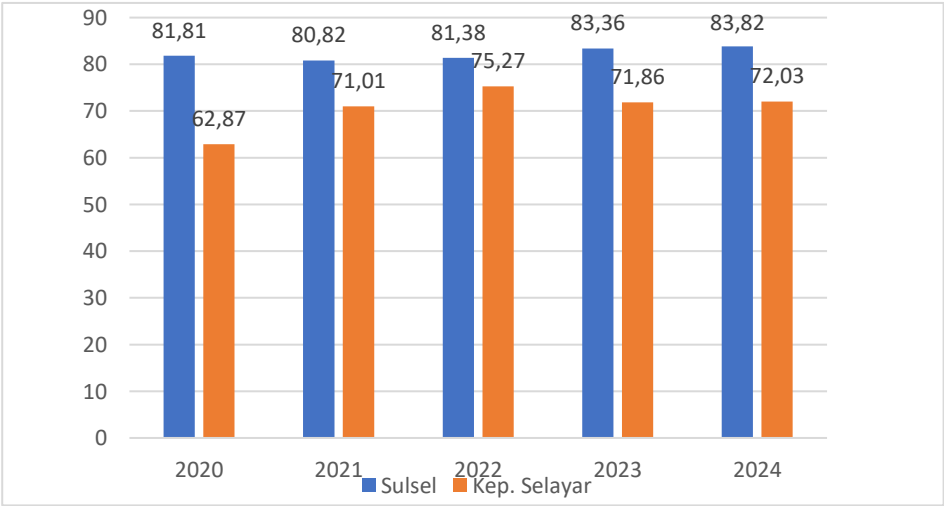
NO	NAMA	JENIS	KAPASITAS (L/detik)	KAPASITAS TERPAKAI (L/detik)
1	Sungai Balang Kalambu	Sungai	20	10
2	Mata Air Muntea	Mata Air	2	35
3	Mata Air Tajuiya	Mata Air	50	40
4	Mata Air Eremata	Mata Air	12	0
5	Sungai Jene Karring	Sungai	20	10
6	Mata Air Topa	Mata Air	225	60
7	Mata Air Bontojaya	Mata Air	5	2,5

Sumber Data: SIMSPAM, 2025

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air baku, meliputi : degradasi daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan, serta ancaman pencemaran dari aktivitas permukiman dan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian kawasan hulu serta penerapan sistem distribusi air yang efisien dan berkelanjutan agar kapasitas air baku tetap terjaga.

2.1.1.6.4. Indeks Ketahanan Pangan

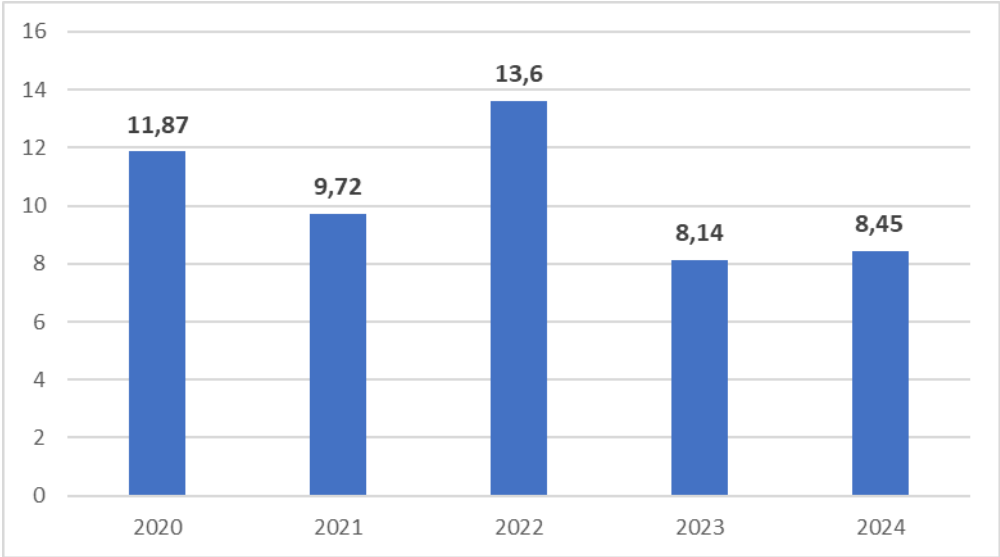
Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencerminkan capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Terdapat sembilan indikator utama dalam penentuan IKP, yaitu : (a) rasio konsumsi normatif perkapita terhadap produksi bersih; (b) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; (c) persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari 65 persen dari total pengeluaran; (d) persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (e) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; (f) persentase rumah tangga tanpa akses air bersih; (g) rasio penduduk terhadap tenaga kesehatan sesuai tingkat kepadatan penduduk; (h) persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); (i) angka harapan hidup saat lahir. Secara umum IKP kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 berada dalam kategori “Sangat Tahan Pangan”. Namun, Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam kategori “Tahan Pangan” ($> 67,75 - 75,68$). Hal ini disebabkan, antara lain : produktivitas pertanian dan perikanan yang belum dimaksimalkan karena teknologi pertanian dan perikanan yang masih tradisional; terbatasnya akses terhadap pupuk, bibit unggul, dan alat pertanian modern; serta masalah degradasi lahan, kekeringan musiman, dan ketersediaan air yang tidak merata. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung gizi berupa akses terhadap air bersih, sanitasi, dan masih terbatas layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil serta masih kurang pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan pola makan sehat juga. Lebih lanjut, letak geografis Kepulauan Selayar yang terpisah dari daratan utama Sulawesi menjadikan distribusi pangan lebih sulit dan mahal dan ketergantungan pada transportasi laut yang membuat daerah ini rentan terhadap gangguan pasokan, terutama saat cuaca buruk. Detail capaian IKP Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan terlihat pada **Grafik 2.6**.



Grafik 2. 6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024
Sumber Data: Badan Pangan Nasional, 2025

2.1.1.6.5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) menunjukkan proporsi populasi yang mengonsumsi energi harian dibawah kebutuhan minimum untuk hidup normal, aktif dan sehat. Angka ini dinyatakan dalam persentase ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.7**.



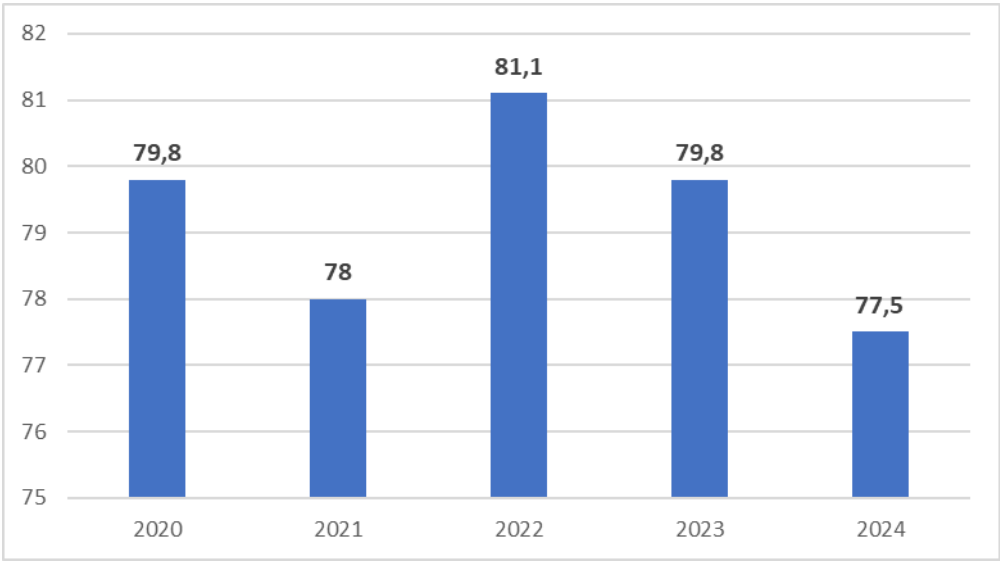
Grafik 2. 7 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tren capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022. Tahun 2024, capaian *PoU* sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum energi (kalori) harian untuk hidup sehat dan aktif, ini diakibatkan produksi tanaman pangan yang mengalami penurunan pada tahun 2024 terutama pada pangan pokok, seperti beras dan jagung. Selain itu, faktor kekeringan dan sistem irigasi dan pengairan yang belum optimal juga mempengaruhi produktivitas dan ketersediaan pangan.

2.1.1.6.6. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Skor PPH sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 sampai 2024, sebagaimana terlihat pada

Grafik 2.8.



Grafik 2. 8 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pangan Nasional, 2025

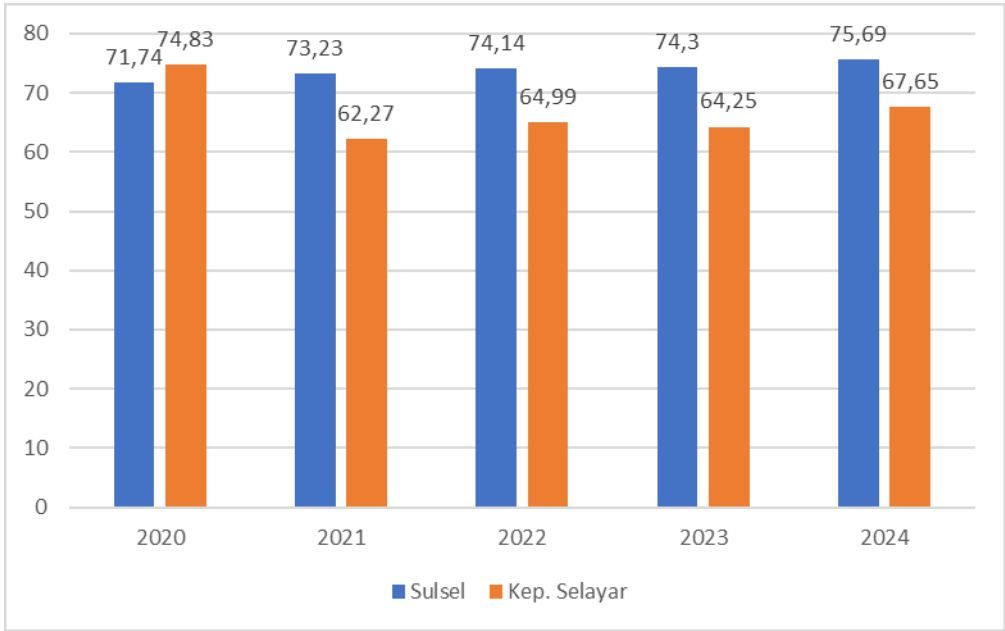
Skor PPH Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan tiga tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan menurunnya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa faktor penyebab penurunan, antara lain : ketergantungan pada pangan pokok tertentu dan pola konsumsi yang tidak seimbang. Masyarakat cenderung mengonsumsi padi-padian secara berlebihan,

sementara konsumsi kelompok pangan lain, seperti : sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan masih rendah. Lebih lanjut sebagai wilayah kepulauan, menghadapi tantangan dalam distribusi pangan. Transportasi yang bergantung pada kondisi laut dan cuaca serta infrastruktur yang terbatas menyebabkan pasokan pangan menjadi tidak stabil dan harga pangan meningkat. Selain itu, pengetahuan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang masih terbatas.

2.1.1.7. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.7.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup suatu daerah dapat dilihat dari capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar tiap tahunnya fluktuatif, tahun 2024 nilai IKLH sebesar 67,65 (kategori sedang). Penurunan IKLH disebabkan perubahan tutupan lahan yang semakin berkurang dan penambahan luas permukiman serta penurunan kualitas air. Nilai IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di bawah nilai IKLH Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian IKLH di Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.13.**



Grafik 2. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor pendukung peningkatan IKLH ini, antara lain : lokasi geografis yang strategis yang jauh dari sumber polusi atau industri besar; inisiasi

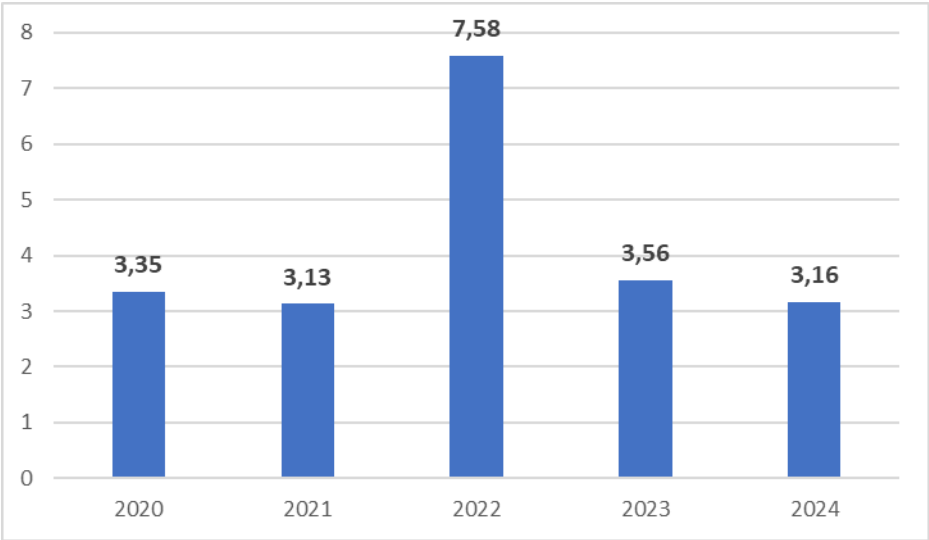
penggunaan energi baru terbarukan dalam penyediaan energi listrik, yaitu : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bagi masyarakat; pelaksanaan konservasi hutan dan ekosistem di sekitar sumber air melalui pengadaan bibit penghijauan oleh Pemerintah Daerah serta penguatan Program Kampung Iklim. Meskipun ada peningkatan, beberapa tantangan masih perlu diatasi, antara lain : belum optimalnya penanganan sampah dan limbah domestik yang mencemari sumber-sumber air baku; keberadaan lahan kritis; luas RTH di wilayah perkotaan dan kawasan pesisir yang semakin berkurang; dan semakin bertambahnya polusi kendaraan.

2.1.1.7.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rendahnya akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan keterbatasan akses air bersih di pulau-pulau kecil. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pemanfaatan sarana prasarana sanitasi turut berkontribusi rendahnya capaian indikator ini.

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 3,16 persen, lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 12,83 persen dan rata-rata nasional sebesar 10,21 persen. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kepulauan Selayar terlihat pada

Grafik 2.10.



Grafik 2. 10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: SIINSAN, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian akses sanitasi aman pada tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024. Penurunan akses sanitasi aman di Kabupaten Kepulauan Selayar

merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor geografis dan ekologis yang khas pada wilayah kepulauan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah keterbatasan ketersediaan air bersih, yang secara langsung berdampak pada kemampuan rumah tangga dalam mengoperasikan fasilitas sanitasi secara layak dan berkelanjutan.

Sebagai daerah kepulauan, terutama di wilayah pulau-pulau kecil, belum memiliki sumber air tanah dalam yang memadai. Warga sangat bergantung pada air hujan sebagai sumber utama air bersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sanitasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan semakin jarang dan tidak merata, terutama pada musim kemarau yang cenderung panjang. Hal ini menyebabkan menurunnya volume tampungan air hujan, sehingga banyak masyarakat yang harus menghemat air untuk kebutuhan dasar seperti minum dan memasak. Dalam kondisi ini, penggunaan air untuk keperluan sanitasi menjadi terbatas, bahkan ditinggalkan.

Kondisi tersebut diperburuk oleh terbatasnya sistem pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas sanitasi yang sudah ada. Banyak toilet dan septic tank di wilayah desa dan pulau-pulau kecil dibangun tanpa perencanaan pengelolaan limbah jangka panjang. Tanpa layanan pengurusan rutin atau pengolahan akhir limbah yang memadai, fasilitas tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sanitasi aman, meskipun secara fisik masih tersedia. Dalam beberapa kasus, warga terpaksa kembali melakukan praktik buang air sembarangan (BABS) atau menggunakan fasilitas tidak layak karena air tidak tersedia untuk membilas atau menjaga kebersihan toilet.

Hal ini berakibat pada data capaian sanitasi aman yang menunjukkan tren penurunan, bukan semata karena kerusakan fasilitas, tetapi karena fasilitas tersebut tidak lagi dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan akibat keterbatasan air bersih. Hal ini menegaskan bahwa akses sanitasi aman tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan air yang cukup dan infrastruktur pendukungnya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu antara program penyediaan air bersih dan sanitasi, terutama dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan geografi wilayah kepulauan. Upaya peningkatan akses sanitasi tidak akan berhasil secara berkelanjutan tanpa adanya solusi terhadap keterbatasan air bersih, seperti pengembangan sistem tampungan air hujan, teknologi desalinasi skala kecil, atau distribusi air antarpulau berbasis kebutuhan prioritas.

2.1.1.7.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan data tahun 2024, capaian persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 2,60 persen dengan timbulan sampah sebesar 20.746,60 ton, timbulan sampah yang terkelola sebesar 4.943,58 ton dan daur ulang sampah sebesar 539,12 ton. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 lebih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 11,19 persen.

Hal ini diakibatkan, karena Kabupaten Kepulauan Selayar hanya memiliki satu buah bank sampah yang terletak di Kota Benteng. Selain itu, penanganan sampah yang masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu Kumpul-Angkut-Buang kemudian ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengakibatkan semakin banyaknya timbulan sampah yang tidak terkelola dengan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pelayanan pengumpulan melalui mobil sampah yang masih melayani masyarakat yang berdomisili di Kota Benteng sehingga pengurangan timbulan sampah tidak maksimal. Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah tertera pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2. 6
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah terkelola (ton/tahun)	Persentase Sampah terkelola	Sampah Masuk TPA (ton/tahun)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
2021	20.488,47	9.381,90	45,79	8.212,50	5,71
2022	20.144,20	6.420,45	31,87	5.381,59	5,16
2023	20.568,63	4.975,50	24,19	4.708,50	1,30
2024	20.746,60	4.943,58	23,83	4.835,81	2,18

Sumber Data: SIPSN-KLHK, 2025

2.1.1.7.4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mengacu pada SEB penyelarasan RPJPN dengan RPJPD yaitu: a) Rumah tangga menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah; b) Rumah tangga memiliki tempat pengumpulan sampah bersama yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani

dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah. Layanan penuh pengumpulan sampah belum tersedia di seluruh wilayah. Hingga tahun 2024 hanya 2,96 persen rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (5,45 persen : tahun 2023) atau sebesar 1.060 rumah tangga dengan rincian 860 rumah tangga yang sampahnya diolah di Bank Sampah dan 200 rumah tangga yang sampahnya diolah di TPS3R. Tahun 2024, belum ada rumah tangga yang sampahnya diolah di TPST diluar TPA, di pusat daur ulang sampah, di rumah kompos, di komposting skala kecil, *biodigiseter*, serta pada *Refuse Derived Fuel*.. Capaian rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dari proporsi capaian rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 3,27 persen. Hal ini menunjukkan masih banyak desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum menerima pelayanan pengumpulan sampah. Pada desa dan kelurahan yang tidak terlayani pengumpulan sampah, sampah yang dihasilkan tidak dikumpulkan ke TPS dan diangkut ke TPA, namun dikelola sendiri dengan dikubur, dibakar atau dibuang ke sungai/kebun. Capaian proporsi rumah tangga dengan layanan dasar pengumpulan sampah tertera pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2. 7

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Dasar Pengumpulan Sampah (% Ruta)

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% Ruta)
	a	b	c=(b/a)*100
2021	34.490	2.187	6,34%
2022	34.752	2.255	6,49%
2023	45.501	2.480	5,45%
2024	35.811	1.060	2,96%

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

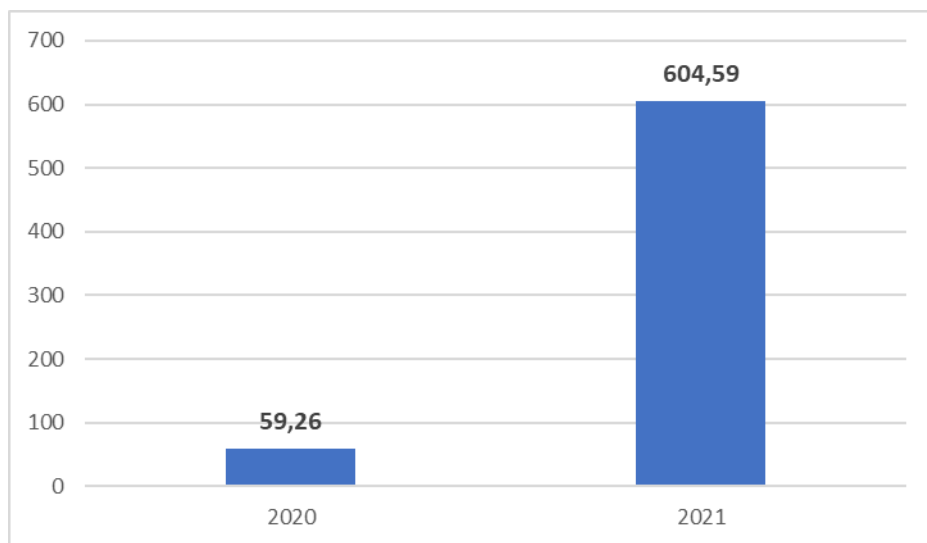
2.1.1.7.5. *Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia*

Penyiangan dan pemupukan merupakan praktik pertanian yang penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pengelolaan proses pemupukan sangat erat kaitannya dengan peningkatan keanekaragaman hayati. Proses pemupukan harus melindungi atau meningkatkan keanekaragaman hayati lahan pertanian untuk lingkungan ekologi yang

lebih baik dengan tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi penggunaan herbisida.

Paparan pestisida terhadap keanekaragaman hayati di darat dapat menyebabkan efek mematikan pada tanaman, sehingga membunuh tanaman non-target. Sisa herbisida fenoksi yang masih tertinggal di udara atau menguap dapat melukai pohon dan semak di dekatnya. Serupa dengan pestisida, pemberian pupuk kimia yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tanah sehingga akan berpotensi merusak tanaman serta keanekaragaman hayati lainnya.

Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia pada masyarakat, maka penyaluran bantuan pupuk organik sangat perlu untuk dilakukan. Terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar, selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2021, jumlah pupuk organik yang disalurkan lebih banyak dari jumlah pupuk kimia yang disalurkan ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia (**Grafik 2.11**).



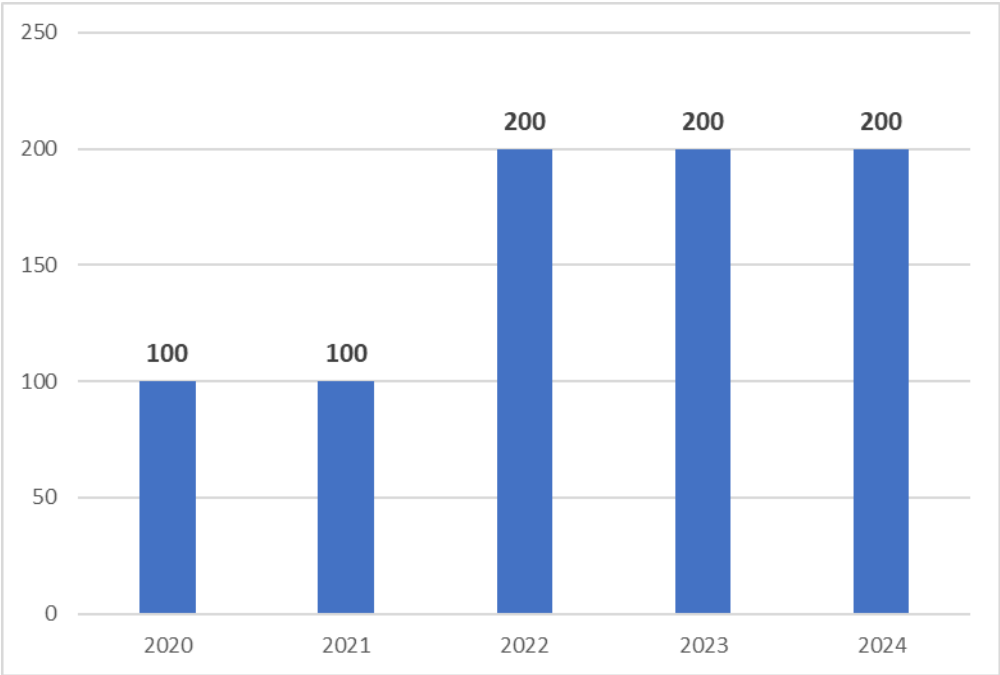
Grafik 2. 11 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021
Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.1.7.6. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks Pertanaman (IP) adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainnya.

Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah 100. Hal ini dapat diartikan bahwa petani dapat melakukan panen atau menanam padi sebanyak satu kali

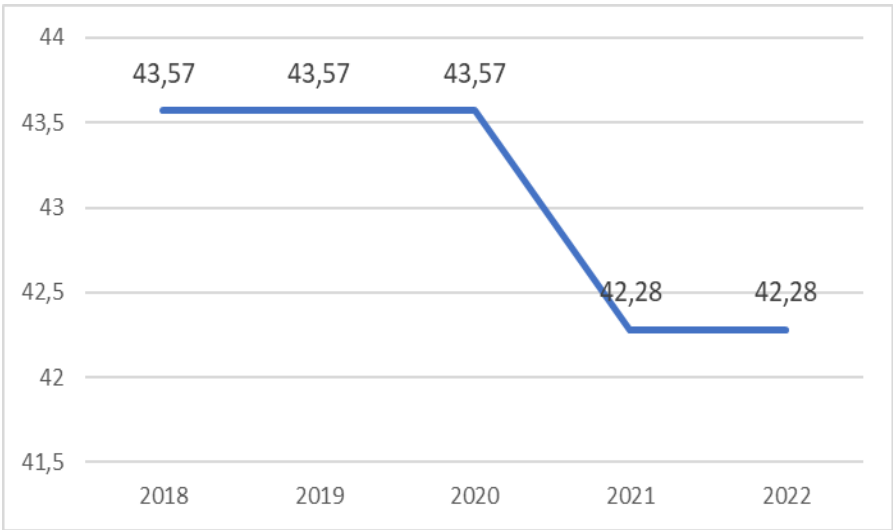
dalam setahun. Pada tahun 2022 sampai 2024, Indeks Pertanaman Padi meningkat ke angka 200 yang berarti bahwa petani telah melakukan panen sebanyak dua kali dalam setahun. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan teknologi pertanian kepada para kelompok tani. Selain itu, program dan kegiatan Pemerintah untuk perbaikan dan penambahan jaringan irigasi turut berkontribusi dalam peningkatan waktu panen padi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.12**



Grafik 2. 12 Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.1.7.7. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi merupakan indikator penting dalam mengukur ketahanan dan produktivitas sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Sawah irigasi merujuk pada lahan sawah yang mendapatkan pasokan air secara teratur melalui jaringan irigasi teknis, setengah teknis, atau sederhana. Keberadaan irigasi yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung intensifikasi pertanian dan menjaga stabilitas produksi pangan daerah. Proporsi sawah irigasi Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.13**

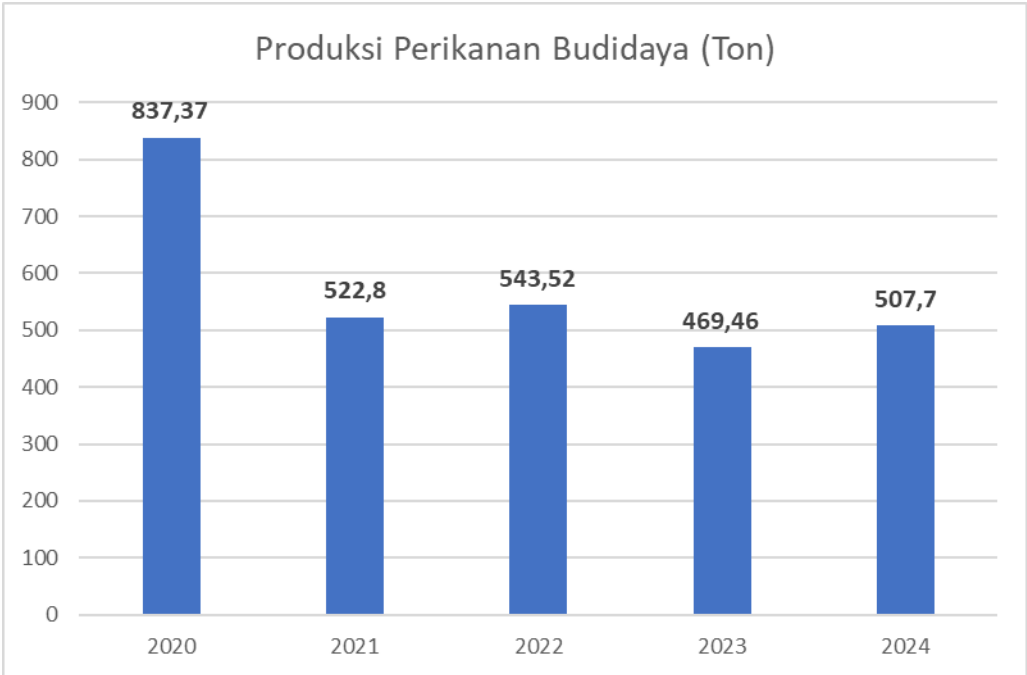


Grafik 2. 13 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.1.7.8. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya mengalami kondisi yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar masih cenderung rendah karena sektor perikanan masih difokuskan pada perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.14**.



Grafik 2. 14 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Faktor penghambat kurang maksimalnya produksi perikanan budidaya dalam beberapa tahun terakhir, antara lain fasilitas pendukung seperti *hatchery* (balai benih), *cold storage*, sistem karamba jaring apung, dan peralatan budidaya masih terbatas atau kurang memadai serta

akses terhadap air bersih dan listrik di beberapa pulau juga menyulitkan proses budidaya yang intensif. Jika dilihat dari segi ketersediaan sumber daya manusia, minimnya tenaga kerja terampil dalam teknik budidaya modern menyebabkan hasil produksi kurang optimal. Selain itu, musim angin kencang (barat dan timur) seringkali menyebabkan kerusakan sarana budidaya laut, seperti keramba dan tambak. Selanjutnya beberapa lahan tambak dan kawasan pesisir yang potensial untuk budidaya telah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman atau pariwisata.

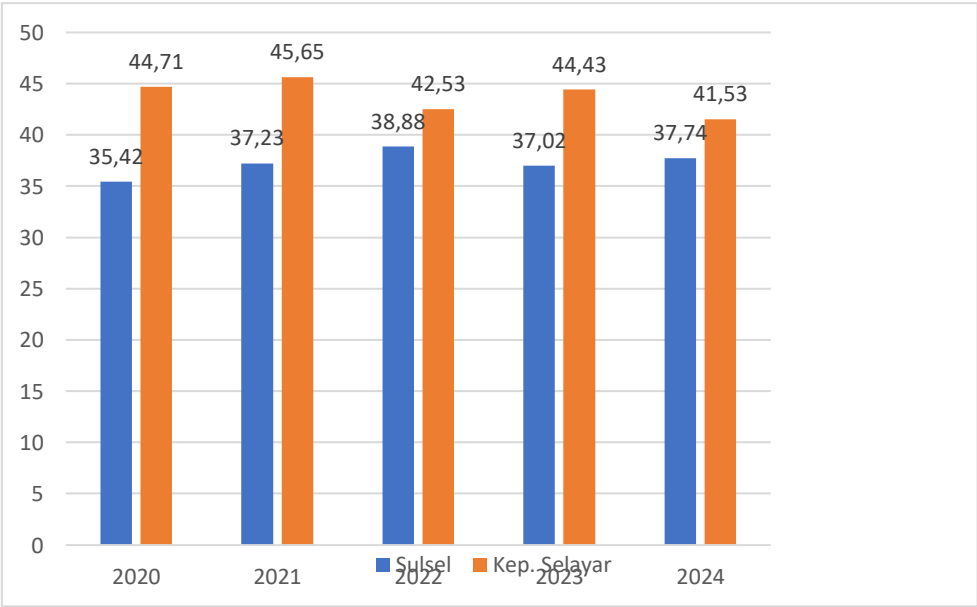
2.1.1.7.9. Konsumsi Ikan Masyarakat

Angka konsumsi ikan masyarakat merupakan indikator penting yang mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Konsumsi ikan yang cukup dan merata berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang berlimpah tentunya memiliki angka konsumsi ikan masyarakat yang cukup tinggi bahkan melebihi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, rata-rata angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2020 sampai 2022. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 44,43 kg/kapita. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, aman, dan bergizi. Ketersediaan produk perikanan tangkap yang tinggi dan budaya konsumsi masyarakat terhadap produk ikan, merupakan pendorong tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun, pada tahun 2024 capaian konsumsi ikan kembali menurun menjadi 41,53 kg/kapita. Sebagai daerah pesisir dan kepulauan, Kepulauan Selayar memiliki sumber daya ikan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, distribusi ikan ke seluruh pulau dan desa belum merata. Pada musim-musim tertentu, terutama saat cuaca buruk, hasil tangkapan menurun dan mempengaruhi ketersediaan ikan segar di pasar lokal. Beberapa rumah tangga mungkin lebih memilih ikan tertentu yang harganya lebih mahal atau tidak tersedia sepanjang tahun, sehingga menurunkan total konsumsi kuantitatif. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan angka konsumsi ikan melalui berbagai program. Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah dan

masyarakat, angka konsumsi ikan dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Adapun nilai angka konsumsi ikan terlihat pada **Grafik 2.15**.



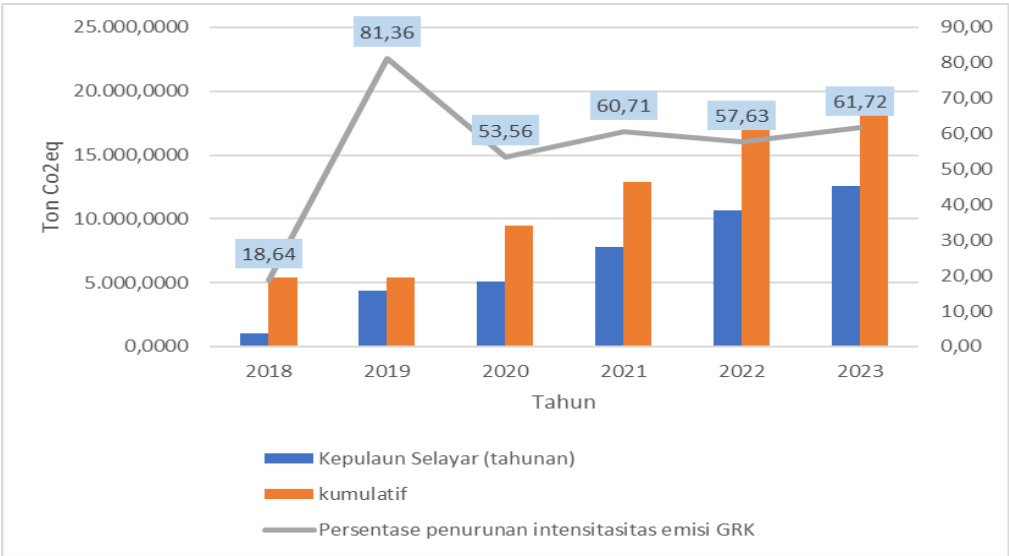
Grafik 2. 15 Konsumsi Ikan Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

2.1.1.8. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.8.1. Penurunan Intensitas GRK

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen internasional untuk secara bersama menahan laju pemanasan global. Progres penurunan emisi tahun 2023 cukup baik (10.626,25 tonCO₂eq). Untuk penurunan emisi, *track record* pada tahun 2018 realisasi penurunan emisi 1.004,21 tonCO₂eq, meningkat ditahun 2019 sebesar 4393,29 tonCO₂eq, dan ditahun 2020 sebesar 5056,25 tonCO₂eq dan tahun 2022 sebesar 10.626,25 tonCO₂eq (**Grafik 2.16**).



Grafik 2. 16 Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2023

Sumber Data: Aplikasi AKSARA, 2025

2.1.1.8.2. Indeks Risiko Bencana

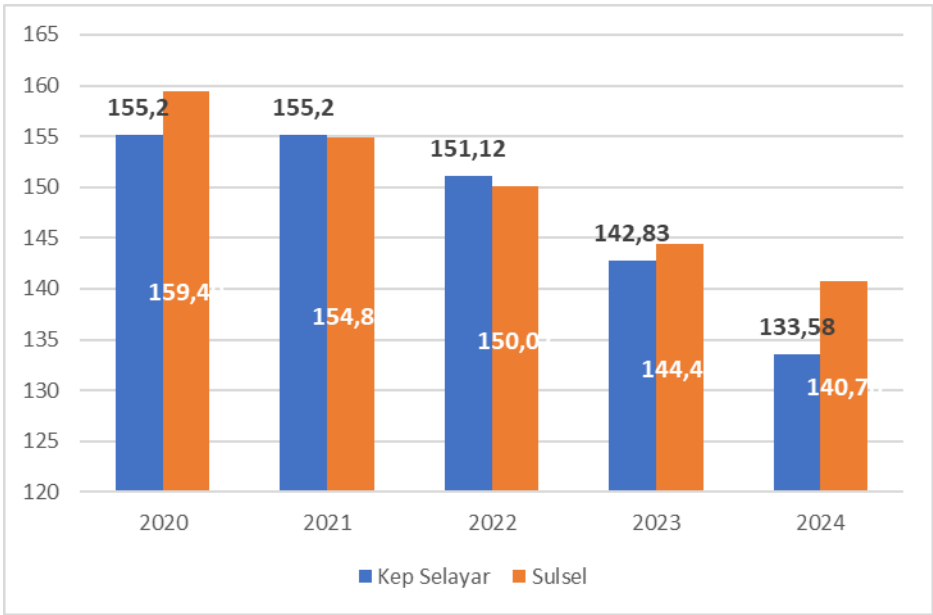
Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua desa dan kelurahan sepanjang pantai Barat dan pantai Timur serta 33 pulau berpenghuni pada 5 (Lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut. Dibawah ini disajikan data kejadian bencana (**Tabel 2.8**). Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren penurunan nilai indeks tetapi Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk daerah dengan tingkat resiko bencana tinggi. Namun, pada tahun 2024, IRB Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berada pada kategori sedang. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar masih dibawah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini terlihat pada **Grafik 2.17**.

Tabel 2. 8
Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

Kejadian Bencana		Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Angin Kencang	Lokasi	Kec.	6	6	7	10	8
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	10 KK	4 KK	157 jiwa	212 jiwa	133 jiwa
	Kejadian	Kali	10	27	236	93	36
	Kerugian	Juta Rp.	69	111,143	-	61,75	49
Banjir/Banjir Rob	Lokasi	Kec.	-	4	3	2	2
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	7 KK	68 jiwa	34 jiwa	15 jiwa
	Kejadian	Kali	-	8	4	2	2
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	-	-
Tanah Longsor	Lokasi	Kec.	-	1	4	-	-
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	1	2 jiwa	-	-
	Kejadian	Kali	-	1	5	-	-
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	-	-
Kebakaran	Lokasi	Kec.	6	2	4	6	6
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	17 KK	1 KK	52 jiwa	43 jiwa	52 jiwa
	Kejadian	Kali	6	2	5	33	13
	Kerugian	Juta Rp.	109	23,144	-	63,53	19
Gempa Bumi	Lokasi	Kec.	-	2	1	-	-
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	1176 KK	-	-	-
	Kejadian	Kali	-	1	1	-	-
	Kerugian	Juta Rp.	-	8.691,30	-	-	-
Kekeringan	Lokasi	Kec.	-	-	-	-	1

Kejadian Bencana		Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Korban Terdampak	KK/Jiwa	-	-	-	-	806 jiwa
	Kejadian	Kali	-	-	-	-	1
	Kerugian	Juta Rp.	-	-	-	-	-

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025



Grafik 2. 17 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

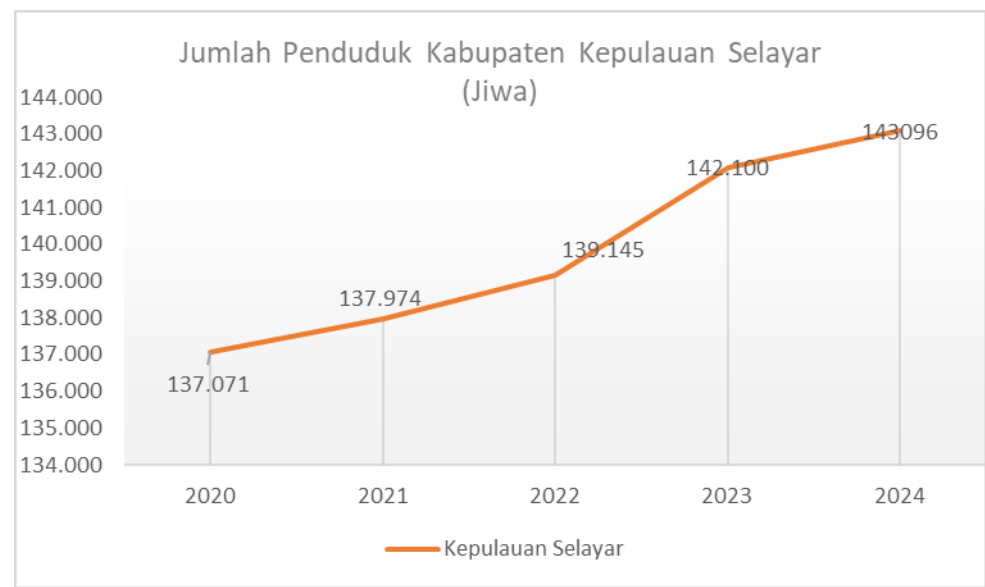
Penurunan IRB Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : teridentifikasinya wilayah-wilayah yang rawan bencana, meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui beberapa pelatihan serta pembentukan relawan tanggap bencana serta pembangunan beberapa infrastruktur untuk mencegah bencana. Namun, terdapat beberapa faktor yang masih perlu ditingkatkan terkait pencegahan dan penanggulangan bencana, antara lain : perencanaan dan tata ruang yang responsif terhadap resiko bencana, penyediaan sistem peringatan dini, dukungan kebijakan dan kelembagaan maupun pendanaan serta investasi dalam rangka pengurangan resiko bencana.

2.1.1.9. Aspek Demografi

2.1.1.9.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 berjumlah 143.096 jiwa. Kecamatan Benteng merupakan wilayah terpadat (24.378 jiwa). Sementara Kecamatan Buki memiliki jumlah penduduk terendah (6.925 jiwa). Dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk

Kabupaten Kepulauan Selayar bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Gambaran lebih rinci terlihat pada **Grafik 2.18**.



Grafik 2. 18 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020- 2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk rata-rata lima tahun terakhir mencapai 1,49 persen. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Benteng merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan dengan capaian negatif. Hal ini disebabkan oleh terjadinya migrasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah non perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu disebabkan oleh pernikahan ataupun masyarakat yang beralih profesi untuk bekerja sebagai petani atau nelayan di wilayah kecamatan lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.9**

Tabel 2. 9
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kecamatan	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK					Rata-rata
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
Pasimarannu	12,01	1,06	1,25	1,67	1,37	3,47
Pasilambena	2,69	1,14	1,31	4,58	1,68	2,28
Pasimassunggu	0,62	0,74	0,92	5,45	1,86	1,92
Taka Bonerate	-3,41	0,42	0,61	8,45	2,21	1,66
Pasimassunggu Timur	3,81	0,24	0,43	2,27	1,47	1,64
Bontosikuyu	-0,35	0,16	0,35	4,22	0,84	1,04
Bontoharu	6,76	1,05	1,24	2,54	1,07	2,53

Kecamatan	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK					
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-rata
Benteng	-6,94	0,99	1,2	-3,48	-0,55	-1,76
Bontomanai	6,32	0,63	0,82	1,55	-0,28	1,81
Bontomatene	1	0,13	0,32	0,92	-0,32	0,41
Buki	4,32	0,46	0,63	1,6	0,07	1,42
Kepulauan Selayar	1,07	0,66	0,85	2,13	0,86	1,49

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.2. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang positif pada tahun 2024 menyebabkan kepadatan penduduk juga tidak mengalami penurunan. Jika kepadatan penduduk dilihat berdasarkan persebaran wilayah kecamatan, persebaran jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 belum merata, namun terdapat progres pemerataan yang lebih baik. Pada **Tabel 2.10**, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, kepadatan penduduk di 6 kecamatan daratan cenderung menurun, disisi lain kepadatan penduduk di 5 kecamatan kepulauan seluruhnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data ini menunjukkan pengembangan wilayah kepulauan semakin meningkat baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi sarana dan prasarana wilayah.

Tabel 2. 10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	195,33	54	54	55	56	57
Pasilambena	114,88	70	70	71	75	76
Pasimasunggu	131,8	66	66	67	70	72
Taka Bonerate	49,3	274	275	276	301	306
Pasimasunggu Timur	67,14	117	117	118	121	122
Bontosikuyu	248,22	62	62	62	65	65
Bontoharu	128,12	114	115	117	120	121
Benteng	24,63	1.009	1.019	1.031	996	990
Bontomanai	136,42	100	101	102	104	103
Bontomatene	193,05	69	69	70	70	70
Buki	68,14	99	99	100	102	102
Kepulauan selayar	1.357,03	101	102	103	105	105

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren meningkat. Kecamatan Bontobaharu memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, sebesar 99 persen dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Bontomatene memiliki nilai rasio jenis kelamin terendah, yaitu sebesar

92 persen. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2. 11
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	98	99	97	97	97
Pasilambena	98	98	98	98	98
Pasimasunggu	96	96	97	97	97
Taka Bonerate	98	98	99	100	100
Pasimasunggu Timur	96	96	97	96	96
Bontosikuyu	96	96	98	99	99
Bontoharu	100	100	99	99	99
Benteng	93	93	94	94	94
Bontomanai	98	98	99	99	99
Bontomatene	93	93	92	93	93
Buki	97	97	96	97	97
Kepulauan Selayar	97	97	97	97	97

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.4. Struktur Usia

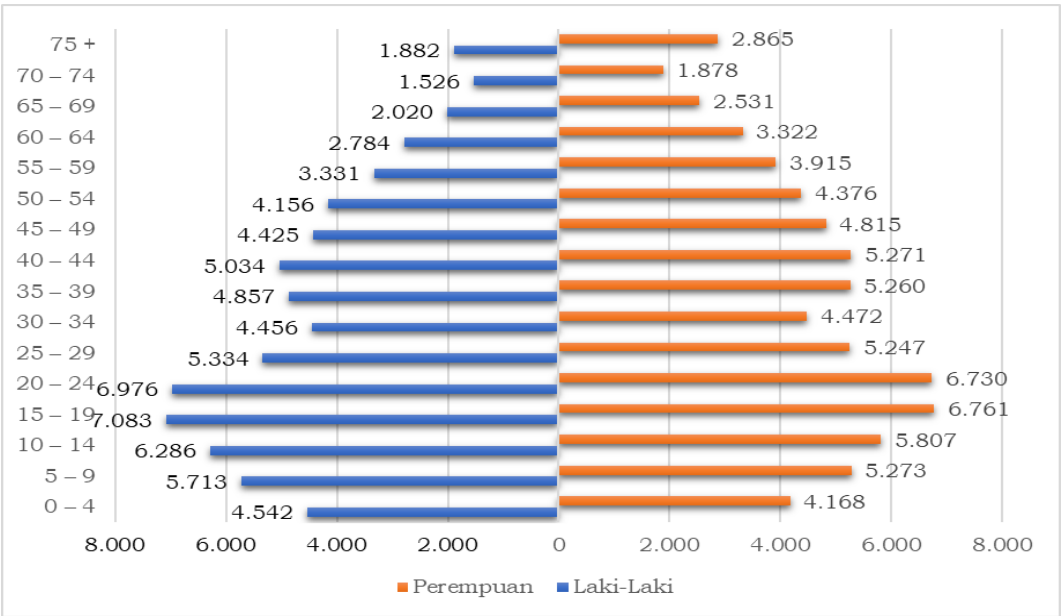
Komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori sedang, karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40 persen. Pada tahun 2024 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun 22,61 persen (32.126 jiwa, terdiri dari 16.718 laki-laki dan 15.408 perempuan) dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 97.824 jiwa (68,84 persen) dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sekitar 8,55 persen atau 12.150 jiwa (terdiri dari 5.228 laki-laki dan 6.922 perempuan). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 terlihat pada **Tabel 2.12** dan **Grafik 2.19**.

Tabel 2. 12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
1	0 – 4	4.542	4.168	8.710	108,97
2	5 – 9	5.513	5.273	10.986	108,34
3	10 – 14	6.286	5.807	12.093	108,25
4	15 – 19	7.083	6.761	13.844	104,76
5	20 – 24	6.976	6.730	13.706	103,66
6	25 – 29	5.334	5.247	10.581	101,66
7	30 – 34	4.456	4.472	8.928	99,64

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			Seks Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
8	35 – 39	4.857	5.260	10.117	92,34
9	40 – 44	5.034	5.271	10.305	95,50
10	45 – 49	4.425	4.815	9.240	91,90
11	50 – 54	4.156	4.376	8.532	94,97
12	55 – 59	3.331	3.915	7.246	85,08
13	60 – 64	2.784	3.322	6.106	83,80
14	65 – 69	2.020	2.531	4.551	79,81
15	70 – 74	1.526	1.878	3.404	81,26
16	75 +	1.882	2.865	4.747	65,69
JUMLAH (KAB/KOTA)		70.405	72.691	143.096	96,86

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025



Grafik 2. 19 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 96,86 yang berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Selayar 3,14 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar di Kecamatan Taka Bonerate sebesar 99,72 sedangkan yang terkecil di Kecamatan Bontomatene sebesar 92,57. Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada **Tabel 2.13**

Tabel 2. 13
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Rasio
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasimarannu	5.437	5.628	11.065	96,61
2	Pasilambena	4.311	4.411	8.722	97,73
3	Pasimasunggu	4.649	4.784	9.433	97,18
4	Taka Bonerate	7.540	7.561	15.101	99,72
5	Pasimasunggu Timur	4.031	4.187	8.218	96,27
6	Bontosikuyu	8.028	8.136	16.164	98,67
7	Bontoharu	7.696	7.793	15.489	98,76
8	Benteng	11.802	12.576	24.378	93,85
9	Bontomanai	7.004	7.075	14.079	99,00
10	Bontomatene	6.500	7.022	13.552	92,57
11	Buki	3.407	3.518	6.925	96,84
	2024	70.405	72.691	143.096	96,86
	2023	69.907	72.193	142.100	96,83
	2022	68.296	70.849	139.145	96,40
	2021	67.713	70.261	137.974	96,37
	2020	67.262	69.809	137.071	96,35

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.1.9.5. Proyeksi dan Analisis Penduduk

Proyeksi penduduk berdasarkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per kecamatan. Proyeksi penduduk pada tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.14**. Jumlah penduduk yang diproyeksi merupakan jumlah penduduk di masing-masing desa yang termasuk dalam wilayah pelayanan perkotaan dalam suatu kecamatan.

Tabel 2. 14
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Kecamatan	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pasimarannu	11.285	11.474	11.667	11.863	12.063
Pasilambena	9.400	9.841	10.302	10.784	11.289
Pasimasunggu	10.326	10.904	11.514	12.159	12.839
Taka Bonerate	17.486	19.023	20.696	22.516	24.495
Pasimasunggu Timur	8.475	8.670	8.869	9.073	9.282
Bontosikuyu	17.439	18.190	18.973	19.789	20.641
Bontoharu	16.124	16.539	16.965	17.401	17.849
Benteng	24.685	24.771	24.857	24.943	25.030
Bontomanai	14.565	14.793	15.024	15.259	15.498
Bontomatene	13.818	13.946	14.075	14.206	14.337
Buki	7.134	7.244	7.355	7.468	7.583
Kepulauan Selayar	150.738	155.394	160.102	165.461	170.905

Sumber Data: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sampai 2029, terlihat bahwa populasi di seluruh kecamatan akan mengalami peningkatan signifikan selama rentang waktu tersebut.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar diproyeksikan bertambah dari 143.096 jiwa pada tahun 2024 menjadi 170.905 jiwa di tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang stabil, dengan rata-rata kenaikan tahunan yang konsisten.

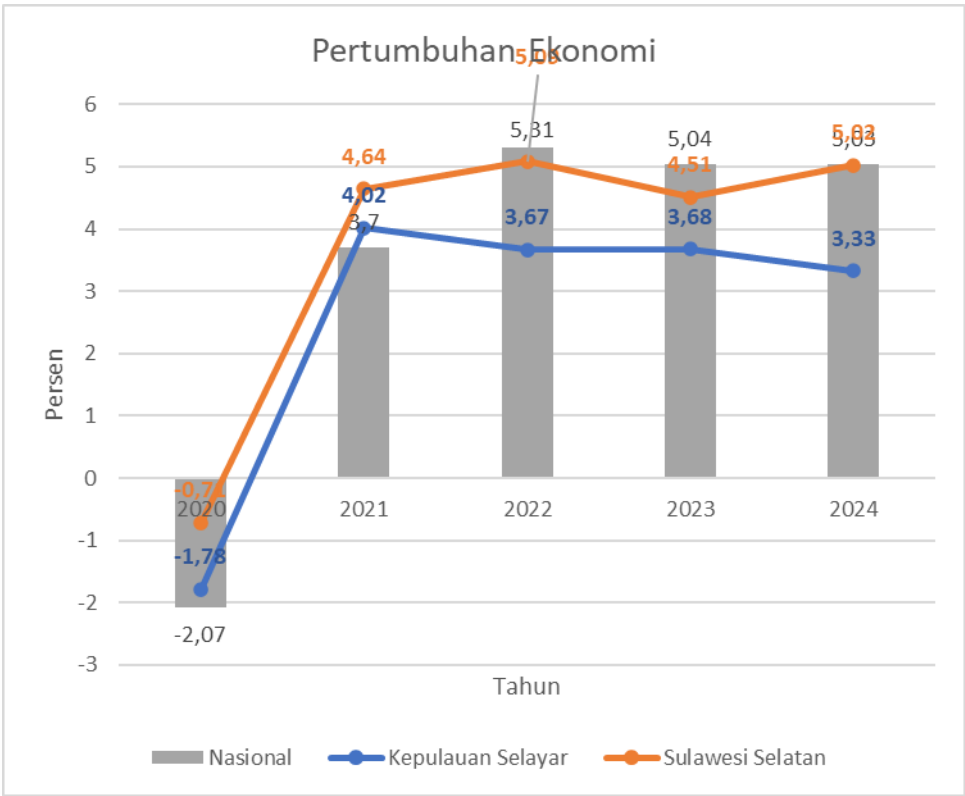
Beberapa kecamatan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kecamatan Taka Bonerate diproyeksikan mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi, dari 15.101 jiwa pada tahun 2024 menjadi 24.495 jiwa pada tahun 2029. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah ini berpotensi menjadi pusat perkembangan penduduk di masa depan. Sebaliknya, Kecamatan Benteng cenderung memiliki pertumbuhan stabil, dari 24.378 jiwa pada tahun 2024 menjadi 25.030 jiwa di tahun 2029, mencerminkan kecamatan dengan kepadatan yang sudah relatif tinggi. Proyeksi ini menunjukkan kebutuhan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika pertumbuhan penduduk.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada kenaikan produksi barang dan jasa. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar - 1,78 persen. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 4,02 persen. Selanjutnya, pada tahun 2022 pertumbuhan melambat menjadi 3,67 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 3,68 persen di tahun 2023, dan kembali melambat menjadi 3,33 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional (lihat pada **Grafik 2.20**).



Grafik 2. 20 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan **Grafik 2.20**, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dipengaruhi oleh tujuh sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi serta jasa real estate. Lebih lanjut terdapat 1 sektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2024 sebesar -0,05 yaitu pada sektor pertambangan dan penggalan.

Data menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan berkontribusi sebesar 43 persen terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, namun akibat perubahan iklim serta kekeringan menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian. Produksi beberapa tanaman pangan seperti padi dan jagung juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Pertumbuhan yang juga melambat pada sektor konstruksi disebabkan oleh penurunan realisasi belanja modal dari APBD terutama belanja modal gedung, jalan, jaringan dan irigasi dari 149 milyar lebih pada tahun 2023 menjadi 105 milyar pada tahun 2024. Sektor transportasi juga mengalami perlambatan, disebabkan tidak optimalnya kunjungan wisatawan. Selain itu, transportasi penerbangan juga belum normal seperti saat sebelum pandemi Covid 19. Terkhusus pada sektor pertambangan dan penggalan, Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar tidak memiliki kewenangan pada pengelolaan sektor tambang dan penggalian.

Beberapa fenomena perekonomian pada tahun 2024 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, antara lain:

1. Berdasarkan hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area) dan ubinan menunjukkan adanya penurunan produksi padi sebesar -11,43%, kacang tanah sebesar -33,79%, kacang hijau sebesar -39,42%, dan ubi kayu sebesar -79,11%.
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Belanja pegawai APBN meningkat 14,5% dan belanja pegawai APBD meningkat 12,8%.
3. Pada tahun 2024 terdapat beberapa event yang diselenggarakan di Kepulauan Selayar, seperti Harkopnas ke-77 Sulsel, Festival Taka Bonerate dan *Dive Camp* dengan peserta dari luar Kepulauan Selayar sehingga meningkatkan beberapa sektor, utamanya Transportasi serta Akomodasi dan Makan Minum
4. Peningkatan produksi listrik salah satunya karena PT PLN (Persero) mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tanamalala dengan kapasitas 176 kilowatt peak (kWp) di Pulau Bembe.
5. Terdapat peningkatan aktivitas LNPRT khususnya Partai Politik, dimana pada Tahun 2024 diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden 2024 pada bulan Februari dan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Gubernur) pada bulan November 2024. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 27,87%.
6. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan disebabkan oleh adanya penurunan Realisasi Belanja Modal APBD sebesar -29,02%, Belanja Barang dan Jasa APBD sebesar -11,64%, serta Belanja Bantuan Sosial APBD sebesar -15,92%.
7. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2024, konsumsi makanan, minuman, dan rokok meningkat 3,08%, konsumsi kesehatan meningkat 25,16%, konsumsi pendidikan meningkat 14,08%, pengeluaran transportasi meningkat 45,31%, dan pengeluaran lainnya meningkat sebesar 19,83%.

2.1.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 tercatat sebesar 4.047,38 Milliar Rupiah, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 4.182,33 Milliar Rupiah. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB (ADHK) tahun 2024 adalah pada sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan yaitu 1.665,77 Milliar Rupiah, diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 760,50 Milliar Rupiah serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 406,50 Milliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB dari sektor-sektor tersebut disebabkan oleh dominasi mata pencaharian masyarakat dibidang pertanian dan perikanan, meningkatnya aktivitas konstruksi, tingginya tingkat konsumsi dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Rincian pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha tertera pada **Tabel 2.15**.

Tabel 2. 15
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.501,47	1.550,58	1.591,13	1.643,05	1.665,77
B	Pertambangan dan Penggalian	29,55	31,60	34,02	35,22	35,20
C	Industri Pengolahan	118,44	124,49	133,48	138,53	146,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	5,71	5,76	6,21	6,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,51	5,51	5,74	5,75	5,79
F	Konstruksi	661,28	688,54	719,95	744,81	760,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	322,96	340,01	366,73	384,71	406,50
H	Transportasi dan Pergudangan	77,05	84,74	94,63	99,21	101,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	9,24	10,49	11,03	11,71
J	Informasi dan Komunikasi	139,50	141,47	143,78	153,05	160,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,68	44,97	45,17	46,46	47,59
L	Real Estat	64,47	65,27	65,74	68,95	71,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,57	0,57	0,58	0,60	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	306,42	319,14	312,04	318,64	344,33
P	Jasa Pendidikan	233,89	244,96	257,68	268,07	282,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,21	87,76	95,22	100,31	109,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	19,84	20,99	21,64	22,77	25,44
Produk Domestik Regional Bruto		3.620,20	3.765,56	3.903,80	4.047,38	4.182,33

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 7.986,24 Milliar Rupiah, dan meningkat menjadi sebesar 8.340,51 Milliar Rupiah pada tahun 2024. Selama lima tahun

terakhir, struktur ekonomi daerah ini didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2024 sektor tersebut menyumbang kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB ADHB, yaitu sebesar 3.595,17 Miliar Rupiah atau 43,10 persen. Sektor berikutnya adalah konstruksi dengan kontribusi sebesar 1.781,79 Miliar Rupiah (21,36 persen) serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 692,55 Miliar Rupiah (8,30 persen). Adapun sektor jasa perusahaan merupakan penyumbang PDRB terkecil yaitu sebesar 1,33 Miliar Rupiah (0,02 persen). Perincian pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tertera pada **Tabel 2.16**.

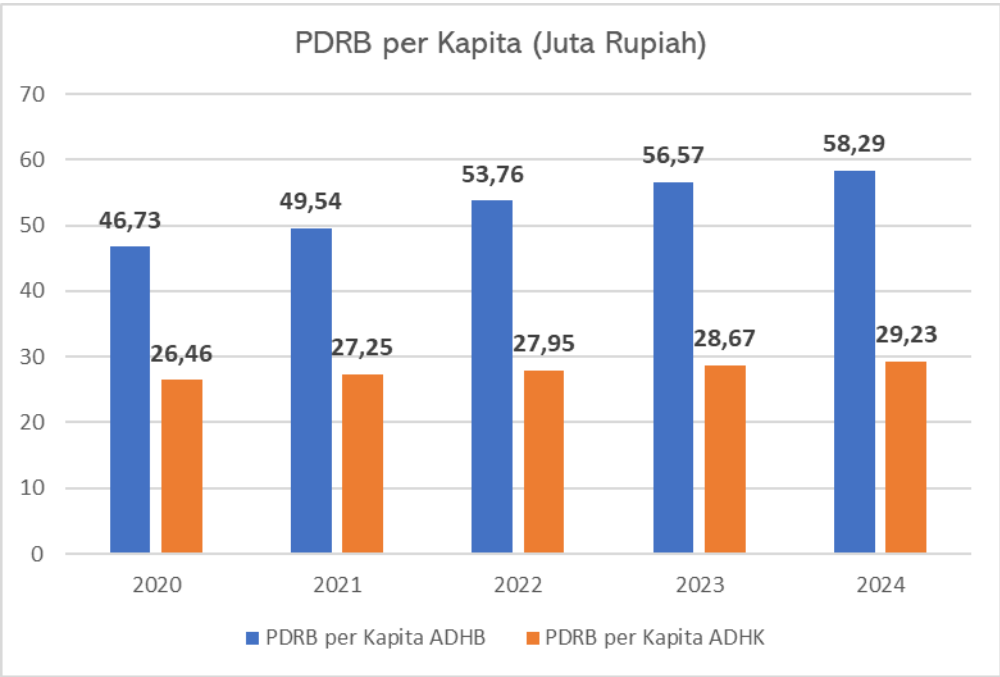
Tabel 2. 16
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.712,90	2.913,58	3.268,73	3.504,83	3.595,17
B	Pertambangan dan Penggalian	59,7	64,26	71,11	75,72	75,34
C	Industri Pengolahan	179,4	191,83	207,73	224,94	244,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	5,88	5,99	6,43	6,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	7,07	7,45	7,55	7,59
F	Konstruksi	1.401,65	1.494,77	1.621,53	1.732,60	1.781,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	499,08	532,85	599,82	645,43	692,55
H	Transportasi dan Pergudangan	127,02	142,50	169,67	187,92	195,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,32	15,07	17,31	18,74	20,33
J	Informasi dan Komunikasi	160,60	165,03	167,74	178,76	188,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,62	89,01	95,55	100,94	106,01
L	Real Estat	93,31	94,78	96,44	102,09	107,39
M,N	Jasa Perusahaan	1,06	1,08	1,16	1,22	1,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	501,07	526,87	518,76	537,26	594,19
P	Jasa Pendidikan	371,18	397,82	420,18	437,27	473,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,66	157,90	173,45	184,75	205,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	32,75	35,10	37,63	39,81	44,64
Produk Domestik Regional Bruto		6.392,74	6.835,40	7.480,47	7.986,24	8.340,51

Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

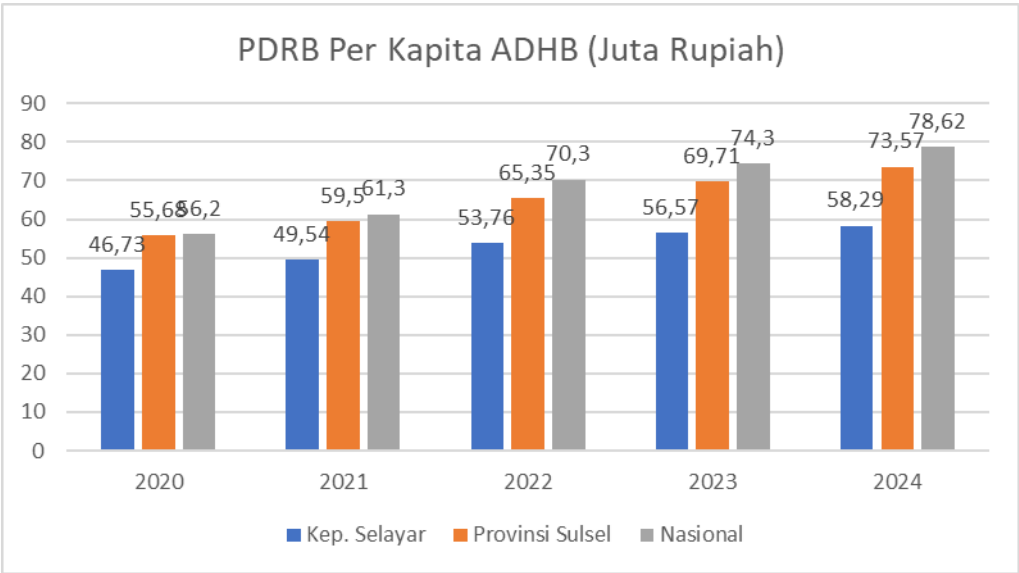
Nilai PDRB per kapita yang diperoleh dari pembagian total nilai PDRB dengan jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, nilai PDRB per kapita cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat oleh pandemi *Covid-19*. Seiring meningkatnya nilai PDRB ADHB dari seluruh lapangan usaha, yaitu dari 6.392,7 Milliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 7.480,47 Milliar Rupiah pada tahun 2022, nilai PDRB Per Kapita kembali naik. Pada tahun 2021 PDRB Per Kapita tercatat sebesar 49,54 Juta Rupiah, dan meningkat menjadi 53,76 Juta Rupiah pada tahun 2022. Selanjutnya, naik menjadi 56,57 Juta Rupiah pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 58,29 Juta Rupiah pada tahun 2024. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.21**.



Grafik 2. 21 PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan **Grafik 2.21**, PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan PDRB yang tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Tahun 2024, PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar 8,34 Milyar lebih dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 7,99 Milyar lebih atau tumbuh sebesar 4,44 persen. Disisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2024 hanya sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 disebabkan oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor lapangan usaha kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa lainnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat untuk jasa-jasa praktis, seperti : laundry, tukang cukur, servis motor dan elektronik. Banyaknya permintaan ini kemudian menyebabkan tumbuhnya UMKM baru yang bergerak dibidang jasa. Sektor lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2024 adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelayanan jaminan sosial wajib oleh Pemerintah Daerah termasuk program dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau program bantuan sosial lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada urutan ketiga dari lima kabupaten/kota setara dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan PDRB Per Kapita sebesar 31,16 Juta Rupiah. PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,57 Juta Rupiah dan nasional Sebesar 78,62 Juta Rupiah.

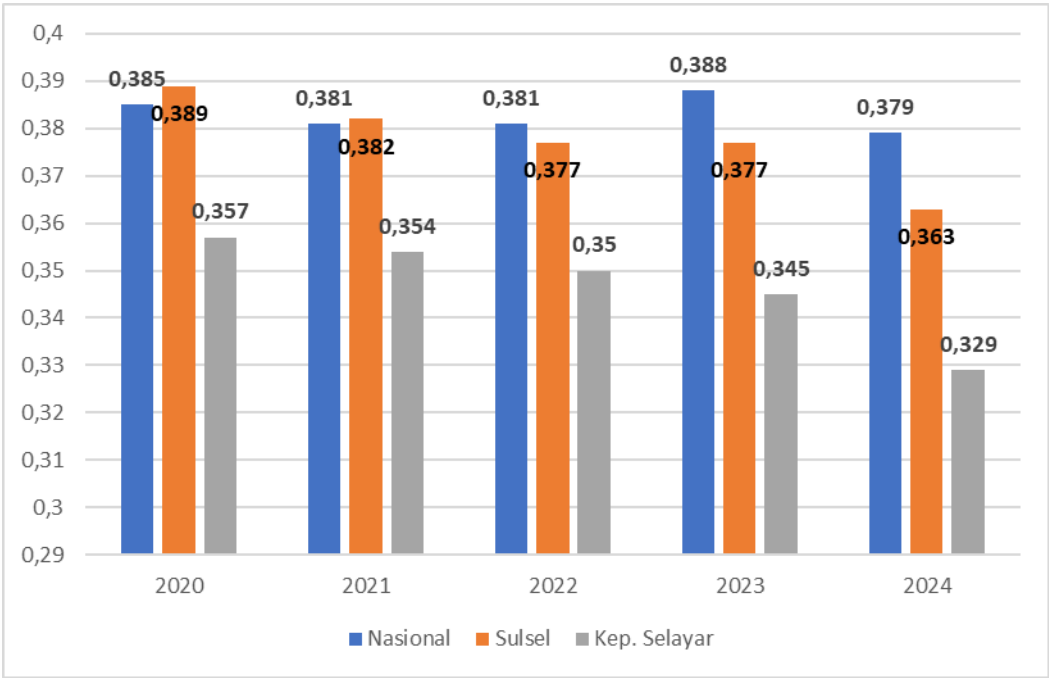


Grafik 2. 22 PDRB Per Kapita Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Gini Rasio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berada dalam rentang 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan

ketimpangan yang tinggi. Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 Indeks Gini tercatat sebesar 0,357 dan mengalami penurunan positif menjadi 0,354 pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 0,345 dan 0,329. Informasi lebih rinci terlihat pada **Grafik 2.23**.



Grafik 2. 23 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

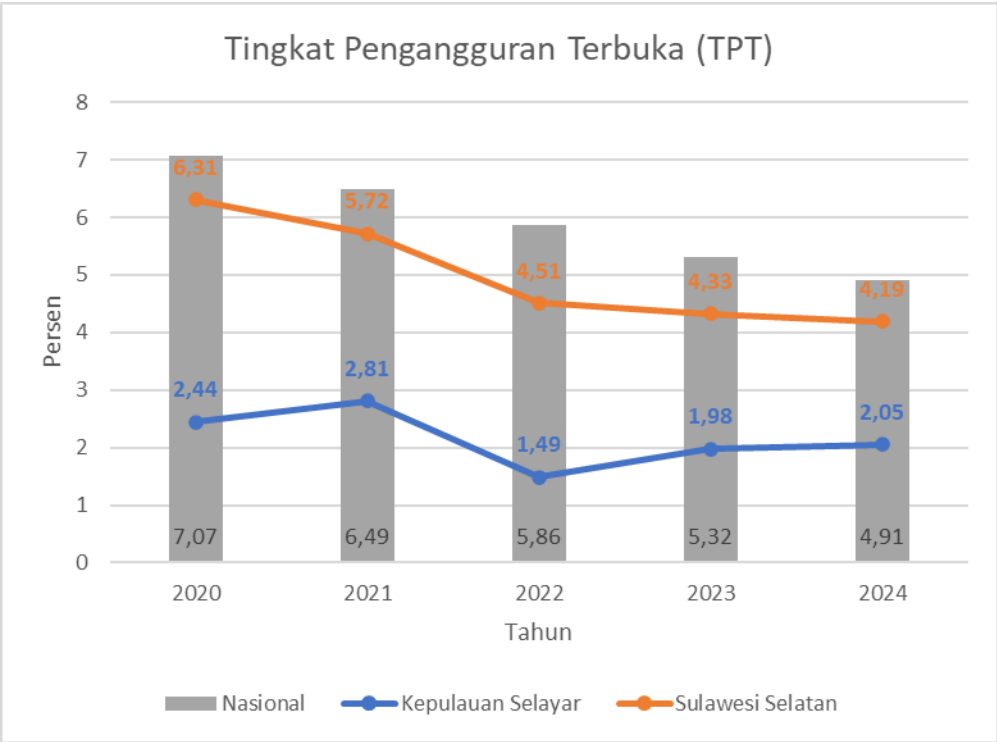
Berdasarkan **Grafik 2.23**, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung menurun dan lebih rendah dibanding Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian dimaksud, antara lain : pengembangan program sosial untuk masyarakat miskin, pembangunan dermaga plensengan di beberapa wilayah kecamatan kepulauan untuk menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa ke wilayah terpencil serta pemberian bantuan alat perikanan, pertanian, UMKM serta alat-alat yang mendukung produktivitas tenaga kerja lainnya. Faktor-faktor dimaksud sangat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah kepulauan khususnya sehingga ketimpangan pendapatan menjadi semakin kecil.

Disamping itu, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi penyebab meningkatnya Indeks Gini tersebut. Beberapa faktor dimaksud antara lain letak geografis yang terdiri dari 130 pulau mengakibatkan tingginya harga bahan pokok di wilayah kepulauan sehingga

daya beli sebagian masyarakat menjadi lemah, infrastruktur dasar yang belum merata terutama air bersih, infrastruktur transportasi, jaringan listrik dan telekomunikasi. Sebagian masyarakat di wilayah kepulauan yang bekerja sebagai petani dan nelayan sehingga terjadi kesenjangan pendapatan dengan masyarakat di wilayah daratan yang lebih memiliki akses terhadap akses lapangan pekerjaan yang bervariasi, ketimpangan kesempatan dalam pendidikan dan kesehatan.

2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki keterkaitan erat dengan jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir, TPT di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, TPT tercatat sebesar 2,05 persen meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,98 persen. Meskipun demikian angka ini lebih rendah (lebih baik) dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional. Diharapkan TPT dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang. Rincian persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.28**



Grafik 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan TPT sebesar 0,54 persen pada tahun 2023 dipengaruhi oleh semakin menurunnya dampak pandemi *Covid-19* terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja yang terdampak *Covid-19* mencapai 8.000 jiwa, namun menurun drastis menjadi 199 jiwa pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

jumlah pengangguran akibat Covid-19 tahun 2021 sebanyak 121 jiwa dan menjadi nol pada tahun 2022; jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja menurun dari 658 jiwa menjadi 70 jiwa; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja turun dari 7.221 jiwa menjadi 129 jiwa.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan kawasan, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 merupakan yang terendah kedua. TPT terendah tercatat di Kabupaten Sinjai sebesar 1,52 persen, sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Bantaeng sebesar 2,57 persen. Informasi perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kabupaten dalam kawasan setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tertera pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2. 17						
Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024						
No	Kab./ Kota	TPT (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sinjai	2,65	2,61	1,80	1,69	1,52
2	Kepulauan Selayar	2,44	2,81	1,49	1,98	2,05
3	Bulukumba	3,42	3,14	1,26	1,31	2,23
4	Jeneponto	2,31	2,38	2,21	2,13	2,47
5	Bantaeng	4,27	4,07	2,72	3,71	2,57
	Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
	Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

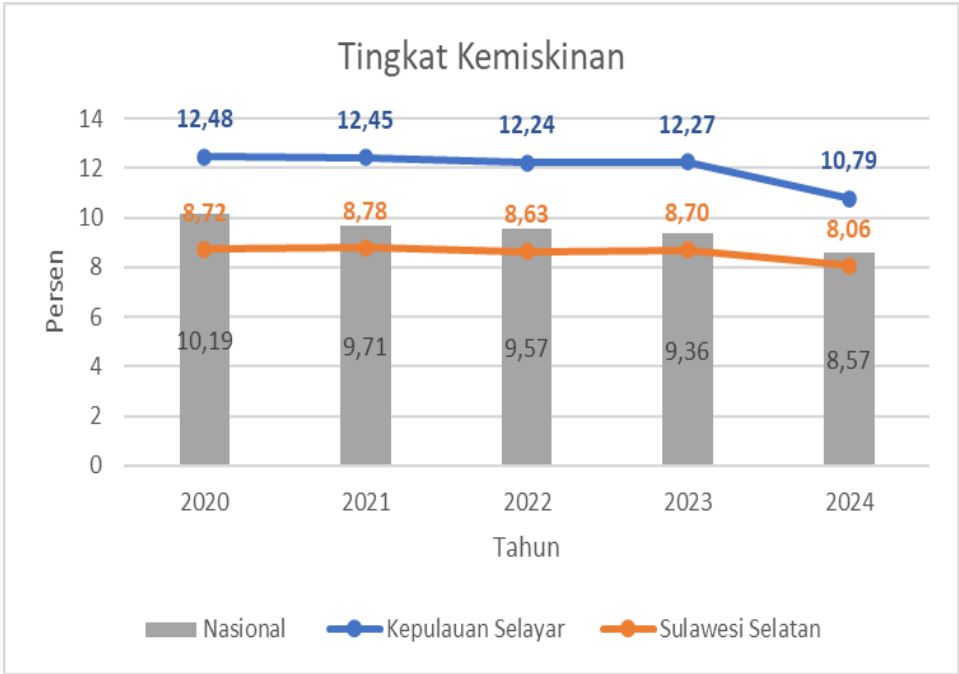
Berdasarkan **Grafik 2.24**, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan TPT secara nasional. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga pemberian alat-alat pertanian dan perikanan, serta bantuan bibit pertanian menyebabkan masyarakat masih bekerja dan tidak menganggur. Selain itu, pemberian bantuan alat-alat pengolahan bagi UMKM yang dibarengi dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM, mampu menghasilkan tenaga kerja baru. Namun, jika dilihat dari tren dari tahun 2022 sampai 2024, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab, antara lain: ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta sektor pemerintahan; rendahnya kualitas angkatan kerja, 79 persen diantaranya tidak berkualifikasi pendidikan tinggi; perlambatan pertumbuhan PDRB sektor konstruksi mengakibatkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan, serta komposisi penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibandingkan sektor formal,

sehingga pertumbuhan ekonomi yang stagnan menyebabkan para pekerja rawan untuk kembali menganggur.

Oleh karena itu, beberapa program dan kebijakan harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, antara lain : menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui penciptaan industri pengolahan sektor unggulan; melanjutkan pemberian bantuan peralatan bagi petani, nelayan, dan UMKM; melaksanakan proyek-proyek padat karya serta melaksanakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan pada masyarakat.

2.1.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,48 persen dan menurun menjadi 10,79 persen pada tahun 2024. Namun, terdapat sedikit kenaikan antara tahun 2022 dan 2023, yaitu sebesar 0,03 poin, dari 12,24 persen menjadi 12,27 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan selama periode tersebut adalah sebesar 0,14 persen (117 jiwa). Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kenaikan Garis Kemiskinan terus terjadi selama lima tahun terakhir. Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari Rp. 406.762,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 430.976,- pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi Rp. 453.432,- pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Informasi lebih rinci terlihat pada **Grafik 2.25**.



Grafik 2. 25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : pemberian bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin; pemberian bantuan alat-alat yang dapat menunjang produktivitas kerja masyarakat; pemberian pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan antar OPD untuk menurunkan tingkat kemiskinan; pelaksanaan program-program padat karya; pelaksanaan Pilkada serentak mendatangkan pendapatan yang meningkat di kalangan UMKM maupun masyarakat umum.

Selain itu, ada beberapa faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk mengoptimalkan penurunan angka kemiskinan dimaksud, antara lain : mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja; meningkatkan nilai tambah lapangan pekerjaan sehingga memberikan dampak pada pendapatan tenaga kerja; mengoptimalkan ketersediaan dan keakuratan data masyarakat miskin *by name by address* yang akan menjamin ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial; mengoptimalkan hilirisasi produk sumber daya alam; serta memaksimalkan intervensi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan terpadu.

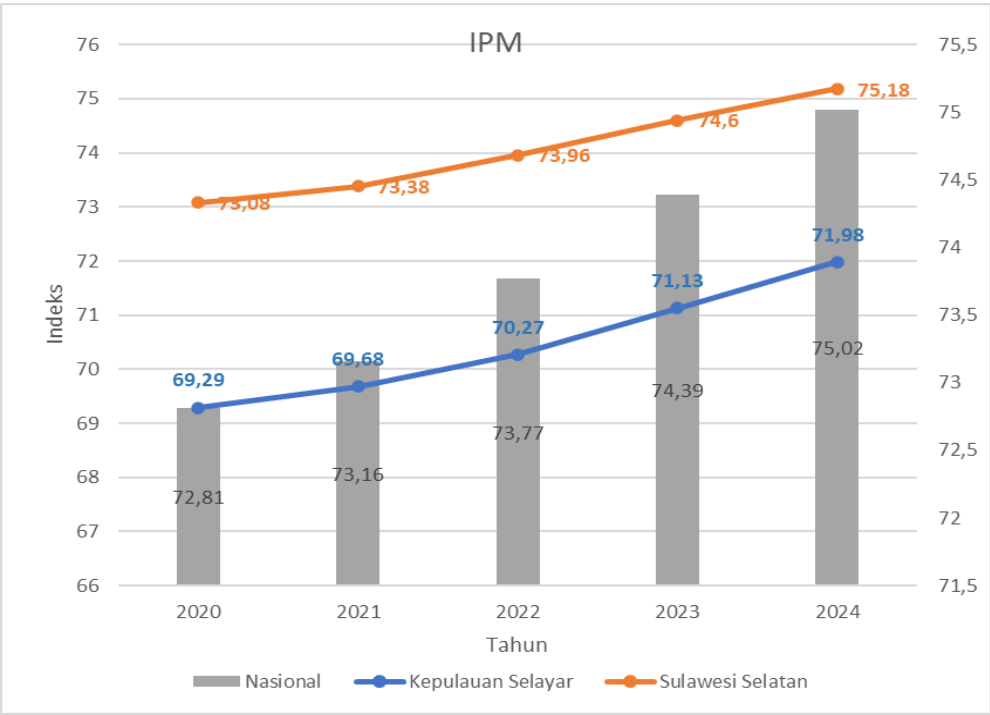
Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Daerah perlu menerapkan kebijakan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Beberapa kebijakan itu, antara lain : pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah; pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM); memperkuat hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja; serta mendatangkan investasi terutama pada pengolahan dan pengelolaan sektor unggulan.

2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, khususnya dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 tercatat sebesar 67,38 dan meningkat menjadi 67,76 pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut menjadi 68,35 pada tahun 2022 dan 69,20 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai angka 71,98 yang menempatkannya dalam kategori tinggi ($IPM \geq 70$). Rincian

capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.26.**



Grafik 2. 26 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

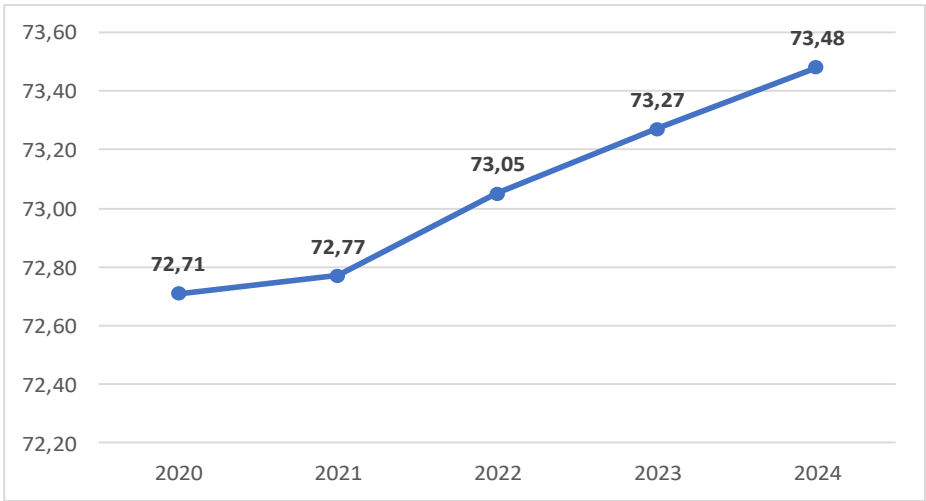
IPM Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat selama lima tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan serta ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan seluruh indikator komposit IPM dari tahun ke tahun dan perhitungan angka harapan hidup berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 menghasilkan Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat signifikan. Namun disisi lain, terdapat pula faktor yang menjadi permasalahan dalam rangka peningkatan capaian IPM dimaksud. Beberapa faktor itu, antara lain : angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan AHLS Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada peringkat 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, UHH Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada peringkat 18 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta Pengeluaran per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada peringkat 20 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan ini tercermin melalui meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang menggambarkan usia rata-rata yang dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Faktor yang mendukung peningkatan ini, antara lain penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat, serta tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan estimasi rata-rata tambahan usia yang diharapkan dapat dijalani seseorang sejak lahir atau setelah mencapai usia tertentu (usia ke-x). Angka usia harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat selama lima tahun terakhir. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka Indeks Kesehatan juga turut mengalami peningkatan. Peningkatan ini seiring dengan kebijakan pembangunan dan pemerataan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, yaitu : pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah kepulauan; pelayanan kesehatan bergerak ke wilayah terpencil dan kepulauan; penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Data lengkap Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.27**.



Grafik 2. 27 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

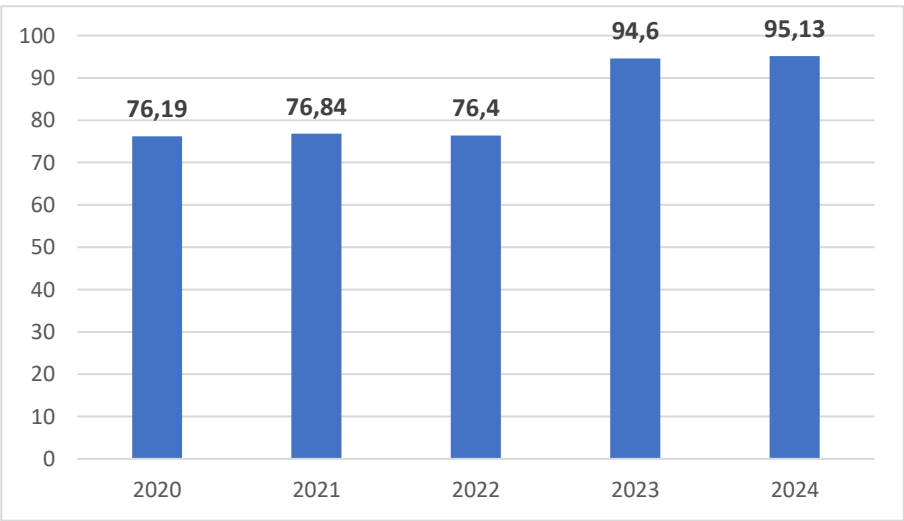
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.2.2. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi adalah dengan mendorong agar setiap persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, atau bidan, serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin merupakan indikator pelayanan wajib

dasar dalam Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, dan wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten / kota untuk seluruh warganya tanpa terkecuali.

Pada tahun 2023, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1.868 orang, dan sebanyak 1.767 orang diantaranya menjalani proses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran cakupan persalinan di fasilitas kesehatan selama periode tahun 2019 hingga 2023 terlihat pada **Grafik 2.28**.



Grafik 2. 28 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

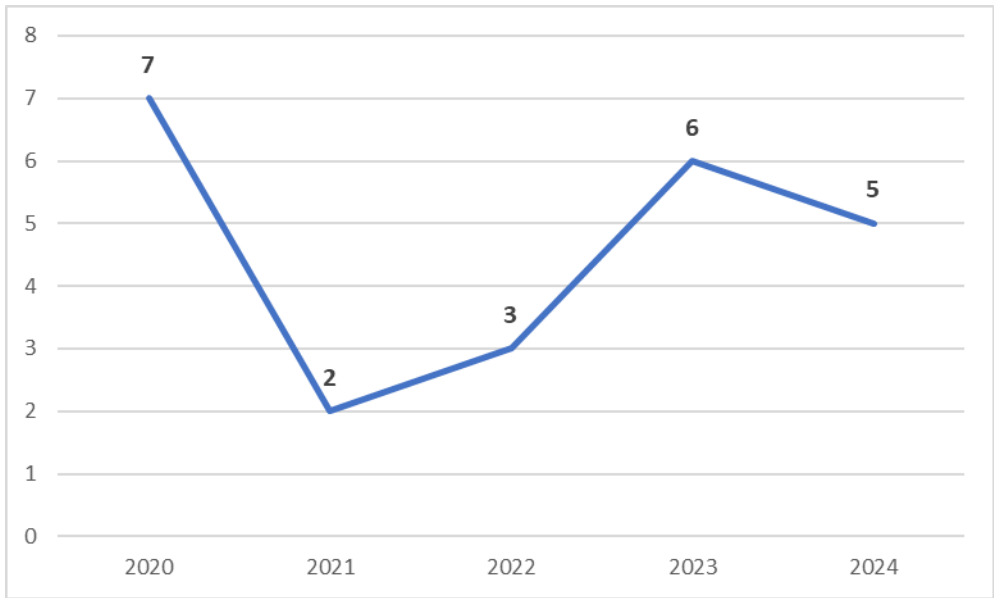
Peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2023, disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat pada fasilitas kesehatan akibat peran aktif kader kesehatan dan petugas kesehatan untuk melakukan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya persalinan aman. Selain itu, program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin sangat membantu masyarakat melakukan persalinan ataupun pelayanan kesehatan lainnya.

2.1.2.2.3. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, indikator ini menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 sebesar 6, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 6 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 kematian ibu hamil, 1 kematian ibu bersalin dan 1 kematian ibu nifas. Tren jumlah kematian ibu

Kabupaten Kepulauan Selayar per 100.000 kelahiran hidup terlihat pada **Grafik 2.29.**



Grafik 2. 29 Jumlah Kematian Ibu per 100 Ribu Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kematian ibu pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 terbesar adalah karena perdarahan sebanyak 2 kasus, disusul kematian ibu disebabkan karena gangguan *cerebrovascular* sebanyak 1 kasus dan disebabkan penyebab lain-lain sebanyak 3 kasus. Standar nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat baik. Hal ini menunjukkan upaya menjaga kesehatan ibu hamil dan bersalin sangat baik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

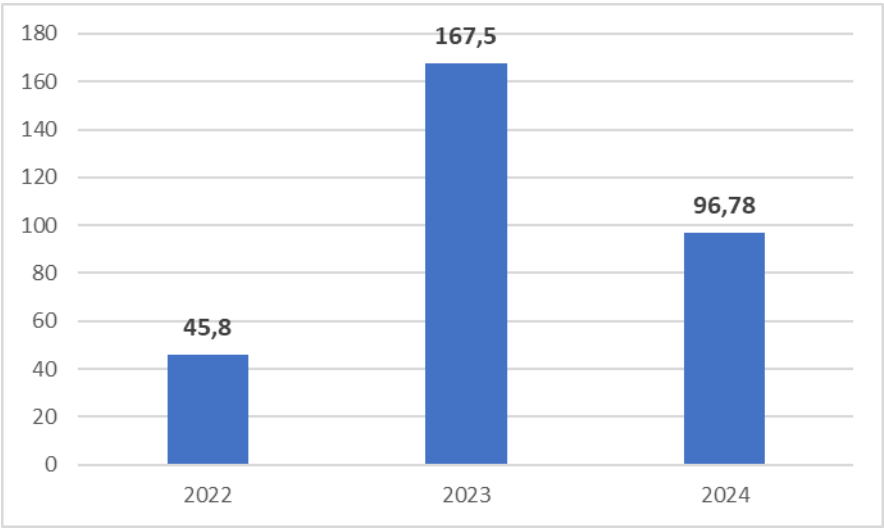
Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografis dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

2.1.2.2.4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)

Jumlah penemuan kasus TBC dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk meminimalisir penularan TBC (misalnya: penderita tidak menggunakan masker saat berinteraksi dengan masyarakat dan terlambatnya masyarakat untuk berobat secara lengkap). Pada tahun 2023, berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah perkiraan penderita Tuberculosis di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 496 orang. Dari jumlah tersebut, pada kenyataannya, jumlah penderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sebesar 831 orang, sehingga capaian *treatment coverage* kasus Tuberculosis pada tahun 2023 sebesar 167,5 persen.

Peningkatan *treatment coverage* disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : penerapan strategi aktif penemuan kasus berupa skrining aktif (*Active Case Finding/ACF*), yaitu mencari kasus Tuberculosis secara proaktif di komunitas, terutama di kelompok risiko tinggi seperti penderita HIV, narapidana, dan pekerja kesehatan serta penguatan pelacakan kontak (*contact tracing*) terhadap orang-orang yang tinggal serumah atau berinteraksi erat dengan pasien Tuberculosis. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis terlihat pada **Grafik 2.30**.

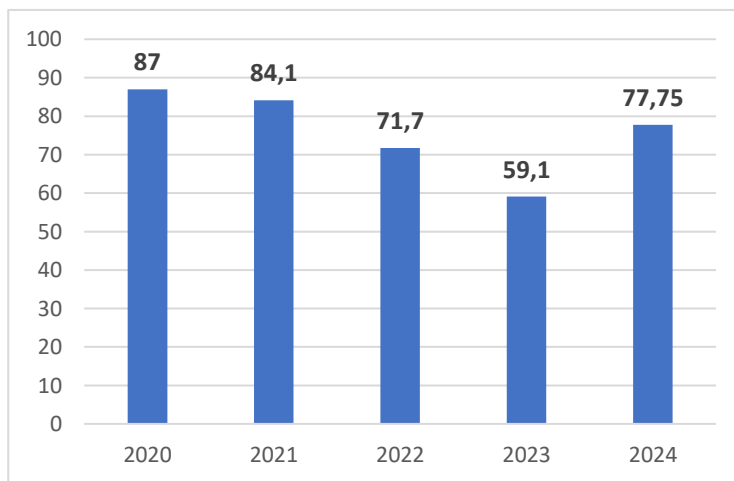


Grafik 2. 30 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (*treatment coverage*) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.2.5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (*treatment success rate*)

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*Success Rate*) adalah jumlah kasus Tuberculosis yang sembuh dengan pengobatan lengkap diantara kasus Tuberculosis yang diobati dan dilaporkan. Penderita Tuberculosis yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberculosis) yang dievaluasi pada tahun berjalan.

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis di Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2023, meskipun secara jumlah orang yang berhasil sembuh semakin meningkat. Pada tahun 2023, jumlah pasien Tuberculosis yang berhasil diobati sebanyak 240 orang dari 406 kasus yang ditemukan pada tahun sebelumnya atau sebesar 59,1 persen. Rincian angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis terlihat pada **Grafik 2.31**.



Grafik 2. 31 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi pasien, pelayanan kesehatan, maupun dukungan sosial dan kebijakan pemerintah. Tingginya angka keberhasilan pengobatan menjadi indikator penting dalam pengendalian Tuberculosis karena menunjukkan efektivitas deteksi dini, penatalaksanaan kasus, serta komitmen sistem kesehatan secara menyeluruh.

Salah satu faktor utama yang sangat menentukan adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Pengobatan Tuberculosis memiliki durasi minimal enam bulan dan membutuhkan disiplin tinggi dari pasien untuk mengonsumsi obat secara teratur. Ketidakpatuhan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan pengobatan dan berkembangnya resistensi obat.

Faktor berikutnya adalah ketersediaan dan kelengkapan Obat Anti Tuberculosis (OAT). Obat yang tersedia secara gratis, tepat jenis, dan tidak terputus sangat membantu keberlanjutan terapi. Kualitas layanan kesehatan juga menjadi penentu. Petugas kesehatan yang terlatih dalam penatalaksanaan Tuberculosis, fasilitas pemeriksaan yang memadai (seperti mikroskop, alat tes cepat molekuler/TCM, dan *rontgen*), serta sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat sangat mendukung proses diagnosis dan monitoring pengobatan. Layanan kesehatan yang responsif dapat mendeteksi kasus lebih awal dan memberikan pengobatan yang sesuai.

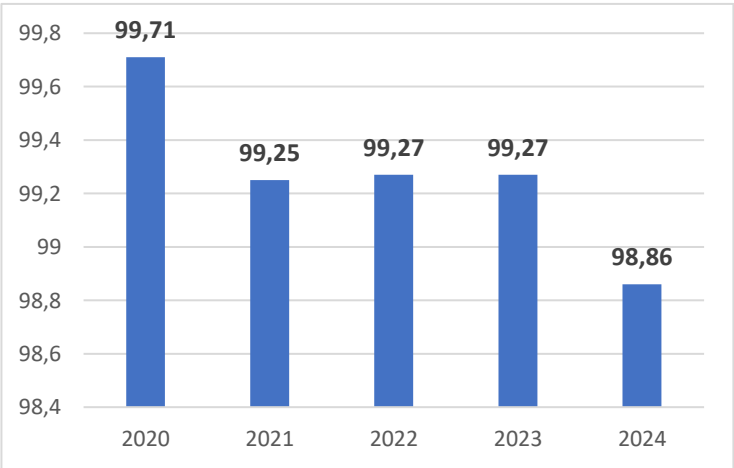
Dari sisi sistem, dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah merupakan faktor kunci. Program nasional pengendalian Tuberculosis yang terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam pencatatan dan pelaporan

Tuberculosis, turut memperkuat pengendalian penyakit ini secara menyeluruh. Penemuan kasus aktif, pelacakan kontak, dan pelibatan masyarakat menjadi bagian dari pendekatan yang komprehensif. Dengan pendekatan multi-sektor, integratif, dan berbasis komunitas, angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya eliminasi Tuberculosis nasional dan global.

2.1.2.2.6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Untuk menjamin seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional, maka pemerintah wajib mendaftarkan dan membayarkan warga miskin dan kurang mampu sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar telah melampaui target nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar beberapa kali menerima penghargaan *Universal Health College* atas capaian dimaksud. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.32**.

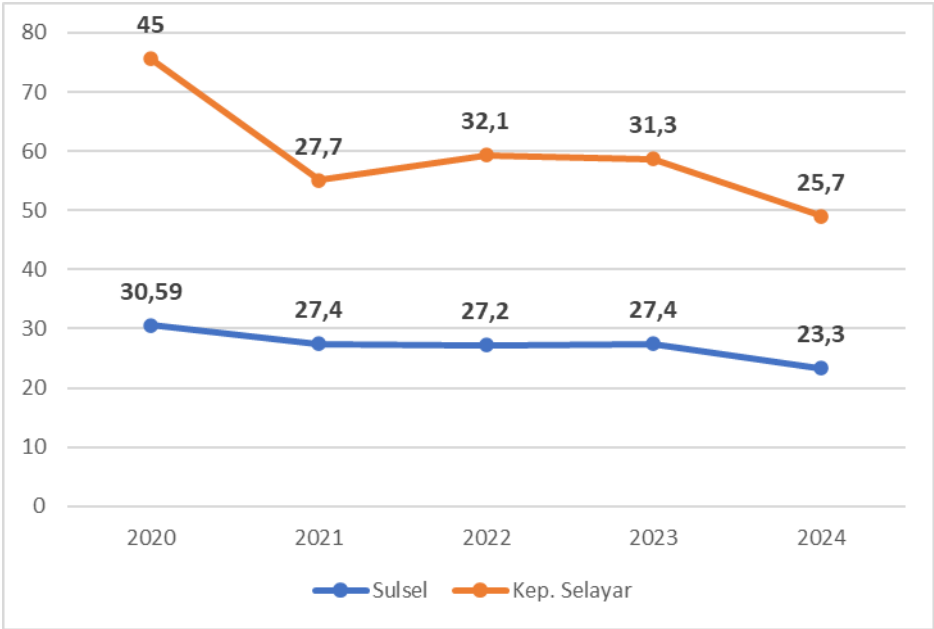


Grafik 2. 32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.2.7. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir terus mengalami tren penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 60 persen dapat ditekan hingga pada tahun 2021 menjadi 27,7 persen. Namun berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 meningkat menjadi 32,1 persen kemudian menurun menjadi 31,3 persen

pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Prevalensi Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Data Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.33**.



Grafik 2. 33 Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa faktor utama penyebab tingginya Prevalensi Stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

1. Kurangnya Akses terhadap Gizi Seimbang
Banyak keluarga di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Konsumsi protein hewani, buah, dan sayuran masih rendah, terutama di kalangan keluarga berpendapatan rendah. Keterbatasan ini diperparah oleh tantangan logistik dan distribusi pangan ke daerah terpencil.
2. Sanitasi dan Akses Air Bersih yang Terbatas
Sebagian masyarakat di Kepulauan Selayar belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi layak dan air bersih. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi seperti diare dan cacingan, yang berkontribusi langsung terhadap buruknya penyerapan nutrisi pada anak-anak.
3. Rendahnya Pengetahuan Gizi Ibu dan Pola Asuh
Faktor pengetahuan ibu tentang pola makan sehat selama kehamilan dan menyusui, serta praktik pemberian MP-ASI yang tepat, masih menjadi tantangan. Pola asuh yang kurang mendukung pertumbuhan anak menjadi faktor tidak langsung yang signifikan terhadap stunting.

4. Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan

Distribusi tenaga kesehatan dan layanan gizi belum merata di seluruh wilayah Kepulauan Selayar, khususnya di wilayah kepulauan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya layanan pemantauan tumbuh kembang anak dan intervensi dini terhadap masalah gizi.

5. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Faktor kemiskinan turut mempengaruhi daya beli keluarga terhadap makanan bergizi dan akses terhadap layanan kesehatan. Ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah juga menciptakan disparitas dalam pencapaian status gizi anak.

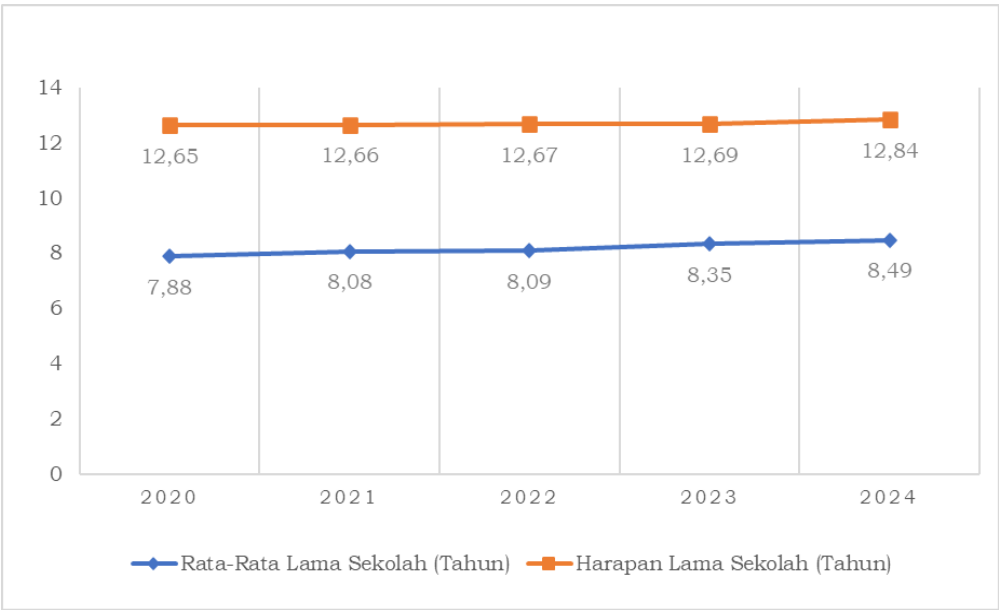
Penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan pendekatan multisektor yang terintegrasi, mencakup perbaikan gizi ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pola asuh dan gizi seimbang.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Besar kecilnya angka ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan keinginan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada angka 8,49. Angka ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berumur 25 tahun keatas dapat bersekolah rata-rata hampir sembilan tahun atau menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 2 SLTP. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingginya angka putus sekolah karena peserta didik yang bekerja membantu ekonomi keluarga. Selain itu, aksesibilitas ke fasilitas pendidikan terutama sekolah menengah atas yang masih belum optimal, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,01 tahun dari 12,66 menjadi 12,67 pada tahun 2022 dan naik menjadi 12,69 pada tahun 2023. Artinya, seorang anak usia 7 tahun saat ini diperkirakan dapat menikmati pendidikan formal selama kurang lebih 13 tahun atau setara dengan menyelesaikan jenjang pendidikan hingga kelas 3 SLTA. Grafik perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.34.**



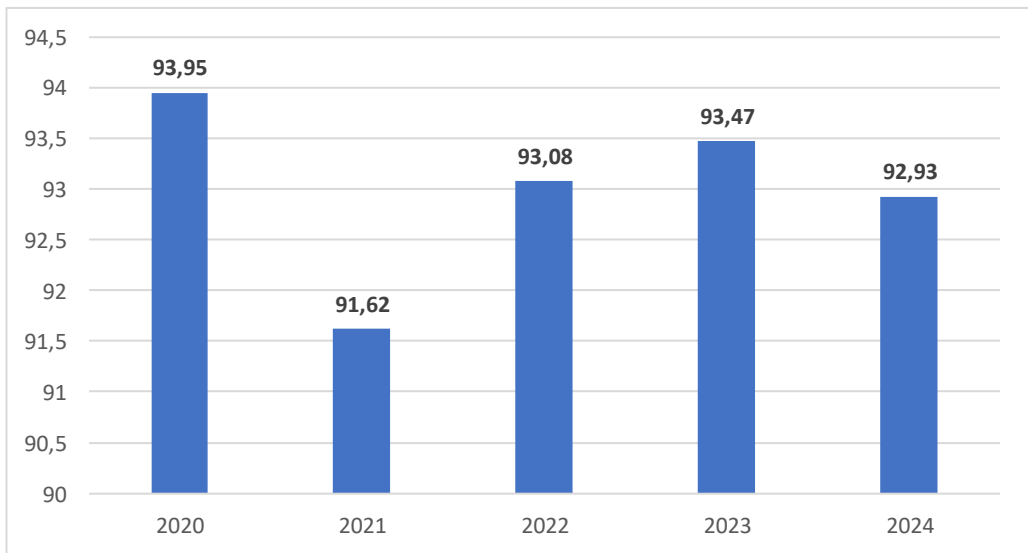
Grafik 2. 34 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan angka HLS tidak terlepas dari kolaborasi dan peran Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah membangun dan merehabilitasi banyak sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya serta disisi lain, kesadaran masyarakat akan pendidikan juga semakin bertambah. Hal ini diperkuat dengan, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memiliki 2 (dua) Perguruan Tinggi sebagai tempat bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan, yaitu kampus vokasi Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITSBM).

2.1.2.3.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, meskipun belum tentu mengerti apa yang di baca/ditulis. Angka melek huruf Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 sampai 2024 selalu berada diatas 90 persen. Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar menurun pada tahun 2021, namun kembali meningkat tiga tahun berikutnya sampai tahun 2023. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat telah mengenyam pendidikan minimal sekolah dasar walaupun banyak dari mereka yang tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya. Dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) SD yang mencapai 97 persen dan APM SMP pada angka 79 persen. Gambaran Angka Melek Huruf tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.35**.



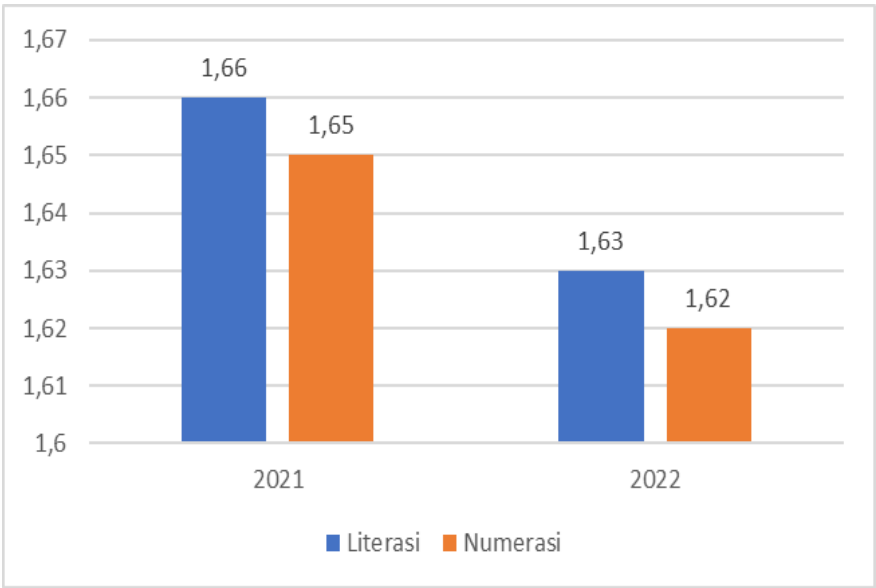
Grafik 2. 35 Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.3. Nilai Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada Asesmen Tingkat Nasional

Pendidikan yang berhasil selain diukur dari tingkat partisipasi sekolah, juga diukur dari kualitas pembelajaran yang dihasilkan oleh para siswa. Kualitas hasil pembelajaran dimaksud diukur menggunakan tingkat literasi dan numerasi dari sebuah satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan kemampuan numerasi paling sedikit 75 persen (level“cakap”) peserta didik pada satuan pendidikan.

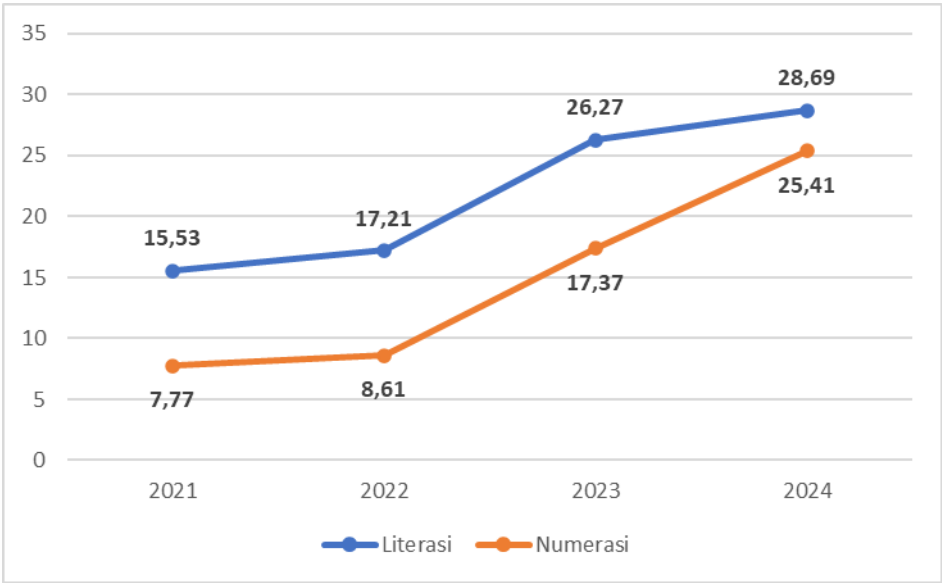
Nilai rata-rata kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada tahun 2022. Oleh karena itu, kedepan pemerintah mendorong peserta didik mencapai kompetensi minimum. Capaian dimaksud dua tahun terakhir terlihat pada **Grafik 2.36.**



Grafik 2. 36 Nilai Rata-Rata Kemampuan Literasi Membaca dan Kemampuan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022
Sumber Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten

Capaian Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada Asesmen Tingkat Nasional (ATN) di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan konsisten selama empat tahun terakhir. Baik pada indikator literasi membaca maupun numerasi, seluruh kurva menunjukkan arah perbaikan yang signifikan, menandakan adanya perbaikan ekosistem pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, untuk kemampuan literasi membaca dan numerasi terlihat pada **Grafik 2.37**.



Grafik 2. 37 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024
Sumber Data: Mendikdasmen diolah, 2025

Pada aspek literasi, capaian SKM meningkat dari 15,53 persen pada tahun 2021 menjadi 17,21 persen (2022), kemudian melonjak tajam mencapai 26,27 persen pada 2023, dan kembali naik menjadi 28,69 persen di tahun 2024. Lonjakan pasca-2022 menunjukkan bahwa berbagai intervensi peningkatan mutu, seperti penguatan budaya literasi sekolah, pengadaan bahan bacaan ramah anak, dan pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis teks, telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan memahami informasi dan mengolah bacaan pada peserta didik. Peningkatan stabil sepanjang tahun menunjukkan bahwa sekolah mulai menerapkan pembelajaran literasi secara lebih sistematis, bukan sekadar aktivitas insidental.

Capaian numerasi memperlihatkan kenaikan yang bahkan lebih tajam. Dimulai dari 7,77 persen pada 2021, sedikit naik menjadi 8,61 persen di tahun 2022, namun mengalami akselerasi besar pada 2023 dengan capaian 17,37 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 25,41 persen pada 2024. Kurva numerasi yang lebih curam mencerminkan bahwa satuan pendidikan di Kepulauan Selayar semakin mampu mengarahkan peserta didik pada kompetensi berpikir matematis dasar, terutama kemampuan menafsirkan informasi kuantitatif dan memecahkan masalah sederhana. Intervensi seperti pelatihan guru matematika berbasis pendekatan numerasi, penggunaan alat peraga konkret, serta penguatan asesmen formatif tampak memberi hasil nyata.

Meskipun capaian numerasi pada awal periode sangat rendah, percepatan kenaikannya menunjukkan adanya *catch-up effect* yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika guru memperoleh pelatihan yang tepat, didukung dengan metode pengajaran yang lebih kontekstual, peserta didik dapat berkembang secara signifikan meskipun memulai dari baseline rendah.

Secara keseluruhan, tren 2021–2024 memperlihatkan dua poin penting. Pertama, gap antara literasi dan numerasi mulai menyempit, terutama setelah 2023. Kedua, laju peningkatan yang konsisten mengonfirmasi bahwa kabupaten ini telah berada pada jalur yang benar menuju pemenuhan standar kompetensi minimum secara lebih merata. Namun demikian, disparitas antarwilayah—khususnya antara kecamatan daratan dan wilayah kepulauan—tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola melalui kebijakan pemerataan layanan pendidikan yang lebih adaptif terhadap konteks geografis.

Peningkatan capaian SKM literasi dan numerasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2021–2024 dipengaruhi terutama oleh penguatan kompetensi guru, perubahan pendekatan pembelajaran, dan pemanfaatan data ATN sebagai dasar perbaikan. Guru mulai menerapkan

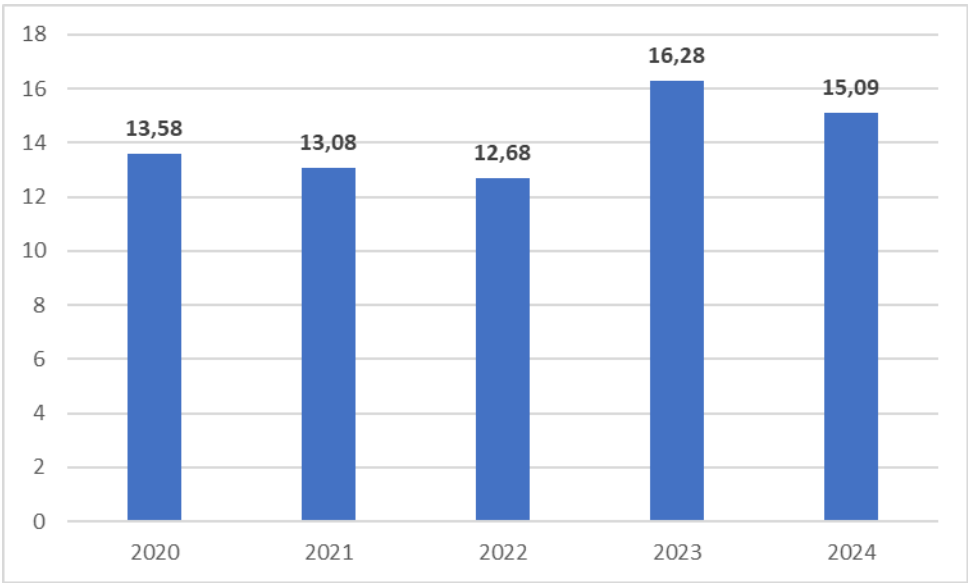
metode yang lebih kontekstual dan berpusat pada pemahaman, baik dalam membaca maupun dalam numerasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Komunitas belajar, pendampingan akademik, serta implementasi Kurikulum Merdeka turut mempercepat perubahan praktik mengajar. Sekolah juga semakin memanfaatkan hasil ATN untuk merancang program remedial, menentukan fokus pembelajaran, dan meningkatkan kualitas supervisi akademik sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran.

Selain itu, penguatan budaya literasi dan numerasi di sekolah, peningkatan tata kelola melalui manajemen berbasis sekolah, dan penyediaan sarana pembelajaran memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan capaian. Lingkungan belajar yang lebih kaya bahan bacaan, penggunaan alat peraga numerasi, serta pengelolaan pembelajaran yang lebih partisipatif mendorong siswa lebih aktif dan percaya diri. Meskipun karakter kepulauan Selayar menghadirkan tantangan seperti akses terbatas, distribusi pengawas yang belum merata, dan fasilitas yang berbeda antarwilayah, upaya pendampingan dan intervensi yang mulai menjangkau sekolah-sekolah terpencil berhasil menekan kesenjangan capaian. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan akselerasi peningkatan yang terlihat jelas terutama pada 2023–2024.

2.1.2.3.5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Capaian indikator ini menurun pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang setelah tamat SMA memilih untuk langsung bekerja di luar daerah dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Capaian indikator ini terlihat pada **Grafik 2.38**.



Grafik 2. 38 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

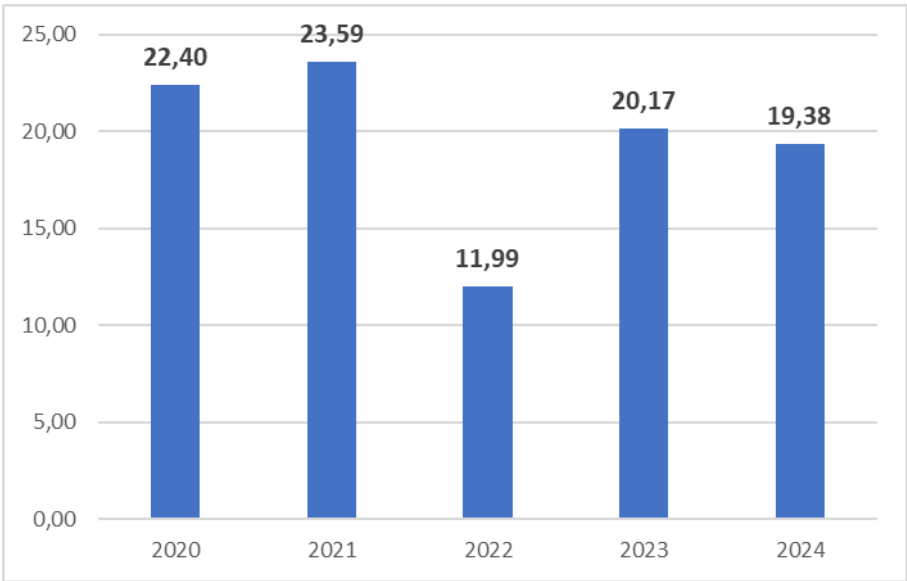
Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terdapat variasi yang signifikan dalam partisipasi kerja kelompok ini. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin besar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil.

Persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menggambarkan kualitas angkatan kerja dari masyarakat yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 mayoritas atau sekitar 38 persen tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SD, 19 persen tenaga kerja yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat pendidikan tinggi.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun capaian indikator ini menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena lulusan pendidikan tinggi mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi. Lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan lulusan perguruan tinggi hanya di sektor pemerintahan sehingga lapangan kerja pada kualifikasi ini cenderung tidak beragam. Lebih lanjut, banyak lulusan pendidikan tinggi yang memilih merantau ke kota besar atau luar daerah karena keterbatasan lapangan kerja

lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal, seperti pertanian yang cenderung tidak mensyaratkan pendidikan tinggi sehingga tidak terdata sebagai pekerja karena status pekerjaan tidak formal.

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir terlihat pada **Grafik 2.39**.



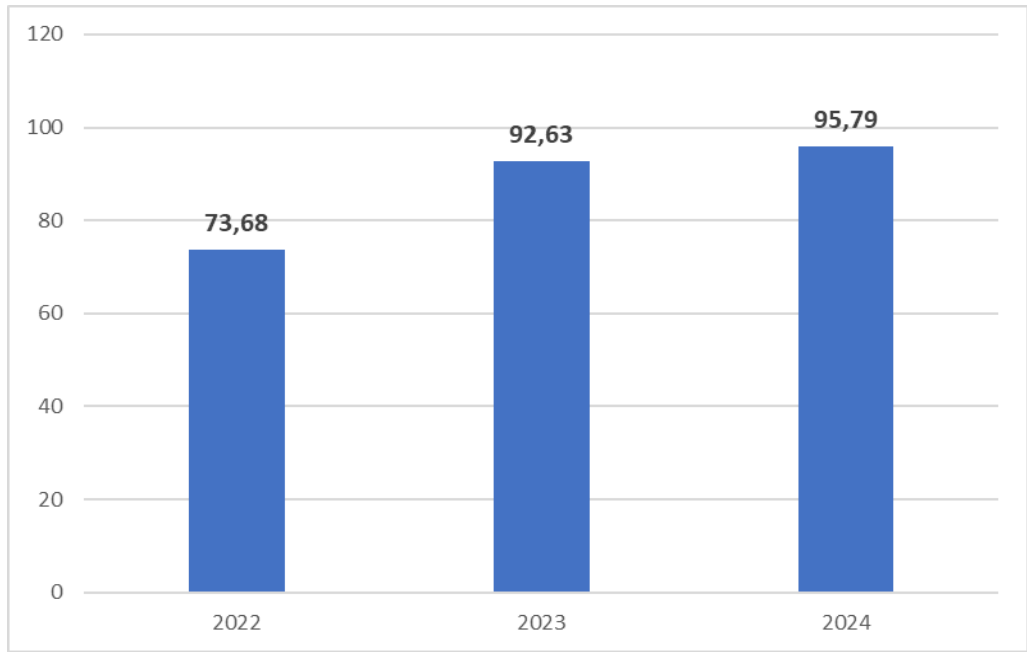
Grafik 2. 39 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.3.7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2024, capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta kerjasama yang baik dari masyarakat. Beberapa upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, antara lain : pemerataan layanan perpustakaan di desa, mencukupkan koleksi dan tenaga perpustakaan, serta sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan pembinaan pada perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah sehingga semakin banyak perpustakaan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ber-Standar

Nasional Perpustakaan (SNP). Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran IPLM untuk kabupaten/kota dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI yang dimulai pada tahun 2022, maka capaian IPLM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sampai 2024 terlihat pada **Grafik 2.40**.



Grafik 2. 40 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024

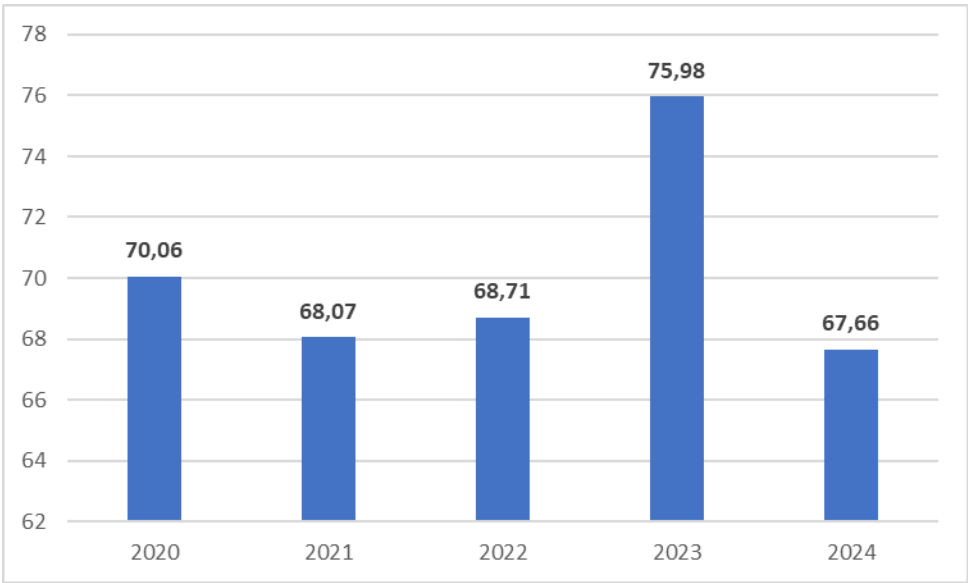
Sumber Data: Perpustakaan Nasional RI, 2025

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja memiliki capaian yang fluktuatif. Hal ini disebabkan banyak tenaga kerja di sektor informal (petani, nelayan, pedagang kecil) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial karena tidak terdaftar sebagai pemberi kerja, kurangnya pemahaman tentang manfaat kepesertaan, serta ketidakmampuan membayar iuran secara mandiri. Lebih lanjut, masih ada beberapa perusahaan atau pelaku usaha belum mendaftarkan pekerjanya karena ingin menghindari biaya iuran tambahan. Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.41**.



Grafik 2. 41 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Informal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, 2025

2.1.2.4.2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, yang meliputi : (1) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, (2) memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, (3) memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, (4) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, (5) mendapatkan program kembali bekerja, (6) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, (7) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, (8) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Melihat hal tersebut, seluruh pemerintah di berbagai tingkatan baik dari pusat maupun daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar wajib mengakomodir masyarakat disabilitas untuk bekerja di berbagai sektor terkhusus pada sektor formal. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumlah masyarakat disabilitas pada tahun 2023 sebanyak 607 orang. Dari 607 orang, 380 orang atau sekitar 62,6 persen tidak bekerja, 34 orang atau sekitar 5,6 persen berprofesi sebagai pelajar, 10 orang sebagai buruh, 31 orang sebagai petani, serta 152 orang atau 25,04

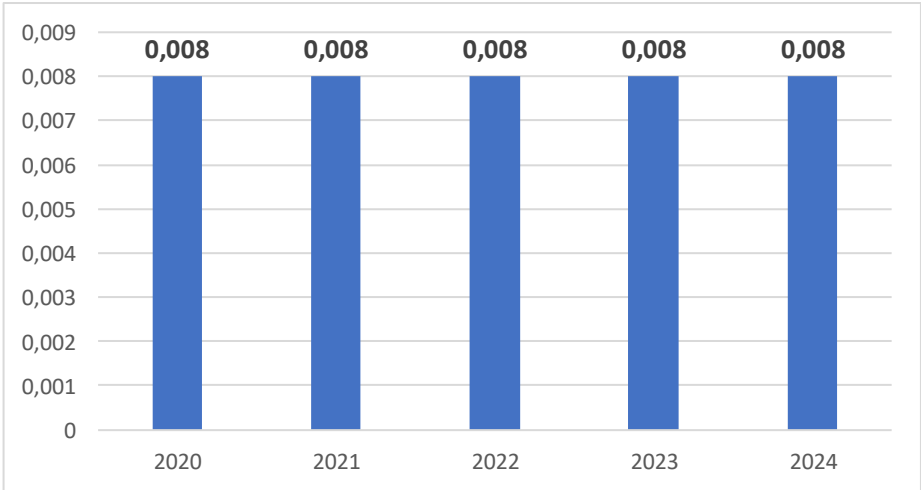
persen yang bekerja di sektor lainnya. Jumlah penyandang disabilitas menurut tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis penghasilan tertera pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2. 18
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Jenis Penghasilan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Pendidikan (Orang)				
Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma
301	204	47	54	1
Penghasilan per bulan (Orang)				
0	1 - 500 ribu	500.001 - 1 juta	lebih 1,5 juta	
546	55	4	2	
Pekerjaan (Orang)				
tidak bekerja	pelajar/ mahasiswa	buruh	petani	lainnya
380	34	10	31	152

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Tahun 2020 sampai 2024, dari 607 disabilitas di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 5 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal dan/atau sektor pemerintahan sehingga persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal pada Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.42**.



Grafik 2. 42 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2.1.2.5.1. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui berbagai instansi seperti Kementerian Agama (Kemenag), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penggerak PKK, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda secara aktif memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan di wilayah ini. Dukungan tersebut mencakup penyelenggaraan

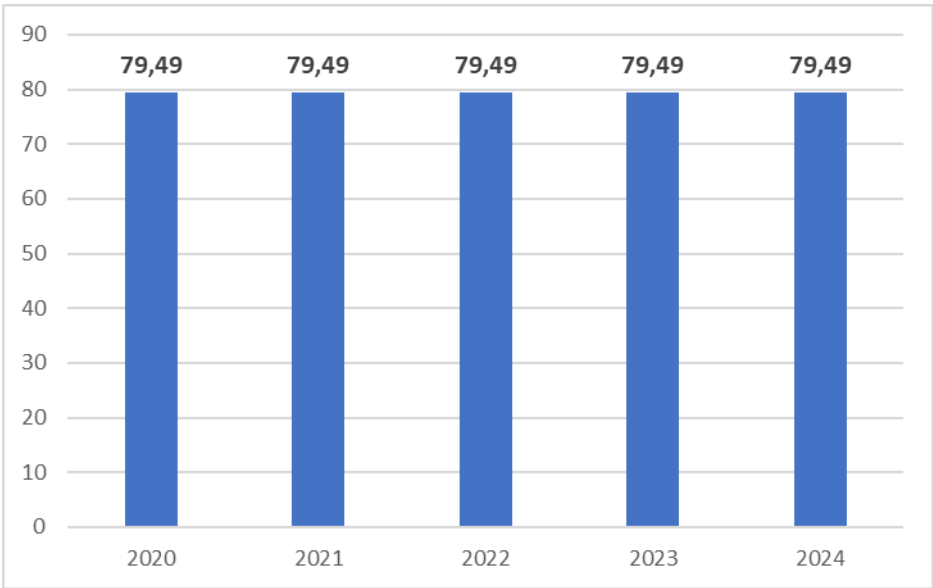
pelatihan, sosialisasi, deklarasi, dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah, serta kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu memberikan dukungan baik itu dukungan kebijakan ataupun dukungan anggaran terhadap seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, capaian untuk indikator ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 100 persen.

2.1.2.5.2. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Sejatinya, cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Oleh karena itu, suatu tempat harus punya ciri khas dan daya tarik wisata maupun atraksi di dalamnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 39 cagar budaya yang dilestarikan dan diregistrasi. Dari tahun 2020 hingga 2024 dari 36 cagar budaya yang dilestarikan baru 31 cagar budaya yang telah ditetapkan. Namun capaian indikator ini tidak berubah sampai tahun 2024 disebabkan oleh belum ada lagi benda, bangunan ataupun situs yang didaftarkan atau diregistrasi menjadi cagar budaya sejak tahun 2018. Capaian ini selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.43**.



Grafik 2. 43 Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

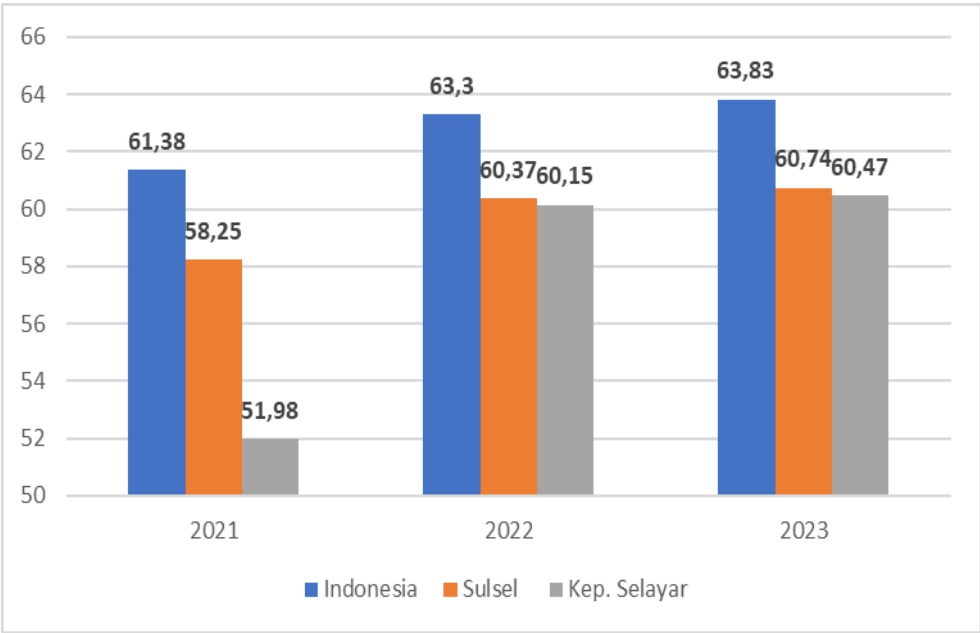
Salah satu visi utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas emas. Perwujudan SDM yang berkualitas emas di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Hal ini penting karena anak-anak Indonesia memegang peranan penting dalam upaya perwujudan Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki mandat bagi penciptaan generasi Indonesia Emas 2045. Melalui berbagai program dan kebijakan, Kemen PPPA berfokus pada upaya perlindungan dan penjaminan hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diharapkan sebanyak 79,5 juta anak (0-17 tahun) di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berkarakter.

Tingginya kasus-kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima klaster, sebagai berikut : Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus

Capaian IPA untuk tingkat kabupaten/kota baru diukur sejak tahun 2021 oleh Kemen PPA, dimana capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sampai tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan capaian IPA Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Jika dilihat dari 5 indeks komposit pembentuk IPA dimaksud, Indeks Klaster 1 yang terkait dengan hak sipil dan kebebasan yang capaiannya lebih rendah dengan rata-rata capaian IPA Sulawesi Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal dimaksud antara lain masih rendahnya partisipasi anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar. Lebih lanjut, masih kurangnya anak yang pernah mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Selain itu, tingginya angka stunting juga sangat berpengaruh terhadap capaian tersebut. Hal ini

menunjukkan masih perlunya dukungan perlindungan dan membangun resiliensi bagi anak-anak khususnya usia dini hingga usia 18 tahun

Meskipun capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dari capaian IPA Sulawesi Selatan dan nasional, namun selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023 terus meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin berkurangnya perkawinan anak, angka partisipasi sekolah anak yang cukup tinggi, serta jaminan kesehatan pada anak khususnya kategori miskin yang telah ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Capaian IPA Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional terlihat pada **Grafik 2.44**.



Grafik 2. 44 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023
Sumber Data: Kemen PPA, 2025

2.1.2.6.2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan dengan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga terdiri atas 3 dimensi, yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.

Kabupaten Kepulauan Selayar baru melakukan pengukuran terhadap capaian indeks dimaksud pada tahun 2022. Dari hasil pengukuran, capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat selama tiga tahun terakhir, dapat diartikan bahwa pembangunan kualitas keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori cukup responsif gender dan anak. Kondisi ini menunjukkan kualitas pengasuhan anak dan pemenuhan kewajiban orang tua / keluarga terhadap anak masih

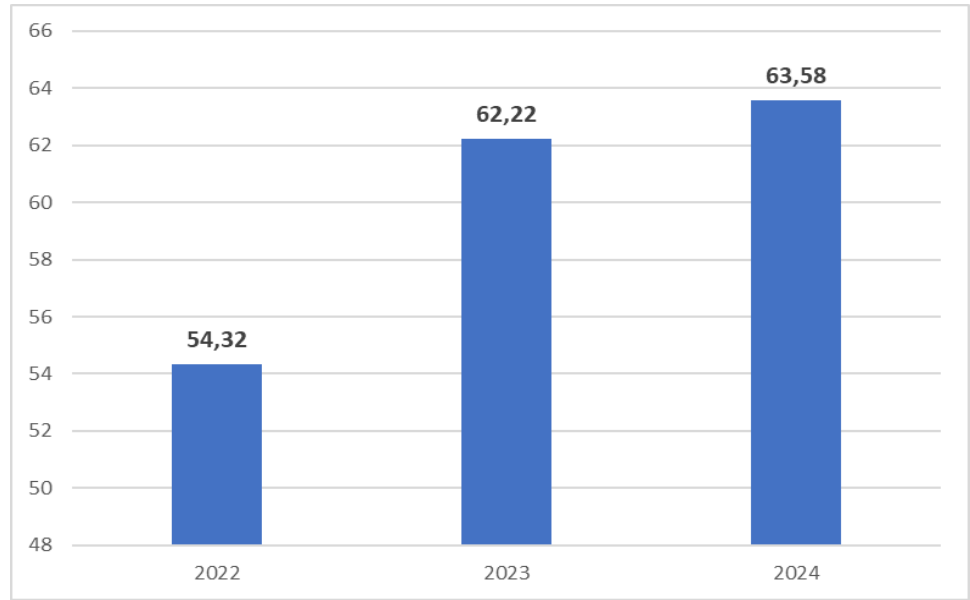
menjadi prioritas kedepan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai intervensi kebijakan dan program yang terintegrasi, antara lain:

1. Program Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia yang memperkuat peran keluarga dalam mendidik dan melindungi anggotanya.
2. Peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, KB, dan gizi keluarga.
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan.

Beberapa faktor kunci yang mendukung peningkatan kualitas keluarga di daerah, antara lain:

1. Komitmen lintas sektor, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan lembaga sosial.
2. Pemanfaatan data *by name by address* melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk penentuan sasaran program secara tepat.
3. Peran aktif kader dan kelompok masyarakat, seperti kelompok UPPKA, PIK Remaja, dan Pusyan Gatra.
4. Peningkatan edukasi keluarga melalui penyuluhan, konseling, dan kampanye keluarga berketahanan.

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.45**.



Grafik 2. 45 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024

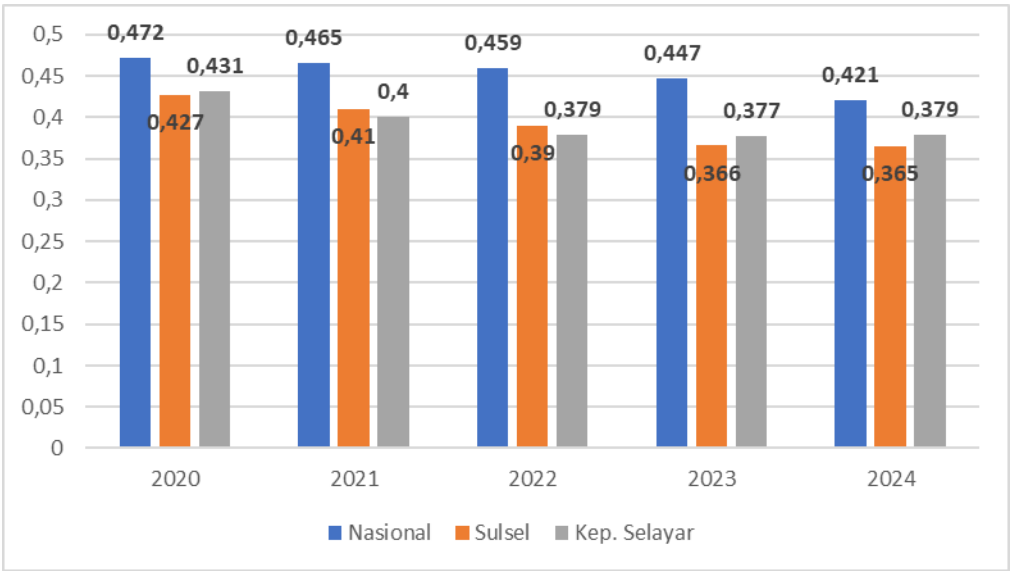
Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yaitu

kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender, meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 sampai 2023, namun sedikit meningkat pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki dari tahun ke tahun lebih setara, ditandai dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang semakin meningkat selama kurun waktu dimaksud. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.46**.



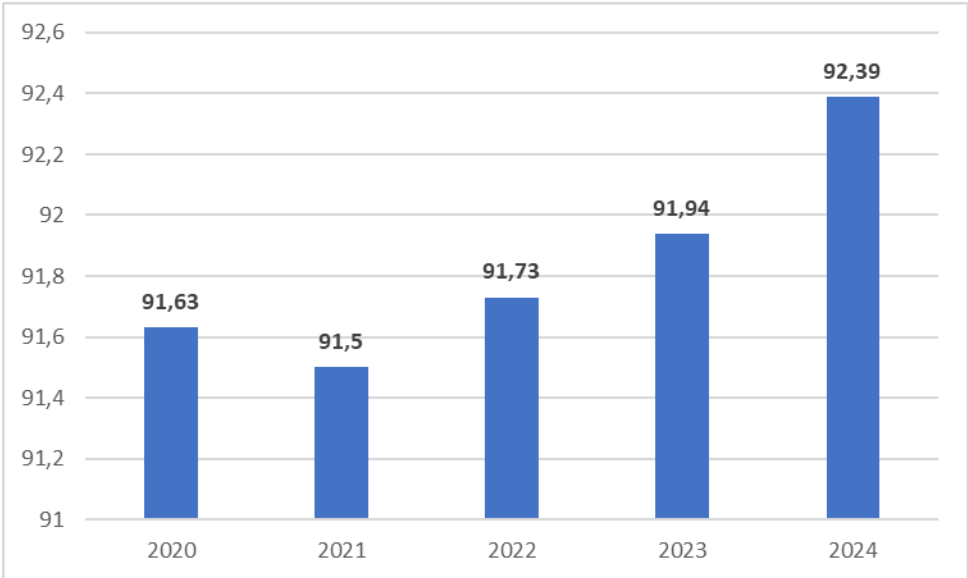
Grafik 2. 46 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPG dihitung dengan membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki, sehingga mencerminkan tingkat keadilan gender dalam pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat IPG sebesar 92,39. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pencapaian pembangunan perempuan telah mencapai 92,39 persen dari pencapaian laki-laki. Meskipun masih terdapat kesenjangan, nilai ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.47**.



Grafik 2. 47 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender didukung oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan: Program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan telah menunjukkan hasil positif, dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan tingkat melek huruf di kalangan perempuan.
2. Peningkatan Kesehatan Perempuan: Upaya dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, serta program kesehatan reproduksi, telah berkontribusi pada peningkatan harapan hidup perempuan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Inisiatif untuk memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti:

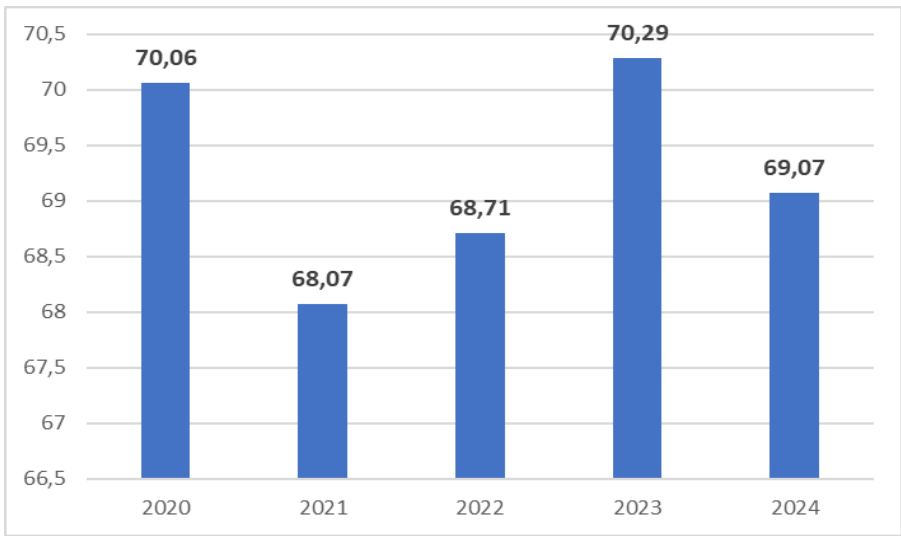
1. Kesenjangan Pendapatan: Perempuan cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang dapat mempengaruhi standar hidup layak.
2. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam kebijakan publik.

Mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam mendorong kebijakan dan program yang responsif gender. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.2.6.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta mengakses sumber daya ekonomi. IDG mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam tiga dimensi utama: partisipasi politik, pengambilan keputusan ekonomi, dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki capaian yang fluktuatif selama lima tahun terakhir, namun, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang juga menurun pada tahun 2024. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.48**.



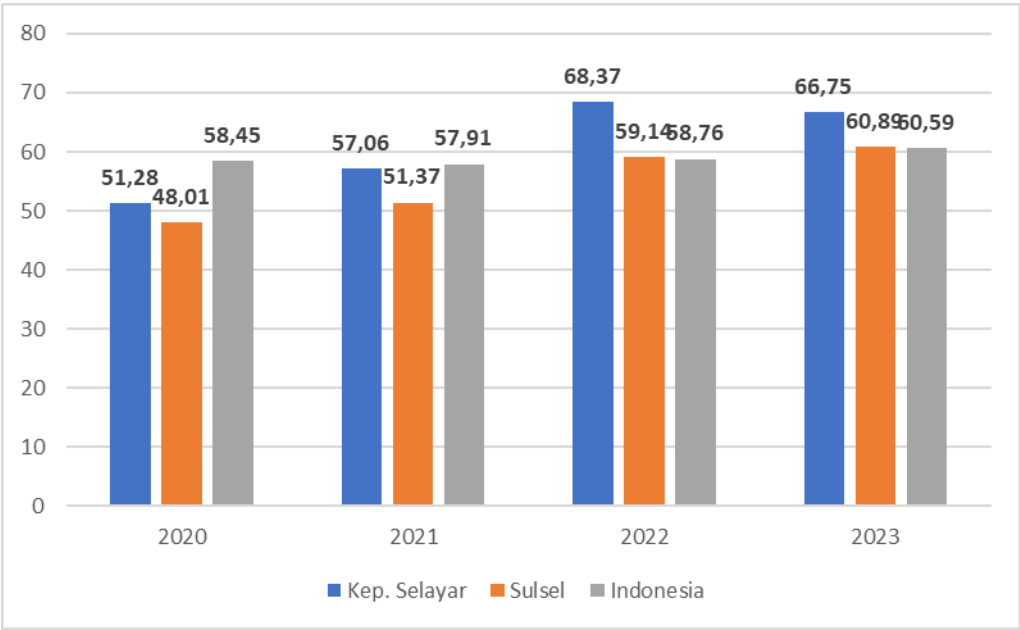
Grafik 2. 48 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan kepemudaan dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nilai IPP menjadi gambaran seberapa jauh pemuda memiliki kualitas, kapasitas, serta ruang partisipasi dalam pembangunan daerah.

Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi aspek strategis mengingat komposisi penduduk usia muda cukup besar dan memiliki peran penting sebagai agen perubahan, inovator, sekaligus motor penggerak pembangunan. Tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya akses pemuda terhadap pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, keterbatasan lapangan pekerjaan formal, serta rendahnya partisipasi pemuda dalam ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, peluang besar juga terbuka melalui penguatan kewirausahaan pemuda, pemanfaatan teknologi digital, serta pemberdayaan pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2023 terlihat pada **Grafik 2.48**.

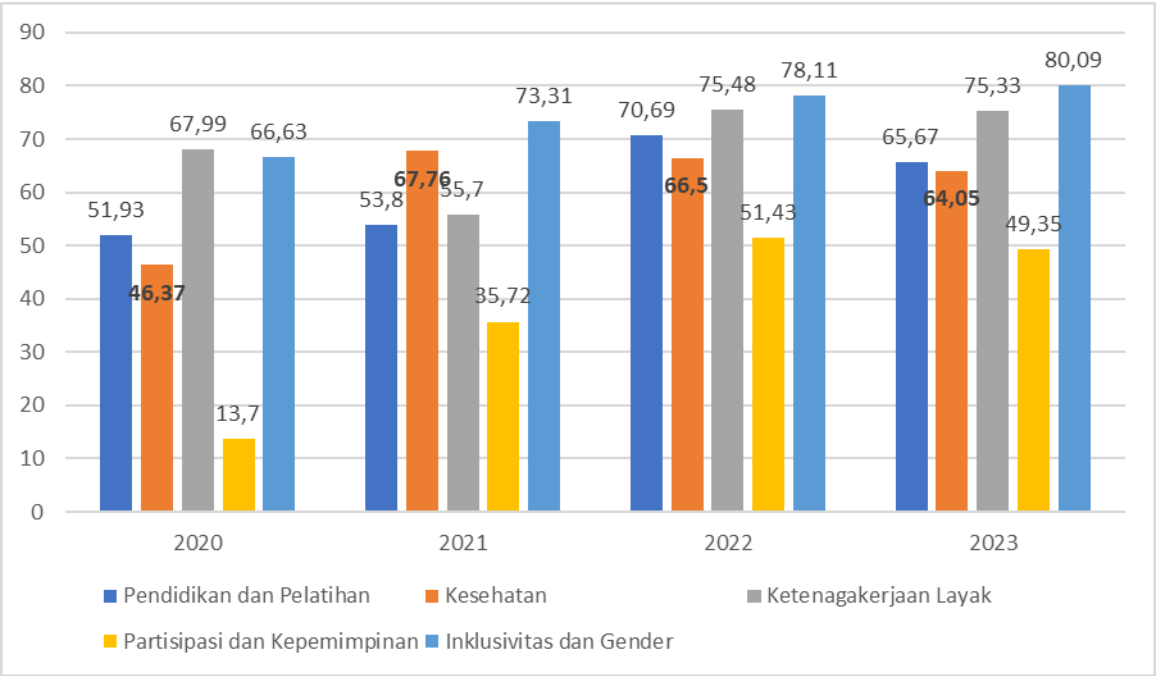


Grafik 2. 49 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023

Sumber Data: Bappenas, 2025

Berdasarkan **Grafik 2.49**, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 lebih tinggi dari capaian indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan serta capaian IPP nasional. Namun jika dilihat dari tren capaian, capaian IPP Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dari tahun 2020 sampai tahun

2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari domain pembentuknya, penurunan capaian IPP Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh penurunan capaian pada domain pendidikan dan pelatihan, kesehatan, serta partisipasi dan kepemimpinan. Capaian ini selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.50**.



Grafik 2. 50 Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023

Sumber Data: Bappenas, 2025

Berdasarkan **Grafik 2.50**, penurunan capaian yang paling signifikan pada tahun 2023 terjadi pada domain pendidikan dan pelatihan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesempatan pelatihan keterampilan bagi pemuda. Program pelatihan kerja dan keterampilan vokasi yang disediakan pemerintah maupun swasta belum merata, baik dari sisi jumlah maupun jangkauan wilayah. Hal ini membuat banyak pemuda, khususnya di desa-desa terpencil, tidak memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lebih lanjut bahwa berdasarkan data BPS, angka partisipasi murni di semua jenjang sekolah pada tahun 2023 mengalami penurunan. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah, terutama pada jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi, masih rendah. Banyak pemuda yang setelah lulus SMP atau SMA memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dibanding melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, domain IPP Kabupaten Kepulauan Selayar yang juga mengalami penurunan pada tahun 2023 adalah domain partisipasi dan kepemimpinan. Domain dimaksud juga merupakan domain dengan capaian terendah dari lima domain pembentuk IPP Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain : terbatasnya ruang partisipasi

formal bagi pemuda; keterlibatan pemuda dalam forum-forum perencanaan pembangunan, musyawarah desa, maupun organisasi kemasyarakatan masih relatif rendah; pemuda seringkali belum diposisikan sebagai subjek pembangunan, melainkan hanya sebagai objek kegiatan. Selain itu, banyak pemuda yang lebih fokus pada pekerjaan atau mencari nafkah sehingga kurang melibatkan diri dalam kegiatan sosial maupun organisasi kepemudaan. Kondisi ini membuat ruang partisipasi mereka terpinggirkan.

Peningkatan nilai IPP di Kepulauan Selayar ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi keterampilan pemuda, memperluas kesempatan kerja serta kewirausahaan, memperkuat akses layanan kesehatan dan gizi remaja, serta menciptakan ruang-ruang partisipasi pemuda dalam pengambilan kebijakan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemuda di Kepulauan Selayar diharapkan mampu berdaya saing, memiliki integritas, serta berkontribusi dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah kepulauan.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mempunyai pendapatan yang besar pula. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 982.570 Rupiah, turun menjadi 967.487 Rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari pandemi *Covid-19* sampai akhir tahun 2021 bahkan masih berlanjut sampai saat ini dengan berbagai varian baru. Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang didorong oleh adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, sehingga mendorong pendapatan yang lebih tinggi, daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapitra tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.19**.

Tabel 2. 19

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Ribu Rp.	982.570	967.487	996,286	1.054.071	1.111.674

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.1.2. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani, NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib). Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Selain nilai tukar nelayan, digunakan pula Nilai Tukar Pembudidaya untuk mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menyajikan data NTP dan NTN kabupaten, sehingga menggunakan data NTP dan NTN Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan. Data NTP pada tahun 2020 sebesar 97,86 meningkat menjadi 121,01 pada 2024. Sedangkan untuk NTN dan Nilai tukar pembudidaya hanya tersedia data dari tahun 2022 sampai tahun 2024, selengkapnya tertera pada **Tabel 2.20**.

Tabel 2. 20
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Gabungan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan	Poin	97,86	100,37	101,12	114,25	121,01
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Gabungan	Poin	-	-	109,29	111,49	111,92
Nilai Tukar Pembudidaya Gabungan	Poin	-	-	109,98	111,35	106,84

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.1.3. Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tingginya persentase desa berstatus swasembada menandakan bahwa semakin banyak desa dalam suatu daerah yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Namun sejak tahun 2019, status desa swasembada diganti menjadi desa maju yang tergambar dari Indeks Desa Membangun (IDM). Persentase desa berstatus swasembada/ desa maju di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 sebesar 3,75 persen, meningkat menjadi 48,14 persen pada tahun 2024. Data selengkapnya tertera pada **Tabel 2.21**.

Tabel 2. 21
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	3,75	10,00	27,16	38,27	48,14

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.1.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah (tergolong daerah maju, sedang berkembang atau daerah yang tertinggal). Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun berfluktuasi, namun menunjukkan tren menurun mulai dari tahun 2020 sampai 2024, yang selengkapnya tertera pada **Tabel 2.22**.

Tabel 2. 22
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	32.356	32.356	31.600	32.126	31.789
2	Jumlah Penduduk usia 15-64 Tahun	93.749	93.749	95.709	97.824	98.605
3	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	10.966	11.869	11.836	12.150	12.702
4	Rasio Ketergantungan	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Angka ketergantungan semakin menurun, menunjukkan proporsi penduduk usia produktif semakin dominan dalam struktur kependudukan. Angka ketergantungan Kabupaten Kepulauan Selayar beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan, ini menunjukkan bahwa daerah ini mulai memasuki fase bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menjadi tanggungan (anak-anak dan lansia).

Kondisi ini menciptakan peluang emas bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah, karena lebih banyak penduduk berada pada usia kerja yang produktif akan berpotensi mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, seperti perikanan, pariwisata, pertanian, dan UMKM. Namun, untuk benar-benar memanfaatkan momentum bonus demografi ini, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat, antara lain melalui:

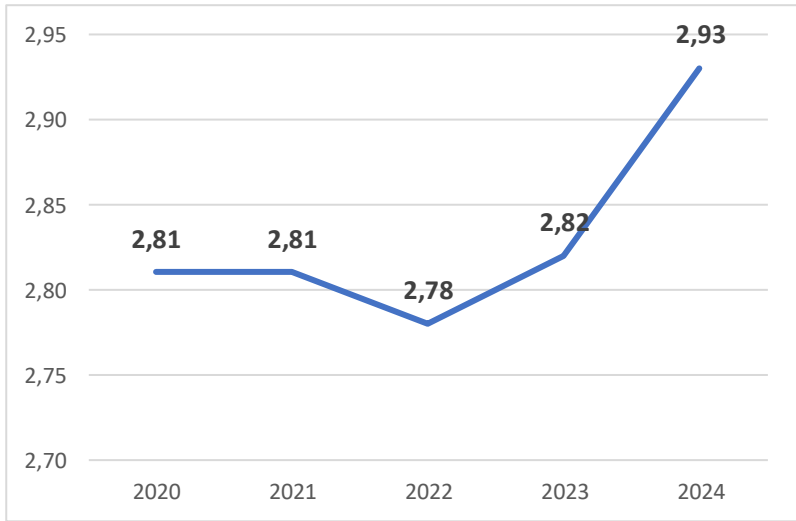
1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan vokasi;
2. Penyediaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas;
3. Penguatan sektor kesehatan, terutama layanan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi;
4. Pemberdayaan generasi muda dan perempuan agar berkontribusi secara optimal dalam pembangunan.

Bonus demografi jika tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi beban demografi, dimana angkatan kerja yang besar menjadi pengangguran karena tidak terserap oleh pasar kerja. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengubah struktur demografi yang menguntungkan ini menjadi *dividen* ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kepulauan Selayar.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan kontribusi pendapatan dari sektor industri pengolahan terhadap seluruh pendapatan masyarakat pada tahun berlaku. Melihat capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. (masih dibawah 3 persen). Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.51**.



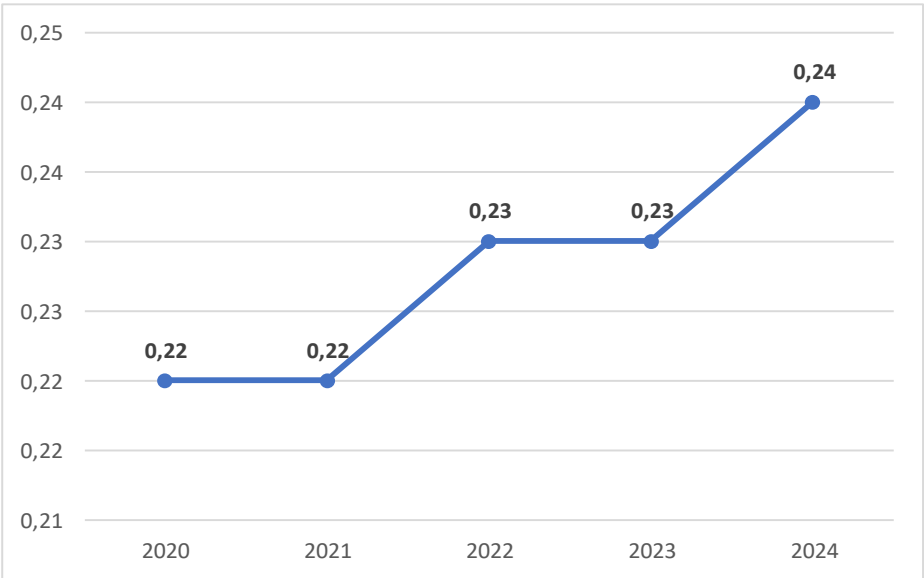
Grafik 2. 51 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Rendahnya PDRB sektor industri pengolahan disebabkan oleh belum adanya industri besar di Kepulauan Selayar, industri masih didominasi oleh industri mikro, kecil dan menengah. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan oleh sebagian besar Industri Kecil Menengah (IKM) belum memiliki pasar yang luas baik itu di kalangan masyarakat Kepulauan Selayar maupun pasar ekspor ke luar wilayah. Lebih lanjut, hilirisasi produk-produk unggulan belum terlaksana secara optimal serta industrialisasi sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi andalan dari Kabupaten Kepulauan Selayar belum terlaksana secara optimal dikarenakan keterbatasan APBD yang diikuti oleh tidak optimalnya investasi untuk mengembangkan dua sektor ini.

2.1.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

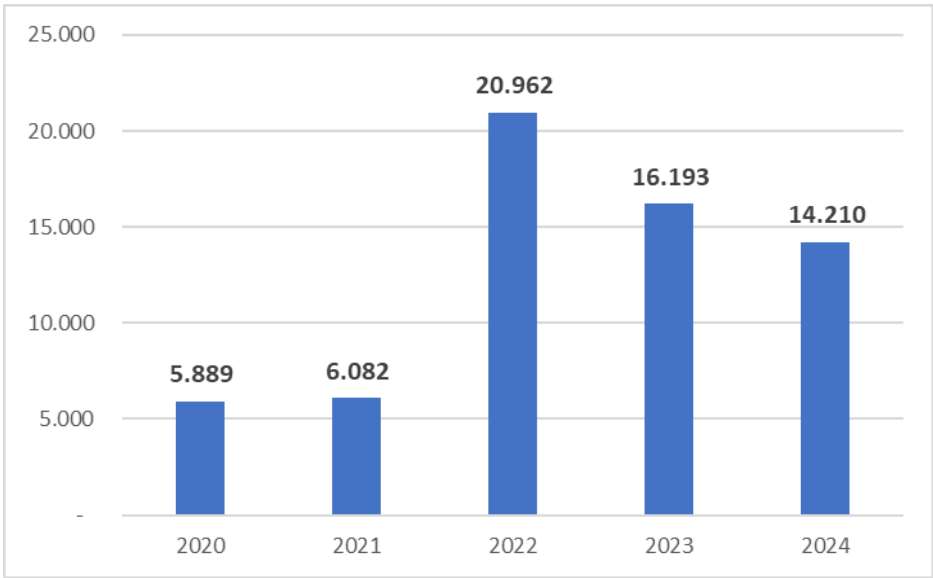
Rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB menggambarkan kontribusi pendapatan dari sektor akomodasi dan makan minum terhadap seluruh pendapatan masyarakat pada tahun berlaku. Indikator dimaksud dapat menggambarkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PDRB sektor harga berlaku. Capaian indikator rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 sampai 2024 masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi dari sektor akomodasi, makan dan minum yang berkisar 0,2 persen selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2024. Kedepan ketersediaan objek wisata andalan terus dipercepat pembangunannya sebagai komponen terpenting untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan yang secara langsung dapat meningkatkan kontribusi jasa akomodasi dan makan minum pada PDRB. Capaian rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.52**.



Grafik 2. 52 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Rendahnya pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkhusus pada saat dunia dilanda pandemi *Covid-19*, namun mengalami lonjakan kunjungan pasca pandemi pada tahun 2022 yang dipengaruhi oleh beberapa pelaksanaan event-event tingkat provinsi dan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.53**.



Grafik 2. 53 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan menjadi sinyal penting bagi sektor pariwisata daerah untuk mengevaluasi strategi dan kesiapan dalam menjaga daya tarik destinasi wisata. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut, antara lain:

1. Tingginya biaya akses transportasi ke Kepulauan Selayar, terutama dari wilayah Sulawesi Selatan dan luar provinsi;
2. Terbatasnya kapasitas akomodasi dan layanan pendukung wisata, terutama pada musim libur;
3. Kurangnya promosi wisata yang konsisten dan terintegrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional;
4. Fluktuasi kondisi cuaca dan infrastruktur seperti pelabuhan atau bandara yang bisa mempengaruhi kenyamanan wisatawan.

Meskipun demikian, potensi wisata Kepulauan Selayar tetap besar, terutama di sektor ekowisata bahari, selam, dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, seperti:

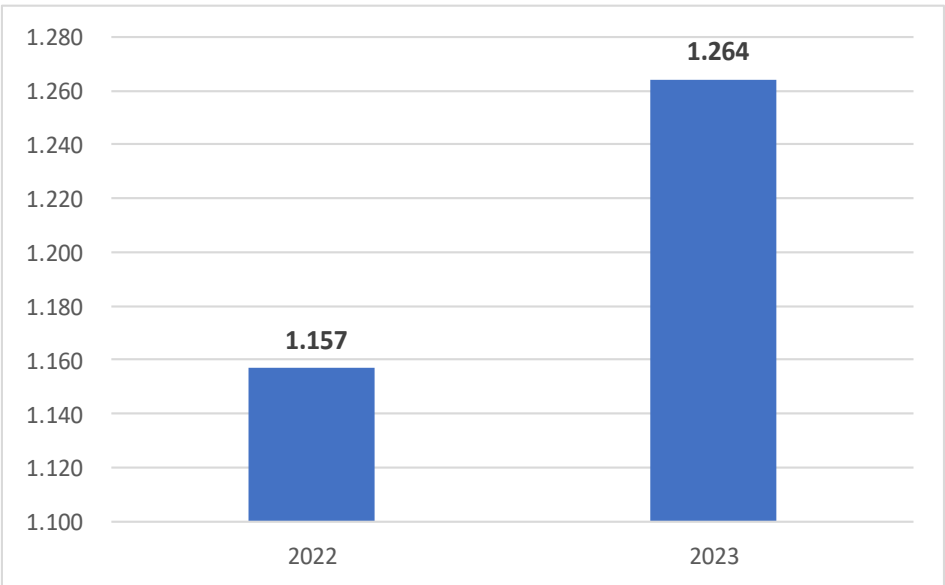
1. Peningkatan promosi digital dan kemitraan dengan agen perjalanan;
2. Penguatan infrastruktur transportasi dan pariwisata;
3. Pelatihan SDM pelaku pariwisata lokal;
4. Dukungan anggaran dan regulasi yang pro-investasi wisata.

2.1.3.2.4. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Industri ekonomi kreatif adalah industri yang berkontribusi oleh aktivitas ekonomi yang bersumber dari ekonomi kreatif, aktivitas dimaksud terdiri dari 17 subsektor yaitu fesyen, kuliner, kriya, film, animasi dan video, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain

komunikasi visual, televisi dan radio, seni rupa, desain produk, periklanan, penerbitan, arsitektur, desain interior.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah industri ekonomi kreatif pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 bahwa 92 persen lebih dari seluruh industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah industri yang bergerak di sektor ekonomi kreatif berupa industri kuliner, kerajinan, sandang atau pakaian dan industri lainnya. Beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya industri ekonomi kreatif adalah peran pemerintah dalam mengembangkan industri-industri ekonomi kreatif melalui beberapa pelatihan serta pemberian bantuan peralatan dalam menunjang berkembangnya industri di sektor ekonomi kreatif. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.54**.

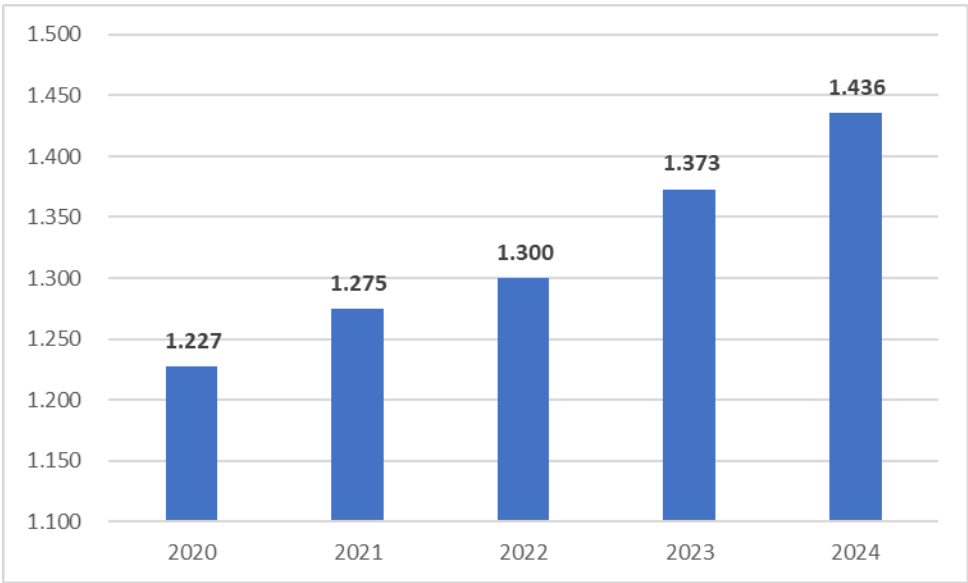


Grafik 2. 54 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.5. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sesuai data dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak memiliki industri dengan kategori mikro dan belum memiliki industri besar, hanya memiliki industri kategori kecil dan menengah. Oleh karena itu, proporsi jumlah industri kecil dan menengah tidak dapat dihitung. Terkait dengan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah IKM terus meningkat dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Jumlah IKM dimaksud terlihat pada **Grafik 2.55**.

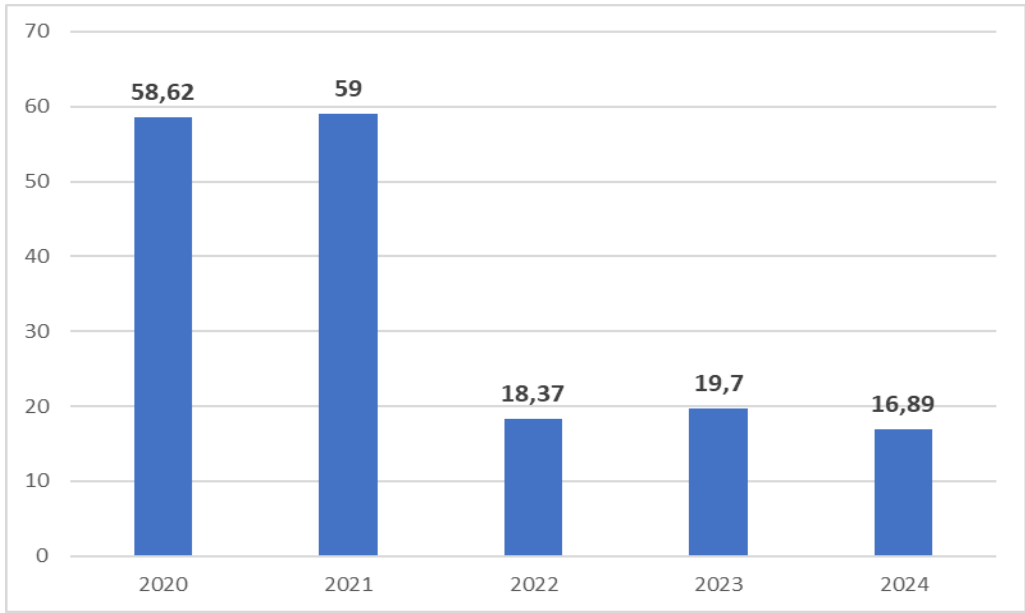


Grafik 2. 55 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.6. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 - 100 dalam penilaian kesehatan koperasi, meliputi 4 aspek pemeriksaan, yaitu: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami penurunan terutama pada tahun 2022 yang menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data koperasi melalui sistem *Online Data System* (ODS), sehingga banyak koperasi yang tidak aktif atau fiktif akhirnya dihapus dari data koperasi sehat. Namun secara umum, kurangnya koperasi kategori sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh proses revitalisasi koperasi masih belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam hal peningkatan kapasitas manajemen, tata kelola, dan pelaporan keuangan. Masih banyak koperasi masih memiliki manajemen yang lemah, tidak transparan, dan kurang akuntabel. Selain itu, akibat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar menyebabkan banyak koperasi menghadapi masalah likuiditas, penurunan omset, dan meningkatnya kredit macet, khususnya koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.56**.

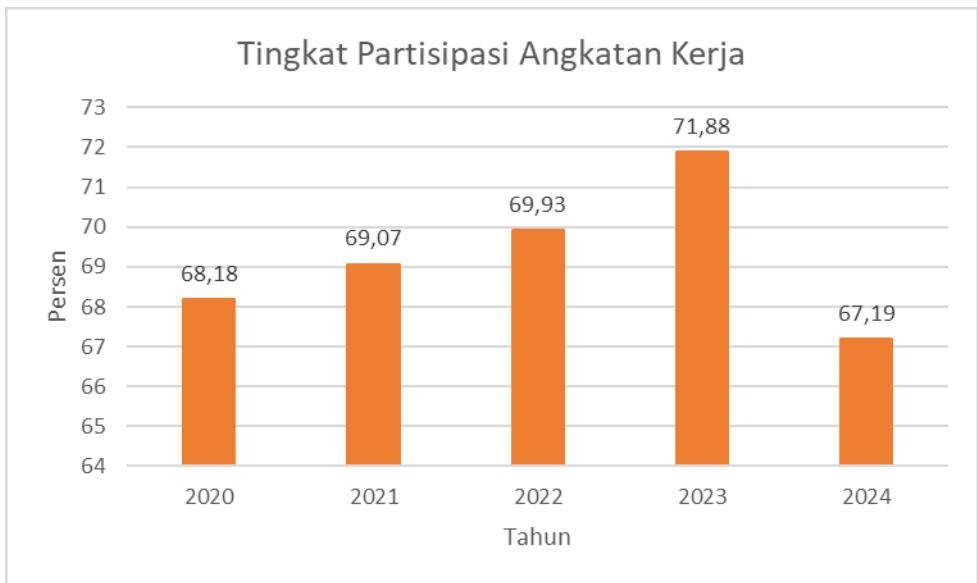


Grafik 2. 56 Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.3.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio antara angkatan kerja dan total penduduk dengan rentang usia yang sama. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 sebesar 68,18 persen, meningkat menjadi 71,88 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 67,19. Hal ini disebabkan karena bertambahnya penduduk yang bukan angkatan kerja pada tahun 2024. Berdasarkan data dari BPS, sekitar 4.000 lebih masyarakat terutama perempuan yang berhenti bekerja untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, masih kurangnya lapangan pekerjaan mengakibatkan sebagian penduduk usia kerja memilih tidak aktif mencari kerja atau melakukan migrasi ke daerah lain untuk mencari kerja sehingga mengurangi jumlah penduduk yang tercatat aktif bekerja secara lokal. TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 terlihat pada **Grafik 2.57.**



Grafik 2. 57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

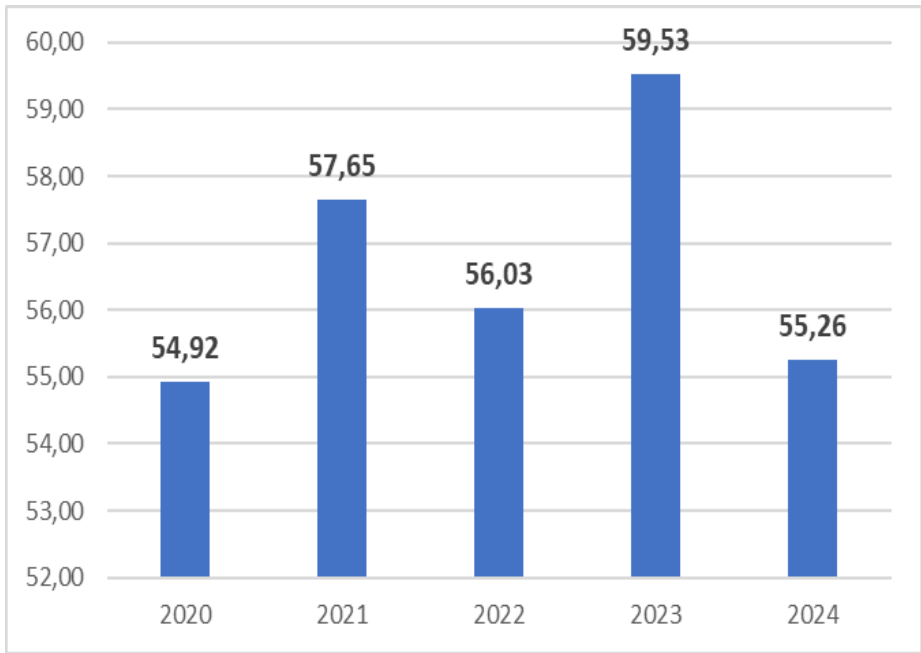
2.1.3.2.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024. Data tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sudah berada diatas 50 persen, ini menunjukkan bahwa perempuan usia produktif (berusia 15 tahun keatas) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagian besar sudah bekerja untuk mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga. TPAK Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.58**.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan pada tahun 2024, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Beban ganda: Perempuan sering menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam angkatan kerja.
2. Akses terbatas terhadap peluang kerja: Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilan perempuan dapat menyebabkan penurunan partisipasi mereka dalam angkatan kerja.

- 3. Norma sosial dan budaya: Norma yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.
- 4. Kurangnya pelatihan dan pendidikan: Keterbatasan dalam pelatihan dan pendidikan yang relevan dapat menghambat kemampuan perempuan untuk memasuki pasar kerja



Grafik 2. 58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

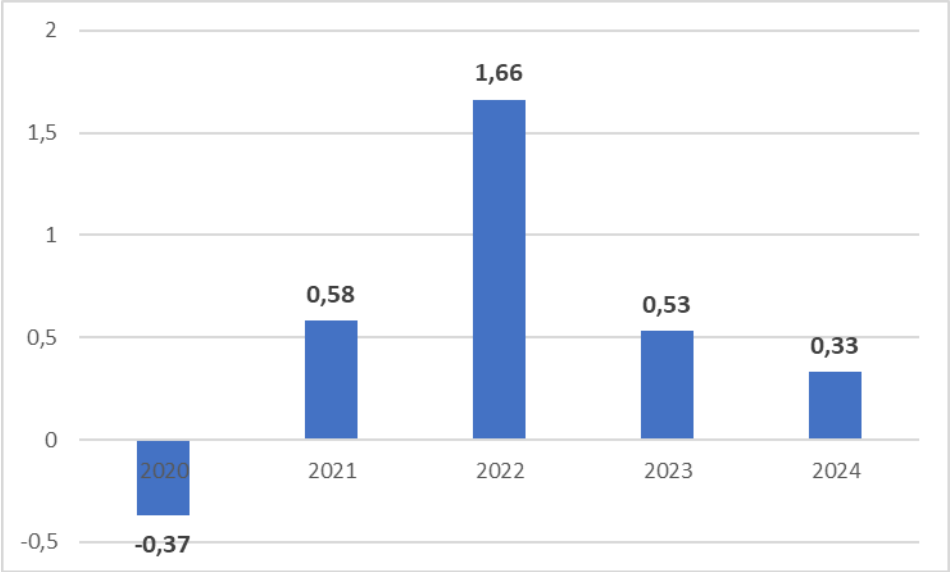
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.9. Return on Aset (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama.

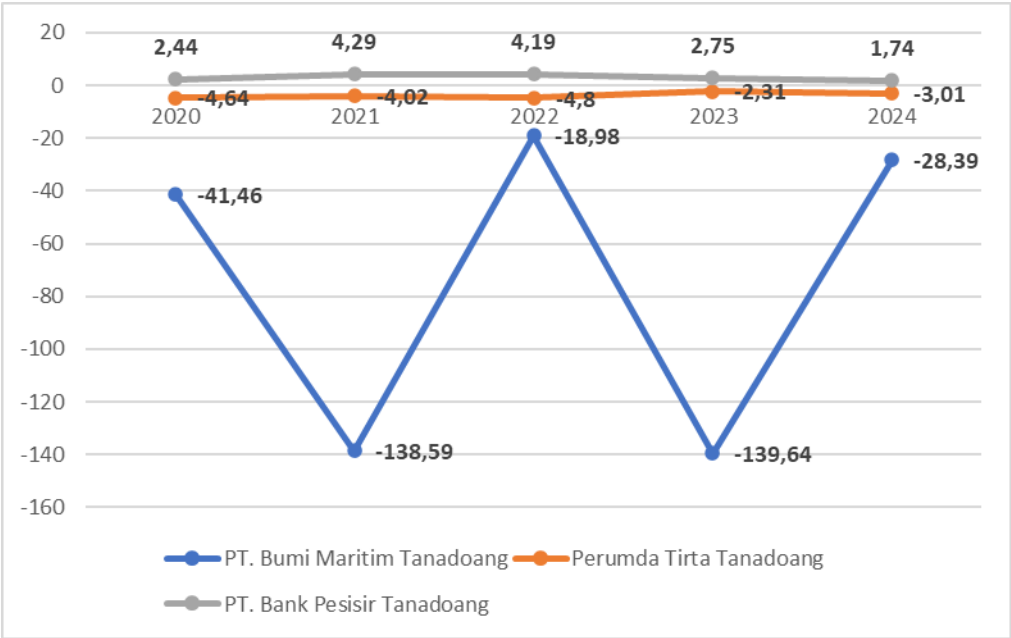
Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu PT. Bumi Maritim Tanadoang, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Tanadoang, serta PT. Bank Pesisir Tanadoang. Dari tiga BUMD dimaksud, dua BUMD yaitu PD Berdikari serta PDAM belum menghasilkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, sedangkan PT Bank Pesisir Tanadoang telah menghasilkan keuntungan bagi Daerah dari tahun 2019 sampai 2023. Kondisi ini disebabkan oleh tidak optimalnya pengelolaan dan manajemen keuangan, serta BUMD tidak memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga tidak mendatangkan kemandirian dan hanya mengharapkan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah. BUMD di Kabupaten Kepulauan Selayar juga kekurangan SDM yang berkualitas yang dapat menghambat inovasi dan pengembangan BUMD.

Capaian *Return On Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.59** serta capaian ROA masing-masing BUMD terlihat pada **Grafik 2.60**.



Grafik 2. 59 *Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024*

Sumber Data : *Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025*



Grafik 2. 60 *Return On Asset (ROA) Masing-masing BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024*

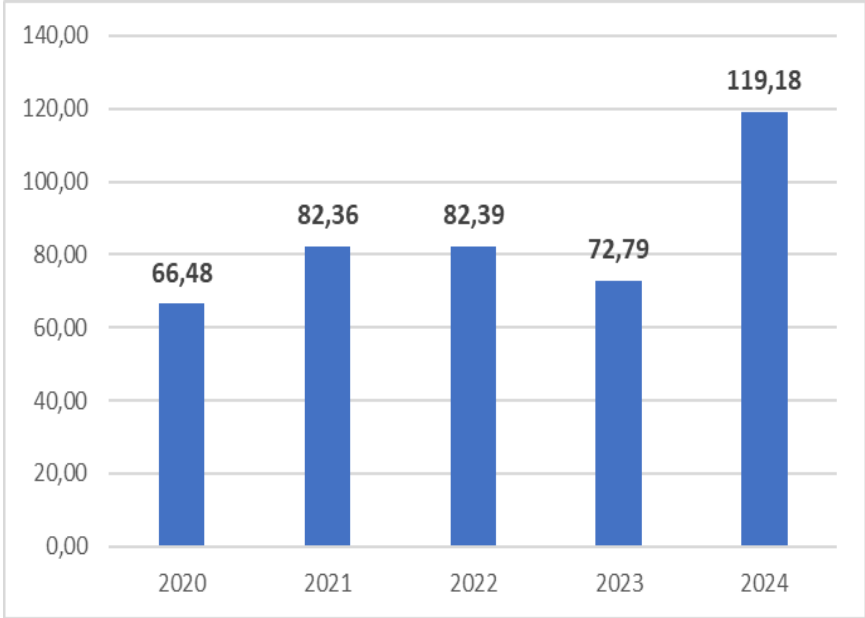
Sumber Data : *Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025*

2.1.3.2.10. Produktivitas Padi

Produktivitas padi merupakan indikator untuk mengukur produksi padi per hektar untuk kurun waktu tertentu. Produktivitas padi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, produksi padi Kabupaten Kepulauan Selayar 23.896 ton mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 24.512,88 ton. Namun, sejalan dengan itu, luas panen padi pada tahun 2024 juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan

tahun 2023 yaitu menjadi 1.362 Ha. Penurunan produksi juga disebabkan fenomena *El Niño* yang terjadi pada semester II tahun 2023 menyebabkan perubahan pola cuaca, seperti penurunan curah hujan dan peningkatan suhu. Hal ini mengakibatkan mundurnya musim tanam padi di awal tahun 2024, penundaan ini berdampak pada berkurangnya luas panen di awal tahun.

Peningkatan produktivitas padi didukung oleh peningkatan penggunaan sarana pertanian berupa benih, pupuk, pestisida dan alsintan sesuai anjuran. Selain itu, didukung pula oleh kebijakan pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan dalam peningkatan produksi pangan strategis. Produktivitas padi selama lima tahun terakhir terlihat pada **Grafik 2.61**.



Grafik 2. 61 Produktivitas Padi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.11. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pengumpulan dan analisa data terlihat bahwa peningkatan produksi didominasi pada kelompok komoditas Ikan Demersal, sementara pada kelompok komoditas Ikan Pelagis cenderung menurun. Gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi kinerja produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Meningkatnya produksi pada kelompok Ikan Demersal dipengaruhi oleh efektifitas alat tangkap; jaring insang tetap, bubu, pancing ulur, rawai dasar dan panah. Faktor lain yang turut mempengaruhi yaitu musim timur yang agak panjang sehingga menambah masa produksi bagi nelayan.

2. Penurunan produksi Ikan Pelagis disebabkan penurunan stok sumber daya yang terjadi secara periodik, biasanya sekali dalam 4 tahun.

Korelasi capaian kinerja produksi perikanan tangkap dengan intervensi kegiatan berdasarkan tupoksi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI Dinas Perikanan dapat tergambarkan pada fasilitasi pemberian bantuan alat tangkap dan sarana penangkapan ikan serta fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil yang telah diimplementasikan sejak lama. Meskipun demikian korelasi kinerja peningkatan produksi tangkap dengan ketersediaan sarana dan alat tangkap ikan tetap memiliki faktor pembatas seperti ketersediaan BBM, keterbukaan pasar regional dan lokal, musim tangkap, dan daya dukung lingkungan. Jumlah produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir terlihat pada **Grafik 2.62**.



Grafik 2. 62 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

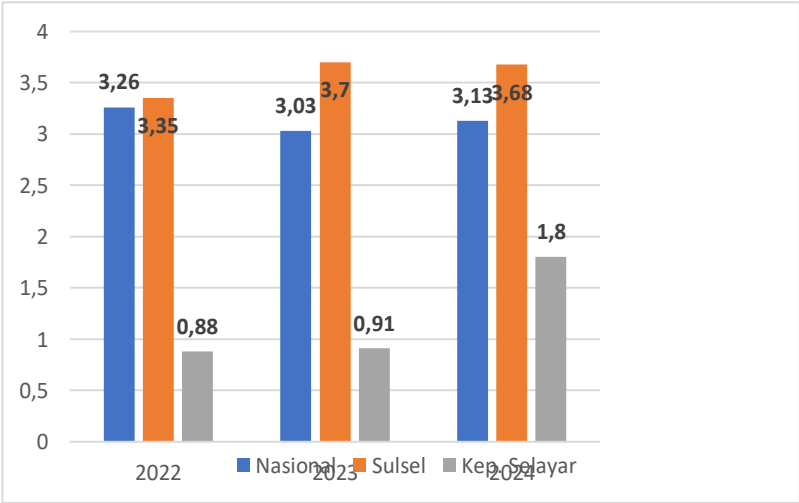
Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.2.12. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi merupakan salah satu pilar dalam mengukur daya saing suatu daerah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Kapabilitas inovasi juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

Capaian Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir (tahun 2022 sampai 2024). Hal ini disebabkan peningkatan belanja riset pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun capaiannya masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal

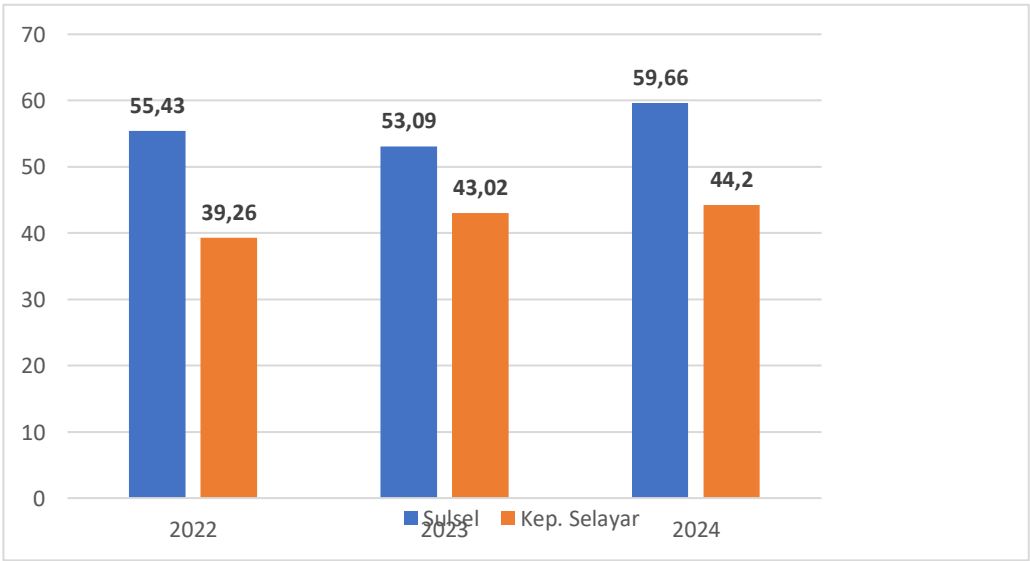
antara lain: riset daerah yang belum berkembang ditandai publikasi ilmiah yang masih sedikit, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas peneliti. Capaian nilai Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.63**.



Grafik 2. 63 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024
Sumber Data: : BRIN, 2025

2.1.3.2.13. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar telah tergolong sebagai kabupaten yang inovatif. Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.64**.



Grafik 2. 64 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri, 2025

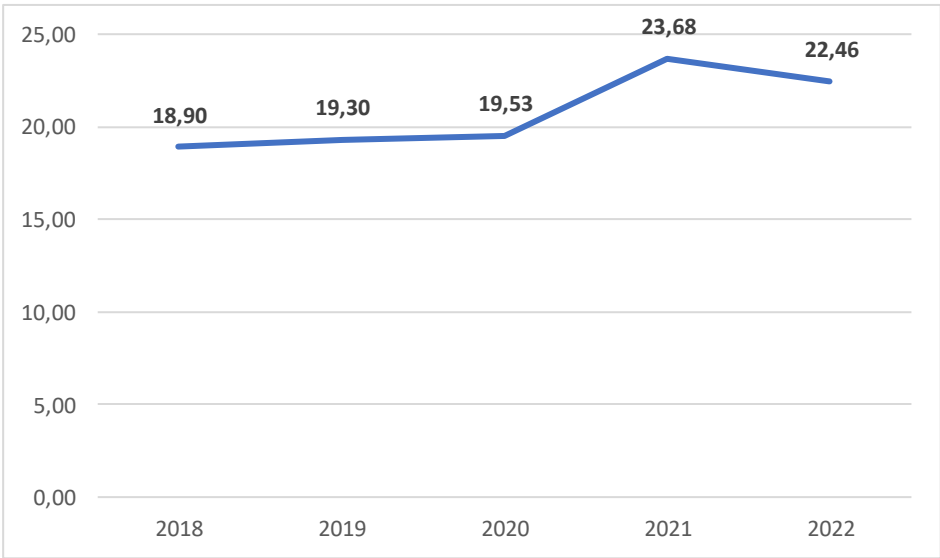
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : semakin banyaknya produk-produk inovasi yang dilakukan oleh OPD dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja masing-masing OPD dimaksud. Salah satu kendala dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah kurang maksimalnya pelaporan inovasi, terdapat beberapa inovasi sudah dilaporkan namun belum melengkapi indikator-indikator ataupun data pendukung yang diperlukan.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Bappenas menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks ini menggabungkan 3 pilar, yaitu : pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Indeks ini berskala 0-100, dimana bila nilainya mendekati 100, maka indeks ini semakin sangat baik. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada level baik.

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung fluktuatif. Namun capaian dimaksud masih tergolong rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Jika ditinjau dari 3 pilar pembentuk Indeks Ekonomi Hijau, beberapa indikator memiliki capaian yang belum optimal. Beberapa diantaranya adalah produktivitas padi yang tidak optimal dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki keterbatasan lahan untuk menanam padi serta karakteristik daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki luas laut dan potensi perikanan tangkap yang melimpah sehingga pengembangan perikanan budidaya belum optimal. Lebih lanjut, pada pilar sosial ekonomi, tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup tinggi ini disebabkan lapangan pekerjaan (sektor pertanian dan perkebunan) belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pendapatan petani. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.65**.



Grafik 2. 65 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2018-2022

Sumber Data: Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sejalan dengan konsep ekonomi biru. Indeks Ekonomi Biru menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur sejauh mana pembangunan wilayah memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif.

Berdasarkan perhitungan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 mencapai angka 83,6 tertinggi ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa indikator ini baru dilakukan perhitungan pada tahun 2023. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki skor indeks yang relatif tinggi pada aspek kesehatan ekosistem, mengingat kawasan ini mencakup wilayah Taman Nasional Taka Bonerate dan perairan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Namun, skor masih perlu ditingkatkan pada aspek nilai tambah ekonomi dan hilirisasi hasil laut, mengingat dominasi praktik perikanan tangkap tradisional dan terbatasnya industri pengolahan. Selain itu, akses terhadap pasar, infrastruktur pelabuhan perikanan, serta sistem rantai dingin (*cold storage*) yang belum merata di seluruh pulau-pulau kecil turut mempengaruhi efektivitas pemanfaatan potensi ekonomi biru secara optimal.

Sementara itu, upaya pemerintah daerah dalam mendorong ekowisata bahari, seperti wisata selam di kawasan atol dan wisata pulau kecil, telah berkontribusi pada peningkatan inklusi ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Kepulauan Selayar bukan hanya mengandalkan sektor perikanan, tetapi juga

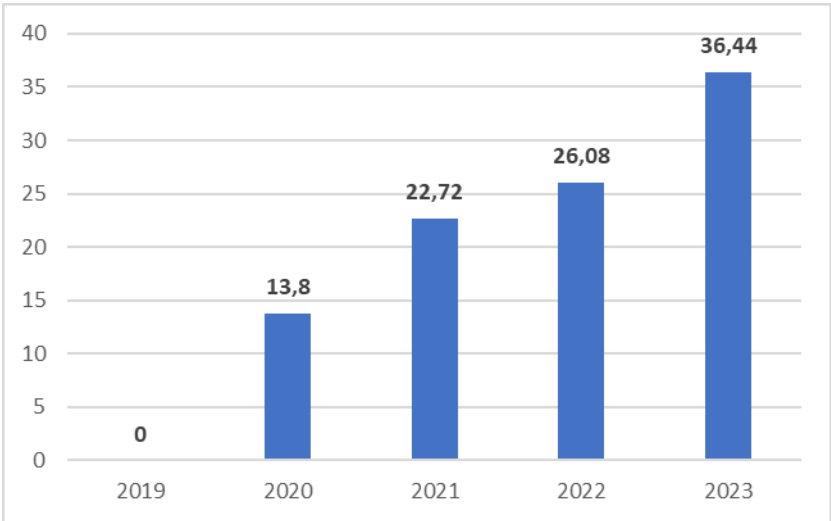
memperkuat sektor pariwisata berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Upaya meningkatkan Indeks Ekonomi Biru ke depan, Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperkuat sinergi antar sektor, memperluas investasi dalam infrastruktur maritim, mendorong inovasi dan teknologi perikanan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya laut.

2.1.3.4. Transformasi Digital

2.1.3.4.1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi

Berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pemerintah Daerah telah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berupaya agar seluruh layanan publik diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi agar seluruh stakeholder dapat memiliki akses yang sama dalam layanan publik dimaksud. Layanan publik yang diselenggarakan secara *online* adalah layanan publik berbasis elektronik serta layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan beberapa pelayanan publik sudah berbasis *website/internet* yang dapat digunakan masyarakat dalam mendapatkan layanan pelayanan pada sarana pelayanan publik (sarana kesehatan, pelayanan identitas kependudukan dan layanan perizinan). Hal ini diperkuat oleh pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2021 yang merupakan MPP pertama di wilayah kepulauan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.66**

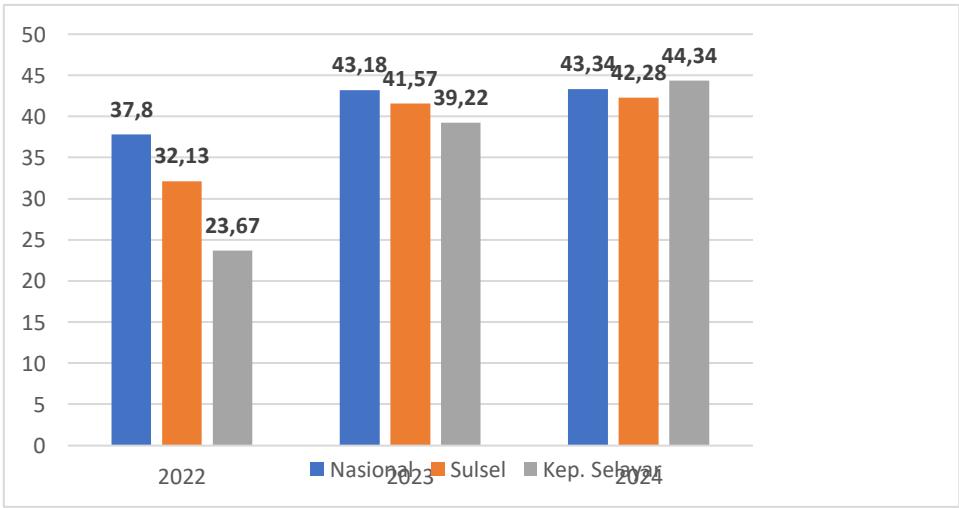


Grafik 2. 66 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023
Sumber Data: Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

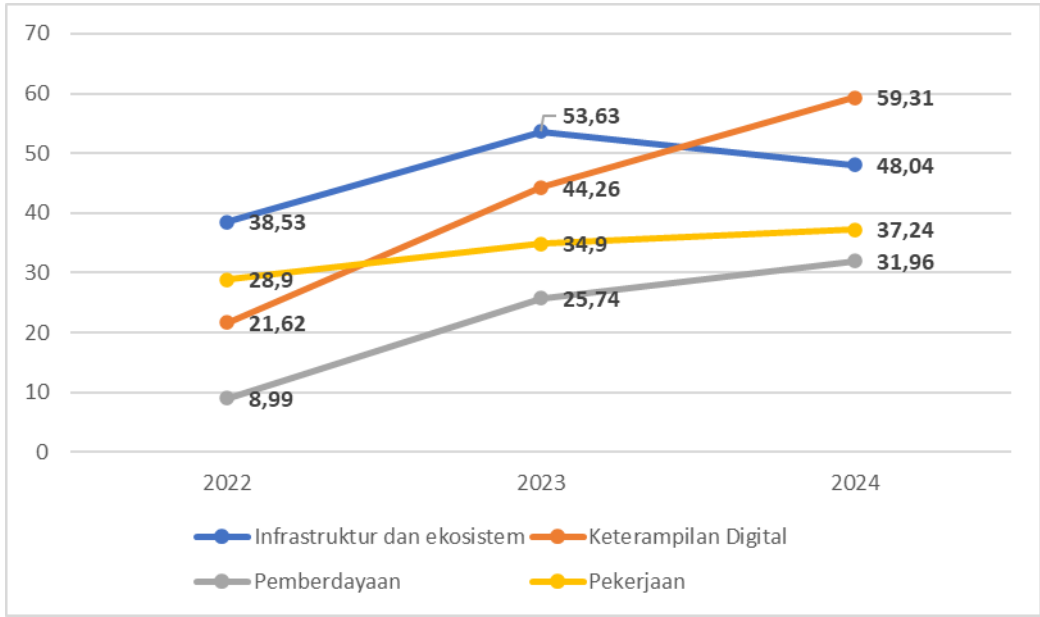
2.1.3.4.2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah ukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menggambarkan tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024, berada pada angka 44,34, yang menempatkannya dalam kategori “Cukup”. Capaian IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 telah melampaui capaian IMDI Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, setelah dua tahun sebelumnya memiliki capaian lebih rendah dari IMDI Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Capaian ini menggambarkan kondisi masyarakat digital di Kepulauan Selayar yang masih dalam tahap transisi menuju masyarakat yang sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : semakin meningkatnya akses dan adopsi teknologi digital baik itu di sektor pemerintahan maupun bisnis dan privat. Lebih lanjut, upaya Pemerintah Daerah sudah melakukan pelatihan terkait keterampilan digital kepada masyarakat dan kelompok masyarakat, seperti pelatihan teknologi digital kepada UMKM ataupun sektor pemerintahan. Selain itu, sebagian besar masyarakat Kepulauan Selayar telah memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan beragam peralatan komunikasi berbasis teknologi digital seperti penggunaan media sosial ataupun media digital lainnya. Capaian IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.67** serta capaian keempat pilar pembentuk IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.68**



Grafik 2. 67 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022-2024
Sumber Data: Kementerian Komdigi, 2025



Grafik 2. 68 Capaian Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024
Sumber Data: Kementerian Komdigi, 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh pilar pembentuk IMDI Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki capaian yang meningkat dari tahun 2022 sampai 2024, kecuali pilar infrastruktur yang mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki akses internet terutama sekolah yang terletak di wilayah pulau-pulau kecil.

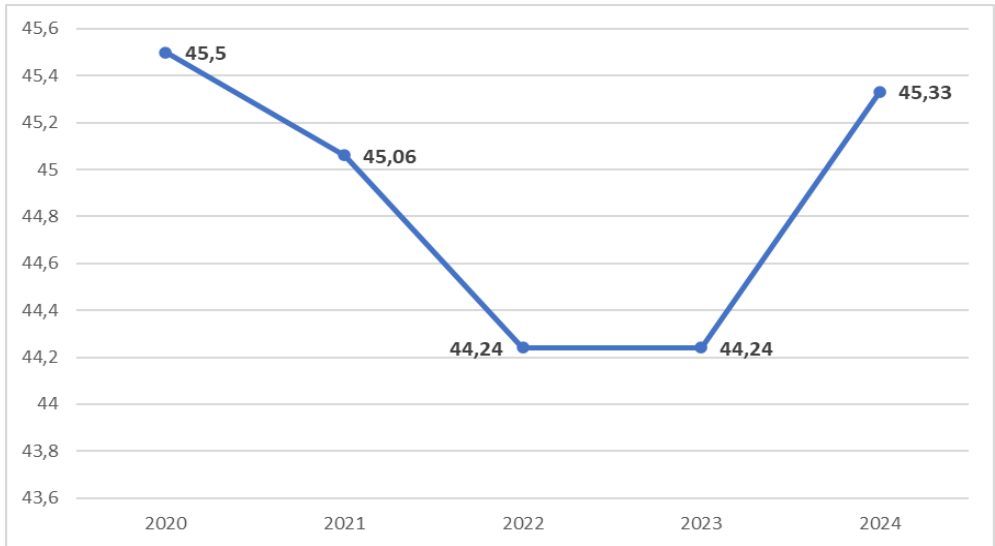
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat

tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan suatu daerah.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan pengoperasian 3 pelabuhan penyeberangan/plengsengan di wilayah kepulauan serta pembangunan 3 PLTS juga di wilayah kepulauan, yang anggarannya bersumber dari APBN. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.69**.



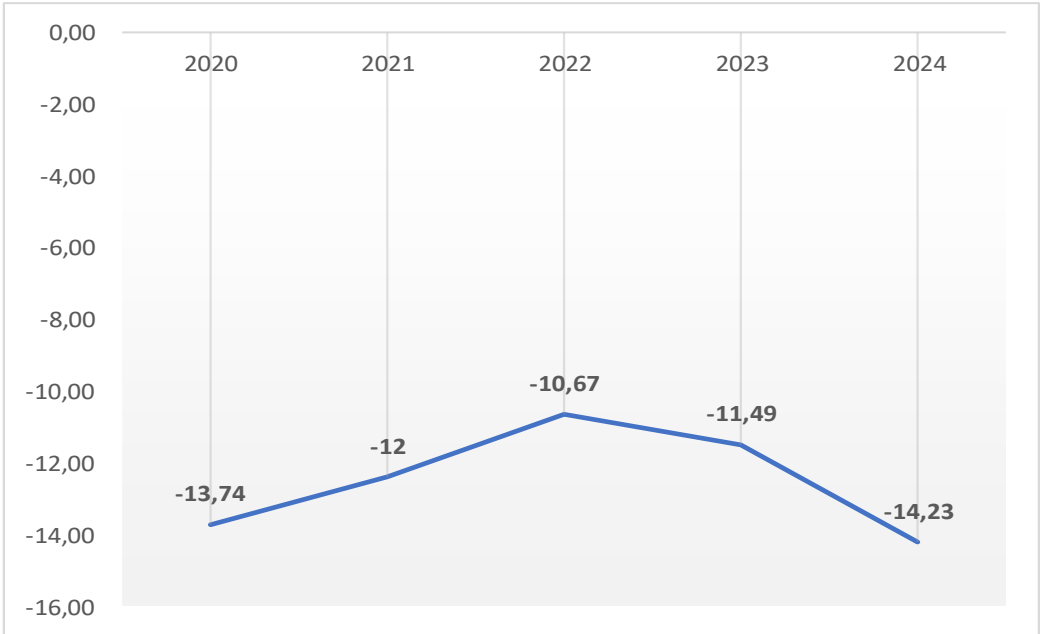
Grafik 2. 69 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor dan impor sangat mempengaruhi PDRB suatu daerah. Ekspor yang meningkat dan lebih banyak dari impor akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan suatu daerah. Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, net ekspor Kabupaten Kepulauan Selayar selalu negatif. Hal ini berarti impor Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih banyak dari eksponya. Kabupaten Kepulauan Selayar masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk dari luar daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar lebih banyak mengimpor bahan pangan, barang konsumsi, bahan baku, atau barang modal karena belum optimal dalam memproduksi sendiri atau produksi daerah habis dikonsumsi secara lokal, sehingga tidak tersedia cukup untuk diekspor. Lebih lanjut bahwa produksi daerah belum kompetitif untuk diekspor baik itu dari segi kualitas, harga ataupun volumenya. Selain itu, masih kurangnya

diversifikasi produk ekspor mengakibatkan nilai ekspor masih rendah. Kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.70**.



Grafik 2. 70 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

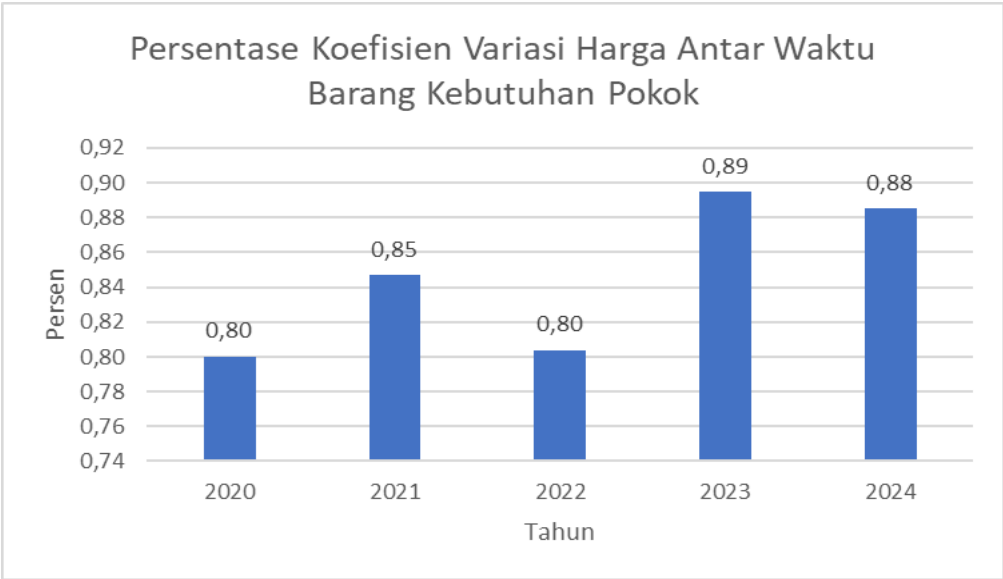
2.1.3.5.3. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok

Barang kebutuhan pokok (Bapok) merupakan komoditi yang banyak diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan yang cukup dan harga yang terjangkau sangat diperlukan. Harga yang stabil dan terjangkau merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama yang memiliki pendapatan rendah.

Stabilisasi harga merupakan salah satu aspek dalam kebijakan pangan yang senantiasa menjadi agenda pemerintah. Stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harga itu sendiri selalu dimonitor oleh pemerintah, mengingat sebagian besar komoditi Bapok merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik produksi bersifat musiman dan harga berfluktuasi sementara permintaan terjadi sepanjang waktu.

Stabilitas harga dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga. Semakin kecil nilai koefisien variasi harga menunjukkan fluktuasi harga rendah (stabil) dan sebaliknya. Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun, mencakup 11 komoditi yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Persentase penurunan koefisien variasi

harga antar waktu diperoleh dari rata-rata koefisien variasi 11 komoditi. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok terlihat pada **Grafik 2.71**.

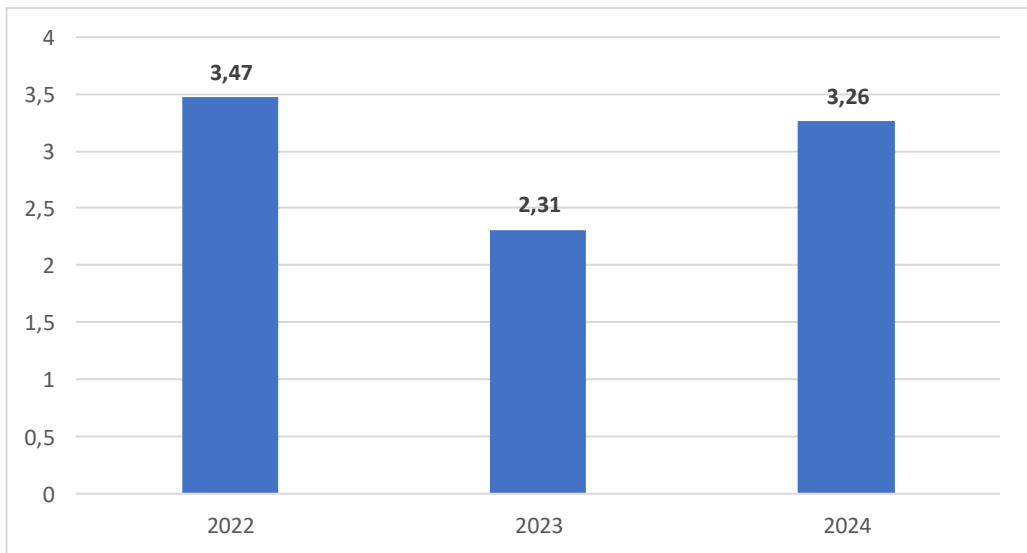


Grafik 2. 71 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

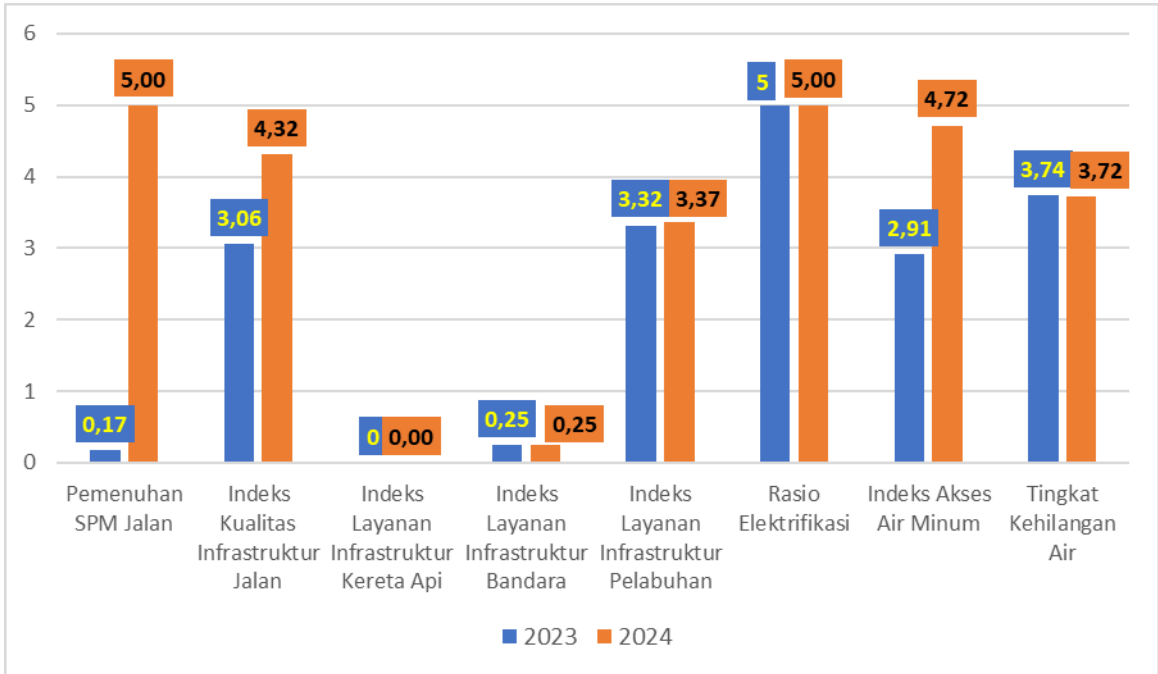
2.1.3.6.1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah. Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pemenuhan SPM aksesibilitas jalan, kualitas jalan, serta akses air minum layak yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, disisi lain beberapa faktor yang menghambat capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar adalah layanan infrastruktur bandara yang tidak berjalan optimal akibat pandemi *Covid 19*, serta beberapa wilayah kepulauan yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses air minum layak. Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.72**, serta rincian capaian setiap indikator pembentuk Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 terlihat pada **Grafik 2.73**.



Grafik 2. 72 Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024

Sumber Data: BRIN, 2025



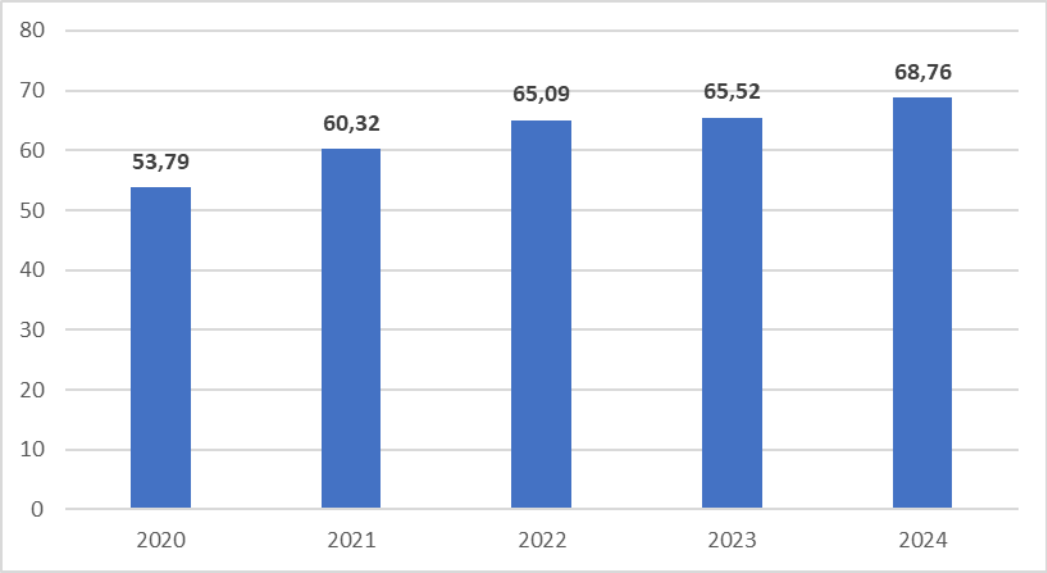
Grafik 2. 73 Rincian Capaian Setiap Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 – 2024

Sumber Data: BRIN, 2025

2.1.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Rumah yang layak dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

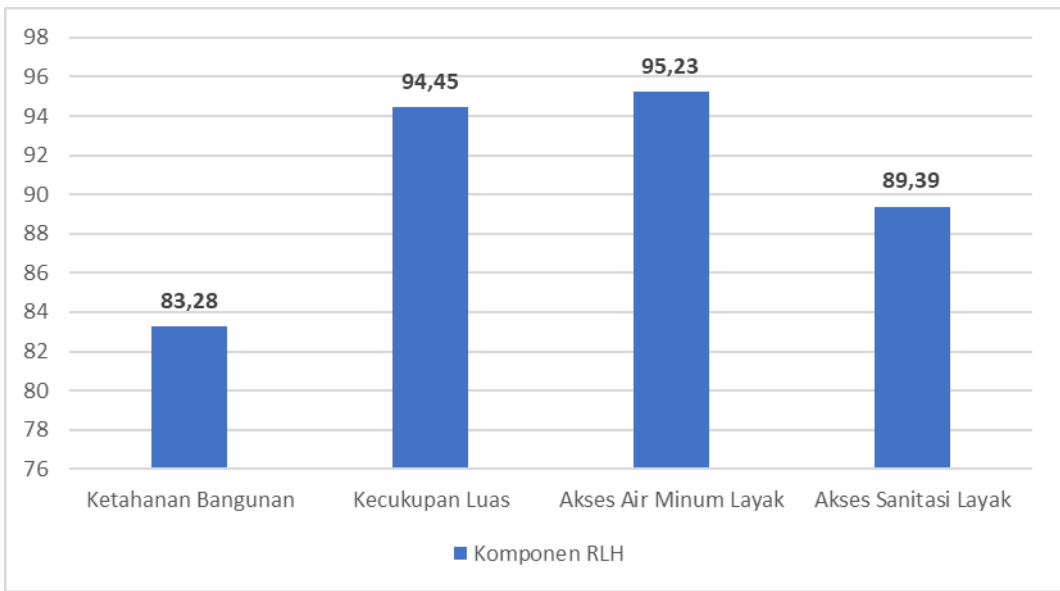
Jumlah rumah layak huni dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peningkatan dimaksud merupakan *impact* dari beberapa intervensi baik dari Pemerintah Pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program Pemerintah Daerah melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan terlihat pada **Grafik 2.74**.



Grafik 2. 74 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2024

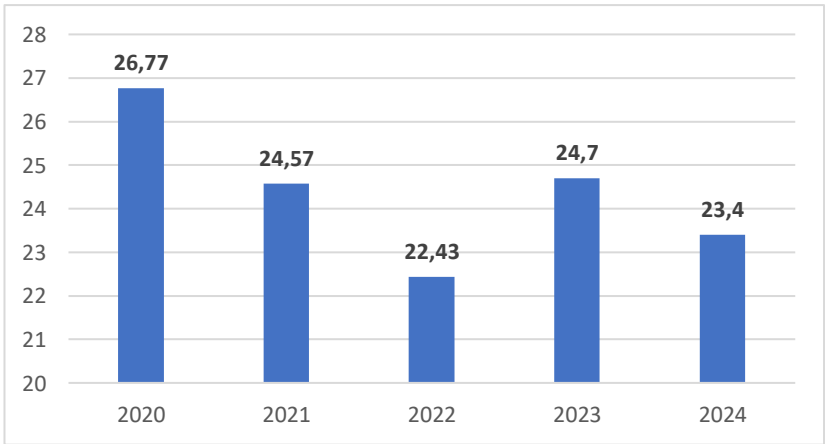
Sumber Data: SUSENAS, 2025

Rumah yang layak huni dapat diidentifikasi dari beberapa komponen yang dimiliki. Komponen Rumah Layak Huni (RLH) merujuk pada elemen-elemen minimum yang harus dipenuhi agar sebuah rumah dapat dikategorikan aman, sehat, dan layak ditempati. Beberapa komponen utama rumah layak huni meliputi : (1) ketahanan bangunan, berupa kondisi fisik dari bangunan rumah mulai dari atap, dinding, lantai serta ketahanan terhadap cuaca; (2) kecukupan luas, berupa luasan rumah yang ideal jika dibandingkan dengan jumlah penghuni rumah; (3) akses air minum layak, berupa ketersediaan air bersih yang layak untuk minum dan mandi, berasal dari sumur terlindung, PDAM, atau sumber aman lainnya; serta (4) akses sanitasi layak, berupa ketersediaan sanitasi yang layak dan tidak mencemari lingkungan. Capaian komponen rumah layak huni Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024, terlihat pada **Grafik 2.75**.



Grafik 2. 75 Capaian Akses Rumah Layak Huni Menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar
Sumber Data: SUSENAS, 2025

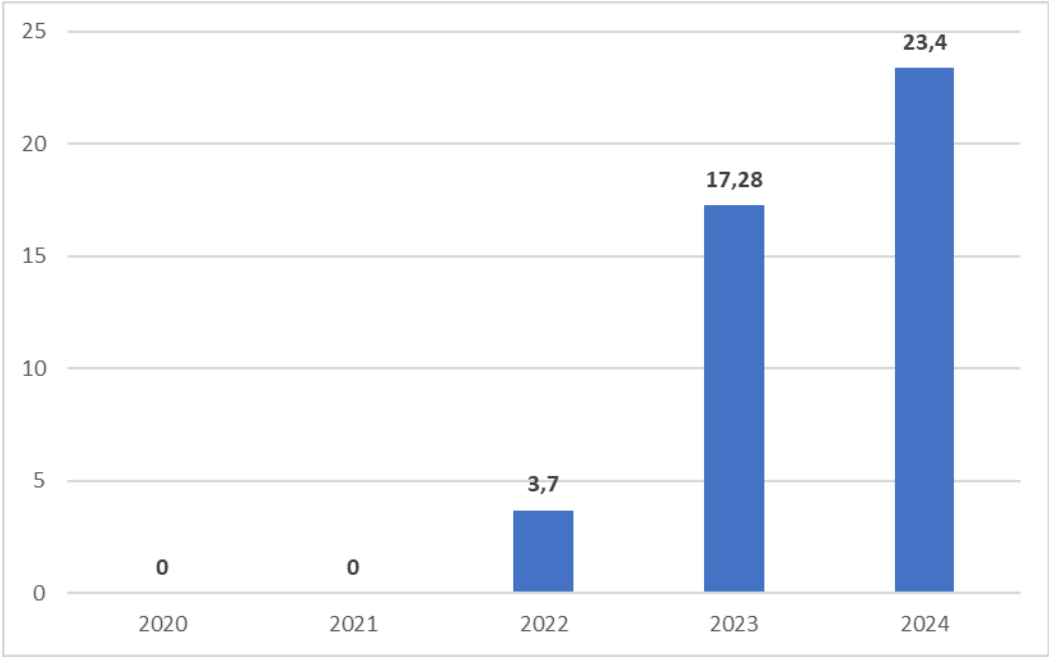
Kemampuan rumah tangga memiliki hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan, yang mengukur kemampuan pengeluaran perkapita untuk membiayai kebutuhan terkait hunian. Menurut standar *World Bank*, proporsi pengeluaran hunian dari total pengeluaran rumah tangga yang ideal tidak melebihi 30 persen. Jika melebihi 30 persen, maka biaya hunian telah membebani kemampuan ekonomi dan tidak layak secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa optimal dalam menjangkau akses hunian yang layak sehingga masih terdapat 31 persen lebih rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Capaian proporsi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.76**



Grafik 2. 76 Proporsi Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Selayar
Sumber Data: SUSENAS, 2025

2.1.3.6.3. *Persentase Desa Mandiri*

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasikan status desa berdasarkan nilai indeks komposit yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Berdasarkan IDM yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), status desa dibagi menjadi lima, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, belum memiliki desa mandiri. Pada tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkatkan status desa sebanyak 3 desa menjadi desa mandiri, meningkat menjadi 22 desa pada tahun 2024. Persentase desa mandiri berdasarkan IDM di Kabupaten Kepulauan terlihat pada **Grafik 2.77**



Grafik 2. 77 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Kemendesa PDTT, 2025

Meningkatnya jumlah desa mandiri (22 desa) tidak terlepas dari pelaksanaan program strategis “Gerbang Sari” yang merupakan akronim dari Gerakan Membangun Desa Mandiri yang dimulai pada tahun 2022. Pelaksanaan program Gerbangsari dilakukan melalui beberapa penanganan secara menyeluruh yang dilaksanakan melalui kolaborasi dan integrasi antar OPD untuk mengoptimalkan pencapaian indikator pembangunan daerah. Program Gerbang Sari sebagai salah satu program unggulan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Melihat hal ini, pemilihan Gerbang Sari sebagai salah satu strategi peningkatan kualifikasi desa serta penurunan angka kemiskinan merupakan aplikasi dari **pendekatan tematik** untuk menjamin pelaksanaannya telah searah dengan tema dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya pada **pendekatan holistik**,

untuk menurunkan angka kemiskinan dengan penanganan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, penyediaan akses informasi yang merata, SDM unggul serta peningkatan pendapatan.

Kemudian **pendekatan integratif** melalui perumusan beberapa program dan kegiatan multisektor dan terintegrasi antar OPD. Secara khusus pada aspek peningkatan pendapatan, sangat diperlukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar seluruh komponen, baik itu Perangkat Daerah, perbankan, BUMDesa serta pemerintah desa. Beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu :

1. Peningkatan akses permodalan yang dapat diintervensi oleh perbankan serta koperasi yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Peningkatan kualitas produk melalui hilirisasi mulai dari skala rumah tangga sampai dengan industri UMKM yang dapat difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas PKP, dan Dinas Perikanan.
3. Peningkatan akses pemasaran, dilaksanakan melalui promosi di berbagai obyek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, fasilitasi promosi produk unggulan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta mendorong digitalisasi terhadap pemasaran produk sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda pada tahun 2022 yaitu pelatihan pengembangan usaha melalui *digital marketing*.
4. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, dengan terus mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi para angkatan kerja yang didukung oleh pemberian bantuan peralatan untuk para angkatan kerja yang telah dilatih.
5. Mendatangkan investasi yang dapat mengembangkan sektor-sektor unggulan melalui *event-event investment day* oleh DPMPTSP.

Selanjutnya, untuk menjamin program dan kegiatan tepat sasaran, maka diperlukan **pendekatan spasial**, dimana intervensi kegiatan dilakukan pada desa tertentu sesuai dengan potensi lokal desa. Sebagaimana diketahui bahwa pada Program Gerbang Sari, ada 4 desa sasaran sesuai dengan potensi lokal desa dimaksud, yaitu : Desa Wisata, Desa Tani, Desa Nelayan dan Desa Koperasi dan UMKM.

Peningkatan status desa juga sangat berkaitan dengan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa dengan status maju atau mandiri cenderung memiliki BUMDes yang aktif, produktif, dan memiliki unit usaha yang berjalan baik. Berdasarkan data dari Dinas PMD, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 36 BUMDes dari 36 desa dengan kategori aktif. Namun, jika dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh ke 36 BUMDes, belum ada

BUMDes yang menghasilkan pendapatan asli desa yang lebih besar dari penyertaan modal ke BUMDes dimaksud. Hal ini membutuhkan upaya bagi Pemerintah Desa setempat untuk mengembangkan BUMDesnya.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan BUMDes dimaksud, antara lain:

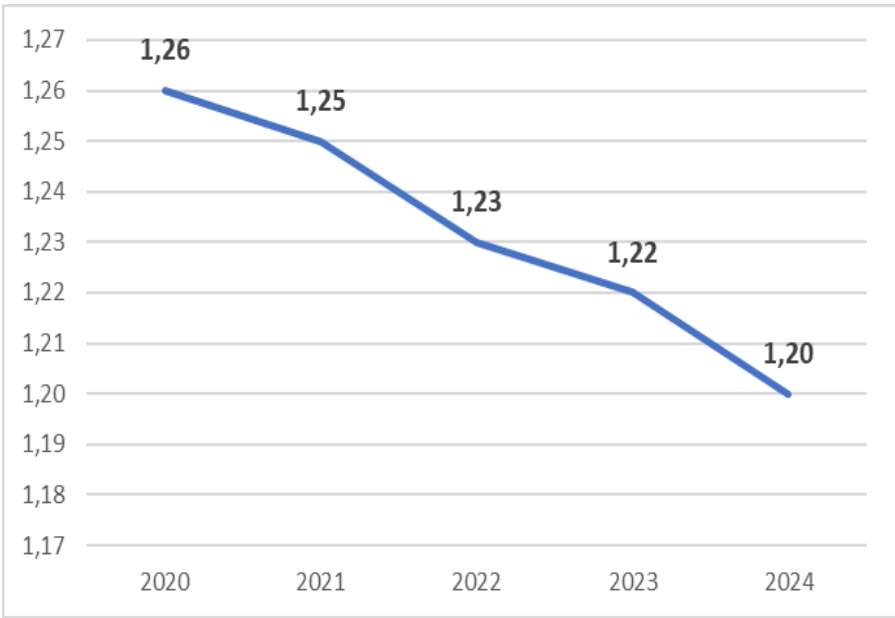
1. Kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMDes.
2. Minimnya akses permodalan dan jaringan pasar.
3. Lemahnya pendampingan teknis dan monitoring rutin.
4. Tantangan geografis di desa-desa pulau kecil (akses dan logistik).

Memperhatikan beberapa tantangan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas BUMDes, diperlukan upaya sinergis melalui:

1. Pelatihan manajemen dan kewirausahaan desa.
2. Akses pembiayaan usaha mikro dan kemitraan strategis.
3. Digitalisasi manajemen usaha desa.
4. Integrasi BUMDes dengan program ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan.

2.1.3.6.4. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai satu-satunya daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi provinsi, khususnya di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Meskipun secara geografis tergolong daerah dengan aksesibilitas terbatas, potensi ekonomi yang dimiliki sangat besar, terutama di sektor-sektor primer yang berbasis sumber daya alam pesisir dan laut. Secara kuantitatif, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di daratan utama seperti Makassar, Gowa, atau Maros. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk yang lebih sedikit, keterbatasan infrastruktur ekonomi, serta rendahnya tingkat industrialisasi. Capaian kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan terlihat pada **Grafik 2.78**.



Grafik 2. 78 Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024
Sumber Data: BPS, 2025

Walaupun kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil, namun dalam konteks pembangunan wilayah yang berkeadilan dan inklusif, angka kontribusi PDRB bukan semata-mata menjadi indikator utama. Kepulauan Selayar memiliki potensi untuk meningkatkan peran strategisnya dalam struktur PDRB provinsi melalui optimalisasi sektor unggulan, seperti:

1. Perikanan tangkap dan budidaya, khususnya rumput laut dan hasil laut bernilai ekspor.
2. Pariwisata bahari dan konservasi, termasuk Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sebagai destinasi kelas dunia.
3. Pertanian lokal, yang menyokong ketahanan pangan regional.
4. Ekonomi biru dan energi terbarukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penguatan investasi, pembangunan infrastruktur konektivitas antar-pulau, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kabupaten Kepulauan Selayar berpeluang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Sulawesi Selatan secara lebih signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan angka statistik, kontribusi Kepulauan Selayar mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berpihak pada wilayah kepulauan melalui kebijakan afirmatif, pembangunan infrastruktur maritim, serta pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan dalam struktur ekonomi provinsi.

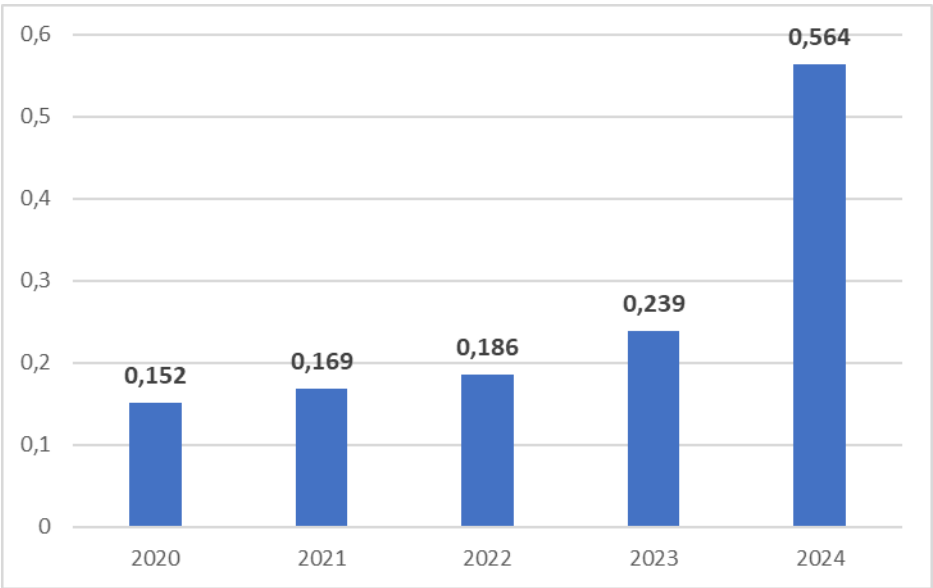
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah, maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terus meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (**Grafik 2.79**). Tren peningkatan rasio pajak terhadap PDRB dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- 1. Penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
- 2. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak.
- 3. Edukasi dan penyuluhan pajak kepada masyarakat serta pelaku usaha.



Grafik 2. 79 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: diolah dari data LKPD Kepulauan Selayar dan BPS, 2025

Melihat konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, rasio pajak daerah terhadap PDRB masih berada pada level yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menggambarkan bahwa potensi fiskal daerah belum sepenuhnya tergali secara optimal, terutama

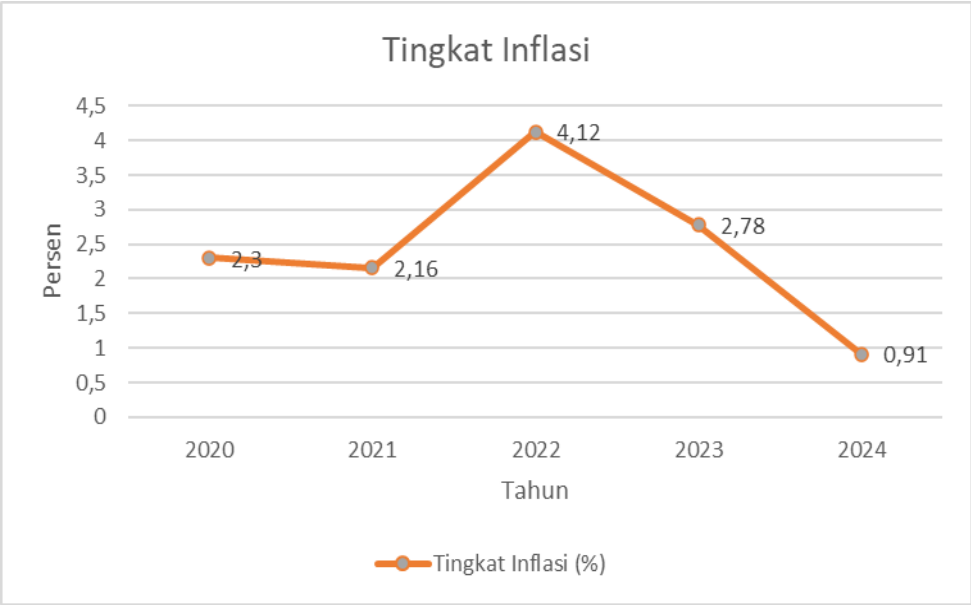
dalam pemungutan pajak seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Beberapa faktor penyebab rendahnya rasio ini antara lain:

1. Struktur ekonomi lokal yang masih didominasi sektor informal dan primer (pertanian, perikanan).
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan sistem pemungutan.
3. Kurangnya basis data pajak yang akurat dan terintegrasi.
4. Belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dengan peningkatan rasio ini, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Rasio pajak daerah yang sehat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

2.1.3.7.2. Tingkat Inflasi Gabungan

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi menandakan lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Tingkat inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang digunakan mengacu pada inflasi Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba) terlihat pada **Grafik 2.80**.



Grafik 2. 80 Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba) Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang inflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain : beras, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, gula pasir, bawang putih, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe, dan sabun cair/cuci piring. Berdasarkan grafik di atas, penurunan inflasi yang disebabkan oleh menurunnya nilai/ harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Tiga kelompok yang sangat berpengaruh terhadap penurunan inflasi adalah kelompok transportasi yang menurun dari 12,70 pada tahun 2022 menjadi 0,09 pada tahun 2023, kelompok pakaian dan alas kaki menurun dari 1,89 pada tahun 2022 menjadi 0,89 pada tahun 2023, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menurun dari 2,03 menjadi -0,75. Selain itu, salah satu kelompok yang nilainya masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yang masih berada pada angka 4,59 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 6,27 pada tahun 2023.

2.1.3.7.3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terjadi, jika ada kenaikan produksi barang dan jasa dalam perekonomian, atau ditunjukkan oleh kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak hanya berarti telah terjadi kenaikan produksi barang dan jasa, tetapi juga berarti terciptanya lapangan pekerjaan.

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi dapat mendorong pertambahan pendapatan daerah (pertumbuhan ekonomi), selain itu investasi juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, yang berarti akan mengurangi jumlah pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan, yang akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain, seperti : gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain. Selain itu investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi pada tahun 2022. Pada tahun 2024, nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 28,462 Milyar dengan pertumbuhan sebesar minus 168,03 persen. Nilai realisasi dan pertumbuhan investasi Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Tabel 2.23**.

Tabel 2. 23
 Nilai Realisasi Dan Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)		Pertumbuhan Investasi
		Jumlah Pelaku Usaha (Orang)	Nilai Investasi	
1.	2020	209	39.200.520.000	34,40
2.	2021	-	67.442.916.200	41,88
3.	2022	8	12.826.155.311	(425,82)
4.	2023	17	76.286.000.000	83,19
5.	2024	25	28.462.000.000	(168,03)

Sumber Data: DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Laju pertumbuhan investasi pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, mengingat investasi baik dari sektor swasta maupun publik merupakan motor utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

Meskipun realisasi investasi di daerah menunjukkan potensi yang cukup besar, pertumbuhan investasi pada tahun 2024 mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Banyak pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, belum sepenuhnya memahami kewajiban dan mekanisme pelaporan LKPM. Akibatnya, data realisasi investasi yang tercatat tidak sepenuhnya mencerminkan aktivitas investasi yang sebenarnya terjadi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara potensi riil investasi dengan data resmi yang menjadi dasar pengukuran pertumbuhan investasi.

Selain faktor pemahaman, kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam perusahaan, minimnya pendampingan, serta belum optimalnya sosialisasi dan fasilitasi pemerintah daerah turut memperburuk tingkat kepatuhan. Alhasil, meskipun investasi di lapangan tetap berjalan, laporan yang tidak lengkap atau tidak disampaikan tepat waktu berdampak pada penurunan angka pertumbuhan investasi secara statistik.

Dengan demikian, penurunan pertumbuhan investasi tidak semata-mata disebabkan oleh berkurangnya minat investor, melainkan juga karena belum optimalnya kepatuhan pengusaha dalam melaporkan LKPM yang berimplikasi pada rendahnya validitas dan kelengkapan data investasi daerah

Penurunan pertumbuhan investasi tercermin dari turunnya nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor-sektor strategis, seperti : pariwisata, perikanan, dan

infrastruktur pendukung. Beberapa faktor utama juga diduga menjadi penyebab penurunan ini, antara lain:

1. Tingginya biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan yang masih sulit dijangkau.
2. Minimnya kepastian hukum dan perizinan yang masih dianggap rumit oleh pelaku usaha.
3. Kurangnya promosi investasi yang terarah dan berbasis potensi lokal.
4. Dampak lanjutan dari kondisi ekonomi global dan nasional, yang menyebabkan investor lebih berhati-hati menanamkan modal di daerah dengan risiko geografis tinggi.
5. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan zona ekonomi potensial lainnya di wilayah Kepulauan Selayar.
6. Penurunan ini tentu berdampak pada terhambatnya realisasi proyek-proyek strategis daerah, lambatnya penyerapan tenaga kerja lokal, serta stagnasi pertumbuhan ekonomi riil di sejumlah kecamatan.

Momentum ini harus dijadikan sebagai evaluasi menyeluruh dan titik balik untuk membenahi ekosistem investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan mengambil langkah-langkah strategis, seperti:

1. Meningkatkan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di level daerah.
2. Mempromosikan potensi investasi secara digital dan partisipatif.
3. Menyederhanakan proses perizinan melalui integrasi OSS (*Online Single Submission*).
4. Membangun kemitraan antara BUMDes, UMKM, dan investor lokal.
5. Menyiapkan insentif fiskal atau non-fiskal bagi investor yang menanamkan modal di sektor prioritas seperti pariwisata bahari dan industri hasil laut.

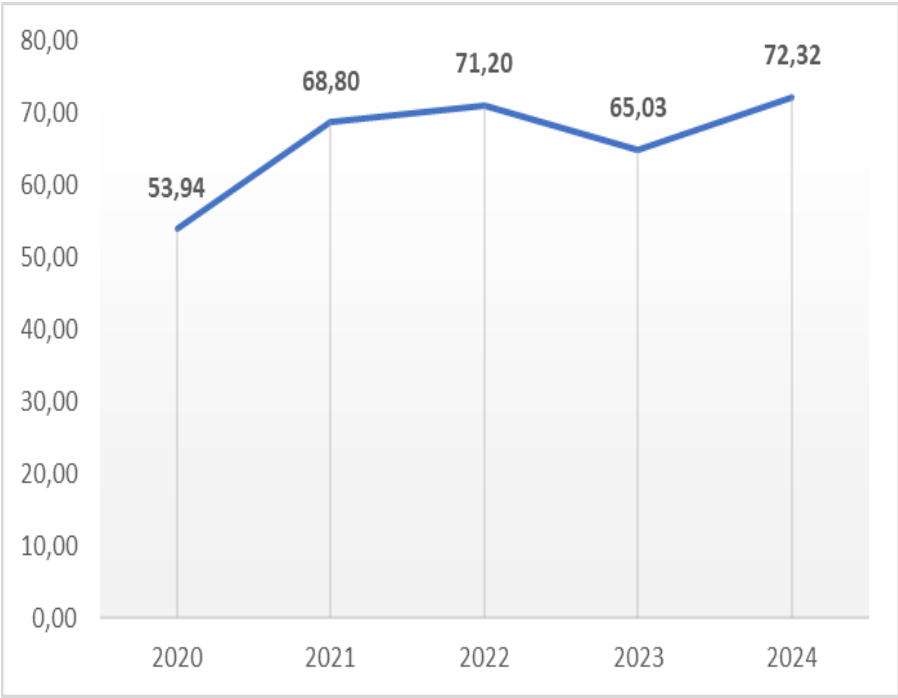
2.1.3.7.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Stabilitas ekonomi makro suatu daerah sangat tergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang kuat dan stabil akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan serta mengoptimalkan capaian-capaian indikator ekonomi makro lainnya. Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur, yaitu : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam

APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan dan cukup rendah karena pada saat itu perencanaan dan penganggaran daerah belum menggunakan SIPD sehingga perencanaan dan penganggaran menjadi tidak terintegrasi. Namun setelah menerapkan SIPD pada tahun 2021 dan 2022 sehingga mengalami peningkatan. Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh capaian WTP yang diraih sebanyak 8 kali berturut-turut.

Beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kemandirian keuangan. Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan sumber pendanaan dari dana transfer Pemerintah Pusat dikarenakan Pemerintah Daerah belum mampu memaksimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.81**.



Grafik 2. 81 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3.7.5. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu wilayah. Indeks ini menjadi penting karena semakin tinggi tingkat akses keuangan, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh

manfaat dari produk dan layanan keuangan, seperti : tabungan, pembiayaan, asuransi, hingga layanan digital.

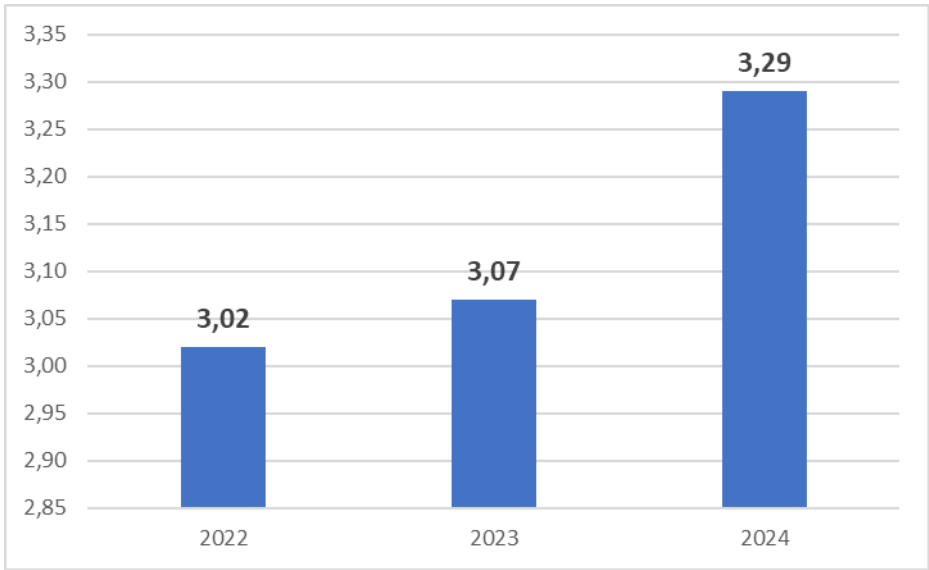
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi geografis yang berupa daerah kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses keuangan. Sebagian masyarakat tinggal di pulau-pulau kecil yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota dan fasilitas perbankan. Hal ini berimplikasi pada masih terbatasnya ketersediaan kantor cabang bank, jaringan ATM, maupun agen layanan keuangan di desa-desa terpencil.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir terdapat perkembangan positif. Kehadiran beberapa agen BRILink menjadi alternatif solusi untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui program literasi keuangan, pemanfaatan layanan digital, serta perluasan jaringan agen keuangan di tingkat desa.

Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang semakin baik, meskipun masih tergolong rendah dan masih terdapat ruang untuk peningkatan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- a) Aspek ketersediaan, yaitu jumlah lembaga dan layanan keuangan yang masih terbatas di beberapa wilayah kepulauan.
- b) Aspek penggunaan, yaitu belum semua masyarakat memanfaatkan layanan keuangan formal karena keterbatasan pemahaman atau masih kuatnya budaya transaksi tunai.
- c) Aspek kualitas, yaitu literasi keuangan yang relatif rendah menyebabkan sebagian masyarakat belum bisa mengoptimalkan produk keuangan sesuai kebutuhan.

Capaian Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.82** berikut.



Grafik 2. 82 Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan reformasi hukum secara sistematis dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmen dalam mendorong terciptanya tata kelola hukum yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah upaya aktif dalam peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM diperoleh hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam reformasi hukum. Hal ini ditunjukkan melalui:

- 1) Koordinasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Pemerintah daerah secara aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan untuk memastikan seluruh produk hukum daerah, baik berupa rancangan peraturan daerah (ranperda) maupun peraturan kepala daerah (perkada), telah sesuai dengan prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal.

2) Peningkatan Kompetensi Aparatur

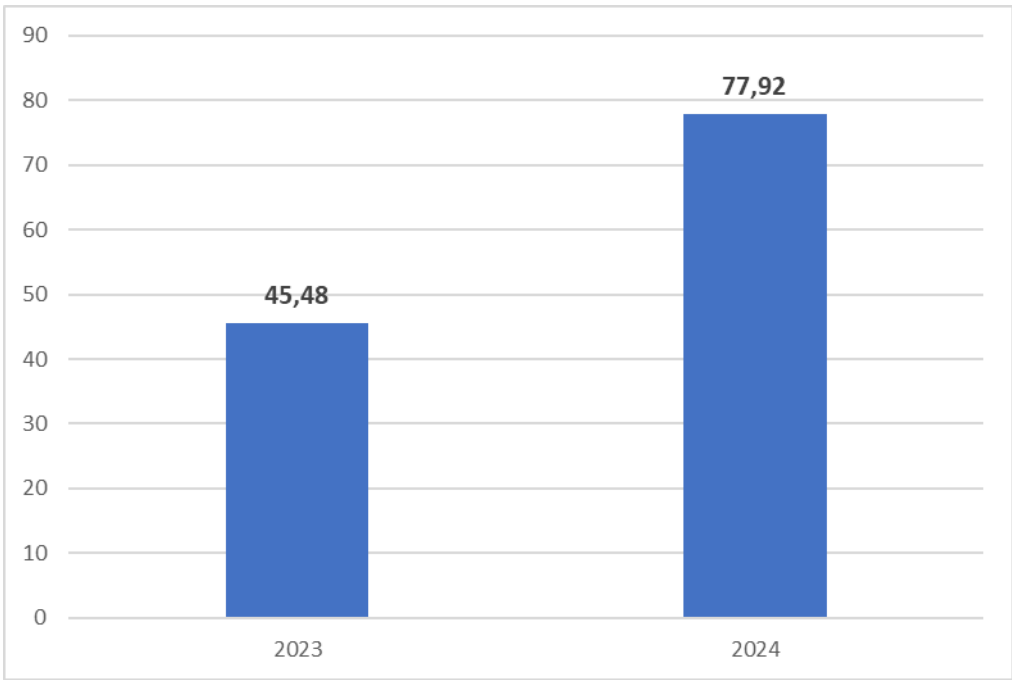
Dalam rangka memperkuat kapasitas perancang peraturan, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mengikutsertakan ASN dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar proses legislasi di tingkat daerah dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

3) Pemanfaatan Teknologi dan Keterbukaan Informasi

Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap regulasi daerah dengan mengembangkan sistem digitalisasi produk hukum, yang diharapkan dapat diakses masyarakat melalui website resmi Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum untuk tingkat kabupaten baru dilakukan pada tahun 2023. Oleh karena itu, untuk melihat capaian IRH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dan tahun 2024 selengkapnya pada terlihat

Grafik 2.83



Grafik 2. 83 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024

Sumber Data: Kemenkumham RI, 2025

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran kinerja penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

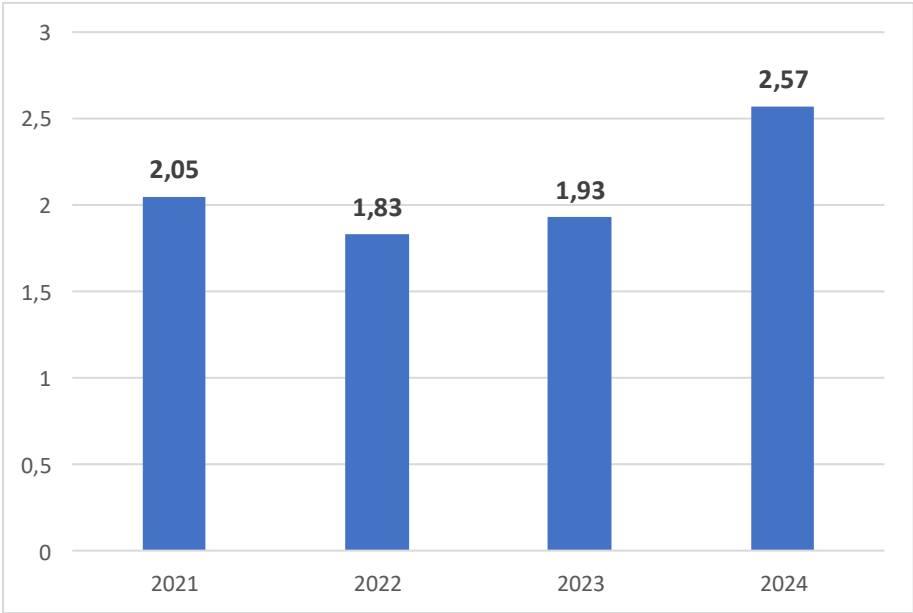
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2024, hasil

evaluasi menunjukkan Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori “Cukup” dengan nilai 2,57. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dari capaian tahun sebelumnya, namun juga menandakan perlunya peningkatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan digital.

Untuk mendorong peningkatan Indeks SPBE, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

- 1) **Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE:** Melakukan penyesuaian terhadap arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE daerah agar selaras dengan arsitektur dan peta rencana SPBE nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.
- 2) **Penguatan Koordinasi antar Perangkat Daerah:** Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE, guna memastikan implementasi SPBE berjalan efektif dan efisien.
- 3) **Peningkatan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pelatihan bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan SPBE.
- 4) **Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi:** Memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan SPBE, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik berbasis elektronik.
- 5) **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan SPBE untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi yang tepat, serta memastikan keberlanjutan program SPBE di masa mendatang

Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sampai 2024 selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.84**



Grafik 2. 84 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024
Sumber Data: Kementerian PAN dan RB, 2025

2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penilaian ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada kategori “Baik” dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada pada kategori “Kurang”.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor terpenting yang mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah komitmen Pimpinan Daerah yang diikuti oleh komitmen pimpinan Perangkat Daerah. Komitmen ini mencakup alokasi anggaran, kebijakan internal, dan arahan strategis. Dukungan penuh dari kepala daerah, kepala dinas, atau pimpinan unit pelayanan sangat menentukan penerapan standar pelayanan secara konsisten. Lebih lanjut, sistem pengawasan dan evaluasi yang baik juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari

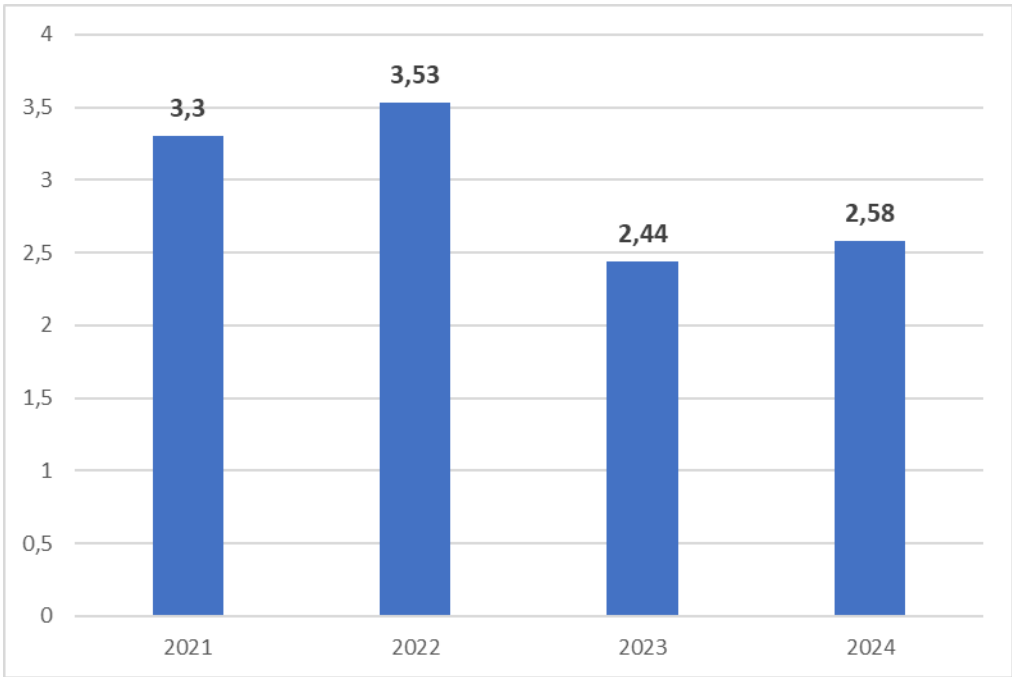
adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat, Ombudsman RI) serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan dan kinerja pelayanan, disertai tindak lanjut atas temuan. Selain itu, beberapa faktor lain yang berpengaruh positif, antara lain :

1. Peran masyarakat dalam memberikan umpan balik, saran, dan pengaduan melalui kanal resmi baik itu melalui website Pemerintah Daerah ataupun aplikasi SP4N Lapor
2. Penerapan inovasi pelayanan (seperti Mal Pelayanan Publik, layanan keliling, aplikasi *online*) dapat mempercepat kepatuhan dan efisiensi layanan.

Melihat faktor-faktor pendukung di atas, masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen Standar Pelayanan yang lengkap dan memenuhi unsur sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 (misalnya: jenis layanan, persyaratan, jangka waktu, biaya, prosedur, produk akhir).
2. Masih terbatasnya SDM petugas pelayanan yang memiliki kompetensi teknis dan etika pelayanan publik sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan terkait pelayanan prima, komunikasi, dan pengelolaan pengaduan
3. Belum optimal infrastruktur dan sarana pendukung, berupa ketersediaan sarana fisik (loket, ruang tunggu, *signage*) dan non-fisik (aplikasi digital, website layanan).

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.85**.

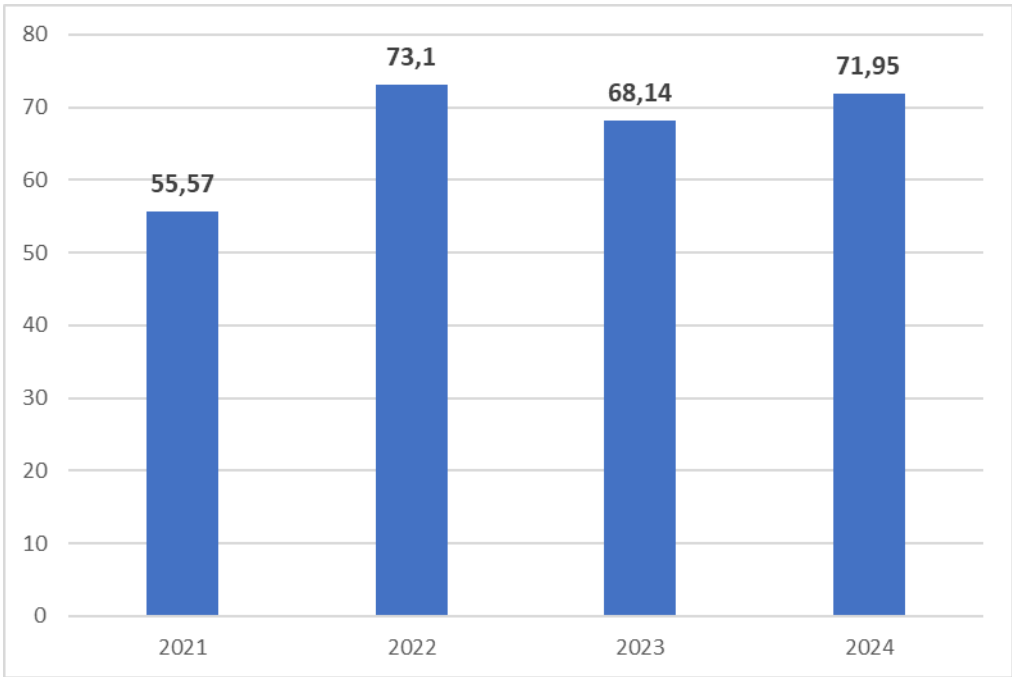


Grafik 2. 85 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024
Sumber Data: Kemenpan RB, 2025

2.1.4.1.4. Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui persepsi dan pengalaman masyarakat serta pegawai pemerintah terhadap potensi praktik korupsi dan integritas di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Skor SPI Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 71,95 pada tahun 2024. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kategori “Rentan” yang berarti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/ kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi. Indeks Survei Penilaian Integritas diukur mulai dari tahun 2021. Capaian Indeks SPI Kabupaten Kepulauan Selayar selama empat tahun terakhir memiliki capaian yang fluktuatif, sebagaimana yang tergambar pada **Grafik 2.86.**



Grafik 2. 86 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024
Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian Indeks Survei Penilaian Integritas, sebagai berikut :

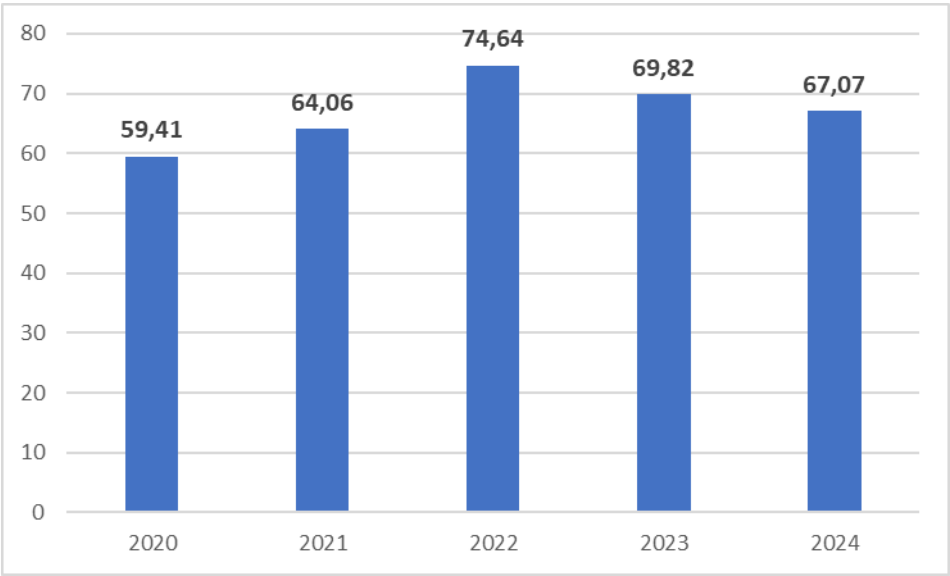
1. Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai;
2. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan;
3. Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif;
4. Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan;
5. Mempertahankan upaya peningkatan kesadaran untuk melaporkan dan menolak gratifikasi; dan
6. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas.

2.1.4.1.5. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salah satu bentuk concern dan komitmen tinggi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi daerah adalah melakukan pemberantasan korupsi daerah melalui tugas koordinasi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah dilakukan melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi baik sebelum terjadi korupsi

maupun setelah upaya penindakan korupsi telah dilakukan baik oleh KPK maupun APH lain.

Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 cenderung fluktuatif. Namun capaian nilai MCP KPK selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.87**



Grafik 2. 87 Nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

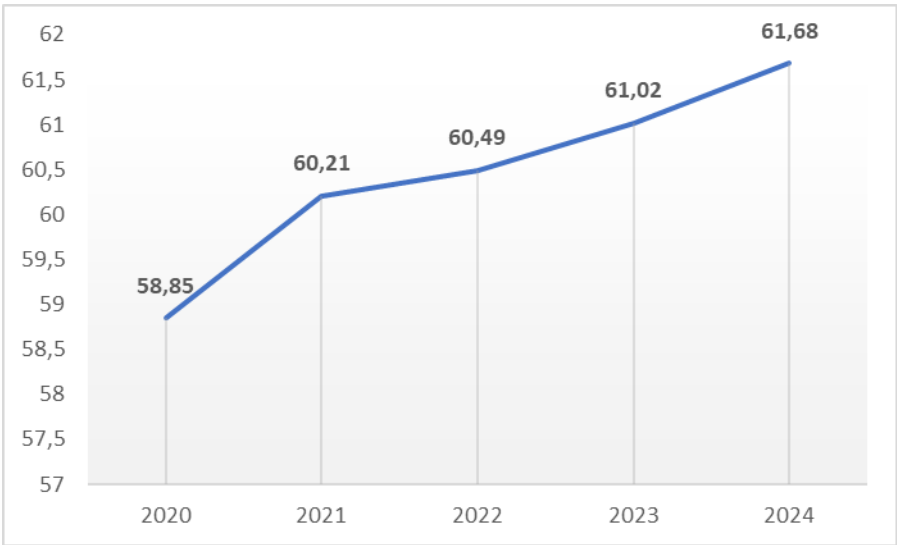
Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan nilai MCP KPK Kabupaten Kepulauan Selayar selama dua tahun terakhir, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap bantuan keuangan, pemberian bantuan sosial dan hibah serta belum optimalnya inventarisasi penganggaran honorarium dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya pengawasan APIP
3. Belum optimalnya Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN
4. Belum optimalnya Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD
5. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

2.1.4.1.6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Capaian nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir, selengkapnya terlihat pada **Grafik 2.88**



Grafik 2. 88 Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Memperhatikan grafik di atas, nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun, peningkatan dimaksud tidak terjadi secara signifikan. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pada aspek perencanaan kinerja, masih banyak OPD yang menyusun perencanaan kinerja belum berorientasi hasil serta belum semua indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART
2. Indikator kinerja Utama pada beberapa Perangkat Daerah belum memiliki formulasi perhitungan, definisi operasional, sumber data dan penanggungjawab
3. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan kepada Perangkat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Sebagian besar Perangkat Daerah belum mengunggah Laporan Hasil Evaluasi Internal.

Mengatasi beberapa permasalahan di atas, beberapa rekomendasi yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperbaiki perencanaan kinerja berupa perbaikan pohon kinerja, sasaran pembangunan yang berorientasi hasil, serta perumusan indikator kinerja yang memiliki definisi operasional serta formulasi perhitungan;
2. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan Rencana Aksi secara berkala serta memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk pemberian *reward and punishment*;
3. Melakukan revaluasi kembali terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja yang telah disusun; dan

4. Melakukan bimbingan dan pelatihan kepada para perencana di Perangkat Daerah.

2.1.4.1.7. Indeks Maturitas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren yang fluktuatif, sehingga masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada Level 2 (Berkembang), yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mulai menerapkan unsur-unsur pengendalian intern secara parsial. Beberapa kebijakan dan prosedur sudah disusun, namun implementasinya belum konsisten di seluruh unit kerja. Dokumentasi belum menyeluruh, dan evaluasi pengendalian masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Namun, untuk mencapai Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur) dan Level 5 (Optimal), masih dibutuhkan perbaikan dalam hal monitoring berkelanjutan, evaluasi efektivitas pengendalian, dan integrasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 3,002, menurun menjadi 1,3 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2,84 pada tahun 2024.

Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berada pada Level 2, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kompetensi auditor internal serta petugas pengendalian internal belum merata di seluruh OPD, yang menyebabkan lemahnya pengawasan fungsional.

2. Belum Terintegrasinya Manajemen Risiko secara Optimal

Belum terdapat pedoman manajemen resiko Pemerintah Dearah Kabupaten Kepulauan Selayar. Meskipun ada, pelaksanaan manajemen risiko belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan di OPD.

3. Kultur Organisasi yang Belum Mendukung

Masih terdapat resistensi terhadap perubahan, serta persepsi bahwa SPIP hanya bersifat administratif, bukan sebagai alat bantu manajerial.

Mendorong peningkatan ke level maturitas SPIP yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperkuat peran Inspektorat sebagai *quality assurance* dalam pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Strategi penguatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan integrasi SPIP dalam siklus manajemen pembangunan daerah menjadi kunci utama menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan efektif.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Sustansial

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada lima tahun terakhir (tahun 2020 sampai 2024) sebesar 100 persen.

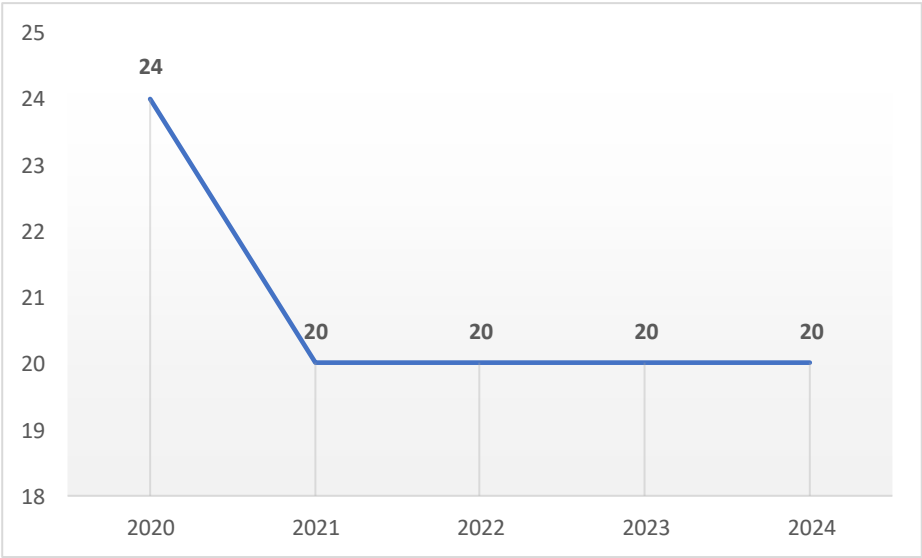
Beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam mengoptimalkan persentase penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda), baik oleh pemerintah daerah, Satpol PP, maupun aparat penegak hukum lainnya adalah :

- 1) Kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih akan lebih mendorong implementasi Perda secara konsisten. Kepemimpinan ini juga berpengaruh dalam penguatan kelembagaan Satpol PP dan perangkat pendukung lainnya;
- 2) Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- 3) Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sangat penting, terutama untuk Perda yang mengandung sanksi pidana atau perdata;
- 4) Pengawasan masyarakat dan partisipasi publik. Partisipasi ini bisa melalui pelaporan pelanggaran, sosialisasi, atau keterlibatan dalam forum musyawarah; dan
- 5) Kampanye publik, penyuluhan, dan dialog dengan komunitas penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Perda.

2.1.4.2.2. Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan

bagi perempuan. Selama 4 kali pemilihan legislatif, jumlah anggota DPRD perempuan terpilih sebanyak 4 sampai 6 orang dengan persentase sebesar 16 sampai 24 persen, yang terlihat pada **Grafik 2.89**.



Grafik 2. 89 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.4.2.3. Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya kontribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan keseluruhan potensi-potensi di daerah demi kemakmuran masyarakat.

Sejalan dengan era reformasi, salah satu unsur penting yang selalu mengiringi implementasi desentralisasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari unsur eksekutif maupun legislatif telah menghasilkan beberapa Peraturan daerah setiap tahunnya dalam rangka mengatur pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, dari beberapa Peraturan daerah dimaksud belum ada Peraturan daerah yang

dihasilkan merupakan inisiatif dari DPRD melainkan keseluruhan adalah inisiatif atau usulan dari unsur eksekutif. Olehnya itu, kedepannya DPRD dapat melakukan inisiasi untuk membentuk Peraturan daerah sesuai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian masalah dimaksud. Jumlah Peraturan daerah yang dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2. 24
Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	Jumlah Peraturan Daerah inisiatif DPRD
1	2020	6	0
2	2021	10	0
3	2022	10	0
4	2023	11	0
5	2024	11	0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar dan Bagian Hukum Setda, 2025

2.1.4.2.4. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Peran perempuan dalam partai politik sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Keterwakilan perempuan di parlemen dan partisipasi politik perempuan dalam Pemilu bukan hanya sekedar pelengkap semata, melainkan keterwakilan perempuan dan partisipasi politik perempuan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan berkontribusi dalam perubahan secara nyata dan dapat dirasakan oleh perempuan.

Persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar telah melebihi 30 persen sebagaimana syarat sekurang-kurangnya keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai politik. Persentase perempuan pengurus partai politik sudah mencapai 38,66 persen dari tahun 2021 sampai dengan 2024, dengan rincian setiap partai tertera pada **Tabel 2.25**.

Tabel 2. 25
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Kepulauan Selayar

Partai Politik	Jumlah Pengurus	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
PKB	18	7	38,89
Gerindra	26	9	34,62
PDIP	15	5	33,33
Nasdem	31	11	35,48
Buruh	3	1	33,33
Gelora	3	1	33,33
PKS	44	19	43,18
PKN	9	4	44,44
Hanura	13	5	38,46
Garuda	7	4	57,14
PAN	23	9	39,13

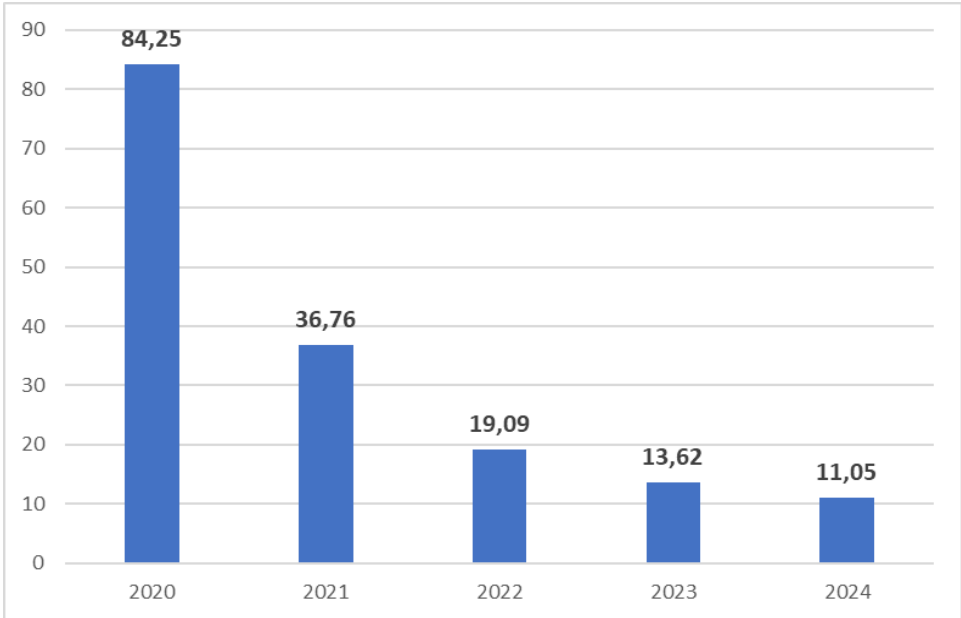
Partai Politik	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
PBB	9	4	44,44
Demokrat	48	22	45,83
PSI	5	2	40,00
PPP	3	1	33,33
Ummat	16	5	31,25
Golkar	40	12	30,00
TOTAL	313	121	38,66

Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.2.5. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Pembangunan suatu daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu daerah. Semakin kondusif keadaan di suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tenang dalam menjalankan aktivitas di segala bidang kehidupan, seperti : ekonomi, sosial ataupun budaya.

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun, jumlah tindak pidana meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu melebihi 300 tindak pidana dari yang sebelumnya hanya pada kisaran 100 tindak pidana. Persentase tindak kriminal yang ditangani juga mengalami capaian yang fluktuatif dan yang tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 84,25 persen. Persentase tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.90**.



Grafik 2. 90 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2025

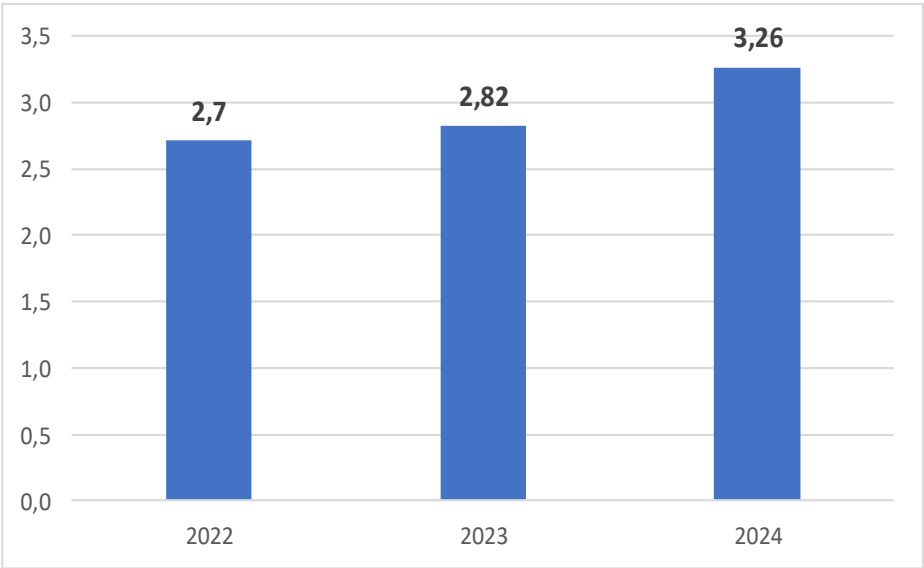
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu : lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Pengukuran IDSD untuk level kabupaten/kota baru dilaksanakan mulai tahun 2022. IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa pilar IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 adalah pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro dan pilar ukuran pasar. Peningkatan capaian pilar adopsi TIK disebabkan karena pada tahun 2023, banyak tower BTS yang dibangun di wilayah terpencil dan kepulauan sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati jangkauan layanan telepon selular dan internet. Lebih lanjut bahwa capaian ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi serta PDRB per kapita yang meningkat seiring banyaknya *event-event* yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta beberapa pekerjaan konstruksi yang menyebabkan aktivitas ekonomi semakin menggeliat. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah serta inflasi yang dapat ditekan turut berkontribusi dalam peningkatan capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa pilar IDSD yang masih memiliki capaian dibawah nilai indeks 1 (satu), yaitu : pilar sistem keuangan dan pilar kapabilitas inovasi. Rendahnya pilar sistem keuangan disebabkan oleh belum masifnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh masyarakat untuk membuka usaha. Terkhusus untuk pilar kapabilitas inovasi, Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki ekosistem riset dan inovasi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan jumlah peneliti serta masih belum optimalnya belanja riset dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada **Grafik 2.91.**



Grafik 2. 91 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024

Sumber Data: BRIN, 2025

2.1.4.3.2. Jumlah Kerjasama antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kerjasama antar daerah, baik itu kerjasama dengan kabupaten/kota yang lain, kerjasama dengan Pemerintah provinsi maupun dengan Pemerintah pusat. Dari berbagai kerjasama yang dilakukan, kemudian seluruh dari kerjasama dimaksud kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang ada. Jumlah kerjasama serta persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti tertera pada **Tabel 2.26**.

Tabel 2. 26

Jumlah Kerjasama dan Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

NO	JENIS KERJASAMA	JUMLAH KERJASAMA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	2	-	2
2	Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi	3	1	2	2	2
3	Kerjasama dengan Pemerintah Pemerintah Pusat/ Instansi	1	6	5	1	3

NO	JENIS KERJASAMA	JUMLAH KERJASAMA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Vertikal/ Lembaga non Kementerian					
4	Kerjasama luar negeri	-	-	-	-	-
JUMLAH		4	7	9	3	7
Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1. Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah menggunakan indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur.

Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana data yang disajikan berikut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain masih rendahnya angka partisipasi pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) dengan capaian pada angka 82,44 persen pada tahun 2021 turun menjadi 65,5 pada tahun 2022 persen, kemudian meningkat menjadi 93,14 persen pada tahun 2024. Masih rendahnya persentase partisipasi pada pendidikan PAUD yaitu sebesar 99,6 persen pada tahun 2021 dan turun menjadi 93,78 pada tahun 2024. Beberapa hal yang menyebabkan capaian kinerja bidang Urusan Pendidikan tidak maksimal, yaitu akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan. Capaian indikator kinerja bidang pendidikan secara detail tertera pada **Tabel 2.27**.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	99	79,01	65,5	90,02	98,25	Akses pendidikan yang terbatas, sistem pendidikan, tantangan pembelajaran, faktor sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi orang tua tentang pentingnya pendidikan.	<i>Mandatory Spending</i> bidang pendidikan minimal 20 persen dari APBD
2	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	98,2	92,84	78,74	52,26	48,49		
3	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	98,42	99,6	88,46	94,44	89,30		
4	Cakupan persentase muatan lokal dalam kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	%	5	5	100	100	100	Eksistensi budaya lokal mulai tergerus, sehingga sulit menemukan materi yang relevan	Kepulauan Selayar memiliki kekayaan budaya, seni, bahasa daerah, dan tradisi yang masih hidup dan relevan, serta materi muatan lokal yang kontekstual dan menarik bagi anak.
5	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	%	65	66	100	100	100	Masih kurangnya guru / tenaga pendidik, seperti guru kelas, guru agama, guru olah raga, dan guru beberapa mata pelajaran, baik karena permasalahan distribusi guru maupun karena jumlahnya yang kurang	Peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi
6	Persentase jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	20	24	100	100	100	Masih terdapat lembaga/satuan pendidikan belum mendaftarkan akreditasi lembaganya	Lembaga informal terakreditasi
7	Persentase pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	%	10	10	100	100	100	Tidak tersedianya buku ajar, kurikulum, dan bahan pembelajaran yang memadai	Peran aktif komunitas adat, sanggar seni, dan lembaga swadaya masyarakat dalam melestarikan bahasa dan sastra.

Sumbe Data: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.2. Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat dan tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja bidang kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik pada beberapa indikator khususnya indikator Standar Pelayanan Minimal, secara detail tertera pada **Tabel 2.28**.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,8	85,66	76,3	78,34	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; Rasio ketersediaan fasilitas penyedia pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk belum memenuhi standar	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	76,19	76,84	76,4	75,88	99,48	Masih adanya persalinan yang dilakukan/ ditangani di luar Tenaga Kesehatan (Dukun)	Penyuluhan dan edukasi ibu hamil. Peningkatan kesadaran masyarakat
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	79,25	80,9	80,04	79,41	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	63,08	57,3	54,08	64,37	94,03	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan balita di puskesmas	Penerapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) kesehatan
5	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	19,8	43,9	68,97	85,90	92,23	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan warga negara usia pendidikan dasar.	Penerapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) kesehatan
6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87,8	100	100	100	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	43,88	43,88	50,9	100	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
8	Persentase warga negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,9	100	100	100	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
9	Persentase warga negara penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91,9	100	100	100	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100	100	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
11	Persentase warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	60,65	73,87	Capaian pelayanan kesehatan lingkungan belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Masih rendahnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat	Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sampai tingkat desa dan kelurahan
12	Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,9	100	85,56	70,85	100	Pemeriksaan HIV pada ibu hamil terutama desa sangat terpencil di kepulauan sulit dijangkau. Ketersediaan RDT HIV yang sangat terbatas tidak mencukupi untuk pustu yang terdapat di desa-desa terpencil.	Perbaikan distribusi tenaga kesehatan
13	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	0,028	0,030	0,031	0,036	0,0138	Rasio perbandingan tenaga kesehatan masih rendah, khususnya untuk dokter umum masih di bawah target Indonesia Sehat 40 per 10.000 penduduk	Perbaikan distribusi dan pemerataan tenaga dokter dan bidan di wilayah kepulauan
14	Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat	%	98,4	99,6	100	100	100	Peredaran produk ilegal (obat, kosmetik dan makanan) tanpa izin edar	Regulasi yang jelas terkait standar keamanan, mutu dan manfaat produk
15	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	%	0	0	37,41	30,19	92,95	Masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat
16	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama		

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Salah satu indikator bukan SPM yang menunjukkan capaian cukup baik, dapat dilihat pada persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100 persen, serta rasio tenaga kesehatan yang mencapai angka 0,014 atau 14/1000 penduduk pada tahun 2024 yang menandakan bahwa untuk satu orang tenaga kesehatan melayani 13-14 orang penduduk. Namun masih terdapat beberapa indikator yang merupakan unsur paling menunjang dalam peningkatan angka harapan hidup dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal namun capaiannya masih rendah yaitu, pelayanan kesehatan terhadap penderita *Tuberculosis* dengan capaian 73,87 persen, persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan capaian 70,93 persen, dan persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan dengan capaian 60,28 persen lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 85,90 persen (tahun 2023). Masih rendahnya capaian tersebut khususnya untuk pencapaian SPM disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan usia lanjut di puskesmas; masih adanya persalinan yang dilakukan/ ditangani di luar tenaga kesehatan (dukun); belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan warga negara usia pendidikan dasar; sulitnya pelayanan kesehatan terutama untuk desa sangat terpencil di kepulauan, karena sarana transportasi yang terbatas.

2.1.4.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024, tertera pada **Tabel 2.29.**

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	78,72	100	100	Belum ada kebijakan/peraturan daerah tentang pemanfaatan sampadan pantai dan saluran irigasi	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir sesuai dengan kewenangan. Tersusunnya perencanaan teknis bangunan
2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	0	100	100	Lokasi pembangunan daerah rawan abrasi, erosi dan akresi sulit diakses	Pembangunan infrastruktur pangaman pantai sesuai dengan kewenangan
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	10,95	11,41	13,19	17,10	3,89	Masih belum terpenuhinya kebutuhan embung dan saluran irigasi	Pembangunan infrastruktur embung dan saluran irigasi sesuai dengan kewenangan. Perencanaan teknis pembangunan sudah disusun
4	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	48,30	53,79	58,23	76,00	43,20	Penyediaan layanan air minum terkendala pembebasan lahan	Tersusunnya perencanaan teknis bangunan
5	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	%	0	0	0	0	0	Pembangunan sarana prasarana masih berdasar pada perencanaan teknis kementerian/ lembaga	Peraturan daerah dan kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan sampah
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80	90	0	100	100	Penyediaan layanan air limbah terkendala pembebasan lahan	Tersusunnya perencanaan teknis bangunan
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	75	95	55	55	73,13	Pembangunan pemukiman penduduk tidak memperhatikan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	Penegakan peraturan terkait bangunan dan fasilitas pendukungnya. Perlibatan lintas instansi
8	Persentase infrastruktur pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis	%	-	-	-	0	0	Kawasan strategis proses penetapan	Dukungan regulasi dalam penyediaan infrastruktur pemukiman pada kawasan strategis

NO	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
9	Persentase kepatuhan IMB	%	0	0,5	41	100	100	Keterbatasan personil yang melakukan survei lokasi	Izin IMB terintegrasi dengan OSS perizinan
10	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya milik Pemerintah	%	67,00	69,00	72,30	73,20	100	Keterbatasan data bangunan	Pemeliharaan bangunan gedung pemerintah berdasarkan pada tingkat kerusakan
11	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	%	68	70	71	75	100	Kurangnya tenaga pengawas teknis	Pemeliharaan bangunan gedung pemerintah berdasarkan pada tingkat kerusakan
12	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	55,85	58,15	58,24	57,26	54,58	Meningkatnya beban jalan dan struktur tanah yang menyebabkan tingkat kerusakan semakin cepat	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan sesuai SK jalan kabupaten
13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	%	0	0	0	0	0	SK jalan desa belum ada	Dukungan regulasi dan alokasi dana desa dalam pembangunan ruas jalan desa
14	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	%	96,67	96,67	96	96,25	79,38	Kualitas konstruksi yang perlu ditingkatkan dan faktor umur jembatan	Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan sesuai SK jembatan kabupaten
15	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	22,6	31,3	36,2	40,1	11,50	Kurangnya peserta yang mengikuti kegiatan kompetensi	Tenaga operator/teknis/analisis tersedia
16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0	0,45	0	Kurangnya data dan pelaporan kecelakaan kerja	Pelatihan dan sertifikasi pekerja dan pengawas K3
17	Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR	%	95	84,85	86	88,89	88,89	Masih lemahnya pengawasan tata ruang	Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.29**, beberapa kendala dalam pencapaian target bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain tidak adanya data yang akurat terkait total panjang jalan desa, tidak terlaksananya kegiatan akibat keterbatasan anggaran, terbatasnya kewenangan kabupaten terhadap wilayah sungai, banyaknya drainase yang tersumbat karena sedimen dan sampah, keterbatasan personil, tenaga teknis atau operator yang bersertifikat kompetensi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB/PBG.

2.1.4.4.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan perumahan dan permukiman semakin meningkat. Hal tersebut membutuhkan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan pengolahan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

Capaian kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu luas kawasan kumuh Kabupaten Kepulauan Selayar berkurang menjadi 6,32 persen, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurun sebesar 4,42 persen. Perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum pada tahun 2024 sebesar 1,83 persen. Data Capaian indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman secara lengkap tertera pada **Tabel 2.30**.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	82,99	98,98	100	SK Penetapan Bencana belum dikeluarkan oleh BPBD.	Melakukan pendataan BNBA
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0	Belum ada Program Pemerintah Daerah yang berdampak pada relokasi	Pelaksanaan program pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni dilaksanakan pada asset pemerintah daerah
3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	0,01	4,80	6,32	6,23	6,32	Beberapa penanganan kawasan kumuh terkendala lahan yang masih bersatatus tanah pinjaman (bukan tanah hak milik)	Penanganan kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh
4	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	44,48	20,08	3,26	3,48	4,42	Beberapa penanganan rumah yang tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersatus tanah pinjaman	Data RTLH terdata di aplikasi eRTLH
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	63,37	0,46	0,50	1,03	1,84	Belum ada perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi	Ketersediaan pengembangan kompleks perumahan yang bersertifikasi
6	Persentase rekondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	Belum ada pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan	Penerbitan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terintegrasi dengan OSS Perizinan

Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penurunan luas kawasan kumuh, berkurangnya jumlah RTLH serta perumahan sudah dilengkapi PSU merupakan *impact* dari beberapa intervensi baik dari Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program Pemerintah Daerah melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Sementara itu, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 belum ada penanganan untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten dikarenakan tidak ada rumah penduduk yang terdampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara capaian untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebesar 82,99 persen merupakan realisasi dari pelaksanaan program pemerintah untuk penanganan rumah bagi warga terdampak gempa di kecamatan kepulauan pada tahun 2022. Selain itu, dari tahun 2020 belum ada rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diterbitkan disebabkan tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan.

2.1.4.4.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2020-2024), yaitu 100 persen, waktu tanggap penanganan kebakaran 11,84 menit pada tahun 2023 atau lebih lambat dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu 7,58 menit. Informasi capaian kinerja secara detail tertera pada **Tabel 2.31**.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan patroli rutin yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan patroli cipta kondisi/ patroli skala besar yang merupakan gabungan antara Satpol PP, TNI.
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	Masih terbatasnya jumlah personil dalam memberikan layanan hukum	ASN yang merupakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberikan layanan dan pendampingan hukum pada masyarakat
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	89,06	92,68	100	85,00	Lokasi kebakaran lahan yang jauh/ sulit dijangkau	Pos-pos pemadam tingkat kecamatan (Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimasunggu)
4	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	11,95	9,01	7,58	11,84	8,35		
5		%	99,90	100	100	100	99,83	Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana. Kurangnya pemahaman warga negara akan budaya sadar bencana	Penyelenggaraan layanan informasi rawan bencana dengan optimal. Tersusunnya Kajian Resiko Bencana (KRB) sebagai <i>baseline</i> data daerah rawan bencana dan acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	93	74,52	100	100	99,23	Kurangnya tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dan kompeten bidang kebencanaan	Peningkatan penyelenggaraan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terhadap masyarakat, sekolah, instansi, desa/kelurahan. Telah terpasanya jalur-jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu informasi bencana di desa, sekolah dan kantor pemerintah
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	75,10	89,99	87,30	100	99,23	Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat) seperti kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana.	Sinergitas dan dukungan antar instansi terkait dalam upaya penanganan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Meningkatnya waktu tanggap penanganan kebakaran dan menurunnya persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2024 diakibatkan oleh kejadian kebakaran di lokasi yang jauh dari pos pemadam atau sulit dijangkau. Selain itu untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pelaksanaannya belum optimal dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat), seperti kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) dan kurang optimalnya kondisi kendaraan yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana.

2.1.4.4.6. Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya, yaitu : memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Dalam bidang pelayanan sosial, beberapa indikator kinerja pemerintah yang belum optimal, antara lain : masih rendahnya persentase pemberdayaan sumber kesejahteraan sosial, yaitu sebesar 22,50 persen pada tahun 2024 dan rendahnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang difasilitasi, yaitu sebesar 53,60 persen, data selengkapnya tertera pada **Tabel 2.32.**

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan yang diberdayakan	%	18,66	28,79	13,7	12,58	22,50	Kurangnya pemberdayaan berupa bimtek, pelatihan dan sosialisasi pada PSKS (TKSK, pendamping PKH dan Anggota Karang Taruna)	Peningkatan pemberdayaan berupa bimtek, pelatihan dan sosialisasi pada PSKS (TKSK, pendamping PKH dan Anggota Karang Taruna).
2	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	18,99	19,6	100	100	100	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	31,99	100	98,59	100	100	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	13,35	17,5	98,99	100	100	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5	Persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	25	0	100	100	100	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	77,5	86,6	47,55	40,54	53,60	Belum optimalnya pendataan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)	Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
7	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	%	86,6	86,6	47,55	40,74	73,28	Meningkatnya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan KIP /PIP dan data DTKS	Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
8	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	Belum seluruh korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Warga korban bencana diassesment dan ditindaklanjuti dengan pemberian pelayanan dan bantuan permakanan/ sandang/ tempat penampungan sementara
9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1	Kurangnya tenaga pemelihara taman makam pahlawan	TMP yang dikelola terletak di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar.

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Rendahnya berapa capaian kinerja tersebut disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan peningkatan potensi untuk PPKS sangat terbatas. Disamping itu, beberapa indikator yang capaiannya mengalami peningkatan karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan kinerja kegiatan dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, optimalisasi penanganan bencana baik bencana alam maupun sosial, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.1.4.4.7. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK juga sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya-upaya, diantaranya : meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat menjadi 52,49 persen pada tahun 2024. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi meningkat menjadi 3,01 persen pada tahun 2024. Informasi selengkapnya tertera pada **Tabel 2.33**.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	20,31	85,71	77,70	50,00	50,00	Belum ada RTK, namun telah disusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bagi perusahaan
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,26	0,40	0,48	2,63	3,01	Target pelatihatam kerja tidak sesuai dengan pencari kerja	Melakukan penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan keahlian calon tenaga kerja
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	12,5	24,04	39,06	27,55	52,49	Lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja	Peningkatan kapasitas pelatihan; seleksi masuk peserta pelatihan; pengelompokan / pemetaan peserta pelatihan sesuai latar belakang perusahaan dan minat peserta
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0	0,30	0,60	0,94	0,92	Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkn 5 aspek tata kelola perusahaan yang layak	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tata kelola perusahaan yang layak

Sumber Data: Disperinaker Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat data di atas, terdapat satu indikator yang target dan capaiannya belum terpenuhi, yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disebabkan sampai dengan tahun 2024 belum ada perusahaan yang menyusun RTK, sementara RTK makro telah disusun. Selain itu, terdapat indikator yang target dan capaiannya dibawah 1 persen dari tahun 2020-2024, yaitu perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, yang disebabkan karena sampai pada tahun 2024 regulasi terkait hal tersebut masih dalam tahap sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan namun dari sisi capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 0,90 persen.

2.1.4.4.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Permasalahan mendasar dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu : rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan, lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, serta masih adanya pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian indikator kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain : persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,15 persen meningkat menjadi 0,90 persen pada tahun 2023, dan menurun menjadi 0,26 persen pada tahun 2024. Sedangkan persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten menunjukkan penurunan positif dimana pada tahun 2021 sebesar 0,069 persen dan pada tahun 2022 sebesar 0,045 persen dan pada tahun 2023 sampai tahun 2024 seluruh korban kekerasan anak yang dilaporkan pada dinas terkait telah ditangani 100 persen. Informasi selengkapnya tertera pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2. 34
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,12	0,15	0,54	0,90	0,26	Masih rendahnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender di perangkat daerah	Penganggaran ARG dalam APBD tiap tahun
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0,006	1,28	9,56	1,56	0,20	Belum ada kebijakan tingkat kabupaten tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	Pembentukan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), jika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilaporkan ke UPTD PPA.
3	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang terstandarisasi	%	0	0	0	0	0	Belum ada lembaga penyedia layanan keluarga yang terstandarisasi di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pembentukan Puspaga (Pusat Pelayanan Keluarga)
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0,18	0,8	0,80	0,36	0,95	Kelembagaan gender belum berjalan optimal	Kelembagaan gender telah tersedia di tingkat kabupaten
5	Persentase capaian pemenuhan hak anak (skor indikator KLA)	%	120	125	138,89	65,00	0	Belum maksimalnya pembinaan dan peran lembaga anak	Lembaga pemenuhan hak anak telah terbentuk di tingkat kabupaten
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten	%	0,07	0,069	0,045	100	100	Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anak	Penanganan korban kekerasan anak oleh instansi terkait

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan uraian **Tabel 2.34**, beberapa kendala dalam pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah belum adanya kebijakan kabupaten terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), belum ada lembaga penyedia layanan keluarga yang terstandarisasi serta layanan sistem informasi gender dan anak baru mencakup dua kecamatan.

2.1.4.4.9. Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Persentase desa rawan pangan yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditangani pada tahun 2021 sebesar 4,88 persen meningkat menjadi 60,87 persen dari total 81 desa pada tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 41,18 persen pada tahun 2024. Informasi selengkapnya tertera pada **Tabel 2.35**.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Bidang Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	31,03	4,88*	38,71	60,87	41,18	Data miskin ekstrim yang masih tinggi. Kurangnya infrastruktur pangan dalam mendukung ketahanan pangan	Meningkatkan bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin ekstrim. Pengembangan infrastruktur pangan dan pertanian sehingga memudahkan akses dalam proses produksi, pengangkutan dan pemasaran hasil-hasil pertanian
2	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	15,68	12,25	48,33	51,47	51,45	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras. Harga bahan pangan masih fluktuatif. Konsumsi sayuran dan buah-buahan masih kurang	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif. Menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok selain beras. Meningkatkan ketersediaan pangan lokal pengganti beras. Keterjangkauan harga pangan lokal. Meningkatkan ketersediaan sayuran dan buah-buahan
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	44,83	24,39	19,35	34,78	26,09	Ketersediaan pangan yang tidak merata. Akses pangan tidak optimal.	Meningkatkan ketersediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal, ketersediaan fasilitas dan layanan air bersih, ketersediaan tenaga kesehatan yang merata
4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	100	100	80	100	Kurangnya pengawasan penggunaan pestisida pada tanaman. Kurangnya pembinaan petani/poktan/ gapoktan untuk menggunakan pestisida alami.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan secara berkala. Pengawasan keamanan dan mutu pangan menjadi perhatian, mengingat bahan pangan khususnya pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat kontaminansi oleh cemaran kimia, fisik maupun mikrobiologi. Peran SDM pertanian sangat menentukan kualitas produk pertanian

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025

Informasi pada **Tabel 2.35**, dapat dilihat bahwa cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang didorong oleh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif, namun keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya, yaitu : konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan diversifikasi pangan adalah menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok selain beras yang nantinya masyarakat akan memilih komoditas apa yang dikonsumsi sebagai pengganti beras, ketersediaan pangan lokal pengganti beras, serta keterjangkauan harga pangan lokal. Selain itu persentase desa rawan pangan yang ditangani juga meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan oleh terdapat 14 desa yang keluar dari desa rawan pangan prioritas 1-3. Sementara untuk penanganan kerawanan pangan hanya dapat dilakukan pada 8 desa/kelurahan dari 23 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan prioritas 1-3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan selama 1 tahun dan dilakukan pula uji sampel pangan segar dengan capaian 80 persen. Pengawasan keamanan dan mutu pangan telah menjadi perhatian, mengingat bahan pangan khususnya pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat kontaminasi oleh cemaran kimia, fisik maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Selain itu, peran SDM pertanian sangat menentukan kualitas produk pertanian.

2.1.4.4.10. Pertanahan

Capaian kinerja bidang pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum pada tahun 2021-2022 adalah sebesar 20 persen, namun untuk tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sementara penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan pada tahun 2021 sebesar 20 persen. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 capaiannya sebesar 0 persen dikarenakan tidak ada kasus tanah yang ditangani. Informasi selengkapnya tertera pada **Tabel 2.36**.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	0	36,65	0	Masih terdapat asset tanah belum bersertifikasi	Proses sertifikat tanah dalam proses pengurusan
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	n/a	20	20	0	0	Belum ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada rencana tata ruang.
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0	0	1	0	0	Belum tersedia lokasi pembangunan disebabkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih berjalan	Proses penetapan kawasan khusus proses pemenuhan persyaratan kelengkapan
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	60	0	0	Masih banyaknya bidang tanah masyarakat yang belum bersertifikat	Program sertifikasi lahan milik masyarakat oleh Kantor Pertanahan
5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	%	100	20	0	0	0	Masih banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat	Proses sertifikat tanah dalam proses pengurusan
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100	20	100	1,97	0	Masih terdapat asset tanah belum bersertifikasi	Proses sertifikat tanah dalam proses pengurusan
7	Persentase luas lahan ulayat yang di tetapkan	%	0	0	0	0	0	Tidak terdapat tanah yang masuk kategori tanah ulayat	Penetapan lahan ulayat
8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	%	n/a	30	40	0	0	Belum ada penetapan pemanfaatan tanah kosong di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penetapan aset tanah milik pemerintah daran rencana peruntukannya
9	Persentase rekomendasi izin membuka tanah untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan	%	0	0	100	0	0	Tidak ada rekomendasi izin membuka lahan untuk kepentingan masyarakat (sudah dikuasai oleh masyarakat)	Penggunaan lahan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang
10	Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah	%	n/a	20	30	0	0	Zona nilai tanah yang ditetapkan berbeda dengan nilai jual	Penetapan nilai jual tanah oleh pemerintah

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.11. Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, penanganan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Realisasi capaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.37**.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang trintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten	%	0	37,50	11,25	12,50	23,00	Tahapan penyusunan RPPLH untuk mencapai target telah terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi antar Pokja dan Tim, dan sinergi stakeholder
2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	2,59	2,75	1,76	2,01	3,91	Nilai Indeks Pencemaran yaitu 2,01 (cemar ringan), semakin rendah, menunjukkan semakin baik status mutu air	Pelaksanaan pengambilan sampel, kualitas hasil uji sampel air, kondisi wilayah pengambilan sampel air, koordinasi dengan desa yang menjadi lokasi pengambilan sampel
3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	1,38	1,39	1,40	1,40	1,40	Luas RTH Publik telah dipenuhi	Penambahan RTH di beberapa lokasi, Kegiatan pembersihan dan pemeliharaan taman (sarana dan prasarana)
4	Persentase lembaga/ perusahaan penghasil limbah B3 yang diawasi	%	100	90	100	100	100	Masih terdapat lembaga/perusahaan penghasil limbah yang membuang limbahnya belum memenuhi baku mutu lingkungan	Pengawasan dan koordinasi antar pelaku usaha penghasil limbah B3
5	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan	%	63,64	4,35	60	51,20	47,14	Masih kurangnya ketaatan perusahaan dan pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan limbah dan lingkungan	Perusahaan / pelaku industri memiliki izin usaha dan izin lingkungan
6	Persentase MAH kearifan lokal yang terkait PPLH yang diakui beneradaannya	%	0	0,19	1,42	1,43	n.a	Masih terdapat kearifan lokal desa yang belum terdata	Pelaksanaan pembinaan yang baik antar lembaga
7	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan diklat	%	0	0	28,85	30,00	20,00	Masih kurangnya lembaga adat terdaftar yang mengikuti diklat	Pelaksanaan pembinaan yang baik antar lembaga
8	Persentase lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan yang berprestasi	%	20	20	25	20	33,33	Kurangnya lembaga masyarakat yang berprestasi (17 desa yang berprestasi)	Pelaksanaan koordinasi yang baik antar Entitas dan Tim, pelaksanaan pembinaan yang baik terhadap Entitas
9	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	%	80	100	100	100	100	Survei pemantauan pengaduan yang masuk telah terbatas	Penanganan pengaduan yang cepat mulai proses penerimaan sampai verifikasi lapangan kasus pengaduan terkait lingkungan hidup
10	Presentase pengelolaan persampahan yang bernilai ekonomi	%	1,30	19,67	2,83	1,66	7,90	Belum baiknya penanganan sampah bernilai ekonomi terkait dengan manajemen persampahan	Pengawasan dan pembinaan pada bank sampah induk dan TPS 3R. Peningkatan pelaku usaha sampah skala besar

Sumbe Datar: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah keseluruhan penduduk usia 17 tahun ke atas. Persentase penerbitan KTP-el pada tahun 2022 sebesar 91,40 persen meningkat menjadi 94,07 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2022 sebesar 50,27 persen meningkat menjadi 52,64 persen pada tahun 2024. Persentase penerbitan akta pencatatan sipil pada tahun 2022 sebesar 96,60 persen dan meningkat menjadi 98,23 persen pada tahun 2024. Kendala yang dihadapi dari penerbitan dokumen kependudukan adalah beberapa data terkait penerbitan KTP-el masih harus menunggu dari Dukcapil Pusat, begitu pula dengan data untuk penerbitan akta pencatatan sipil. Sementara OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai dengan tahun 2024 hanya sebesar 62,96 persen dikarenakan perjanjian kerjasama masih dalam proses persetujuan pusat. Capaian kinerja bidang administrasi kependudukan selengkapnya tertera pada **Tabel 2.38**.

Tabel 2. 38
 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase penerbitan KTP-el	%	91	93,7	90,26	92,77	94,07	Masih terdapat masyarakat yang belum melakukan perekaman.	Pemenuhan peralatan pelayanan yang memadai
2	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	12,67	43,24	55,69	54,08	52,64	Masih adanya penduduk yang belum mengurus kartu identitas anaknya	Pelayanan adaministrasi kependudukan langsung ke sekolah-sekolah
3	Persentase penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	77,04	85,98	84,10	86,96	98,23	Kurangnya kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan	Pemenuhan sarana, prasarana dan SDM. Peningkatan kepedulian pemerintah kecamatan dan desa melaporkan mutasi penduduk
4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	46,15	53,84	44,54	61,54	62,96	Adanya penambahan persyaratan berupa sertifikat ISO dari Kementrian Dalam Negeri bagi OPD yang akan melakukan kerja sama dalam pemanfaatan data	Pembuatan naskah PKS di respon cepat sehingga PKS dapat diselesaikan (Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemenfaatan Data Kependudukan)
5	Persentase ketersediaan data Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	Kurangnya pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan L/K dalam penyusunan Profil Kependudukan

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat serta pembinaan PKK. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Kurun waktu lima tahun terakhir, persentase administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi mencapai 100 persen pada tahun 2024. Persentase fasilitasi dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa tidak mengalami peningkatan dari 33,33 persen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.39**.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi	%	0	25	100	100	0	Masih kurangnya SDM, sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatkan keterlibatan masyarakat, kapasitas petugas pendataan. Sosialisasi dan Evaluasi. Dukungan pemerintah desa. Pemenuhan infrastruktur dan teknologi
2	Persentase peningkatan kerja sama desa	%	0	25	0	8,6	0	Ketiadaan aturan teknis atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam membentuk kerja sama antar desa serta kurangnya pelatihan atau pendampingan untuk membentuk kerja sama antar desa (misalnya dalam bentuk Badan Kerja Sama Antar Desa atau BKAD)	Meningkatkan kerja sama antar desa dan pembentukan BUMDes Bersama. Kepemimpinan desa. Partisipasi masyarakat, sumber daya dan infrastruktur. Kebijakan dan regulasi, Komunikasi dan informasi
3	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	%	80	85	100	100	100	Masih terdapat beberapa desa yang belum baik penyelenggaraan administrasi desa.	Kualitas sumber daya manusia, Infrastruktur teknologi. Dukungan keuangan. Kerjasama antar lembaga. Regulasi dan kebijakan. Komunikasi dan informasi
4	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	25	33,33	33,33	33,33	Masih kurangnya peran kelembagaan masyarakat dan desa	Komitmen dan kepemimpinan. Partisipasi masyarakat, sumber daya. Jaringan dan kemitraan, Sistem monitoring dan evaluasi

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada beberapa indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah meningkatnya capaian kinerja pada indikator cakupan fasilitasi administrasi pemerintahan desa yang didorong oleh semakin efektifnya sistem yang digunakan oleh pemerintah salah satunya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, terdapat satu indikator yang capaiannya tidak mencapai target (0 persen), yaitu persentase peningkatan kerja sama desa. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya perjanjian kerja sama (MoU) antara desa yang terbentuk sampai dengan tahun 2024, sementara telah dilakukan fasilitasi dan sosialisasi ke desa terkait kerja sama antara desa.

2.1.4.4.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga.

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu daerah. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator *Total Fertility Rate (TFR)* atau angka kelahiran total, yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya, persentase pemakaian kontrasepsi modern, dan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam peningkatan keluarga sejahtera. Beberapa hambatan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan masyarakat. Capaian kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024, tertera pada **Tabel 2.40.**

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,09	2,1	2,17	1,94	2,10	Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ikut menjadi peserta KB karena keinginan segera memiliki anak	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti KB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,2	77,23	72,54	69,42	59,10	Masih rendahnya cakupan kelembagaan KB	Peningkatan operasional penyuluh KB
3	Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							Kebijakan dan dukungan pemerintah berupa PKH (Program Keluarga Harapan), P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) serta adanya penyuluh keluarga, kader, atau fasilitator dari dinas terkait yang mendampingi kelompok	Sarana dan prasarana, seperti : tempat pertemuan, alat pelatihan, atau akses teknologi masih terbatas serta adanya budaya patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam kelompok masyarakat
	BKB	%	53,70	15,11	14,38	29,18	25,13		
	BKR	%	38,01	12,38	5,74	2,71	10,22		
	BKL	%	27,11	9,06	6,00	40,01	10,26		
	PIK-R	%	10	3,55	4,30	73,03	5,76		
	UPPKS	%	14	4,64	5,09	43,19	90,81		

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.15. Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Realisasi capaian indikator kinerja perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.41**.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	%	30,54	10,37	25,23	37,92	26,83	1. Terbatasnya rambu jalan dan pelengkap jalan 2. Kondisi jalan rusak, sempit, atau berlubang memperlambat arus lalu lintas 3. Tidak adanya integrasi moda transportasi antar kecamatan/desa di kabupaten	Kecepatan tempuh yang semakin tinggi dan arus lalu lintas yang semakin baik. Hal ini ditandai dengan kondisi ruas jalan yang semakin baik dalam melayani volume kendaraan yang ada. Adanya perbaikan di beberapa ruas jalan dan juga pemberlakuan jalan satu arah di beberapa ruas jalan yang dirasa perlu turut menunjang peningkatan kinerja lalu lintas jalan kabupaten
2	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi	%	63,63	62,5	41,37	44,07	44,83	Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada tambatan perahu layak fungsi	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut sesuai dengan studi kelayakan dan studi desain yang telah disusun
3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	Belum adanya investor yang menjadi penggerak sehingga rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter belum bisa diterbitkan	Lokasi investasi tersedia

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja lalu lintas melampaui target karena didukung oleh kecepatan tempuh yang semakin tinggi dan arus lalu lintas yang semakin baik. Hal ini ditandai dengan kondisi ruas jalan yang semakin baik dalam melayani volume kendaraan yang ada, kemudian adanya perbaikan di beberapa ruas jalan dan juga pemberlakuan jalan satu arah di beberapa ruas jalan. Berbeda halnya dengan persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi, dari target sebesar 60,66 persen pada tahun 2024, capaiannya pada angka 44,83 persen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang ada, dan terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada sarana prasarana perhubungan laut layak fungsi. Selain itu, belum adanya investor yang menjadi penggerak sehingga rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter tidak terlaksana.

2.1.4.4.16. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <https://www.kepulauanselayarkab.go.id/> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelenggarakan layanan publik secara terintegrasi dan layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi tertera pada **Tabel 2.42.**

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	%	2,77	13,51	43,24	100	100	Infrastruktur TIK yang belum merata	Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. Terdapat 7 layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas (Youtube (kominfo selayar), Facebook (@kepulauan_selayar), Instagram (@kepulauan_selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose)).
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	%	13,8	22,72	26,08	100	100	Belum semua OPD mempunyai layanan online/website	Pengembangan penyediaan layanan informasi website <i>online</i> . Terdapat 23 layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi dari 23 layanan publik
3	Indeks SPBE	Nilai	-	2,05	1,83	1,93	2,57	SOP SPBE belum lengkap	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2024 terdapat 23 layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi dari 23 layanan publik, terdapat 7 layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas yaitu Youtube (kominfo selayar), Facebook (@kepulauan_selayar), Instagram (@kepulauan_selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose).

2.1.4.4.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian daerah, keberadaan koperasi terbukti merupakan pelaku usaha mandiri, kukuh dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak disangkal koperasi memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi daerah, dan dapat menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor pertumbuhan ekonomi rakyat.

Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah sebesar 0 persen, ini menunjukkan tidak terdapat koperasi simpan pinjam yang mengusulkan perizinannya di tahun 2024. Koperasi sehat semakin menurun dari angka 19,70 persen ditahun 2023 menurun menjadi 16,89 persen. Koperasi KSP/USP sehat sebesar 81,82 persen (tahun 2023) meningkat menjadi 100 persen di tahun 2024, serta koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan sebesar 100 persen. Sedangkan persentase UMKM yang diberdayakan tahun 2024 sebesar 83,12 persen dan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 69,82 persen. Hasil analisis kinerja atas layanan urusan koperasi dan UKM, tertera pada **Tabel 2.43.**

Tabel 2. 43
 Capaian Kinerja Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	18,23	18,23	18,23	100	0	Masih terdapat koperasi yang meminta rekomendasi izin simpan pinjam belum memenuhi syarat (sertifikat koperasi)	Seluruh koperasi simpan pinjam yang ada memiliki izin usaha simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku
2	Persentase koperasi sehat	%	58,62	59	18,37	19,70	16,89	Beberapa koperasi belum memenuhi syarat untuk koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat meningkat
3	Persentase koperasi KSP/USP yang sehat	%	11,11	11,1	11,1	81,82	100	Beberapa koperasi KSP/USP belum memenuhi syarat untuk koperasi sehat	Koperasi seluruhnya tergolong koperasi KSP/USP yang sehat
4	Persentase pengurus koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	10,31	10,31	24,15	17,27	20,19	Kurangnya pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan	Kepengurusan koperasi legal secara administrasi
5	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	82,4	100	100	100	100	Koperasi yang diberdayakan belum berstatus koperasi sehat	Jumlah koperasi yang terbentuk berbadan hukum dan memiliki jenis usaha yang hampir sama
6	Persentase UMKM yang diberdayakan	%	51	53,2	54,63	55,00	83,12	Jumlah UMKM yang diberdayakan melalui pemberian pelatihan meningkat	Peningkatan kapasitas SDM pelaku UKM
7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	32,2	44,73	45,67	46,20	69,82	Masih sedikitnya jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas	Peningkatan kapasitas UMKM melalui pemberian bantuan peralatan meningkat

Sumber Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian kinerja bidang koperasi dan UMKM berdasarkan data di atas pada tahun 2024 seluruh koperasi simpan pinjam yang ada memiliki izin usaha simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan lebih sedikit yang disebabkan karena besar anggaran untuk pelatihan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.4.4.18. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktivitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktivitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Hasil analisis kinerja atas layanan urusan penanaman modal tertera pada **Tabel 2.44**.

Tabel 2. 44
 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase potensi untuk peluang investasi daerah	%	100	100	100	100	100	Beberapa lahan investasi masih belum <i>cleen and clear</i>	Proposal IPRO proyek strategis daerah (Pariwisata, Minapolitan dan Industri)
2	Jumlah investor PMDN/PMA	Investor	205	1.527	2.281	1.878	25	Belum tersedia sarana dan prasarana perizinan mobile	Tersedianya MPP (Mall Pelayanan Publik)
3	Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	Belum memadai sarana dan prasarana MPP	Geraí perizinan yang saling terintegrasi/ terhubung
4	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rp.	133.236	72.474	12.826	76.286	28.462	Rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan LKPM dan menggunakan aplikasi pelaporan LKPM	Memfasilitasi pelaku usaha melaporkan LKPM
5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	Layanan data belum terintegrasi	Pengarsipan pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan aplikasi digital

Sumber Data: Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, faktor yang mempengaruhi menurunnya nilai investasi (PMDN/PMA) adalah minimnya kesadaran pihak pengusaha/ pelaku usaha untuk melaporkan hasil kegiatan usahanya serta minimnya kesadaran pengusaha/pelaku usaha dalam memperbaharui modal usaha bila terjadi perkembangan sehingga berdampak pada limit pelaporan LKPM.

2.1.4.4.19. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu, olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, urusan kepemudaan masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, antara lain: (1) masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat; (3) belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sementara itu permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga; (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembinaan atlet unggulan; (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah. Kinerja atas layanan urusan pemuda dan olahraga tertera pada **Tabel 2.45**.

Tabel 2. 45
 Capaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,2	0,2	4,20	0,13	0,33	Kurangnya persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri disebabkan karena masih adanya wirausaha muda yang belum terdaftar pada pendataan wirausaha muda	Peningkatan kelembagaan pemuda. Peningkatan kapasitas wirausaha muda
2	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	4	42,50	67,00	66,00	Kurangnya sarana prasarana penunjang latihan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga prestasi	Sarana prasarana beberapa cabang olahraga telah tersedia
3	Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	%	60	70	4,06	4,26	4,51	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi kegiatan kepramukaan	Kelembagaan kepramukan telah terbentuk dari tingkat kabupaten dan pengurus ranting cabang keperamukaan

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.20. Statistik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Data statistik menjadi parameter bagi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi mengenai keadaan geografis, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial budaya, pertanian, industri, perekonomian dan lain-lain. Data analisis kinerja bidang urusan statistik tertera pada **Tabel 2.46**.

Tabel 2. 46
 Capaian Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	1. Tidak semua OPD memiliki pegawai yang memahami statistik, pengolahan data, dan <i>evidence-based planning</i> 2. Sulitnya mengakses data karena masih tersebar di banyak instansi, tidak dalam satu portal terpadu	1. Kerja sama antara OPD dengan BPS, perguruan tinggi, atau lembaga riset dalam pengumpulan dan analisis data 2. Tersedianya aplikasi perencanaan daerah (seperti SIPD, e-Planning, e-Monev) yang berbasis data
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100		

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Bappeltbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jika melihat data di atas, capaian kinerja bidang statistik dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang optimal disebabkan karena dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah menggunakan data statistik dasar yang diproduksi oleh Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengolah, memproduksi dan menyebarluaskan data-data statistik dasar. Selain itu, dalam melakukan perencanaan dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah juga menggunakan data statistik sektoral yang diproduksi sendiri atau diperoleh dari organisasi atau lembaga terkait.

2.1.4.4.21. Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Capaian kinerja bidang persandian tertera pada **Tabel 2.47**.

Tabel 2. 47

Capaian Kinerja Bidang Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	0,12	13,51	35,13	100	100	Terbatasnya sarana prasarana computer emergency response team	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi

Sumber Data: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Penilaian tingkat keamanan informasi dilaksanakan mulai tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2024, dimana terdapat 26 sistem dari 26 sistem elektronik yang diassesment/audit berdasarkan kualitas dan kuantitas pengamanan informasi pemerintah daerah. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) aspek dan area penilaian, yaitu tata kelola, pengelolaan risiko, teknologi, pengelolaan aset dan kerangka kerja

2.1.4.4.22. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada program pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, yaitu upaya untuk membina, menggali dan melestarikan budaya lama maupun baru yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan peningkatan potensi budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai baru yang berkembang dimasyarakat. Capaian kinerja bidang kebudayaan, selengkapnya tertera pada **Tabel 2.48**.

Tabel 2. 48
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	100	0	WBTB yang diusul untuk didaftarkan WBTB tingkat nasional belum memenuhi syarat	Terdapatnya aplikasi dapobud yang baik
2	Persentase pembinaan kesenian tradisional	%	0	0	0	10	0	Masih terdapat kesenian tradisional yang belum mendapatkan pembinaan	Pembinaan lembaga seni, dan objek kesenian tradisional
3	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	0	0	0	0	0	Terbatasnya narasumber objek sejarah lokal	Perlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui sejarah lokal
4	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	7,69	Kurangnya benda situs cagar budaya yang dilakukan rehabilitasi yang dilestarikan. Belum ada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Kabupaten	Peraturan terkait pelestarian BCB
5	Jumlah pengelolaan museum	Unit	1	1	1	1	1	Masih terbatas jenis koleksi museum	Tingginya minat wisatawan dan masyarakat berkunjung ke museum

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi dan inventarisasi karya budaya serta pembinaan sejarah lokal. Selain itu, dari 39 cagar budaya hanya 4 yang dilakukan rehabilitasi, yaitu Makam We Tenri Dio, Gantarang Lalangbata, Kantor Disparbud, dan Koleksi Museum Nekara.

2.1.4.4.23. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Melihat kinerja bidang perpustakaan, terjadi penurunan tingkat kegemaran membaca masyarakat jika dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 5,13 persen menjadi 4,50 persen pada tahun 2023 dan meningkat signifikan menjadi 82,99 persen pada tahun 2024. Adapun kinerja layanan perpustakaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir tertera pada **Tabel 2.49**.

Tabel 2. 49
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	5,13	7,90	9,40	4,50	82,99	1. Kurangnya konten digital yang edukatif dan memancing keingintahuan membaca lebih lanjut 2. Minimnya dukungan anggaran untuk perpustakaan dan literasi di daerah	1. Perubahan metode perhitungan Indeks Kegemaran Membaca (IKM) secara resmi dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mulai tahun 2023 dan diterapkan secara lebih sistematis pada tahun 2024 2. Tersedianya perpustakaan di desa/kelurahan atau bahan bacaan yang diperbarui
2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	0	0	0	0	0	1. Sistem Registrasi Nasional (SRN) Kemdikbud belum digunakan atau belum tersosialisasi luas di daerah 2. Tidak adanya dashboard pelestarian budaya yang dapat dipantau oleh publik dan pemangku kepentingan 3. Kekurangan tenaga ahli antropologi, arkeologi, sejarah, atau budaya lokal yang kompeten melakukan dokumentasi dan revitalisasi	Program revitalisasi dan inventarisasi karya budaya menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah sebagai proiritas

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Realisasi capaian untuk indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2024 meningkat signifikan yakni sebesar 82,99 persen, hal tersebut didorong oleh karena adanya kolaborasi dan koordinasi edukasi pada masyarakat. Sementara untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tidak terlaksana pada tahun 2024 dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya Bidang Perpustakaan belum memiliki data dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut.

2.1.4.4.24. Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan ditujukan sebagai daya dukung penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya diukur dengan menggunakan indikator sasaran adalah adanya kesiapan pengelola arsip secara baku di OPD dan peningkatan SDM pengelola kearsipan dalam peningkatan penerapan standar, norma kearsipan dari OPD. Jika sasaran indikator tersebut tercapai, maka *outcome* dari urusan ini dapat dianggap berhasil dengan memperhatikan indikator kunjungan masyarakat tentang kearsipan, peningkatan wawasan dan pengetahuan pengelolaan kearsipan di Kepulauan Selayar. Hasil analisis kinerja layanan kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 2.50**.

Tabel 2. 50
Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	68,25	72,80	52,26	55,68	57,50	Daftar arsip yang diminta sebagai syarat akses jaringan belum rampung menyebabkan aplikasi belum bisa terbuka sehingga jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip belum terinput semua	Aplikasi pengarsipan digital tersedia
2	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	61,60	66,00	50,00	33,33	50,00	Enam indikator penilaian yang belum terpenuhi	Beberapa indikator penilaian telah dipenuhi
3	Persentase arsip dapat diakses yang sifatnya tertutup/rahasia	%	0	0	10	0	0	Masih kurangnya jumlah arsip/dokumen rahasia dalam bentuk elektronik	Penelusuran arsip / dokumen penting dan rahasia

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian kinerja persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, pada tahun 2024 capaiannya sebesar 57,50 persen. Hal tersebut disebabkan karena Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) belum memberikan *password* dikarenakan daftar arsip yang diminta sebagai syarat akses jaringan belum rampung, aplikasi belum bisa terbuka mengakibatkan jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip belum terinput semua sehingga untuk sementara masih dilakukan penginputan secara manual. Sedangkan capaian kinerja untuk persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat hanya mencapai 50,00 persen disebabkan karena terdapat empat dari enam indikator penilaian yang belum terpenuhi. Begitupun dengan capaian kinerja pada indikator persentase arsip dapat diakses yang sifatnya tertutup/rahasia capaiannya 0 persen yang disebabkan karena pada tahun 2024 tidak ada arsip tertutup/rahasia yang tercipta.

2.1.4.4.25. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Disisi lain sektor ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai wacana pemerataan melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Data kinerja bidang pariwisata kselengkapannya tertera pada **Tabel 2.51**.

Tabel 2. 51
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,43	4,45	5,61	3,39	3,50	Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan objek wisata, sehingga objek wisata tersebut kurang diminati wisatawan	Destinasi yang terkelola. Minat wisatawan/ pengunjung. Pengawasan usaha pariwisata berbasis risiko
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5,00	0,41	777,27	-16,41	141,72	Faktor keamanan akibat konflik dunia mempengaruhi jumlah wisatawan untuk datang. Aksesibilitas dari luar ke Kepulauan Selayar tidak memadai. Kurangnya atraksi wisata	Amenitas, transportasi, dan atraksi
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar	%	33,33	37,5	242,72	-22,85	-13,80	Aksesibilitas dari luar ke selayar tidak memadai, kurangnya atraksi wisata	Amenitas dan atraksi
4	Tingkat hunian akomodasi	%	8,50	4,06	3,96	4,20	4,35	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang menginap di hotel	Amenitas, transportasi (udara), dan atraksi
5	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	0	0	0	0	0	Masih kurangnya pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	Kepemilikan lahan dan lokasi strategis
6	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	100	100	100	100	100	Waktu pelaksanaan pelatihan terlalu singkat dan materi masih bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pengelola destinasi/pokdariws	Instruktur atau narasumber yang memiliki kompetensi dan sertifikat keahlian. Terbentuknya lembaga atau Pokdarwis di setiap desa wisata yang akan dikembangkan

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kontraksi yang disebabkan oleh faktor keamanan akibat konflik dunia yang mempengaruhi jumlah wisatawan dari Eropa dan sekitarnya untuk datang serta menurunnya jumlah wisatawan nusantara yang datang akibat wisatawan lebih memilih ke destinasi lain di luar Kepulauan Selayar. Oleh karena kedua hal tersebut sehingga berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat hunian akomodasi.

2.1.4.4.26. Pertanian

Kabupaten Kepulauan Selayar menjadikan sektor pertanian sebagai sektor secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya : menodorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya : mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Capaian kinerja bidang pertanian selengkapnya tertera pada **Tabel 2.52.**

Tabel 2. 52
Capaian Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Cakupan sarana pertanian	%	100	100	100	80,00	83,86	Kelompok tani kurang mahir menggunakan sarana pertanian. Fenomena iklim atau dampak el nino mengurangi produksi dan produktivitas pertanian	Sarana pertanian yang tersedia berupa bibit tanaman, bibit ternak, pestisida, dan alsintan. Sarana pertanian yang ada dimanfaatkan oleh kelompok tani/ gabungan kelompok tani secara maksimal dalam upaya peningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya. Hal ini didukung pula peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan kelompok tani terhadap sarana pertanian. Terdapat sarana pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani karena adanya fenomena iklim atau dampak el nino.
2	Cakupan prasarana pertanian	%	100	100	97,37	100	87,50	Kurangnya sumber-sumber air untuk pertanaman, akses jalan pertanian tidak memadai	Ketersediaan prasarana dan sarana pertanian yang memadai dan cukup sesuai kebutuhan petani/poktan/gapoktan
3	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana penyakit hewan menular	%	5,85	5,95	4,23	30,86	32,19	- Kurangnya tenaga medik dan paramedik hewan sehingga biasa terjadi keterlambatan dalam pelayanan kesehatan hewan. - Jangkauan lokasi yang sulit, membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. - Terbatasnya ketersediaan obat-obatan, perlengkapan dan peralatan kesehatan hewan	Fasilitasi penanggulangan bencana penyakit hewan menular didukung oleh kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan penyakit hewan. Ketersediaan obat-obatan ternak dan perlengkapan kesehatan hewan sangat mempengaruhi proses pelayanan ternak kepada masyarakat/peternak.

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
									SDM peternakan juga sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan
4	Persentase pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	23,15	8,56	21,85	20,75	19,85	Serangan OPT. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sesuai konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Pengendalian dilakukan secara mekanis, sanitasi dan kimiawi. Pengendalian OPT didukung oleh adanya kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Selayar dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengendalian OPT melalui GERDAL dengan pemanfaatan paket teknologi yang ramah lingkungan. Peran aktif petani dan petugas pengamat hama dalam pengendalian OPT. Pengetahuan dan keterampilan (SDM) petugas, penyuluh pertanian dan tim teknis pertanian
5	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	100	- Kurangnya pengawasan lalu lintas ternak - Kurangnya SDM peternakan baik medik maupun paramedik	- Ternak yang beredar sesuai dengan sistem manajemen mutu ternak - Adanya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak
6	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	15,62	19,72	26,95	17,14	4,32	Kurangnya kelompok tani/ gabungan kelompok tani yang memperoleh pembinaan dan pendampingan baik oleh tim teknis maupun penyuluh pertanian	Ketersediaan tenaga penyuluh yang kompeten

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana pertanian berupa bibit tanaman, bibit dan pakan ternak, pupuk dan alsintan dimanfaatkan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani secara maksimal. Hal ini didukung pula peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan kelompok tani terhadap sarana pertanian. Namun terdapat sarana pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani karena adanya fenomena iklim atau dampak *el nino*. Cakupan prasarana pertanian telah memenuhi target pada tahun 2024 sebesar 100 persen karena prasarana yang tersedia berupa jalan tani, irigasi usaha tani, dan DAM parit digunakan oleh petani untuk mendukung meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertaniannya. Fasilitas penanggulangan bencana penyakit hewan menular sebesar 325 area pada 1053 area yang terkena bencana atau sekitar 30,86 persen. Hal ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan penyakit hewan, pengamanan penyakit hewan, pemberantasan penyakit hewan dan pengobatan penyakit hewan. Ketersediaan obat-obatan ternak dan perlengkapan kesehatan hewan sangat mempengaruhi proses pelayanan ternak kepada masyarakat peternak. Selain itu, SDM peternakan juga sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan. Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berdampak pada semua kecamatan dilakukan pada beberapa komoditi baik komoditi perkebunan, hortikultura maupun tanaman pangan. Pengendalian dilakukan secara mekanis, sanitasi dan kimiawi. Pengendalian OPT didukung oleh adanya kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengendalian OPT melalui GERDAL dengan pemanfaatan paket teknologi yang ramah lingkungan. Peran serta petani dan petugas pengamat hama juga sangat membantu dalam pengendalian OPT. Sementara untuk fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian, tahun 2024 terdapat 265 izin usaha pertanian yang diterbitkan yaitu izin pengeluaran ternak. Penerbitan izin mencapai 100 persen karena didukung adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak. Sedangkan untuk jumlah kelompok tani dibina sampai tahun 2024 sebesar 4,32 persen. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena kurangnya kelompok tani atau gabungan kelompok tani dari total poktan 887 yang memperoleh pembinaan dan pendampingan baik oleh tim teknis maupun penyuluh pertanian.

2.1.4.4.27. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 8,02 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 8,08 persen pada tahun 2023. Sementara itu, kinerja bidang perdagangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tertera pada **Tabel 2.53**.

Tabel 2. 53
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase izin usaha sektor perdagangan yang diterbitkan	%	21,19	23,28	100	100	100	Akses teknologi terbatas	Izin usaha perdagangan dikeluarkan oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi persetujuan DISDAGKUKM.
2	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	90	95	100	100	100	Sarana prasarana pendukung (areal parkir) perdagangan belum tersedia / belum representatif	Ketersediaan sarana prasarana perdagangan seperti pasar rakyat yang sudah memadai
3	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	20,58	20,58	20,58	68,42	86,00	Keterbatasan SDM pemantau. Kurangnya jenis komoditi barang yang terpantau.	Penambahan SDM pemantau
4	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	%	20,58	20,58	20,58	20,58	66,60	Masih kurangnya komoditi yang di ekspor. Belum tersedianya SKA (Surat Keterangan Asal) barang sebagai syarat ekspor. Kurangnya akses para petani memasarkan hasil produksi	Peningkatan jenis barang komoditi ekspor. Penyediaan surat keterangan asal barang ekspor. Meningkatkan akses pasar komoditi
5	Persentase alat ukur yang ditera	%	15,16	25,28	0	38,46	75,20	Kurangnya SDM Penera (tidak seimbangnya rasio antara Penera dan Alat ukur yang ditera) serta cakupan luas wilayah.	Penambahan SDM penera dan pengawas kemetrolagian
6	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	0	30	30	30	100	Belum maksimalnya identifikasi produk lokal yang dipasarkan	Peningkatan kapasitas SDM

Sumber Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian kinerja bidang perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut: seluruh permohonan izin usaha sektor perdagangan diberikan rekomendasi untuk penerbitan izin usaha sesuai kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Untuk ketersediaan sarana prasarana perdagangan, seperti pasar rakyat yang sumber pendanaannya berasal dari APBD, DAK, APBN sudah memadai. Jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) seperti hasil pertanian dan perikanan yang dipantau tahun 2024 meningkat jumlahnya sehingga persentase realisasi meningkat. Tera/ tera ulang tahun 2024 sudah terlaksana, namun perlu penambahan SDM Penera karena tidak seimbang rasio antara Penera dan Alat ukur yang ditera serta cakupan luas wilayah. Maksimalnya pelaksanaan pendataan produk lokal yang dipasarkan pada tahun 2024 sehingga capaiannya pada angka 100 persen.

2.1.4.4.28. Perindustrian

Sektor perindustrian memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak ±1.000 IKM, namun jika melihat perkembangan modal usaha dan tenaga kerjanya hanya sebesar 4,50 persen pada tahun 2024, IKM yang memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) meningkat menjadi 9,00 persen pada tahun 2024 dan yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional meningkat menjadi 10,76 persen. Informasi selengkapnya tertera pada **Tabel 2.54.**

Tabel 2. 54
 Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	%	2	8	10	5,60	4,50	Masih banyaknya IKM yang belum memenuhi standar kelayakan produksi	Pendataan pelaku IKM
2	Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	%	0	15	20	4,76	9,00	Pendaftaran melalui OSS sehingga yang terdaftar di PIRT tidak terpantau melalui pengawasan. Kurangnya tenaga yang menangani aplikasi OSS	Kerjasama dan sosialisai aplikasi pendaftaran PIRT dengan dinas terkait. Peningkatan kapasitas operator aplikasi OSS
3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	%	0	0,02	0,02	4,76	10,79	Pelaku IKM tidak memahami cara pendafrn usaha dalam aplikasi SIINAS.	Sosialisasi aplikasi SIINas. Pembentukan pengelolah data dan operator SIINas. Melakukan kunjungan ke pelaku IKM

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, peningkatan persentase izin pelaku IKM yang telah memiliki PIRT disebabkan sosialisasi terkait aplikasi pendaftaran PIRT yang telah dilakukan sehingga IKM melakukan pendaftarannya melalui OSS. Permasalahan yang dihadapi saat ini, IKM yang terdaftar di PIRT tidak terpantau melalui pengawasan, dan kurangnya tenaga yang menangani aplikasi OSS. Sementara itu, aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional mulai aktif dan digunakan pada tahun 2021 sehingga data IKM yang terdaftar pada sistem tersebut hanya data pada tahun itu saja dan pelaku IKM belum mengetahui dan mengerti manfaat dari Sistem Informasi Nasional tersebut sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang SIINAS dalam menjalankan kegiatan ini.

2.1.4.4.29. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan cukup tinggi sehingga merupakan produsen perikanan terbesar karena merupakan daerah *fish ground*. Produksi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Usaha dalam rangka peningkatan produksi perikanan perlu didukung beberapa program pembangunan, yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lainnya melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada nelayan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan. Secara lengkap capaian kinerja bidang perikanan dan kelautan tertera pada **Tabel 2.55**.

Tabel 2. 55
Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	18.729,2	20.883,8	21.223,4	24.962,9	25.610,40	Minimnya ketersediaan dan fungsi fasilitas pendaratan ikan baik di pelabuhan maupun di sentra pendaratan, seperti BBM, es, dan kedai nelayan. Belum optimalnya kelembagaan dalam distribusi dan rantai pasok perikanan, antara lain : harga, pelaku usaha, dan sarana distribusi. Masih tingginya kegiatan penjualan ikan di tengah laut (<i>transshipment</i>) oleh pengepul luar daerah. Kondisi daya dukung sumberdaya perikanan karang yang mulai menurun	• Efektifitas alat tangkap jaring yang mulai massif digunakan oleh nelayan dengan target Ikan Pelagis pada kapal di atas 5 GT yang tersebar di berbagai desa pulau • Terbukanya pasar lokal, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk bahan baku olahan perikanan • Meningkatkan trip penangkapan sebagai dampak motorisasi perikanan dan musim teduh yang relatif lama
2	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	837,4	522,8	528,66	468,44	507,97	Fenomena El-Nino menyebabkan menurunnya volume perikanan budi daya. Terjadi <i>Blooming Algae</i> menyebabkan menurunnya kandungan oksigen dalam air yang dapat menghambat kelangsungan hidup komoditas budidaya laut. Penyakit pada udang berpengaruh besar terhadap tingginya mortalitas (kematian) pada budidaya tersebut	• Memilih jenis bibit/benih yang tahan terhadap perubahan cuaca dan modifikasi metode budidaya yang adaptif • Revitalisasi lahan mengingat potensi lahan budidaya payau lebih dari 50% masuk dalam kategori non produktif • Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya dan penerapan standarisasi CBIB
3	Volume produksi olahan hasil perikanan	Ton	160,8	299,9	241,84	244,91	247,99	Kurangnya bahan baku untuk jenis produk olahan. Terbatasnya pemasaran untuk produk olahan	Adanya peningkatan produksi dan Rumah Tangga Perikanan (RTP) khususnya untuk jenis olahan penggaraman/pengeringan (produk ikan kering). Meningkatnya kualitas SDM pengolah hasil perikanan yang telah mendapatkan pengetahuan melalui bimbingan teknis yang rutin

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
									Pemberian sarana/prasarana pengolahan ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sertifikasi Poklamsar dan produk olahan hasil perikanan
4	Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya dalam kabupaten/kota terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	0	0	0	10,54	15,84	Pembudidaya ikan belum memiliki dokumen perizinan berusaha	• Meningkatkan kolaborasi multipihak dalam pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha budidaya • Mendorong pemahaman dan partisipasi pelaku usaha untuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Meningkatnya produksi pada kelompok Ikan Pelagis, hal ini dipengaruhi oleh efektifitas alat tangkap jaring yang mulai massif digunakan oleh nelayan yang tersebar di berbagai pulau. Juga dipengaruhi oleh meningkatnya waktu (*trip*) penangkapan Ikan Pelagis sebagai dampak dari panjangnya musim tangkap (teduh) pada tahun 2024, terutama pada armada 3 GT dengan alat tangkap jaring, seperti : bagang perahu, purse seine, dan kapal motor lainnya. Selanjutnya adalah produktifitas nelayan tangkap berbasis komoditas ikan pelagis juga terdorong oleh terbukanya pasar lokal, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk bahan baku olahan perikanan. Sedangkan produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2024. Sementara untuk produksi olahan hasil perikanan, bertambahnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP). Selain peningkatan jumlah RTP, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi olahan hasil perikanan adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengolah hasil perikanan. Peningkatan ini diperoleh melalui bimbingan teknis yang secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga mendukung peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi.

2.1.4.4.30. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah yang mencakup fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2024 secara rata-rata menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Informasi selengkapnya tertera pada **Tabel 2.56**.

Tabel 2. 56
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	90	88	100	100	100	Penataan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru	Ketersediaan SDM yang berkualitas dan professional
2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	100	91	97	99,27	100	Belum semua unit pelayanan perangkat daerah melaksanakan evaluasi pelayanan publik secara berkala	Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	99	97	100	99,98	100	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi perencanaan	Sinergitas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.31. Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan konsistensi sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dengan DPRD dengan terlaksananya tiga program kerja DPRD, yaitu peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, pengembangan regulasi daerah dan peningkatan kehumasan DPRD. Capaian kinerja Sekretarian DPRD tertera pada **Tabel 2.57**.

Tabel 2. 57

Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Bidang dan Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJM dan RKPd	%	100	100	100	100	100	Standar operasional dan prosedur Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kepuasan pelayanan	Struktur organisasi kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan tingginya komitmen dan kerja sama pemerintah dan legislatif

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 persen atau dengan kata lain bahwa seluruh program kerja DPRD terintegrasi kedalam RPJMD dan RKPd yang disebabkan oleh struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta tingginya komitmen dan kerjasama antar pemerintah dan legislatif.

2.1.4.4.32. Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Berkaitan dengan mekanisme, perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) bertujuan untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif dan substansial. Sehingga dalam makna lain, hilangnya mata rantai hasil perencanaan dari bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Dalam konteks ini, proses perencanaan sistem pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis. Komitmen dan niat baik dari seluruh stakeholders perencanaan pembangunan mutlak diperlukan.

Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat,

rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan, jika diterapkan dalam perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari Pemerintah Daerah dengan perangkat di bawahnya serta Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Capaian kinerja bidang perencanaan pembangunan tertera pada **Tabel 2.58**.

Tabel 2. 58
Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	75,72	89,47	96,49	100	100	Kurangnya ketersediaan data yang valid dan <i>up date</i> dalam mendukung analisis perencanaan pembangunan	Peraturan Daerah tentang RPJMD telah disusun. Dukungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan mempedomani dan mengacu pada RKPD
2	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	Perubahan lingkungan strategis yang dinamis, seperti peraturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah dan nasional	Koordinasi dengan mitra perangkat daerah intensif dilakukan

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.58**, dapat dijelaskan bahwa dari 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan jumlah program yang termuat dalam RKPD yakni terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) program. Untuk kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah, dari 72 (tujuh puluh dua) program prioritas perangkat daerah tahun 2024, seluruhnya telah selaras dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran prioritas pembangunan daerah.

2.1.4.4.33. Keuangan

Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 8 tahun secara berturut turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek-aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Faktor penghambat pencapaian target kinerja bidang keuangan salah satunya disebabkan karena persentase penerimaan pajak daerah yang belum mencapai 100 persen. Capaian kinerja bidang keuangan tertera pada **Tabel 2.59**.

Tabel 2. 59
 Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	7,80	7,65	8,09	3,68	4,08	Keterlambatan penyusunan data LRA	Evaluasi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara bekala. Perbaikan manajemen anggaran, pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kapasitas SDM
2	Assets Management		ada	ada	ada	ada	ada	Perolehan aset yang sudah lampau. Dokumen daftar aset kabupaten terdaftar di Aplikasi SIMDA	Kesiapan dokumen pendukung dan penetapan dalam penganggaran
3	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah	%	78,36	45,82	82	85,03	71,61	Kurangnya kesadaran wajib pajak. Sulitnya mengetahui omset penjualan wajib pajak. Lemahnya regulasi pengelolaan pendapatan daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pembenahan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Penyusunan Perda/Perbup yang mengatur sanksi terkait pajak dan retribusi

Sumber Data: BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.34. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah sebesar 96,92 persen, persentase pegawai berkinerja baik sebesar 99,97 persen dan cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis sebesar 95,85 persen. Capaian kinerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tertera pada **Tabel 2.60**.

Tabel 2. 60
Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah	%	87,12	59,79	23,35	82,16	96,92	Terdapat formasi yang kurang pendaftaranya dan formasi yang tidak ada pendaftaranya (kosong pendaftar)	Pemetaan kebutuhan ASN
2	Persentase Pegawai Berkinerja Baik	%	99,70	99,61	96,67	99,78	99,97	Masih kurangnya pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin	Optimalisasi peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
3	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/ manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis	%	18,96	46,04	150,70	74,16	95,85	Kurangnya usulan dari OPD untuk mengikuti pelatihan bagi jabatan fungsional. Biaya kontribusi pelatihan tiap lembaga penyelenggara pelatihan tidak sama sehingga tidak sesuai dengan indeks yang ada pada DPA	Pemetaan kebutuhan diklat ASN

Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Persentase pemenuhan ASN tahun 2024 mencapai angka sebesar 90,40 persen dikarenakan dari 50 formasi CPNS terealisasi 46 diantaranya 41 Tenaga Teknis dan 5 Tenaga Dokter. Dari 50 formasi tersebut ada yang tidak lulus dan ada formasi yang tidak ada pendaftaranya (kosong) dan 80 formasi PPPK Tenaga Teknis terealisasi 80 orang. Persentase pegawai yang berkinerja baik masih pada angka 99,97 persen, dikarenakan sebanyak 1 orang pegawai mendapatkan pembinaan disiplin sehingga berdampak pada pencapaian target persentase pegawai berkinerja baik. Untuk cakupan ASN yang lulus diklat tahun 2024 sebesar 95,85 persen yang disebabkan oleh kurangnya usulan dari OPD untuk mengikuti pelatihan bagi jabatan fungsional dan biaya

kontribusi pelatihan tiap lembaga penyelenggara pelatihan tidak sama sehingga tidak sesuai dengan indeks yang ada pada DPA.

2.1.4.4.35. Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan melalui hasil riset dan pengembangan inovasi daerah yang dituangkan kedalam perencanaan berdasarkan urusan dan perangkat daerah masing-masing. Kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan konsistensi dengan capaian 100 persen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.61**.

Tabel 2. 61
Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	Masih kurangnya hasil penelitian dan pengembangan kelitbangan	Penyusunan kebijakan strategis yang menjadikan hasil penelitian dan kajian sebagai dasar penentuan program perangkat Daerah

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Capaian di atas merupakan perwujudan dari komitmen dan sinergitas seluruh *stakeholders* dalam mengimplementasikan hasil kelitbangan berdasarkan kewenangan masing-masing untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil kelitbangan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kesalehan Sosial digunakan oleh perangkat daerah terkait khususnya untuk mengukur IKU Kepala Daerah, sedangkan inovasi daerah yang dihasilkan pada tahun 2024 juga diterapkan oleh perangkat daerah terkait. Setiap tahun terdapat minimal 2 hasil penelitian dan pengembangan yang dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1.4.4.36. Transparansi dan Partisipasi Publik

Untuk mendukung pencapaian revolusi industri 4.0, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat pada aspek pelayanan publik. Sejak tahun 2021, dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) masyarakat Kepulauan Selayar sudah dapat mengakses sepuluh layanan pada satu tempat dengan waktu yang singkat dan akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Pada aspek keuangan daerah, di era keterbukaan informasi saat ini, Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerapkan aplikasi berbasis *online* dari Kementerian Dalam Negeri yang dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, seluruh stakeholder dapat mengakses informasi perencanaan dan keuangan daerah. Capaian kinerja transparansi dan partisipasi publik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.62**.

Tabel 2. 62
Capaian Kinerja Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan Operator PPID dan SP4N Lapor.	Pengembangan SDM talenta digital untuk pelayanan
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum memadai ketersediaan jaringan internet dan intranet	Tersedianya dokumen informasi keuangan daerah pada website kabupaten

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dapat diakses melalui portal kepulauanelayarkab.go.id. akses publik terhadap informasi keuangan daerah melalui dokumen Perda APBD, Nota Keuangan, LRA seluruh OPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit, Opini atas LKPD dan Dokumen RKA/DPA kabupaten yang telah dipublikasi.

2.1.4.4.37. Pengawasan

Capaian kinerja bidang pengawasan menunjukkan hasil yang cukup baik karena dalam waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh 5 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah. Capaian WTP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mencapai level 2 dengan nilai 2,840 pada tahun 2024. Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menunjukkan peningkatan dari level 2+ dengan nilai 2,110 pada tahun 2022 menjadi 2,520 pada tahun 2024. Capaian kinerja bidang pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.63**.

Tabel 2. 63
 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,007	3,002	3,002	2,840	Belum optimalnya monitoring atas hasil penilaian penyelenggaraan SPIP	Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Satgas SPIP, Surat Tugas Bupati tentang Pelaksanaan PM dan Penetapan Perangkat Daerah sampel
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2+	3	3	2+	2,520	Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum didasari dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Belum mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi. Belum memadainya upaya Pengembangan SDM dalam keikutsertaan pada diklat/bimtek.	Peningkatan kapabilitas APIP melalui diklat/ bimtek

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Peningkatan kinerja pengawasan harus menunjang penugasan yang ada, dimana tugas dan tanggung jawab APIP menjadi semakin berat karena selain sebagai auditor, juga dituntut untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai reviuer, evaluator, pemantauan serta melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya.

2.1.4.4.38. Kecamatan

Kinerja bidang kewilayahan difokuskan pada peningkatan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dalam sistem perencanaan dikenal dengan istilah pendekatan *bottom-up*. Selain itu, kinerja bidang kewilayahan juga mencakup urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan desa, yaitu : penurunan kasus kriminalitas, konflik sosial dan keagamaan di tingkat kecamatan serta dukungan program pemerintah desa terhadap program pemerintah. Capaian kinerja bidang kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.64**.

Tabel 2. 64
Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Menit	29	29	25,71	19,09	15,00	Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa	Pelayanan didukung sarana dan prasarana yang cukup, serta koordinasi dan kerja sama sesama pegawai yang baik
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	91,60	94,40	97,73	99,00	98,85	Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan
3	Penurunan kasus kriminalitas di tingkat kecamatan	%	1,00	0,50	0,43	0,39	0,59	Masih adanya potensi kriminalitas dalam masyarakat	Kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Kepolisian (Kapolsek), TNI (Danramil), Kepala Desa, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), serta stakeholder terkait lainnya
4	Persentase konflik sosial dan keagamaan di tingkat kecamatan	%	0,02	0,02	0	0	0	Masih adanya potensi konflik sosial dalam masyarakat	Kerja sama antara pemerintah kecamatan, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik sosial dan keagamaan.
5	Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	%	89,60	93,32	83,77	70,22	70,44	Masih lemahnya perencanaan pembangunan desa	Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di desa

Sumber Data: Seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.1.4.4.39. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik mencakup pembinaan karakter masyarakat, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta pembinaan kewaspadaan terhadap terorisme/ radikalisme dan konflik sosial. Capaian kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.65**.

Tabel 2. 65
Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun					Faktor Penghambat	Faktor Pendukung Keberhasilan
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Cakupan pelaksanaan pembinaan karakter	%	0,02	0,017	0,016	0,020	0,073	Keterbatasan peserta yang mengikuti pembinaan karakter	Pembinaan karakter dilaksanakan secara mandiri
2	Persentase partai politik yang mengikuti pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	Masih kurangnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilbup	Peningkatan peran partai politik memberikan edukasi melalui pemahaman pendidikan politik
3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	38	38	100	100	12,13	Rendahnya kegiatan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan kolaborasi perangkat daerah
4	Persentase kebijakan bidang ketanahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dirumuskan	%	0	100	100	100	100	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat kabupaten. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran atau Penggunaan Narkoba Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar.	Lembaga perumus kebijakan ekonomi, sosial dan budaya telah terbentuk
5	Persentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/ radikalisme dan konflik sosial	%	54	54	100	100	100	Faktor geografis serta luasnya kawasan pantauan	Sinergitas pemerintah dan masyarakat

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa faktor pendorong pencapaian cakupan pelaksanaan pembinaan karakter adalah karena realisasi kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, tes urine secara acak (random) pada kelompok sasaran serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan pencegahan bahaya peredaran atau penggunaan narkoba kepada generasi muda, tokoh masyarakat, PKK kabupaten, PKK kecamatan, desa dan kelurahan terfasilitasinya penguatan ideologi Pancasila kepada siswa/siswi SMA/SMK/MAN/ negeri dan swasta.

2.1.5. Analisis Capaian Indikator Kinerja Daerah

Analisis capaian dari indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis kinerja dimaksud memuat target dan capaian yang telah dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai pada pelaksanaan tahun 2024 sebagai tahapan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tersebut. Analisis dilakukan membandingkan capaian dan target yang ditetapkan. Dengan memunculkan interpretasi untuk melihat ketercapaian dan kesesuaian antara target dan capaian. Interpretasi tersebut adalah ketika capaian lebih besar dari target yang diinterpretasikan melampaui (>), capaian sama dengan target yang diinterpretasikan sesuai (=), dan capaian lebih kecil dari target yang diinterpretasikan belum tercapai (<).

Hasil analisis capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2024, yang merupakan indikator tujuan dan sasaran yang “melampaui” dan “sesuai” target sebesar 48 persen dan target yang “belum mencapai” target sebesar 52 persen (**Tabel 2.66**). Hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2024 (**Tabel 2.67**), dengan rincian sebagai berikut :

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, dari 27 indikator yang diukur terdapat 16 indikator yang “belum tercapai” atau 59,26 persen.
2. **Aspek Pelayanan Umum**, dari 63 indikator yang diukur terdapat 27 indikator yang “belum tercapai” atau 42,86 persen
3. **Aspek Non Pelayanan Dasar**, dari 79 indikator yang diukur terdapat 49 indikator yang “belum tercapai” atau 58,23 persen
4. **Aspek Pelayanan Urusan Pilihan**, dari 25 indikator yang diukur terdapat 16 indikator yang “belum tercapai” atau 64,00 persen
5. **Aspek Pendukung Urusan Pemerintahan**, dari 4 indikator yang diukur terdapat 0 indikator yang “belum tercapai” atau 0,00 persen
6. **Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan**, dari 11 indikator yang diukur terdapat 4 indikator yang “belum tercapai” atau 36,36 persen

7. **Aspek Pengawasan Urusan Pemerintahan**, dari 2 indikator yang diukur terdapat 2 indikator yang “belum tercapai” atau 0 persen
8. **Aspek Urusan Kewilayahan**, dari 5 indikator yang diukur terdapat 1 indikator yang “belum tercapai” atau 20,00 persen
9. **Aspek Urusan Pemerintahan Umum**, dari 5 indikator yang diukur terdapat 1 indikator yang “belum tercapai” atau 20,00 persen
10. **Aspek Daya Saing daerah**, dari 3 indikator yang diukur terdapat 1 indikator yang “belum tercapai” atau 33,33 persen

Hasil analisis capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan bahwa dari 29 indikator yang di hitung sampai dengan tahun 2024, masih terdapat 7 indikator yang belum mencapai target atau 24,14 persen. Terdapat 5 indikator yang tidak dihitung capaiannya dari tahun 2021 sampai dengan 2024, hal ini disebabkan diadakan penyesuaian indikator. Berdasarkan **Tabel 2.68** terdapat beberapa capaian SPM yang belum mencapai target, yaitu :

1. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan, hal ini disebabkan : (1) Rendahnya persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) disebabkan meningkatnya angka putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mencapai 1.255 siswa dan kurangnya pemerataan guru, faktor ekonomi keluarga serta faktor budaya, dimana masih ada orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 12 tahun; (2) Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD hanya mencapai 94,44 persen disebabkan tenaga pendidik secara formal di PAUD (guru dan kepala sekolah) yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan S-1 serta masih kurangnya jumlah sekolah PAUD yang terakreditasi; (3) Rendahnya persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan disebabkan kurangnya satuan pendidikan kesetaraan serta pencapaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai angka 8,35 tahun sebagai indikasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
2. Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan, hal ini disebabkan pelayanan untuk pemeriksaan spesimen di laboratorium puskesmas atau laboratorium TCM terutama di desa terpencil dan wilayah kepulauan terhambat oleh akses sehingga banyak warga terduga TBC yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebagai populasi kunci sulit untuk dijangkau terutama pada desa terpencil

di wilayah kepulauan, *Rapid Diagnostic Test* (RDT) HIV sangat terbatas sehingga tidak mencukupi untuk pustu yang ada di desa terpencil.

Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada **Tabel 2.69**, menunjukkan bahwa dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat 116 indikator dengan hasil capaian sebagai berikut : 52 indikator “belum mencapai” target (44,83 persen), 17 indikator “sesuai” target (14,66 persen) dan 25 indikator “melampaui” target (21,55 persen), serta terdapat 22 indikator (18,97 persen) yang tidak memiliki nilai capaian. Beberapa indikator yang belum tercapai (44,83 persen), untuk lima tahun kedepan sangat membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta berbagai pihak lainnya (masyarakat, swasta, lembaga nasional/internasional dan akademisi); Perencanaan dan tata kelola pembangunan yang holistik, partisipatif dan responsif dalam menghadapi tantangan global dan lokal dalam upaya pencapaian target.

Tabel 2. 66
 Hasil Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
						Target	Capaian	Target	Capaian	
Tujuan 1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka / Huruf	51,24 (CC)	55,65 (CC)	64,00 (CC)	53,30 (CC)	68,00 (B)	60,55 (B)	Belum Tercapai
Sasaran 1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,22	75,13	72,50	78,00	75,00	80,74	Melampaui
		Nilai Sakip Daerah	Angka / Huruf	60,21 (B)	60,49 (B)	65,00 (B)	61,02 (B)	70,00 (BB)	61,68 (BB)	Belum Tercapai
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka / Kategori	68,8 (Perlu Perbaikan)	71,196 (Perlu Perbaikan)	72,015 (Perlu Perbaikan)	65,027 (Perlu Perbaikan)	73,943 (Perlu Perbaikan)	72,32 (Perlu Perbaikan)	Belum Tercapai
Tujuan 2	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,354	0,350	0,320	0,345	0,339	0,329	Melampaui
Sasaran 2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6201 (Berkembang)	0,6670 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,6953 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7190 (Maju)	Melampaui
Sasaran 3	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,81	1,49	2,33	1,98	1,83	2,05	Belum Tercapai
		Tingkat Kemiskinan	%	12,45	12,24	10,54	12,27	11,03	10,79	Melampaui
Tujuan 3	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,76	68,35	68,60	69,20	69,44	71,98	Melampaui
Sasaran 4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	62,10	62,16	54,19	63,08	64,19	63,97	Belum Tercapai
		Indeks Kesehatan	Angka	68,52	75,09	68,81	81,95	78,81	82,83	Melampaui
Sasaran 5	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita yang Disetarakan	Rp	9.060.000	9.446.000	9.450.000	9.830.000	9.700.000	10.235.000	Melampaui
Tujuan 4	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,02	3,67	5,27-7,03	3,68	5,19	3,33	Belum Tercapai
		PDRB Per Kapita	Rp. Juta	49,54	53,76	53,50	56,57	55,00	58,29	Melampaui

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
						Target	Capaian	Target	Capaian	
Sasaran 6	Meningkatnya Usaha Perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	25,45	27,09	27,00	27,09	28,00	23,83	Belum Tercapai
Sasaran 7	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	4,45	5,16	5,59	3,39	6,41	3,50	Belum Tercapai
Sasaran 8	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	12,69	15,23	14,00	13,25	16,00	13,57	Belum Tercapai
Tujuan 5	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	48,36	79	44,00	79,00	48,00	50,00	Melampaui
Sasaran 9	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,6993	0,7384	0,7000	0,7592	0,7500	0,7694	Melampaui
Tujuan 6	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	76,68	77,55	65,15	76,87	78,15	77,87	Belum Tercapai
Sasaran 10	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Kasus	185	309	115	367	105	389	Belum Tercapai
Tujuan 7	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka / Huruf	62,27 (Cukup Baik)	64,99 (Cukup Baik)	64,80 (Cukup Baik)	64,25 (Sedang)	66,14 (Cukup Baik)	67,65 (Sedang)	Melampaui
Sasaran 11	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	Angka	50,00	55,56	54,00	51,18	56,00	52,22	Belum Tercapai
		Indeks Kualitas Udara	Angka	87,16	88,73	85,49	90,71	89,49	94,56	Melampaui
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	37,29	37,29	45,06	37,76	47,56	44,39	Belum Tercapai

Sumber Data: BPS dan OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tabel 2. 67

Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2024

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
1			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	1		FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	1	1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,02	3,67	5,27	3,68	5,19	3,33	Belum Tercapai
1	1	2	Laju Inflasi	%	2,16	4,12	1,82	2,78	1,82	0,91	Melampaui
1	1	3	PDRB per kapita (ADHB)	Rp / Juta	49,54	53,76	48,33	56,57	55,00	58,29	Melampaui
1	1	4	Gini Ratio	Poin	0,354	0,350	0,336	0,345	0,339	0,329	Melampaui
1	1	5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	12,45	12,24	10,54	12,27	11,03	10,79	Melampaui
1	1	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,76	68,35	68,60	69,20	69,44	71,98	Melampaui
1	1	7	Angka Melek Huruf (AMH)	%	91,62	93,08	93,97	93,06	93,98	93,47	Belum Tercapai
1	1	8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	8,09	10,50	8,35	11,00	8,49	Belum Tercapai
1	1	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,52	68,81	69,23	73,27	69,48	73,48	Melampaui
1	1	10	Persentase Balita Stunting	%	27,7	32,10	18,83	18,00	18,72	25,70	Belum Tercapai
1	1	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,07	69,92	69,08	69,93	70,00	67,19	Belum Tercapai
1	1	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,81	1,49	2,33	2,81	1,83	2,05	Belum Tercapai
1	1	13	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,19	98,51	98,50	99,77	98,67	65,81	Belum Tercapai
1	1	14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	5,36	5,39	0,07	9,01	6,07	0,42	Belum Tercapai
1	1	15	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
1	1	16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	74,6	76,90	79,90	81,4	79,93	77,50	Belum Tercapai
1	1	17	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	8,24	8,24	8,48	6,96	9,15	4,98	Belum Tercapai
1	1	18	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	Ton	21.407,59	21.752,06	22.117	25.431,34	23.039	26.118,37	Melampaui
1	1	19	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	16,75	16,23	17,16	16,99	17,39	19,23	Melampaui
1	1	20	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	2,83	2,64	3,28	2,5	3,37	2,43	Belum Tercapai
1	1	21	Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,96	0,95	1,04	0,94	1,05	1,00	Belum Tercapai
1	1	22	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	11,86	11,53	11,54	12,18	11,66	14,41	Melampaui
1	1	23	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,10	1,11	1,18	1,09	1,19	1,10	Belum Tercapai
1	1	24	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan	%	25,45	27,09	24,73	27,09	28,00	23,83	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
			terhadap PDRB								
1	1	25	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,81	8,02	7,85	8,08	8,85	8,30	Belum Tercapai
1	1	26	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,88	2,78	2,85	2,82	2,87	0,14	Belum Tercapai
1	1	27	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp. 000	9.240.000	17.310.000	14.645.819	18.740.000	17.762.940	20.330.000	Melampaui
2			ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
2	1		PENDIDIKAN								
2	1	1	Persentase Warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	79,01	65,5	100	90,02	100	98,25	Belum Tercapai
2	1	2	Persentase Warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	92,84	78,74	100	52,26	100	48,49	Belum Tercapai
2	1	3	Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	99,60	88,46	100	94,44	100	89,30	Belum Tercapai
2	1	4	Cakupan persentase muatan lokal dalam kurikulum PAUD dan pendidikan dasar	%	5	100	100	100	100	100	Sesuai
2	1	5	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum	%	66	100	100	100	100	100	Sesuai
2	1	6	Persentase jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	24,00	100	100	100	100	100	Sesuai
2	1	7	Persentase pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2		KESEHATAN								
2	2	1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,66	76,3	100	78,34	100	100	Sesuai
2	2	2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	77,77	76,4	100	75,88	100	99,48	Belum Tercapai
2	2	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80,89	80,04	100	79,41	100	100	Sesuai
2	2	4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	57,29	54,8	100	64,37	100	94,03	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
2	2	5	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	56,73	68,97	100	85,90	100	92,23	Belum Tercapai
2	2	6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	43,88	50,9	100	100	100	100	Belum Tercapai
2	2	8	Persentase warga negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	9	Persentase warga negara penderita <i>Diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	11	Persentase warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	60,65	100	73,87	Belum Tercapai
2	2	12	Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	85,56	100	70,85	100	100	Sesuai
2	2	13	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	30/1000 Penduduk	31/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	36/1000 Penduduk	13,8/1000 Penduduk	Belum Tercapai
2	2	14	Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat	%	99,6	100	100	100	100	100	Sesuai
2	2	15	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	%	0	37,41	30,00	30,19	20,00	92,95	Melampaui
2	2	16	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	4	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Sesuai
2	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
2	3	1	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	0	78,72	90,00	100	92,00	100	Melampaui
2	3	2	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	0	0	38,00	100	45,00	100	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
2	3	3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	11,41	13,19	1,85	17,10	1,92	3,89	Melampaui
2	3	4	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	53,79	58,23	100	76	100	43,20	Belum Tercapai
2	3	5	Persentase sarana prasarana persampahan	%	-	0	100	0	100	0	Belum Tercapai
2	3	6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90,00	0	100	100	100	100	Belum Tercapai
2	3	7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	95,00	55,00	96,45	55,00	96,88	73,13	Belum Tercapai
2	3	8	Persentase infrastruktur pemukiman terbangun pada Kawasan Strategis	%	0	0	5,00	0	10,00	0	Belum Tercapai
2	3	9	Persentase kepatuhan IMB	%	0,5	41,00	85,00	100	88,00	100	Melampaui
2	3	10	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya milik pemerintah	%	69,00	72,30	70,11	73,20	81,61	100	Melampaui
2	3	11	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	%	70,00	71,00	69,84	75,00	82,54	100	Melampaui
2	3	12	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	58,15	58,24	72,31	57,26	73,19	54,58	Belum Tercapai
2	3	13	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	%	0	0	85,00	0	85,00	0	Belum Ada SK
2	3	14	Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	%	96,67	96,00	98,50	96,25	99,00	79,38	Belum Tercapai
2	3	15	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	31,30	36,20	22,02	40,10	22,97	11,50	Belum Tercapai
2	3	16	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	10,00	0,45	12,00	0	Belum Tercapai
2	3	17	Persentase Pembangunan yang Sesuai RTRW dan RDTR	%	84,85	86,00	97,00	0,45	98,00	88,89	Belum Tercapai
2	4		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
2	4	1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	82,99	100	98	100	100	Sesuai
2	4	2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	100	0	100	0	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
2	4	3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	4,80	6,32	3,16	6,32	4,22	6,32	Melampaui
2	4	4	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	20,08	16,26	5,91	3,48	8,14	4,42	Belum Tercapai
2	4	5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	46,49	0,50	1,41	1,03	3,42	1,84	Belum Tercapai
2	4	6	Persentase rekondansi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	0	0	100	0	100	0	Belum Tercapai (Tidak ada pengembang yang memenuhi kriteria)
2	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
2	5	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	95,00	100	100	Sesuai
2	5	2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	5	3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	92,19	92,68	100	100	100	85,00	Belum Tercapai
2	5	4	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	9,01	7,58	10,93	11,84	6,00	8,35	Belum Tercapai
2	5	5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana	%	100	100	100	100	100	99,83	Belum Tercapai
2	5	6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	74,52	100	100	100	100	99,23	Belum Tercapai
2	5	7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	89,99	87,30	100	100	100	99,23	Belum Tercapai
2	6		SOSIAL								
2	6	1	Persentase potensi sumber kesejahteraan yang diberdayakan	%	28,79	13,70	37,59	12,58	42,40	22,50	Belum Tercapai
6	6	2	Persentase warga negara penyandang	%	19,6	100	100	100	100	100	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
			disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								
2	6	3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	98,59	100	100	100	100	Sesuai
2	6	4	Persentase warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	17,5	98,99	100	100	100	100	Sesuai
2	6	5	Persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	0	100	100	100	100	100	Sesuai
2	6	6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	86,6	47,55	21,32	40,54	48,32	53,60	Melampaui
2	6	7	Persentase PPKS dari data PPKS yang difasilitasi	%	86,6	47,55	38,12	40,74	50,00	73,28	Melampaui
2	6	8	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	6	9	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1	1	Sesuai
3			NON PELAYANAN DASAR								
3	1		TENAGA KERJA								
3	1	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%	85,71	77,70	73,00	50,00	80,00	50,00	Belum Tercapai
3	1	2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,40	0,48	1,17	2,63	2,00	3,01	Melampaui
3	1	3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	24,04	39,06	25,00	27,55	39,69	52,49	Melampaui
3	1	4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak	%	0	0,60	0,90	0,94	1,17	0,92	Belum Tercapai
3	2		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
3	2	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,15	0,543	0,25	0,90	0,56	0,26	Belum Tercapai
3	2	2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1.000 penduduk perempuan)	Angka	1,28	9,56	28 / 1000 penduduk perempuan	1,56	23/ 1.000 penduduk perempuan	0,20	Melampaui

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
3	2	3	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang terstandarisasi	%	1	0	0,06	0	0,08	0	Belum Tercapai
3	2	4	Cakupan layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0,80	0,80	0,36	0,36	0,86	0,95	Melampaui
3	2	5	Persentase capaian pemenuhan hak anak (skor indikator KLA)	%	450	138,89	52,50	65,00	139,50	0	Belum Tercapai
3	2	6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten	%	0,069	0,045	100	100	100	100	Sesuai
3	3		PANGAN								
3	3	1	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	4,88*	38,71	62,50	60,87	75,00	41,18	Belum Tercapai
3	3	2	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	12,25	48,33	36,36	51,47	49,36	51,45	Melampaui
3	3	3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	24,39	19,35	57,50	34,78	62,50	26,09	Belum Tercapai
3	3	4	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	80,00	80	100	100	Sesuai
3	4		PERTANAHAN								
3	4	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	50,00	35,65	70	0	Belum Tercapai
3	4	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	20,00	20,00	40,00	0	60	0	Belum Tercapai
3	4	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0	1	60,00	0	70	0	Belum Tercapai
3	4	4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%		60,00	70,00	0	80,00	0	Belum Tercapai
3	4	5	Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan	%	20,00	0	100	0	100	0	Belum Tercapai
3	4	6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	20,00	100	40,00	1,97	100	0	Belum Tercapai
3	4	7	Persentase luas lahan ulayat yang di tetapkan	%	0	0	40,00	0	60,00	0	Belum Tercapai
3	4	8	Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya	%	30,00	40,00	50,00	0	60,00	0	Belum Tercapai
3	4	9	Persentase rekomendasi izin membuka tanah	%	0	100	100	0	100	0	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
			untuk kepentingan masyarakat yang dikeluarkan								
3	4	10	Persentase Pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah	%	20,00	30,00	40,00	0	60,00	0	Belum Tercapai
3	5		LINGKUNGAN HIDUP								
3	5	1	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang trintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten	%	37,50	11,25	12,50	12,50	25,50	23,00	Belum Tercapai
3	5	2	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Point	2,75	1,76	2,59	2,01	1,59	3,91	Belum Tercapai
3	5	3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	1,39	1,4	1,38	1,40	1,58	1,40	Belum Tercapai
3	5	4	Persentase lembaga/ perusahaan penghasil limbah B3 yang diawasi	%	90	100	100	100	100	100	Sesuai
3	5	5	Persentase ketaatan pelaku usaha dan / atau kegiatan	%	4,35	60,00	64,00	51,20	66,00	47,14	Belum Tercapai
3	5	6	Persentase MAH kearifan lokal yang terkait PPLH yang diakui beradaannya	%	0,19	1,42	2,27	1,43	3,41	n.a	Belum Tercapai
3	5	7	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan diklat	%	-	28,85	23,08	30,00	23,08	20,00	Belum Tercapai
3	5	8	Persentase lembaga masyarakat / dunia usaha/ dunia pendidikan yang berprestasi	%	20,00	25,00	33,33	20,00	33,33	33,33	Sesuai
3	5	9	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3	5	10	Presentase pengelolaan persampahan yang bernilai ekonomi	%	19,67	0,71	1,30	1,66	1,30	7,90	Melampaui
3	6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
3	6	1	Persentase Penerbitan KTP-el	%	93,70	90,26	97,00	92,77	98,00	94,07	Belum Tercapai
3	6	2	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	43,24	55,69	35,00	54,08	57,00	52,64	Belum Tercapai
3	6	3	Persentase penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	85,98	84,10	94,00	86,96	94,50	98,23	Melampaui
3	6	4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	53,84	44,54	76,92	61,54	88,46	62,96	Belum Tercapai
3	6	5	Persentase ketersediaan data Profil	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
			Kependudukan								
3	7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
3	7	1	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi	%	25,00	100	100	100	100	0	Belum Tercapai
3	7	2	Persentase peningkatan kerja sama desa	%	25,00	0	3,70	8,6	3,70	0	Belum Tercapai
3	7	3	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	%	85	100	100	100	100	100	Sesuai
3	7	4	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	25,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	Sesuai
3	8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
3	8	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Point	2,10	2,17	2,07	1,94	2,06	2,10	Melampaui
3	8	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	77,23	72,54	78,80	69,42	80,00	59,10	Belum Tercapai
3	8	3	Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								
			BKB	%	15,11	14,38	0,74	29,18	0,74	25,13	Melampaui
			BKR	%	12,38	5,74	0,61	2,71	0,61	10,22	Melampaui
			BKL	%	9,06	6,00	0,62	40,01	0,62	10,26	Melampaui
			PIK-R	%	3,55	4,30	0,51	73,03	0,51	5,76	Melampaui
			UPPKS	%	4,64	5,09	0,91	43,19	0,91	90,81	Melampaui
3	9		PERHUBUNGAN								
3	9	1	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	%	10,37	25,23	30,77	37,92	30,85	26,83	Belum Tercapai
3	9	2	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi	%	62,5	41,37	60,66	44,07	63,94	44,83	Belum Tercapai
3	9	3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	0	0	0	100	0	Belum Tercapai
3	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
3	10	1	Persentase layanan sistem informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	%	2,77	43,24	100	100	100	100	Sesuai
3	10	2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	%	61,1	26,08	100	100	100	100	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
3	11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
3	11	1	Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	18,23	18,23	100	100	100	0	Belum Tercapai
3	11	2	Persentase koperasi sehat	%	59	18,37	100	19,70	100	16,89	Belum Tercapai
3	11	3	Persentase koperasi KSP/USP yang sehat	%	11,10	11,1	100	81,82	100	100	Sesuai
3	11	4	Persentase pengurus koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	%	10,31	24,15	100	17,27	100	20,19	Belum Tercapai
3	11	5	Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3	11	6	Persentase UMKM yang diberdayakan	%	53,2	54,62	100	55,00	100	83,12	Belum Tercapai
3	11	7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	%	44,73	45,67	100	46,20	100	69,82	Belum Tercapai
3	12		PENANAMAN MODAL								
3	12	1	Persentase potensi untuk peluang investasi daerah	%	100	100	50,00	100	100	100	Sesuai
3	12	2	Jumlah investor PMDN/PMA	%	1.527	2.281	28	1.878	2.300	25	Belum Tercapai
3	12	3	Persentase izin yang diterbitkan	%	100,00	100	100	100	100	100	Sesuai
3	12	4	Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	72.474	12.826	59.000	76.286	67.000	28.462	Belum Tercapai
3	12	5	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
3	13	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,20	4,20	8,83	0,13	18,55	0,33	Belum Tercapai
3	13	2	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	4,00	42,50	50,00	67,00	60,00	66,00	Melampaui
3	13	3	Persentase organisasi kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	%	70	4,06	4,26	4,26	4,51	4,51	Sesuai
3	14		STATISTIK SEKTORAL								
3	14	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3	14	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
3	15		PERSANDIAN								
3	15	1	Persentase keamanan informasi pemerintah	%	0,12	35,13	100	100	100	100	Sesuai
3	16		KEBUDAYAAN								
3	16	1	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	%	100	100	100	100	100	0	Belum Tercapai
3	16	2	Persentase Pembinaan kesenian tradisional	%	0	0	30,00	10	40	0	Belum Tercapai
3	16	3	Cakupan pembinaan sejarah lokal	%	0	0	100	0	100	0	Belum Tercapai
3	16	4	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	7,69	Belum Tercapai
3	16	5	Jumlah pengelolaan museum	Unit	1	1	1	1	1	1	Sesuai
3	17		PERPUSTAKAAN								
3	17	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	7,9	9,40	4,50	4,50	10,50	82,99	Malampui
3	17	2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	1	0	33,00	0	50,00	0,00	Belum Tercapai
3	18		KEARSIPAN								
3	18	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	72,80	52,26	90,00	55,68	90,00	57,50	Belum Tercapai
3	18	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	122,16	50,00	95,00	33,33	95,00	50,00	Belum Tercapai
3	18	3	Persentase arsip dapat diakses yang sifatnya tertutup/rahasiah	%	0	10,00	100	0	100	0	Belum Tercapai
4			PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
4	1		KELAUTAN DAN PERIKANAN								
4	1	1	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	20.883,8	21.223,40	23.593,4	24.962,90	25.480,87	25.610,40	Melampaui
4	1	2	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	522,8	528,66	1.054,86	468,44	1.139,25	507,97	Belum Tercapai
4	1	3	Volume produksi olahan hasil perikanan	Ton	299,9	241,84	201,49	244,91	261,49	247,99	Belum Tercapai
4	1	4	Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya dalam kabupaten/kota terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	0	0	10,54	10,54	15,81	15,81	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
4	2		PARIWISATA								
4	2	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,45	5,16	5,00	3,39	6,00	3,50	Belum Tercapai
4	2	2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,41	777,27	5,00	-16,41	800,00	141,72	Belum Tercapai
4	2	3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar	%	37,5	242,72	10,00	-22,85	350,00	-13,8	Belum Tercapai
4	2	4	Tingkat hunian akomodasi	%	4,06	3,97	10,00	4,20	10,00	4,35	Belum Tercapai
4	2	5	Cakupan ketersediaan (fisik dan pengelolaan) sentra ekonomi kreatif	%	0	0	33,34	0	66,68	0	Belum Tercapai
4	2	6	Persentase SDM/ tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4	3		PERTANIAN								
4	3	1	Cakupan sarana pertanian	%	100	100	100	80,00	100	83,86	Belum Tercapai
4	3	2	Cakupan prasarana pertanian	%	100	97,37	100	100	100	87,50	Belum Tercapai
4	3	3	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana penyakit hewan menular	%	5,95	4,23	5,28	30,86	5,02	32,19	Melampaui
4	3	4	Persentase pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	8,56	21,85	20,89	20,75	19,85	19,85	Sesuai
4	3	5	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	5,00	100	100	100	Sesuai
4	3	6	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	19,72	26,95	22,72	17,14	27,72	4,32	Belum Tercapai
4	4		PERDAGANGAN								
4	4	1	Persentase izin usaha sektor perdagangan yang diterbitkan	%	23,28	100	100	100	100	100	Sesuai
4	4	2	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	%	95	100	100	100	100	100	Sesuai
4	4	3	Persentase jenis komoditi yang dipantau	%	20,58	20,58	100	68,42	100	86,00	Belum Tercapai
4	4	4	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	%	20,58	20,58	100	20,58	100	66,60	Belum Tercapai
4	4	5	Persentase alat ukur yang ditera	%	25,28	-	100	38,46	100	75,20	Belum Tercapai
4	4	6	Persentase produk lokal yang dipasarkan	%	30	30	100	30,00	100	100	Sesuai
4	5		PERINDUSTRIAN								
4	5	1	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	%	2	10,00	15,00	0	18,00	4,50	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
4	5	2	Persentase izin pelaku IKM yang telah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	%	0	20,00	25,00	4,76	30,00	9,00	Belum Tercapai
4	5	3	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional	%	100	0,02	40,00	4,76	45,00	10,79	Belum Tercapai
5			PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1		SEKRETARIAT DAERAH								
5	1	1	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	88,00	100	100	100	100	100	Sesuai
5	1	2	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	91,00	97,00	100	99,27	100	100	Sesuai
5	1	3	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	%	97,00	100	100	99,98	100	100	Sesuai
5	2		SEKRETARIAT DPRD								
5	2	1	Persentase program kerja DPRD yang trintegrasi dengan program RPJM dan RKPD	%	98,00	100	100	100	100	100	Sesuai
6			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1		PERENCANAAN								
6	1	1	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	92,22	96,49	85,00	100	85,00	100	Melampaui
6	1	2	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah	%	100	100	85,00	100	90,00	100	Melampaui
6	2		KEUANGAN								
6	2	1	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	5,90	8,09	5,50	3,68	5,00	4,08	Belum Tercapai
6	2	2	Assets Management	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
6	2	3	Persentase pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah	%	45,82	82,00	87,50	85,03	90,00	71,61	Belum Tercapai
6	3		KEPEGAWAIAN								
6	3	1	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah	%	59,79	23,35	90,40	82,16	92,60	96,92	Melampaui
6	3	2	Presentase pegawai berkinerja baik	%	99,61	96,67	100	99,78	100	99,97	Belum Tercapai
6	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
6	4	1	Cakupan ASN yang lulus diklat kepemimpinan/	%	46,04	150,70	81,00	74,16	81,50	95,85	Belum Tercapai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
			manajerial, diklat fungsional dan diklat teknis								
6	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
6	5	1	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
6	6		TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
6	6	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
6	6	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
7			PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
7	1		INSPEKTORAT DAERAH								
7	1	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,002	3	3,002	3+	2,840	Belum Tercapai
7	1	2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2+	3	3,2	2,810	3,3	2,520	Belum Tercapai
8			UNSUR KEWILAYAHAN								
8	1		KECAMATAN								
8	1	1	Peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Menit	29,00	25,71	20,00	19,09	15,00	15,00	Sesuai
8	1	2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	94,40	97,73	100	99,00	100	98,85	Belum Tercapai
8	1	3	Penurunan kasus kriminalitas di tingkat kecamatan	%	0,50	0,43	1,00	0,39	1,00	0,59	Melampaui
8	1	4	Persentase konflik sosial dan keagamaan di tingkat kecamatan	%	0,02	0	0	0		0	Sesuai
8	1	5	Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	%	93,32	83,77	55,00	70,22	80,62	70,44	Belum Tercapai
9			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
9	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
9	1	1	Cakupan pelaksanaan pembinaan karakter	%	0,017	0,016	0,026	0,020	0,026	0,073	Melampaui
9	1	2	Persentase partai politik yang mengikuti pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
9	1	3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	38	100	100	100	100	100	Sesuai

No			Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
							Target	Capaian	Target	Capaian	
9	1	4	Persentase kebijakan bidang ketanahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dirumuskan	%	100	100	100	100	100	12,13	Belum Tercapai
9	1	5	Persentase wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/ radikalisme dan konflik sosial	%	54	100	100	100	100	100	Sesuai
10			ASPEK DAYA SAING DAERAH								
10	1		FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI								
10	1	1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	967.487	996.286	991.247	1.054.071	997.247	1.111.674	Melampaui
10	1	2	Nilai tukar petani	Poin	100,37	101,12	101,37	114,25	102,56	121,01	Melampaui
10	1	3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	10,00	27,16	61,77	38,27	63,15	48,14	Belum Tercapai

Sumber data : Diolah, 2025

Tabel 2. 68
Analisis Capaian Indikator SPM Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja SPM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
	Pendidikan									
1	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	99,60	100	88,46	100	94,44	100	89,30	Belum Tercapai
2	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	82,44	100	65,50	100	90,02	100	98,25	Belum Tercapai
3	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	92,84	100	78,74	100	52,26	100	48,49	Belum Tercapai
4	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SD/ MI/ SMP/ MTs/ kesetaraan berdasarkan hasil asesmen Nasional									
	5) Rata-rata kemampuan literasi	100	-	100	1,62	100	-	100	-	
	6) Rata-rata kemampuan numerasi	100	-	100	1,6	100	-	100	-	
	Kesehatan									
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	85,7	100	100	100	78,34	100	100	Sesuai
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	80,5	100	100	100	75,88	100	99,48	Belum Tercapai
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	80,8	100	100	100	79,41	100	100	Sesuai
4	Pelayanan kesehatan balita	100	79,0	100	89,61	100	64,37	100	94,03	Belum Tercapai
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	88,1	100	68,97	100	85,90	100	92,23	Belum Tercapai
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	98,4	100	100	100	100	100	100	Sesuai
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	82,5	100	51,53	100	100	100	100	Sesuai
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100	79,9	100	100	100	100	100	100	Sesuai
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>Diabetes Melitus</i>	100	84,7	100	100	100	100	100	100	Sesuai
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
11	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>Tuberkulosis</i>	100	100	100	100	100	60,65	100	73,87	Belum Tercapai

NO	Indikator Kinerja SPM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	100	85,56	100	70,85	100	100	Sesuai
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	53,79	100	58,23	100	76,00	100	43,20	Belum Tercapai
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	90,00	100	0	100	100	100	100	Sesuai
	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	-	100	-	100	-	100	-	
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	100	-	100	-	100	-	100	-	
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100		100		100		100		
4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100 (Tidak Ada Variabel)	100	86,22	100	98,00	100	100	Sesuai
5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100 (Tidak Ada Variabel)	100	Tidak Ada Variabel	100		100	0	Sesuai
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	89,06	100	92,68	100	100	100	85,00	Belum Tercapai
	Penanggulangan Bencana Daerah									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	8,14	100	100	100	100	100	99,83	Belum Tercapai
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	74,52	100	100	100	100	100	99,23	Belum Tercapai
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	89,99	100	87,30	100	100	100	99,93	Belum Tercapai
	Sosial									

NO	Indikator Kinerja SPM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	19,60	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	98,59	100	100	100	100	Sesuai
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	17,50	100	98,99	100	100	100	100	Sesuai
4	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0	100	100	100	100	100	100	Sesuai
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai

Sumber Data: Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tabel 2. 69
Capaian Indikator TPB Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
Pilar Pembangunan Sosial									
Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun									
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	12,45	12,24	11,57	12,27	11,03	10,79	Melampaui
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	43,31	100	97,60	89,22	98,10	98,81	Melampaui
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	18,99	100	45,87	41,63	47,21	38,72	Belum Tercapai
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	18,99	20,00	22,00	100	23,00	23,00	Sesuai
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	RT	6.597	7.728	6.650	6.692	8.300	7.545	Belum Tercapai
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	75,11	79,62	80,75	98,40	83,72	100	Melampaui
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	69,70	70,30	78,89	70,50	83,93	88,40	Melampaui
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	56,65	72,52	59,85	59,50	81,52	59,20	Belum Tercapai
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	53,79	58,23	6,85	6,85	68,50	7,22	Belum Tercapai
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	74,94	45,00	59,00	59,00	79,00	10,00	Belum Tercapai

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	18,73	27,39	13,61	24,62	12,24	24,58	Belum Tercapai
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	99,01	98,60	99,00	82,38	99,00	98,13	Belum Tercapai
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%	80,74	80,15	93,72	69,42	95,34	82,22	Belum Tercapai
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	85,98	89,80	87,57	91,45	93,58	93,25	Belum Tercapai
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi/Desa	5	1	10	9	13	11	Belum Tercapai
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Jiwa	4813	100	100	100	100	100	Sesuai
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Lokasi/Desa	5	2	10	9	13	13	Sesuai
1.5.1.(e)	Indeks Resiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	Angka	155,00	151,12	146,70	142,83	142,70	140,18	Melampaui
Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan									
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	9,72	13,60		8,14		8,45	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	6,30	5,77	3,98	6,24	3,16	18,48	Belum Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	39,80	32,45					
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	%	0,85	0,75					
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula								

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	27,70	32,10	18,77	31,30	18,63	18,30	Melampaui
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	%	21,90	17,59	18,82	14,55	17,45	13,80	Melampaui
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	68,60	18,38	57,95	13,3	15,27	8,94	Melampaui
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	58,40	61,40	64,35	66,7	67,72	72,60	Melampaui
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	%	79,80	76,90	79,90	81,40	79,93	77,50	Belum Tercapai
Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia									
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	kematian per 100.000 kelahiran hidup	324	3	294	6	3	287	Belum Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	75,10	79,60	80,75	98,4	83,72	100	Melampaui
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	69,80	75,70	77,27	98,4	81,30	99,48	Melampaui
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1000 kelahiran hidup	3,7	6,06	2,2	14,8	1,7	10,3	Belum Tercapai
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi Hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya								
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	per 1000 Penduduk	0,10	0,08	< 1	0,07	< 1	0,009	Melampaui
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,071	0,96	0,00062	0,0068	0,00058	0,4	Belum Tercapai

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Per 100.000 penduduk	159	158	142	335	142	334	Belum Tercapai
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	16,35	14,40	7,06	39,31	4,63	16,10	Belum Tercapai
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%	78,20	72,84	78,80	65,97	80,00	54,27	Belum Tercapai
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	56,65	72,54	59,85	59,50	81,52	59,20	Belum Tercapai
3.7.1.(b)	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	%	15,25	19,73	17,00	30,6	21,94	32,90	Melampaui
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	Kelahiran pada Perempuan umur 15-19 tahun	1,58	0,025	1,37	1,4	0,025	3,75	Belum Tercapai
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	poin	2,01	2,30	2,07	1,9	2,06	2,10	Melampaui
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	%	0,30	0,17	0,1	2,8	0,10	13,50	Belum Tercapai
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,70	100,00	99,90	83,23	100	98,81	Belum Tercapai
Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua									
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya,								

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
	setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	63,83	68,31	81,56	65,49	85,11	66,90	Belum Tercapai
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	65,38	60,00	73,08	60,00	76,92	57,89	Belum Tercapai
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	%	106,82	98,22	104,62	95,45	103,06	98,45	Belum Tercapai
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	%	90,63	79,96	93,56	95,45	95,66	82,83	Belum Tercapai
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	68,00	100,40	72,00	98,36	100	93,78	Belum Tercapai
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi								
	(1) SD/MI/ sederajat		99,29	73,66	99,54	98,31	99,63	85,69	Belum Tercapai
	(2) SMP/MTs/ sederajat		79,83	56,20	88,90	74,54	82,15	63,04	Belum Tercapai
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	91,62	95,21	96,44	93,08	97,29	93,08	Belum Tercapai
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	99,57	97,72	99,83	93,08	99,89	85,72	Belum Tercapai
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan									
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya								
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,12	0,15	0,10	0,0003	0,10	0,03	Tercapai

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan								
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Usia	22,0	21,0	23,0	22,5	24,0	23,0	Belum Tercapai
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	Kelahiran	1,70	0,025	1,26	33,25	0,025	37,50	Belum Tercapai
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	24,00	20,00	24,40	20,00	24,60	31,25	Melampaui
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%	63,11	13,79	63,86	17,00	64,24	42,71	Belum Tercapai
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut								
5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	%	8,46	0,12	7,80	2,80	7,50	13,50	Belum Tercapai
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
5.6.2	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
Pilar Pembangunan Lingkungan									
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua									
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	53,79	58,23	82,56	82,56	83,45	83,45	Sesuai
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan								
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	%	74,94	45,00	6,85	6,85	7,22	6,85	Belum

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
	sanitasi layak								Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	88	88	59	59	88	59	Belum Tercapai
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa	88	88	88	88	88	88	Sesuai
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	%	-	55,56	54,00	55,56	56,00	52,22	Belum Tercapai
6.6	Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau								
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Das	1	1	1	1	1	1	Sesuai
Pilar Pembangunan Sosial									
Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua									
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	%	94,31	96,37	94,59	96,37	94,72	96,40	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Kwh	27.223	284.187	27.531	284.187	27.687	284.187	Tercapai
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua									
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	46,71	53,76	53,50	56,57	55,00	58,29	Melampaui
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	%	9,72	0,05	10,34	-3,62	10,56	-	
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	%	51,10	35,16	53,49	52,00	54,32	52,00	Belum

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
									Tercapai
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp./Jam	29.185	29.760					
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	20,00	10,64			26,00	8,27	Belum Tercapai
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Unit	1	1	1	1			
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	0,22	-	0,47	2,35	0,60	0,24	Belum Tercapai
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	155	193	180	163	210	394	Melampaui
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	5.734	20.769	6300	16.030	26.800	13.816	Belum Tercapai
Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi									
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Buah	1	1	1	1	1	1	Sesuai
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Buah	2	2	2	2	2	2	Sesuai
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Buah	7	7	7	7	7	7	Sesuai
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%	179,4	-	188,29	3,78	193,94	5,43	Belum Tercapai
9.4	Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing								
9.4.1.(a)	Persentase perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca	%	89,1	-	89,3	-	89,6	94,6	Melampaui

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Terget	Capaian	Terget	Capaian	
Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra - dan antar negara									
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Koefisien gini	Angka	0,354	0,350	0,320	0,345	0,339	0,329	Melampaui
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	12,45	12,24	10,54	12,27	11,03	10,79	Belum Tercapai
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Desa	9	13	4	4	8	2	Melampaui
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Desa	25	12	30	8	9	6	Melampaui
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Desa	0	3	1	14	5	8	Melampaui
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	43,31	100	45,87	41,63	100	36,72	Belum Tercapai
Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan									
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	19,67	26,72	1,30	22,67	28,00	0,97	Belum Tercapai
Tujuan 12. Menjamn pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan									
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton/Tahun	5.999,26	905,64	675	4.975,50	1000	14,24	Belum Tercapai
12.6	Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan tradisional untuk mengdopsi praktek-praktek kerkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Unit	2	-	4	-	5	-	
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional								
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Produk	26	-	28	-	29	-	
Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya									
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1*	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Sesuai
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Dokumen	N/A	-	1	0	1	1	Sesuai
Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan									
14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya								
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Ton	22.086	20.884	19.567	-			
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	%	59,09	59,09	59,09	-			
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>The World Trade Organization</i>								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	%	100	100	100	2,98	100		
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jiwa	N/A	7.824					
Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati									
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai duna yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Ha	N/A	-	19,09	0	19,09		
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal								
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas								
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan	Dokumen	-	-	1	0	1		

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
	tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati								
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dokumen	Ada	-	1	0	1		
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan								
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola									
Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan									
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak								
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	%	0,00070	0,00033	0,00056	0,00029	0,00033	0,02	Belum Tercapai
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin	3,84	3,93	9,80	3,92	15,67	3,85	Belum Tercapai
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1.(a)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
16.6.1.(b)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Predikat	B	B	B	B	BB	B	Belum Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	20,00	20,00	24,40	20,00	20,00	31,25	Melampaui
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%	6,45	0,14	7,18	10,34	7,45	25,00	Melampaui
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
					Target	Capaian	Target	Capaian	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	-	94,13					
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	%	2,07	-	9,76	-	21,20	90,16	Melampaui
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	-	43,74					
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	%	100	72,52	100	100	100	100	Sesuai
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterlibatan Informasi Publik	Badan Publik	1	1	1	1	1	1	Sesuai
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Orang	100	0	30	1	30	1	Belum Tercapai
Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan									
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Angka	0,72	-	0,80	2	0,85	0,16	Belum Tercapai
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Data	Ada	Ada					
	Jumlah kelahiran	Jiwa		1.180					
	Jumlah kematian	Jiwa		525					

Sumber Data: BPS dan OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025 diolah

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini, peran strategis pengelolaan keuangan daerah semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur secara komprehensif tentang sumber-sumber pendanaan bagi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Analisis gambaran keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam dokumen RPJMD ini mencakup realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020-2024, realisasi Neraca Tahun Anggaran 2020-2024 serta Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030. Analisis realisasi APBD akan memberikan potret kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir sebagai *existing condition*, realisasi Neraca digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah, dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset dan kewajiban, sementara proyeksi keuangan daerah akan menggambarkan perkiraan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan lima tahun ke depan. Ketiga analisis ini menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan pendanaan dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah periode 2025-2029.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan pencapaian yang telah diraih pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah pada periode sebelumnya. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi tren, pola, dan kapasitas fiskal daerah yang menjadi basis proyeksi keuangan pada periode mendatang.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aspek yang dianalisis mencakup realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta perkembangan neraca daerah selama beberapa tahun terakhir. Hasil analisis ini tidak hanya menunjukkan capaian yang telah diraih, tetapi juga mengungkapkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemahaman mendalam terhadap kinerja keuangan masa lalu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang telah diterapkan, mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum optimal, menilai efisiensi penggunaan anggaran, dan merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk periode mendatang.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD merupakan ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan APBD mengadopsi pendekatan berbasis kinerja yang menekankan pada hasil terukur dari setiap program dan kegiatan, bukan sekadar pada pos-pos pengeluaran.

Pendekatan kinerja dalam pengelolaan APBD memberikan kerangka yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menggambarkan peran strategis anggaran daerah sebagai instrumen pembangunan. Tingkat realisasi dan penyerapan anggaran pada periode tersebut telah berkontribusi dalam mendorong pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Penilaian kinerja pelaksanaan APBD mencakup tiga komponen utama, yaitu realisasi pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan. Realisasi belanja daerah yang mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dalam membiayai program pembangunan, serta pengelolaan pembiayaan daerah yang menggambarkan strategi pemerintah daerah dalam menutup defisit atau memanfaatkan *surplus* anggaran.

Tabel 2. 70
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH						
04.01	Pendapatan Asli Daerah	66.371.401.903,73	54.956.201.151,84	54.417.747.197,53	79.717.225.613,42	75.936.599.688,41	5,89
04.01.01	Pajak Daerah	7.963.533.658,50	9.627.712.505,00	11.726.555.924,72	14.270.867.976,30	13.541.050.302,00	14,82
04.01.02	Retribusi Daerah	1.735.588.105,00	1.916.197.000,00	2.163.203.270,00	4.824.522.956,00	44.562.853.856,00	242,50
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.219.514.000,00	8.610.923.377,48	12.171.072.548,76	12.115.146.704,74	12.005.751.676,20	8,35
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.452.766.140,23	34.801.368.269,36	28.356.915.454,05	48.506.687.976,38	5.826.943.854,21	-15,53
04.02	Pendapatan Transfer	807.309.890.429,07	924.244.895.283,00	953.675.230.094,00	854.591.939.882,66	919.409.979.473,00	3,72
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	776.612.578.963,00	881.462.549.641,00	904.260.024.395,00	802.727.311.424,00	878.900.855.190,00	3,59
04.02.01.01	Dana Perimbangan	760.088.689.963,00	774.854.869.641,00	830.264.598.395,00	734.481.618.424,00	792.113.220.190,00	1,35
04.02.01.01.01	Dana Transfer Umum	580.740.166.342,00	581.452.515.716,00	584.149.162.949,00	602.628.149.588,00	637.730.403.651,00	2,39
	- DBH	15.606.065.342,00	21.305.192.716,00	24.223.459.668,00	18.290.090.317,00	17.235.143.000,00	4,99
	- DAU	565.134.101.000,00	560.147.323.000,00	559.925.703.281,00	584.338.059.271,00	620.495.260.651,00	2,41
04.02.01.01.02	Dana Transfer Khusus	179.348.523.621,00	193.402.353.925,00	246.115.435.446,00	131.853.468.836,00	154.382.816.539,00	1,44
	- DAK Fisik	91.303.308.094,00	109.619.282.288,00	143.430.633.938,00	31.419.707.650,00	42.731.502.855,00	2,20
	- DAK Non Fisik	88.045.215.527,00	83.783.071.637,00	102.684.801.508,00	100.433.761.186,00	111.651.313.684,00	6,67
04.02.01.02	Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal	16.523.889.000,00	21.085.165.000,00	2.950.221.000,00	0,00	21.356.548.000,00	-52,80
04.02.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.01.05	Dana Desa	84.532.957.000,00	85.522.515.000,00	71.045.205.000,00	68.245.693.000,00	65.431.087.000,00	-5,96
04.02.02	Transfer Antar Daerah	30.697.311.466,07	42.782.345.642,00	49.415.205.699,00	51.864.628.458,66	40.509.124.283,00	9,48
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.697.311.466,07	31.692.345.642,00	34.965.699.296,00	45.053.940.458,66	34.078.496.283,00	4,52

No.	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
04.02.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	11.090.000.000,00	14.449.506.403,00	6.810.688.000,00	6.430.628.000,00	-9,38
04.03	Lain-lain Pendapatan yang Sah	111.245.075.000,00	45.167.287.300,00	13.678.377.944,00	11.384.709.448,00	4.986.305.256,00	-50,52
04.03.01	Hibah	20.447.370.000,00	7.340.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-82,05
04.03.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	90.797.705.000,00	37.826.887.300,00	13.678.377.944,00	11.384.709.448,00	4.986.305.256,00	-48,79
JUMLAH PENDAPATAN		984.926.367.332,80	1.024.368.383.734,84	1.021.771.355.235,53	945.693.874.944,08	1.000.332.884.417,41	0,52
5	BELANJA DAERAH						
05.01	Belanja Operasi	667.707.416.112,13	696.515.962.801,00	664.869.638.253,52	685.812.944.263,32	746.613.203.925,10	2,95
05.01.01	Belanja Pegawai	357.468.201.699,13	388.642.494.866,00	354.916.349.730,52	372.087.952.604,00	421.856.354.597,00	4,56
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	235.279.337.879,00	265.189.139.446,00	271.167.735.291,00	284.967.254.713,32	285.017.989.323,10	5,02
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.05	Belanja Hibah	65.815.076.534,00	35.351.199.489,00	30.327.841.932,00	26.150.268.446,00	37.489.026.005,00	-7,73
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.144.800.000,00	7.333.129.000,00	8.457.711.300,00	2.607.468.500,00	2.249.834.000,00	-21,84
05.02	Belanja Modal	172.930.172.357,00	169.226.990.286,00	196.692.630.353,00	170.521.857.369,00	145.606.619.567,00	-3,46
5.02.01	Belanja Tanah	2.529.249.280,00	1.778.655.299,00	1.886.851.800,00	352.830.000,00	512.154.500,00	-14,93
5.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	46.336.062.617,00	59.718.471.630,00	40.530.407.319,00	20.720.049.471,00	18.146.622.784,00	-16,14
5.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	28.990.013.465,00	33.830.974.656,00	74.323.315.084,00	80.539.478.965,00	71.973.982.522,00	33,53
5.02.04	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.344.011.553,00	73.778.890.701,00	78.055.523.650,00	68.627.953.933,00	54.397.846.811,00	-8,21
5.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.730.835.442,00	119.998.000,00	1.896.532.500,00	62.910.000,00	334.572.950,00	429,08
5.02.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	218.635.000,00	241.440.000,00	10,43
05.03	Belanja Tidak Terduga	24.700.800.655,00	2.799.387.174,50	1.444.530.800,00	4.269.780,00	5.462.447.500,00	31.899,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	24.700.800.655,00	2.799.387.174,50	1.444.530.800,00	4.269.780,00	5.462.447.500,00	31.899,00
05.04	Belanja Transfer	144.696.982.529,00	154.978.189.589,00	135.707.988.653,00	133.334.346.956,00	129.792.822.480,00	-2,43
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.273.327.000,00	1.344.635.355,00	1.369.303.500,00	1.702.109.807,00	1.641.045.485,00	7,04

No.	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.423.655.529,00	153.633.554.234,00	134.338.685.153,00	131.632.237.149,00	128.151.776.995,00	-2,52
JUMLAH BELANJA		1.010.035.371.653,13	1.023.520.529.850,50	998.714.788.059,52	989.673.418.368,32	1.027.475.093.472,10	0,46
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
06.01	Penerimaan Pembiayaan	94.098.199.312,40	67.601.373.624,07	66.660.837.653,41	89.793.068.500,42	45.846.626.145,18	-10,95
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	94.041.496.437,40	67.488.955.992,07	66.449.227.508,41	89.717.404.829,42	45.813.525.076,18	-10,92
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	56.702.875,00	112.417.632,00	211.610.145,00	75.663.671,00	33.101.069,00	16,50
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.239.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-33,34
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.239.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-33,34
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		92.597.960.312,40	65.601.373.624,07	66.660.837.653,41	89.793.068.500,42	45.846.626.145,18	-10,45

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2020-2024 menunjukkan dinamika keuangan daerah yang cukup kompleks dengan berbagai tantangan dan pencapaian. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif rendah sebesar 0,52 persen per tahun, sementara total belanja daerah tumbuh dengan rata-rata 0,46 persen per tahun. Pola ini mengindikasikan adanya upaya pengendalian belanja yang selaras dengan kondisi pendapatan yang tidak terlalu dinamis.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal menunjukkan tren yang menarik dengan rata-rata pertumbuhan 5,89 persen per tahun. Meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, PAD berhasil pulih kembali pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai Rp. 79,7 miliar, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 75,9 miliar. Fluktuasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada tahun 2021-2022.

Komponen PAD yang paling mencolok adalah retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan luar biasa dengan rata-rata 242,50 persen per tahun. Lonjakan spektakuler terjadi pada tahun 2024 ketika realisasi retribusi daerah mencapai Rp. 44,5 miliar, meningkat drastis dari Rp. 4,8 miliar pada tahun 2023. Lonjakan ini terjadi akibat perubahan pencatatan Pendapatan Retribusi BLUD, yang sebelumnya tercatat dalam akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kini dialihkan ke akun Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD. Pajak daerah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 14,82 persen per tahun, meningkat secara konsisten dari Rp. 7,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 13,5 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan membaiknya basis pajak daerah dan efektivitas sistem pemungutan pajak.

Pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan daerah dengan kontribusi sekitar 85-95 persen dari total pendapatan. Dengan rata-rata pertumbuhan 3,72 persen per tahun, komponen ini relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi. Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), menunjukkan pertumbuhan yang moderat dengan rata-rata 2,39 persen per tahun.

Yang menarik perhatian adalah Dana Transfer Khusus yang hanya tumbuh 1,44 persen per tahun dengan volatilitas yang cukup tinggi. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi hanya Rp. 31,4 miliar dari Rp. 143,4 miliar pada tahun 2022, sebelum sedikit pulih pada

tahun 2024. Sebaliknya, DAK Non Fisik menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil dengan rata-rata 6,67 persen per tahun.

Belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah dengan porsi sekitar 65-75 persen dari total belanja. Dengan pertumbuhan rata-rata 2,95 persen per tahun, belanja operasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, terutama didorong oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata 4,56 persen per tahun, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024 mencapai Rp. 421,8 miliar. Peningkatan ini terkait dengan kenaikan gaji pegawai, penambahan formasi, atau pembayaran tunjangan tambahan. Sementara itu, belanja barang dan jasa tumbuh 5,02 persen per tahun, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas operasional pemerintah daerah.

Belanja modal menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata negatif 3,46 persen per tahun, menurun dari Rp. 172,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 145,6 miliar pada tahun 2024. Pola ini mengindikasikan adanya penyesuaian prioritas anggaran atau keterbatasan fiskal untuk investasi infrastruktur.

Komponen belanja modal yang mengalami penurunan paling tajam adalah belanja peralatan dan mesin dengan rata-rata penurunan 16,14 persen per tahun. Sebaliknya, belanja gedung dan bangunan menunjukkan pertumbuhan yang impresif dengan rata-rata 33,53 persen per tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan realisasi Rp. 80,5 miliar.

Pembiayaan netto menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata negatif 10,45 persen per tahun, terutama didorong oleh penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Hal ini mengindikasikan semakin efisiennya perencanaan anggaran atau adanya tekanan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia.

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca daerah memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan entitas pelaporan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode pelaporan.

Neraca daerah menjadi instrumen penting untuk menilai kemampuan keuangan daerah melalui analisis rasio keuangan, mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas keuangan daerah, mengevaluasi pengelolaan aset dan kewajiban daerah, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategis, dan menjadi dasar perencanaan keuangan dan pembangunan daerah.

Dalam lima tahun terakhir, neraca daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan perkembangan yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola aset, memenuhi kewajiban, serta mengoptimalkan ekuitas dana untuk mendukung pembangunan daerah. Rincian lebih lanjut mengenai posisi keuangan daerah tertera pada **Tabel 2.71**.

Tabel 2. 71
Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
1	ASET						
a.	Aset Lancar	93.086.066.307,07	106.477.837.456,05	136.249.283.256,79	87.673.195.404,55	81.257.419.542,93	-0,16
b.	Investasi Jangka Panjang	60.623.913.809,30	62.572.592.688,81	53.569.834.782,34	85.060.924.302,47	84.507.132.744,30	11,74
c.	Aset Tetap	1.918.900.161.952,31	1.886.305.566.021,27	1.733.737.692.338,21	1.965.754.320.054,01	2.111.836.633.542,81	2,76
d.	Aset Lainnya	23.121.060.353,00	53.293.687.857,36	56.838.762.143,00	57.171.017.736,02	55.468.235.874,35	33,69
e.	Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	17.912.792.062,00	17.912.792.062,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.095.731.202.421,68	2.108.649.684.023,49	1.980.395.572.520,34	2.213.572.249.559,05	2.350.982.213.766,39	3,13
2	KEWAJIBAN						
a.	Kewajiban Jangka Pendek	11.080.559.263,82	11.473.885.622,52	17.639.758.401,40	12.673.847.168,58	29.006.354.228,53	39,50
b.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.080.559.263,82	11.473.885.622,52	17.639.758.401,40	12.673.847.168,58	29.006.354.228,53	39,50
3	EKUITAS						
a.	Ekuitas	2.084.650.643.157,85	2.097.175.798.400,97	1.962.755.814.118,94	2.200.898.402.390,48	2.321.975.859.537,85	2,96
	JUMLAH EKUITAS	2.084.650.643.157,85	2.097.175.798.400,97	1.962.755.814.118,94	2.200.898.402.390,48	2.321.975.859.537,85	2,96
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.095.731.202.421,67	2.108.649.684.023,49	1.980.395.572.520,34	2.213.572.249.559,06	2.350.982.213.766,38	3,13

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.2.1.3. Aset Daerah

Aset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata 3,13 persen per tahun, meskipun mengalami kontraksi temporer pada tahun 2022. Aset tetap mendominasi struktur kekayaan daerah dengan nilai yang mencapai Rp. 2,11 triliun pada tahun 2024, atau sekitar 89,8 persen dari total aset. Pertumbuhan aset tetap yang mencapai rata-rata 2,76 persen per tahun menggambarkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas publik.

Yang menarik perhatian adalah dinamika aset lancar yang menunjukkan volatilitas tinggi dengan rata-rata pertumbuhan negatif 0,16 persen per tahun. Aset lancar mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 mencapai Rp. 136,2 miliar sebelum turun menjadi Rp. 81,2 miliar pada tahun 2024. Dalam konteks pemerintahan, aset lancar mencerminkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan melaksanakan program-program yang memerlukan dana tunai segera.

Investasi jangka panjang menunjukkan tren yang sangat menarik dengan pertumbuhan rata-rata 11,74 persen per tahun. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, investasi jangka panjang melonjak dramatis pada tahun 2023 menjadi Rp. 85,0 miliar. Dalam konteks pemerintah daerah, investasi jangka panjang ini kemungkinan berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah atau investasi pada instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil stabil untuk mendukung pembangunan masa depan.

Aset lainnya menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dengan rata-rata 33,69 persen per tahun, meningkat dari Rp. 23,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 55,4 miliar pada tahun 2024. Kategori ini mencakup berbagai jenis aset yang tidak termasuk dalam kategori utama lainnya, seperti aset dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, atau aset tidak berwujud. Pertumbuhan yang pesat ini mengindikasikan diversifikasi portofolio aset daerah yang semakin kompleks.

2.2.1.4. Kewajiban

Struktur kewajiban Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan pola yang unik dan patut dicermati. Sepanjang periode 2020-2024, seluruh kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek, tanpa ada kewajiban jangka panjang yang tercatat. Kewajiban jangka pendek mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan rata-rata 39,50 persen per tahun, melonjak dari Rp 11,0 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 29,0 miliar pada tahun 2024. Peningkatan kewajiban jangka pendek yang paling dramatis terjadi pada tahun 2024 ketika nilainya hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun 2023.

2.2.1.5. Ekuitas Dana

Ekuitas daerah yang mencerminkan kekayaan bersih menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 2,96 persen per tahun, meningkat dari Rp. 2,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 2,32 triliun pada tahun 2024. Pola pertumbuhan ekuitas yang mengikuti fluktuasi total aset menunjukkan hubungan yang erat antara akumulasi aset dengan peningkatan kekayaan bersih daerah. Penurunan ekuitas pada tahun 2022 menjadi Rp. 1,96 triliun sebelum pulih kembali pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan dampak dari kontraksi aset total pada periode yang sama.

Yang menarik untuk dicermati adalah stabilitas rasio ekuitas terhadap total aset yang konsisten berada di atas 98 persen sepanjang periode observasi. Kondisi ini menggambarkan struktur modal daerah yang sangat konservatif dengan ketergantungan yang minimal terhadap pembiayaan utang.

Pertumbuhan ekuitas yang relatif moderat dibandingkan dengan beberapa komponen aset lainnya mencerminkan pendekatan pengelolaan keuangan yang *prudent* dan berkelanjutan. Daerah tidak mengejar pertumbuhan aset yang agresif dengan mengorbankan stabilitas keuangan, melainkan membangun kekayaan secara bertahap dan terukur.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu merupakan rangkaian keputusan strategis yang telah diambil pemerintah daerah dalam periode sebelumnya terkait pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya secara transparan, akuntabel, efisien, ekonomis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sejalan dengan kewenangan serta potensi ekonomi lokal. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan umum dan kemampuan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek utama dalam penyusunan kebijakan, dengan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi terhadap kinerja keuangan tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pengalokasian belanja daerah, pemerintah tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyediaan layanan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, kebijakan penganggaran juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi produktif, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada optimalisasi belanja yang efektif, rasional, dan berkeadilan, guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berdaya saing.

2.2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dalam implementasinya, kebijakan ini didasarkan pada dua prinsip utama:

1. Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan kas yang masuk ke rekening kas umum daerah yang tidak wajib dikembalikan oleh Daerah serta penerimaan lain yang diakui sebagai bagian dari ekuitas pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pendapatan daerah disusun secara rasional berdasarkan estimasi terukur yang dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan potensi riil, kapasitas fiskal, dan faktor-faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi pencapaian target untuk setiap sumber pendapatan dalam periode satu tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada strategi optimalisasi berbagai sumber pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar utama dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah melalui optimalisasi pemungutan, penyesuaian tarif berbasis kajian ekonomi, perluasan basis pajak, serta penerapan sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan.

2. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mendorong peran strategis BUMD dalam sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperluas kemitraan dan inovasi bisnis yang berorientasi pada peningkatan pendapatan.
 3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui pemetaan aset daerah yang lebih akurat, pengembangan aset produktif, peningkatan transparansi dalam pemanfaatan aset, serta penertiban aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pendapatan Transfer
- Pendapatan transfer tetap menjadi komponen signifikan dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan berfokus pada peningkatan alokasi transfer Dana Perimbangan dengan strategi, sebagai berikut:
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang mendukung investasi, penguatan sektor unggulan, serta sinergi antara kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan ekonomi nasional.
 2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memastikan efektivitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta pemenuhan indikator kinerja yang menjadi dasar penilaian alokasi dana transfer.
 3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
 4. Mendorong inovasi publik dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan daya saing daerah dan mendukung keberlanjutan fiskal melalui skema pembiayaan inovatif.
 5. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah sebagai indikator tata kelola keuangan yang sehat dan kredibel, yang sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat dalam menyalurkan transfer dana ke daerah.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pendapatan dari sumber lain yang sah menjadi komponen tambahan dalam struktur pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan program prioritas. Kebijakan yang diterapkan mencakup:
1. Peningkatan koordinasi dan penyempurnaan data terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna memastikan alokasi dan penggunaan dana yang lebih akurat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan

di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Eksplorasi sumber pendapatan sah lainnya, termasuk hibah, dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun daerah lain, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam bentuk kemitraan strategis yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.

2.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah: Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengurang nilai kekayaan bersih serta menjadi batas tertinggi untuk setiap jenis pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Penyusunan belanja daerah mengacu pada pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Prioritas utama dalam kebijakan belanja daerah adalah memenuhi pengeluaran wajib, seperti : belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa. Setelah kebutuhan belanja wajib terpenuhi, dana yang tersisa dialokasikan sebagai pagu indikatif untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, pengalokasian belanja operasi, termasuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa, serta belanja tidak terduga, dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan prioritas daerah.

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja yang Bersifat Mengikat

Belanja yang bersifat mengikat diarahkan untuk memastikan kelangsungan operasional pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan hak pegawai dan kewajiban lainnya. Prioritas utama dalam kategori ini, meliputi:

- ✓ Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yang mencakup:
 1. Penyesuaian terhadap kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* maksimal 2,5 persen dari total belanja pegawai.
 3. Pengalokasian anggaran untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan formasi.
 4. Penyediaan dana untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN/PNS Daerah.

5. Pengalokasian tambahan penghasilan bagi ASN dan calon ASN.

Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti yang tertera pada **Tabel 2.72.**

Tabel 2. 72 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020–2024				
No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2020	357.468.201.699,13	1.011.535.610.653,13	35,34
2	2021	388.642.494.866,00	1.025.520.529.850,50	37,90
3	2022	354.916.349.730,52	998.714.788.059,52	35,54
4	2023	372.087.952.604,00	989.673.418.368,32	37,60
5	2024	421.856.354.597,00	1.027.475.093.472,00	41,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Proporsi ini meningkat dari 35,34 persen pada tahun 2020 menjadi 41,06 persen pada tahun 2024, atau naik sebesar 5,72 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun. Dalam nilai absolut, belanja aparatur tumbuh dari Rp. 357,4 miliar menjadi Rp. 421,8 miliar, mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Pola pertumbuhan ini tidak berjalan linear, melainkan mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Setelah meningkat menjadi 37,90 persen pada tahun 2021, proporsi sempat turun menjadi 35,54 persen pada tahun 2022 sebelum kembali naik pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebijakan kepegawaian dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respons terhadap berbagai faktor internal dan eksternal.

- ✓ Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, yang diarahkan untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta kelompok masyarakat dan individu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Belanja Tidak Terduga (BTT), yang dianggarkan untuk menghadapi keadaan darurat dan peristiwa yang tidak terduga seperti bencana alam, bencana sosial, serta kewajiban pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

- ✓ Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, yang dialokasikan untuk menyalurkan dana bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - ✓ Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, yang terdiri dari bantuan keuangan bersifat umum dan khusus. Bantuan umum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa penerima bantuan, sementara bantuan khusus diarahkan penggunaannya oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Salah satu prioritas utama dalam kebijakan ini adalah pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.
- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, kebijakan belanja diarahkan pada:

1. Pelaksanaan program yang berfokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai urusan pemerintahan serta operasional yang berbasis tugas pokok dan fungsi OPD.
2. Upaya pemulihan ekonomi daerah melalui program-program yang mendorong pertumbuhan sektor strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelaksanaan *mandatory spending* di sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengawasan, serta pembangunan infrastruktur, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan pelayanan publik dari tingkat kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten, dengan penguatan kelembagaan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan menjadi prioritas utama.
5. Pengakomodasian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam perencanaan dan penganggaran daerah guna memastikan keselarasan dengan aspirasi masyarakat.

c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 2025–2029

Dalam rangka mencapai target pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025–2030, kebijakan belanja diarahkan pada:

1. Penyelarasan belanja daerah dengan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Implementasi program prioritas pembangunan daerah dan satu program unggulan, yang mencakup berbagai sektor utama pembangunan daerah. Pelaksanaan program prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025–2029.

2.2.2.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi ini mencakup penerimaan maupun pengeluaran yang harus dibayar atau diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada periode anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari dua komponen utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam perencanaan keuangan daerah, pembiayaan *netto* diupayakan selalu surplus guna menutup defisit anggaran ketika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah mencakup berbagai sumber yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran atau meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan belanja prioritas daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah difokuskan pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada dua lembaga keuangan, yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang. Penyertaan modal pada Bank Sulselbar merupakan bagian dari strategi penguatan kelembagaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi *return on investment* bagi pendapatan daerah. Keberadaan Bank Sulselbar sebagai bank pembangunan daerah juga memiliki peran strategis dalam memobilisasi sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pembiayaan sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara itu, penyertaan modal pada BPR Pesisir Tana Doang diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga keuangan mikro dalam memberikan layanan keuangan yang lebih

inklusif kepada masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki aksesibilitas terbatas terhadap layanan perbankan konvensional.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam perencanaan keuangan daerah, pembiayaan *netto* diupayakan agar selalu surplus untuk menutupi defisit anggaran ketika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai belanja daerah. **Tabel 2.73** di bawah ini, menyajikan data mengenai Surplus Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2. 73
Perhitungan Surplus/ Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	984.926.367.333	1.024.368.383.735	1.021.771.355.236	945.693.874.944	1.000.332.884.417
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.010.035.371.653	1.023.520.529.851	998.714.788.060	989.673.418.368	1.027.475.093.472
3	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.239.000	2.000.000.000	0	0	0
	(Surplus Riil)	(26.609.243.320)	(1.152.146.116)	23.056.567.176	(43.979.543.424)	(27.142.209.055)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan data surplus/defisit riil anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat pola kinerja keuangan daerah yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan mengalami defisit dalam sebagian besar periode pengamatan. Pada tahun 2020, kabupaten ini menghadapi defisit yang cukup besar, sebesar Rp. 26,609 miliar, yang disebabkan oleh realisasi belanja daerah mencapai Rp. 1,010 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1,5 miliar, sementara pendapatan daerah hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 984,926 miliar.

Tahun 2021 memperlihatkan perbaikan yang sangat mencolok dalam kinerja keuangan daerah, dengan defisit yang berhasil ditekan drastis menjadi hanya Rp. 1,152 miliar. Pencapaian ini merupakan hasil dari peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp. 1,024 miliar, meskipun belanja daerah juga meningkat menjadi Rp. 1,023 miliar dan pengeluaran pembiayaan naik menjadi Rp. 2 miliar.

Momentum positif berlanjut pada tahun 2022 ketika kabupaten berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp. 23,056 miliar, satu-satunya periode surplus dalam lima tahun pengamatan. Pencapaian ini dimungkinkan oleh kombinasi pendapatan daerah yang tetap tinggi di angka Rp. 1,021 miliar dan pengendalian belanja daerah yang efektif menjadi Rp. 998,714 miliar, serta tidak adanya pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut.

Namun, tren positif ini tidak dapat dipertahankan pada tahun 2023, ketika kabupaten kembali mengalami defisit yang cukup besar, sebesar Rp. 43,979 miliar. Penurunan drastis pendapatan daerah menjadi Rp. 945,693 miliar menjadi faktor utama kemunduran ini, meskipun belanja daerah juga mengalami penurunan menjadi Rp. 989,673 miliar. Defisit tahun 2023 merupakan yang terbesar dalam periode pengamatan. Pada tahun 2024, meskipun terjadi pemulihan pendapatan daerah menjadi Rp. 1,000 miliar, kabupaten masih mengalami defisit sebesar Rp. 27,142 miliar akibat belanja daerah yang melonjak menjadi Rp. 1,027 miliar.

Apabila terjadi defisit, strategi untuk menanggulangi defisit telah dirumuskan melalui struktur pembiayaan defisit riil anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar. Komposisi pembiayaan defisit riil anggaran selama periode 2020-2024 tertera pada **Tabel 2.74**.

Tabel 2. 74
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020–2024

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	94.041.496.437,40	67.488.955.992,07	66.449.227.508,41	89.717.404.829,42	45.813.525.076,18
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya menjadi satu-satunya sumber penutupan defisit riil. Tidak ada pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lain, seperti : pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, maupun penerimaan piutang daerah. Keadaan ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada SiLPA untuk menutup defisit riil anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap SiLPA. Hal ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Gambaran realisasi SiLPA sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 tertera pada **Tabel 2.75**.

Tabel 2. 75
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Jumlah SiLPA	94.041.496.437	67.488.955.992	66.449.227.508	89.717.404.829	45.813.525.076
2	Pelampauan Penerimaan PAD					
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan					
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya					
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
7	Kegiatan Lanjutan					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, SiLPA tercatat sebesar Rp. 94,04 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp. 67,49 miliar. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai SiLPA sebesar Rp. 66,45 miliar. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dimana SiLPA mencapai Rp. 89,72 miliar. Namun, pada tahun 2024 nilai SiLPA mengalami penurunan drastis menjadi Rp. 45,81 miliar. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam penyerapan anggaran atau optimalisasi penggunaan dana yang tersedia. Pola fluktuasi SiLPA ini perlu

menjadi perhatian dalam perencanaan keuangan daerah ke depan, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja daerah.

2.2.3. Analisis Keuangan Daerah

2.2.3.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal daerah merupakan kajian komprehensif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan fiskal, tingkat kemandirian keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, serta dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian daerah. Analisis ini mencakup penilaian terhadap struktur dan komposisi pendapatan daerah, pola pengeluaran atau belanja daerah, serta hubungan antara kemampuan fiskal daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis fiskal daerah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, menentukan prioritas pembangunan, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (*fiscal space*), serta rasio pajak (*tax ratio*). Ketiga indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, fleksibilitas fiskal yang dimiliki untuk melakukan ekspansi belanja atau investasi, serta efektivitas pemungutan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, sementara ruang fiskal menggambarkan kapasitas daerah untuk meningkatkan belanja tanpa mengorbankan sustainabilitas fiskal, dan rasio pajak menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah.

Di sisi belanja daerah, analisis meliputi : rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Analisis belanja pegawai memberikan informasi mengenai proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kompensasi Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang dapat menggambarkan efisiensi operasional pemerintah daerah. Rasio belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pelayanan publik yang berdampak jangka panjang. Sedangkan rasio belanja per kapita mencerminkan tingkat pelayanan publik yang dapat diberikan kepada setiap penduduk, yang berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/ dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Rasio transfer ke daerah merupakan indikator yang mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer lainnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer atau perimbangan dengan total pendapatan daerah, yang dinyatakan dalam persentase. Semakin besar nilai rasio transfer ke daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, yang mengindikasikan rendahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, semakin kecil nilai rasio transfer ke daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Tabel 2. 76
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Pendapatan Transfer / Perimbangan (Rp)	Rasio Transfer terhadap Pendapatan Daerah
1	2020	984.926.367.332,80	807.309.890.429,07	81,97
2	2021	1.024.368.383.734,84	924.244.895.283,00	90,23
3	2022	1.021.771.355.235,53	953.675.230.094,00	93,34
4	2023	945.693.874.944,08	854.591.939.882,66	90,37
5	2024	1.000.332.884.417,41	919.409.979.473,00	91,91

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan data rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024, terlihat bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, rasio transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 81,97 persen, yang berarti sekitar 82 persen dari total pendapatan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 90,23 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan rasio 93,34 persen. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 90,37 persen, namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 91,91 persen. Tingginya rasio transfer ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, dengan kontribusi

Pendapatan Asli Daerah yang masih relatif kecil dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

2. Rasio Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah (*fiscal space*) adalah konsep yang menggambarkan kapasitas atau kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak tanpa membahayakan akses terhadap pasar keuangan atau sustainabilitas fiskal daerah. Ruang fiskal mencerminkan fleksibilitas keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan, krisis ekonomi, atau investasi strategis lainnya. Indikator ruang fiskal dihitung dengan mengurangi total pendapatan daerah dengan pendapatan hibah, Dana Alokasi Khusus, belanja pegawai, dan belanja bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatan daerah. Semakin besar ruang fiskal menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk melakukan ekspansi fiskal atau investasi tambahan, sedangkan ruang fiskal yang kecil menandakan bahwa sebagian besar sumber daya keuangan telah terikat untuk pengeluaran wajib dan rutin, sehingga membatasi kemampuan daerah untuk melakukan investasi produktif atau merespons kondisi darurat.

Tabel 2. 77
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Hibah (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Bunga (Rp)	Selisih (Rp)	Ruang Fiskal (%)
1	2020	984.926.367.333	20.447.370.000	179.348.523.621	357.468.201.699	0	427.662.272.013	43,42
2	2021	1.024.368.383.735	7.340.400.000	193.402.353.925	388.642.494.866	0	434.983.134.944	42,46
3	2022	1.021.771.355.236	0	246.115.435.446	354.916.349.731	0	420.739.570.059	41,18
4	2023	945.693.874.944	0	131.853.468.836	372.087.952.604	0	441.752.453.504	46,71
5	2024	1.000.332.884.417	0	154.382.816.539	421.856.354.597	0	424.093.713.281	42,40

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Analisis terhadap data ruang fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan kondisi ruang fiskal yang relatif stabil namun dengan fluktuasi yang patut diperhatikan. Pada tahun 2020, ruang fiskal daerah sebesar 43,42 persen, yang mengindikasikan bahwa sekitar 43 persen dari total pendapatan daerah masih dapat digunakan secara fleksibel untuk program-program pembangunan atau investasi strategis. Namun, terjadi penurunan ruang fiskal pada tahun 2021 menjadi 42,46 persen dan terus menurun pada tahun

2022 menjadi 41,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran tetap dan wajib semakin meningkat, sehingga mengurangi fleksibilitas fiskal daerah. Menariknya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan ruang fiskal yang signifikan menjadi 46,71 persen, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode analisis. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efisiensi pengeluaran atau peningkatan pendapatan yang tidak terikat. Namun, pada tahun 2024 ruang fiskal kembali menurun menjadi 42,40 persen. Secara keseluruhan, meskipun ruang fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada level yang cukup memadai (di atas 40 persen), fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih konsisten untuk mempertahankan fleksibilitas fiskal yang optimal.

3. Rasio Pajak Daerah (*Tax Ratio*)

Rasio pajak daerah (*Tax ratio*) adalah indikator yang mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan membagi total penerimaan pajak daerah dengan nilai PDRB, kemudian dikalikan 100 persen untuk mendapatkan nilai persentase. *Tax ratio* menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya ekonomi lokal melalui instrumen perpajakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rasio pajak yang tinggi menunjukkan efektivitas sistem perpajakan daerah dalam mengekstrak kontribusi dari aktivitas ekonomi masyarakat, namun perlu diimbangi dengan pertimbangan daya saing dan beban pajak yang tidak memberatkan dunia usaha. Sebaliknya, *Tax ratio* yang rendah dapat mengindikasikan potensi pajak yang belum tergali optimal, sistem administrasi perpajakan yang kurang efektif, atau basis pajak yang masih terbatas.

Tabel 2. 78
Rasio Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Nilai PDRB (Rp)	Tax Ratio (%)
1	2020	7.963.533.658,50	6.392.740.000.000,00	0,12
2	2021	9.627.712.505,00	6.835.400.000.000,00	0,14
3	2022	11.726.555.924,72	7.480.470.000.000,00	0,16
4	2023	14.270.867.976,30	7.986.240.000.000,00	0,18
5	2024	13.541.050.302,00	8.340.510.000.000,00	0,16

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Data rasio pajak Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang positif meskipun dengan nilai yang masih relatif rendah. Pada tahun 2020, *tax ratio* sebesar 0,12 persen, yang berarti penerimaan pajak daerah hanya berkontribusi sebesar 0,12 persen terhadap total

PDRB kabupaten. Tren positif terlihat dengan meningkatnya *tax ratio* menjadi 0,14 persen pada tahun 2021, 0,16 persen pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 0,18 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan daerah, perluasan basis pajak, atau peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,16 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak kondisi ekonomi atau kebijakan tertentu yang mempengaruhi penerimaan pajak. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, nilai *tax ratio* Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat rendah dibandingkan standar nasional yang umumnya berkisar 1-3 persen. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi peningkatan penerimaan pajak daerah yang dapat digali melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, perbaikan sistem administrasi, serta pengembangan basis ekonomi lokal yang dapat meningkatkan objek dan subjek pajak daerah.

4. Rasio Belanja Pegawai

Rasio belanja pegawai adalah indikator yang mengukur proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dalam struktur APBD. Belanja pegawai mencakup seluruh pengeluaran untuk kompensasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berupa gaji pokok, tunjangan, honorarium, dan bentuk kompensasi lainnya yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan membagi total belanja pegawai dengan total belanja daerah, kemudian dinyatakan dalam persentase. Indikator ini penting untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, karena belanja pegawai merupakan komponen pengeluaran yang bersifat rutin dan wajib. Rasio belanja pegawai yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan kurangnya fleksibilitas anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik, sedangkan rasio yang terlalu rendah menunjukkan kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.

Tabel 2. 79
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%)
1	2020	357.468.201.699,13	1.010.035.371.653,13	35,39
2	2021	388.642.494.866,00	1.023.520.529.850,50	37,97
3	2022	354.916.349.730,52	998.714.788.059,52	35,54
4	2023	372.087.952.604,00	989.673.418.368,32	37,60
5	2024	421.856.354.597,00	1.027.475.093.472,10	41,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Analisis terhadap data rasio belanja pegawai Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan patut mendapat perhatian. Pada tahun 2020, rasio belanja pegawai sebesar 35,39 persen, yang berarti sekitar 35 persen dari total belanja daerah dialokasikan untuk kompensasi pegawai. Rasio ini meningkat menjadi 37,97 persen pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 35,54 persen pada tahun 2022. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 37,60 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan rasio 41,06 persen. Peningkatan rasio belanja pegawai ini mengindikasikan beberapa kemungkinan, antara lain adanya peningkatan jumlah pegawai, kenaikan gaji atau tunjangan pegawai, atau proporsi belanja lain yang menurun sehingga secara relatif belanja pegawai menjadi lebih dominan. Kondisi rasio belanja pegawai yang mencapai 41,06 persen pada tahun 2024 perlu mendapat perhatian khusus, karena mendekati batas maksimal yang direkomendasikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan indikator yang mengukur proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam struktur APBD. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti: pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta investasi dalam bentuk fisik lainnya. Rasio belanja modal dihitung dengan membagi total belanja modal dengan total belanja daerah, kemudian dinyatakan dalam persentase. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pelayanan publik yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rasio belanja modal yang tinggi menunjukkan fokus pemerintah daerah pada investasi produktif, sedangkan rasio yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan sumber daya untuk investasi atau prioritas anggaran yang lebih fokus pada pengeluaran operasional.

Tabel 2. 80
Rasio Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)
1	2020	172.930.172.357,00	1.010.035.371.653,13	17,12
2	2021	169.226.990.286,00	1.023.520.529.850,50	16,53
3	2022	196.692.630.353,00	998.714.788.059,52	19,69
4	2023	170.521.857.369,00	989.673.418.368,32	17,23
5	2024	145.606.619.567,00	1.027.475.093.472,10	14,17

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Data rasio belanja modal Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pada tahun 2020, rasio belanja modal sebesar 17,12 persen, yang menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap investasi infrastruktur dan pembangunan fisik daerah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 16,53 persen, meskipun kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 19,69 persen, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode analisis. Tren penurunan kembali terjadi secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 17,23 persen, dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan rasio hanya 14,17 persen. Penurunan rasio belanja modal ini sangat kontras dengan peningkatan rasio belanja pegawai dalam periode yang sama, mengindikasikan adanya pergeseran prioritas anggaran dari investasi produktif menuju pengeluaran operasional. Kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur daerah dan dapat berdampak negatif terhadap daya saing ekonomi daerah serta kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.

6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

Rasio belanja per kapita penduduk adalah indikator yang mengukur rata-rata pengeluaran pemerintah daerah untuk setiap penduduk dalam wilayah administrasinya. Indikator ini dihitung dengan membagi total belanja daerah dengan jumlah penduduk, yang menghasilkan nilai belanja daerah per kapita dalam rupiah. Rasio ini mencerminkan tingkat pelayanan publik yang dapat diberikan kepada setiap penduduk, yang berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Belanja per kapita yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang memadai, infrastruktur yang baik, dan program pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, belanja per kapita yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan sumber daya atau efisiensi yang rendah dalam pengelolaan anggaran daerah.

Tabel 2. 81
Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Belanja Daerah per Kapita (Rp)
1	2020	1.010.035.371.653,13	137.071	7.368.702
2	2021	1.023.520.529.850,50	137.974	7.418.213
3	2022	998.714.788.059,52	139.145	7.177.511
4	2023	989.673.418.368,32	142.100	6.964.626
5	2024	1.027.475.093.472,10	143.096	7.180.320

Sumber: BPKPD dan BPS Kepulauan Selayar, 2025

Analisis terhadap data belanja per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang perlu dicermati dalam konteks efektivitas pelayanan publik. Pada tahun 2020, belanja daerah per kapita sebesar Rp. 7.368.702 dengan jumlah penduduk 137.071 jiwa. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp. 7.418.213 per kapita, meskipun jumlah penduduk juga meningkat menjadi 137.974 jiwa. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan belanja per kapita menjadi Rp. 7.177.511, yang mengindikasikan bahwa meskipun total belanja daerah relatif stabil, penambahan penduduk menjadi 139.145 jiwa menyebabkan distribusi belanja per individu menurun. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2023 dimana belanja per kapita mencapai titik terendah, yaitu Rp. 6.964.626 dengan jumlah penduduk 142.100 jiwa. Pada tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan total belanja daerah yang signifikan, belanja per kapita hanya meningkat menjadi Rp. 7.180.320 dengan jumlah penduduk 143.096 jiwa. Tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang dapat berimplikasi pada penurunan kualitas pelayanan publik per individu jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah.

2.2.3.2. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Analisis share APBD terhadap nilai PDRB merupakan kajian yang mengukur kontribusi dan dampak anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Analisis ini bertujuan untuk memahami seberapa besar peran sektor pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi regional melalui pengeluaran dan investasi publik. Share APBD terhadap PDRB dihitung dengan membandingkan komponen-komponen belanja daerah dengan komponen-komponen PDRB yang relevan, seperti konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto. Analisis ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan *multiplier effect*, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat menilai apakah alokasi anggaran telah optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam strategi fiskal.

Kontribusi PDRB menurut pengeluaran adalah pendekatan perhitungan PDRB yang melihat total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi dalam suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendekatan pengeluaran ini terdiri dari beberapa komponen utama: pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencerminkan daya beli dan pola konsumsi masyarakat; pengeluaran konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang menunjukkan aktivitas organisasi sosial dan keagamaan; pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencerminkan peran sektor publik dalam perekonomian; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menggambarkan investasi dalam aset tetap; perubahan inventori yang menunjukkan perubahan stok barang; serta net ekspor yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Analisis kontribusi ini memberikan gambaran mengenai struktur permintaan dalam perekonomian daerah dan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Tabel 2. 81
Kontribusi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No.	Komponen	Tahun				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.308.170.000.000	3.448.610.000.000	3.797.580.000.000	4.173.890.000.000	4.522.630.000.000
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	77.450.000.000	82.780.000.000	90.340.000.000	103.030.000.000	117.870.000.000
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	944.730.000.000	1.061.540.000.000	1.066.330.000.000	1.120.290.000.000	1.115.990.000.000
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.908.880.000.000	3.079.950.000.000	3.309.730.000.000	3.533.500.000.000	3.780.530.000.000
5	Perubahan Inventori	31.800.000.000	11.100.000.000	14.630.000.000	-3.490.000.000	-9.280.000.000
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-878.290.000.000	-848.590.000.000	-798.140.000.000	-940.970.000.000	-1.187.230.000.000
Total PDRB		6.392.740.000.000	6.835.390.000.000	7.480.470.000.000	7.986.250.000.000	8.340.510.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar menurut pengeluaran periode 2020-2024, terlihat bahwa struktur perekonomian daerah didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp. 3.308,17 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 4.522,63 miliar pada tahun 2024, dengan kontribusi berkisar 51-54 persen

terhadap total PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat terus meningkat dan konsumsi domestik menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan peningkatan dari Rp. 2.908,88 miliar menjadi Rp. 3.780,53 miliar, dengan kontribusi sekitar 45-46 persen terhadap PDRB, menunjukkan tingginya aktivitas investasi dalam perekonomian daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah relatif stabil berkisar Rp. 944,73 miliar hingga Rp. 1.120,29 miliar dengan kontribusi 13-15 persen terhadap PDRB, mencerminkan peran sektor publik yang moderat dalam perekonomian. Yang menarik adalah kondisi net ekspor yang konsisten negatif dan cenderung memburuk dari -Rp. 878,29 miliar menjadi -Rp. 1.187,23 miliar, mengindikasikan bahwa daerah ini lebih banyak mengimpor barang dan jasa dibandingkan mengekspornya, yang menunjukkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan potensi kebocoran ekonomi yang perlu mendapat perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya Analisis share APBD terhadap konsumsi pemerintah tertera pada **Tabel 2.82**.

Tabel 2. 82
Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Konsumsi Pemerintah (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah (%)
1	2020	944.730.000.000,00	1.010.035.371.653,13	106,91
2	2021	1.061.540.000.000,00	1.023.520.529.850,50	96,42
3	2022	1.066.330.000.000,00	998.714.788.059,52	93,66
4	2023	1.120.290.000.000,00	989.673.418.368,32	88,34
5	2024	1.115.990.000.000,00	1.027.475.093.472,10	92,07

Sumber: BPS dan BPKPD Kepulauan Selayar, 2025

Analisis share APBD terhadap konsumsi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan perlu mendapat perhatian serius. Pada tahun 2020, share APBD terhadap konsumsi pemerintah mencapai 106,91 persen, yang menunjukkan bahwa total belanja APBD bahkan melebihi komponen konsumsi pemerintah dalam PDRB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian belanja pemerintah daerah berkontribusi pada komponen PDRB lainnya, seperti investasi atau transfer yang merangsang konsumsi rumah tangga. Namun, terjadi penurunan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya: 96,42 persen pada tahun 2021, 93,66 persen pada tahun 2022, mencapai titik terendah 88,34 persen pada tahun 2023, dan sedikit membaik menjadi 92,07 persen pada tahun 2024. Penurunan share ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, pertumbuhan

konsumsi pemerintah dalam PDRB yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan belanja APBD; kedua, adanya perbedaan metodologi perhitungan antara belanja APBD dan konsumsi pemerintah dalam PDRB; atau ketiga, adanya efisiensi dalam pengeluaran pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak optimal terhadap perekonomian daerah. Peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir tertera pada **Tabel 2.83**.

Tabel 2. 83
Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Komponen PMTB (Rp)	Total Belanja Modal (Rp)	Share Belanja Modal terhadap Komponen PMTB (%)
1	2020	2.908.880.000.000,00	172.930.172.357,00	5,94
2	2021	3.079.950.000.000,00	169.226.990.286,00	5,49
3	2022	3.309.730.000.000,00	196.692.630.353,00	5,94
4	2023	3.533.500.000.000,00	170.521.857.369,00	4,83
5	2024	3.780.530.000.000,00	145.606.619.567,00	3,85

Sumber: BPS dan BPKPD Kepulauan Selayar, 2025

Analisis kontribusi belanja modal APBD terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020 dan 2022, share belanja modal terhadap komponen PMTB mencapai 5,94 persen, yang menunjukkan kontribusi pemerintah daerah yang cukup signifikan dalam total investasi daerah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,49 persen, diikuti penurunan yang lebih tajam pada tahun 2023 menjadi 4,83 persen, dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan hanya 3,85 persen. Penurunan drastis ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam mendorong investasi infrastruktur dan pembangunan fisik semakin berkurang, sementara sektor swasta dan investasi lainnya kemungkinan mengambil peran yang lebih besar dalam pembentukan modal tetap. Kondisi ini sejalan dengan data rasio belanja modal yang juga menunjukkan tren menurun, mengonfirmasi bahwa terjadi pergeseran prioritas anggaran dari investasi produktif menuju pengeluaran operasional. Rendahnya kontribusi belanja modal terhadap PMTB dapat berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur publik, yang pada akhirnya dapat menghambat daya saing ekonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi strategi investasi publik

untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2.4. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan adalah alat analisis yang menggunakan perbandingan antara komponen-komponen dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Analisis rasio keuangan menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan daerah, mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa rasio keuangan yang relevan untuk dianalisis dalam menilai kinerja keuangan daerah meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang.

2.2.4.1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang umum digunakan dalam konteks keuangan daerah salah satunya adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban jangka pendek, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.

Semakin besar nilai rasio lancar, semakin baik kemampuan likuiditas entitas tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas memiliki cadangan aset lancar yang cukup untuk mengantisipasi pembayaran utang-utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Sebaliknya, semakin kecil nilai rasio lancar, semakin rendah tingkat likuiditas entitas, yang berarti kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi lebih terbatas dan berpotensi menghadapi kesulitan dalam pengelolaan arus kas.

Tabel 2. 84
Rasio Lancar Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Persentase (%)
1	2020	93.086.066.307,07	11.080.559.263,82	840,08
2	2021	106.477.837.456,05	11.473.885.622,52	928,00
3	2022	136.249.283.256,79	17.639.758.401,40	772,40
4	2023	87.673.195.404,55	12.673.847.168,58	691,76
5	2024	81.257.419.542,93	29.006.354.228,53	280,14

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan data rasio lancar Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat likuiditas daerah. Pada tahun 2020, kabupaten ini memiliki rasio lancar sebesar 840,08 persen, yang menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik dengan aset lancar mencapai lebih dari delapan kali lipat kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini bahkan membaik pada tahun 2021 dengan rasio mencapai 928 persen, merupakan puncak tertinggi dalam periode observasi, mengindikasikan pengelolaan kas dan aset lancar yang sangat optimal.

Namun demikian, mulai tahun 2022 terjadi penurunan yang perlu mendapat perhatian serius. Rasio lancar turun menjadi 772,40 persen, meskipun masih dalam kategori sangat baik. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 691,76 persen, dan yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan drastis pada tahun 2024 menjadi hanya 280,14 persen. Penurunan tajam ini disebabkan oleh peningkatan signifikan kewajiban jangka pendek dari Rp. 12,67 miliar pada 2023 menjadi Rp. 29,01 miliar pada 2024, atau meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara aset lancar justru mengalami penurunan dari Rp. 87,67 miliar menjadi Rp. 81,26 miliar. Meskipun rasio 280,14 persen masih menunjukkan kemampuan likuiditas yang memadai, tren penurunan ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk mengantisipasi potensi masalah likuiditas di masa mendatang.

2.2.4.2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas daerah dihitung dengan membandingkan total aset dengan total kewajiban. Rasio solvabilitas yang tinggi menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang baik dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Rasio solvabilitas minimal yang direkomendasikan adalah 1,5 atau 150 persen, yang berarti nilai aset minimal 1,5 kali dari total kewajiban.

Tabel 2. 85
Rasio Solvabilitas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Aset (Rp)	Total Kewajiban (Rp)	Persentase (%)
1	2020	2.095.731.202.421,67	11.080.559.263,82	18.913,59
2	2021	2.108.649.684.023,49	11.473.885.622,52	18.377,82
3	2022	1.980.395.572.520,34	17.639.758.401,40	11.226,89
4	2023	2.213.572.249.559,06	12.673.847.168,58	17.465,67
5	2024	2.350.982.213.766,39	29.006.354.228,53	8.105,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Data rasio solvabilitas Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kondisi keuangan jangka panjang yang sangat solid namun mengalami tren penurunan yang perlu diwaspadai. Pada tahun 2020, kabupaten memiliki rasio solvabilitas sebesar 18.913,59 persen, menunjukkan bahwa total aset hampir 190 kali lipat lebih besar dari total kewajiban. Kondisi ini sedikit menurun pada 2021 menjadi 18.377,82 persen, namun masih dalam kategori sangat *excellent*.

Tahun 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan menjadi 11.226,89 persen, meskipun masih menggambarkan kondisi solvabilitas yang sangat baik. Pada 2023, rasio kembali naik menjadi 17.465,67 persen, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Namun, tahun 2024 mencatat penurunan drastis menjadi 8.105,06 persen, merupakan nilai terendah dalam periode observasi.

Penurunan tajam pada 2024 ini disebabkan oleh peningkatan total kewajiban dari Rp 12,67 miliar pada 2023 menjadi Rp 29,01 miliar pada 2024, sementara total aset hanya meningkat dari Rp 2,21 triliun menjadi Rp 2,35 triliun. Meskipun rasio 8.105,06% masih menunjukkan kondisi solvabilitas yang sangat baik dengan aset lebih dari 80 kali lipat kewajiban, tren peningkatan kewajiban yang tajam ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan keuangan jangka panjang untuk mempertahankan stabilitas fiskal daerah.

2.2.4.3. Rasio Utang

Rasio utang mengukur tingkat penggunaan utang dalam struktur keuangan pemerintah daerah. Rasio utang yang umum digunakan salah satunya adalah rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total kewajiban dengan ekuitas dana. Rasio ini dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas dana, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.

Semakin besar nilai rasio utang terhadap ekuitas, semakin tinggi tingkat *leverage* atau ketergantungan entitas pada pembiayaan eksternal berupa utang, yang mengindikasikan risiko finansial yang lebih tinggi namun juga potensi pertumbuhan yang lebih besar melalui penggunaan dana pinjaman. Sebaliknya, semakin kecil nilai rasio utang terhadap ekuitas, semakin rendah tingkat *leverage entitas*, menunjukkan struktur pembiayaan yang lebih konservatif dan stabil dengan dominasi pembiayaan dari modal sendiri, meskipun mungkin membatasi potensi ekspansi yang dapat dicapai melalui *leverage*.

Tabel 2. 86
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Ekuitas Dana (Rp)	Persentase (%)
1	2020	11.080.559.263,82	2.084.650.643.157,85	0,53
2	2021	11.473.885.622,52	2.097.175.798.400,97	0,55
3	2022	17.639.758.401,40	1.962.755.814.118,94	0,90
4	2023	12.673.847.168,58	2.200.898.402.390,48	0,58
5	2024	29.006.354.228,53	2.321.975.859.537,85	1,25

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan struktur pembiayaan yang sangat konservatif dengan tingkat *leverage* yang minimal sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,53 persen, menunjukkan bahwa utang hanya mencapai sekitar setengah persen dari total ekuitas dana. Kondisi serupa terjadi pada 2021 dengan rasio 0,55 persen, mengindikasikan stabilitas struktur pembiayaan yang sangat aman.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan menjadi 0,90 persen, masih dalam kategori sangat rendah namun menandakan adanya sedikit peningkatan penggunaan pembiayaan eksternal. Pada 2023, rasio kembali turun menjadi 0,58 persen, menunjukkan penurunan tingkat *leverage*. Namun, tahun 2024 mencatat peningkatan yang paling signifikan menjadi 1,25 persen, meskipun masih dalam kategori sangat rendah.

Peningkatan pada 2024 disebabkan oleh melonjaknya total kewajiban dari Rp. 12,67 miliar menjadi Rp. 29,01 miliar, sementara ekuitas dana meningkat dari Rp. 2,20 triliun menjadi Rp. 2,32 triliun. Meskipun rasio 1,25 persen masih menunjukkan struktur pembiayaan yang sangat konservatif dan minim risiko, tren peningkatan kewajiban yang konsisten memerlukan monitoring ketat untuk memastikan tidak terjadi peningkatan *leverage* yang tidak terkendali di masa mendatang.

2.2.5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari dua komponen utama, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam.

Dana Bagi Hasil Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Cukai Hasil Tembakau, yang dibagi berdasarkan kontribusi daerah dalam penerimaan pajak tersebut. Sementara itu, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mencakup hasil dari eksploitasi sumber daya alam

seperti minyak bumi, kehutanan, perikanan, dan lainnya, yang dibagikan kepada daerah penghasil sebagai kompensasi atas pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya.

DBH memiliki peran strategis dalam otonomi daerah karena memberikan insentif kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya alamnya, sekaligus memberikan sumber pendapatan yang relatif stabil untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Mekanisme DBH juga mencerminkan prinsip keadilan fiskal dengan mengembalikan sebagian hasil pengelolaan sumber daya kepada daerah yang menjadi sumbernya.

Tabel 2. 87
Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No.	Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.562.848.475,00	13.781.162.857,00	10.625.436.698,00	7.098.924.900,00	7.231.359.000,00
1.2	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.054.396.243,00	7.698.756.019,00	5.080.785.641,00	1.431.192.799,00	2.544.967.000,00
1.2	DBH PPh Pasal 21	6.508.452.232,00	5.884.132.789,00	5.544.651.057,00	5.371.713.899,00	4.403.788.000,00
1.3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	198.274.049,00	0,00	296.018.202,00	282.604.000,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	5.043.216.867,00	7.524.029.859,00	13.598.022.970,00	11.191.165.417,00	10.003.784.000,00
2.1	DBH SDA Minyak Bumi	289.289.456,00	1.195.798.568,00	1.613.884.287,00	291.662.523,00	385.555.000,00
2.2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	12.464.754,00	4.794.055.406,00	9.769.505.740,00	2.449.659.947,00	2.177.316.000,00
2.3	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.159.796,00	37.515.547,00	58.143.446,00	16.798.736,00	6.388.000,00
2.4	DBH SDA Perikanan	788.276.289,00	1.496.660.338,00	1.958.311.000,00	8.433.044.211,00	7.434.525.000,00
2.5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	178.658.130,00	0,00	198.178.497,00	0,00	0,00
2.6	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	3.759.368.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Dana Bagi Hasil	15.606.065.342,00	21.305.192.716,00	24.223.459.668,00	18.290.090.317,00	17.235.143.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dengan tren yang berfluktuatif namun cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Total DBH mengalami peningkatan signifikan dari Rp. 15,61 miliar pada 2020 menjadi puncaknya di tahun 2022 sebesar Rp. 24,22 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 55,17 persen dalam dua tahun. Namun, mulai 2023 terjadi penurunan menjadi Rp. 18,29 miliar dan berlanjut pada 2024 menjadi Rp. 17,24 miliar.

Dari segi komposisi, Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan penurunan konsisten dari Rp. 10,56 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp. 7,23 miliar pada 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya penerimaan DBH Pajak Bumi dan Bangunan dari puncak Rp. 7,70 miliar pada 2021 menjadi hanya Rp. 2,54 miliar pada 2024, mengindikasikan potensi masalah dalam administrasi perpajakan atau penurunan aktivitas ekonomi yang terkait dengan properti di daerah.

Sebaliknya, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menunjukkan pola yang lebih dinamis, meningkat tajam dari Rp. 5,04 miliar pada 2020 menjadi puncak Rp. 13,60 miliar pada 2022, kemudian stabil di kisaran Rp. 10-11 miliar pada 2023-2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor perikanan yang berkembang pesat dari Rp. 0,79 miliar pada 2020 menjadi Rp. 8,43 miliar pada 2023, mencerminkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, hilangnya komponen royalti yang pada 2020 menyumbang Rp. 3,76 miliar menunjukkan adanya perubahan dalam struktur eksploitasi sumber daya alam di daerah ini.

2.2.6. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (44), kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menentukan sumber-sumber pendanaan yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, serta peningkatan kualitas belanja guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam penyusunan kerangka pendanaan, diperlukan analisis terhadap kapasitas fiskal daerah guna memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan tren realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode sebelumnya, proyeksi penerimaan daerah untuk lima tahun ke depan, serta asumsi-asumsi makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

2.2.6.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Proyeksi indikator makro ekonomi dan sosial Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025-2030 menggambarkan visi pembangunan yang sangat optimis dengan target pertumbuhan ekonomi yang progresif dan perbaikan berkelanjutan pada berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Data proyeksi ini memberikan gambaran komprehensif tentang arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi landasan perencanaan strategis kabupaten dalam lima tahun ke depan.

Tabel 2. 88
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,33	3,50	4,20	5,20	5,50	5,90	6,20
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	58,29	60,49	63,03	66,31	69,95	74,07	78,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,05	1,96	1,87	1,78	1,69	1,60	1,50
Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316	0,310	0,304	0,298	0,291
Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,26- 9,67	9,67-8,77	9,47- 8,70	9,07- 8,67	8,67- 7,67	8,28- 7,53
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,38	72,90	73,39	73,97	74,39	74,90
Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%	1,20	1,22	1,22	1,24	1,26	1,27	1,29
Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	18,02*	23,66	28,06	32,47	36,87	37,97	41,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65 (Baik)	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)	75,29 (Baik)	75,50 (Baik)	75,71 (Baik)	75,92 (Baik)

Sumber: Proyeksi Bepperida, 2025

Dari perspektif pertumbuhan ekonomi, kabupaten menargetkan akselerasi yang mengesankan mulai dari baseline 3,33 persen pada tahun 2024 menjadi 3,50 persen pada 2025, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 6,20 persen pada tahun 2030. Pola pertumbuhan ini menunjukkan strategi pembangunan bertahap yang dimulai dengan konsolidasi pada tahun-tahun awal, diikuti dengan akselerasi yang semakin menguat pada periode 2027-2030. Target pertumbuhan 6,20 persen pada akhir periode proyeksi mencerminkan ambisi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang hampir dua kali lipat dari kondisi *baseline*, yang mengindikasikan keyakinan tinggi terhadap potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Peningkatan PDRB per kapita yang diproyeksikan dari Rp. 58,29 juta pada 2024 menjadi Rp. 78,66 juta pada 2030 menunjukkan target peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebesar 25,90 persen dalam enam tahun. Proyeksi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang direncanakan diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, realisasi target ini akan sangat bergantung pada kemampuan kabupaten dalam mengelola pertumbuhan yang inklusif dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek ketenagakerjaan menunjukkan proyeksi yang sangat positif dengan target penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 2,05 persen pada baseline menjadi 1,50 persen pada tahun 2030. Penurunan bertahap sebesar 0,09 poin persentase setiap tahun ini mencerminkan strategi penciptaan lapangan kerja yang konsisten dan terukur. Target tingkat pengangguran 1,50 persen pada akhir periode proyeksi merupakan pencapaian yang luar biasa jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, dan mengindikasikan komitmen kuat untuk mencapai kondisi mendekati *full employment*. Keberhasilan mencapai target ini akan memerlukan sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan program-program pengembangan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan potensi lokal.

Proyeksi perbaikan distribusi pendapatan tercermin dalam target penurunan Indeks Gini dari 0,329 pada 2024 menjadi 0,291 pada 2030. Penurunan koefisien Gini sebesar 0,038 poin ini menunjukkan komitmen untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Target Indeks Gini 0,291 pada akhir periode menempatkan kabupaten dalam kategori ketimpangan rendah berdasarkan standar internasional, yang merupakan pencapaian yang sangat baik untuk sebuah daerah kepulauan yang umumnya menghadapi tantangan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat mempengaruhi distribusi ekonomi.

Target pengurangan tingkat kemiskinan menunjukkan ambisi yang realistis namun menantang, dengan proyeksi penurunan dari 10,79 persen pada 2024 menjadi 8,28-7,53 persen pada 2030. Pola proyeksi kemiskinan yang diberikan dalam rentang menunjukkan pengakuan terhadap kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan memberikan fleksibilitas dalam pencapaian target. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,51-3,26 poin persentase dalam enam tahun memerlukan strategi komprehensif yang

menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Proyeksi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 71,98 pada 2024 menjadi 74,90 pada 2030 menunjukkan komitmen holistik terhadap pembangunan manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan IPM sebesar 2,92 poin dalam enam tahun merupakan target yang ambisius namun *achievable* jika didukung dengan investasi yang memadai dalam infrastruktur sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Target IPM 74,90 akan menempatkan kabupaten dalam kategori pembangunan manusia tinggi, yang merupakan pencapaian signifikan bagi sebuah daerah kepulauan.

Secara keseluruhan, proyeksi indikator makro ekonomi dan sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2030 mencerminkan visi pembangunan yang sangat optimis dan komprehensif. Keberhasilan mencapai seluruh target ini akan memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai sektor, pengelolaan keuangan daerah yang *prudent* sebagaimana terlihat dari analisis rasio keuangan sebelumnya, serta optimalisasi potensi sumber daya alam dan Dana Bagi Hasil untuk mendukung pembiayaan program-program pembangunan. Tantangan utama akan terletak pada kemampuan menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sambil memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan, terutama mengingat karakteristik geografis kepulauan yang memiliki tantangan khusus dalam hal konektivitas dan aksesibilitas.

2.2.6.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, dilakukan proyeksi terhadap target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk lima tahun ke depan. Proyeksi ini didasarkan pada data realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya serta asumsi makro ekonomi, sosial, dan fiskal yang berpengaruh terhadap kapasitas keuangan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diproyeksikan dengan mempertimbangkan sumber-sumber penerimaan utama, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan PAD difokuskan pada optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, terutama dari sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi unggulan daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi diproyeksikan mengikuti formula alokasi yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti : jumlah penduduk, luas wilayah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi. Target pendapatan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang

realistis namun progresif, dengan tetap memperhatikan daya dukung ekonomi lokal dan kondisi fiskal nasional.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip proporsionalitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi belanja diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah kepulauan, serta program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. Belanja modal diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan sektor maritim dan pariwisata. Sementara belanja operasional dikelola secara efisien untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik dengan kualitas yang terus meningkat.

Pembiayaan daerah dirancang sebagai instrumen penyeimbang antara pendapatan dan belanja sekaligus sebagai sarana investasi strategis jangka panjang. Pada sisi penerimaan pembiayaan, optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran sebelumnya, serta penerimaan kembali dari pemberian pinjaman daerah yang menunjukkan *return* dari investasi yang telah dilakukan. Di sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi diarahkan pada penyertaan modal daerah yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan investasi pada sektor unggulan daerah. Pengelolaan pembiayaan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian fiskal untuk menjaga sustainabilitas pembangunan dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa mendatang.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dalam lima tahun ke depan didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahun, yang didorong oleh faktor-faktor berikut:
 - a. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024

- tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- b. Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi serta realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun sebelumnya;
 - c. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
 - d. Peningkatan kesadaran, kepatuhan, serta partisipasi aktif masyarakat dan lembaga dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi;
 - e. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara profesional untuk meningkatkan pendapatan;
 - f. Penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
 - g. Peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak;
 - h. Penguatan kapasitas aparatur yang kompeten dan berintegritas guna mendukung peningkatan PAD melalui pelayanan prima;
 - i. Kolaborasi dengan kabupaten/kota lain untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
 - j. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah guna mempermudah serta mempercepat layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
2. Pendapatan transfer diperkirakan mengalami kenaikan setiap tahun, sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan meningkat seiring dengan kebijakan kenaikan gaji pegawai;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat; dan
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) baik dari pajak maupun non pajak akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
 3. Pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Tabel 2. 89
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH							
Pendapatan Asli Daerah	75.936.599.688	100.670.000.000	113.378.500.000	105.778.500.000	107.478.500.000	109.178.500.000	110.878.500.000
Pajak Daerah	13.541.050.302	23.000.000.000	28.000.000.000	24.000.000.000	24.500.000.000	25.000.000.000	25.500.000.000
Retribusi Daerah	44.562.853.856	54.891.500.000	62.600.000.000	59.000.000.000	60.200.000.000	61.400.000.000	62.600.000.000
- Retribusi Daerah		1.891.500.000	4.600.000.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.400.000.000	4.600.000.000
- Retribusi Jasa Pelayanan		53.000.000.000	58.000.000.000	55.000.000.000	56.000.000.000	57.000.000.000	58.000.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.005.751.676	12.778.500.000	12.778.500.000	12.778.500.000	12.778.500.000	12.778.500.000	12.778.500.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.826.943.854	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Pendapatan Transfer	919.409.979.473	913.908.257.281	976.676.415.000	944.506.506.000	948.206.506.000	951.906.506.000	955.606.506.000
Transfer Pemerintah Pusat	878.900.855.190	887.075.653.281	941.843.811.000	914.673.902.000	917.373.902.000	920.073.902.000	922.773.902.000
Dana Perimbangan	792.113.220.190	815.063.066.281	866.683.924.000	839.514.015.000	842.214.015.000	844.914.015.000	847.614.015.000
Dana Transfer Umum	637.730.403.651	636.902.639.000	673.251.016.000	646.081.107.000	648.281.107.000	650.481.107.000	652.681.107.000
- DBH	17.235.143.000	12.500.000.000	17.000.000.000	14.900.000.000	15.100.000.000	15.300.000.000	15.500.000.000
- DAU	620.495.260.651	624.402.639.000	656.251.016.000	631.181.107.000	633.181.107.000	635.181.107.000	637.181.107.000
Dana Transfer Khusus	154.382.816.539	178.160.427.281	193.432.908.000	193.432.908.000	193.932.908.000	194.432.908.000	194.932.908.000
- DAK Fisik	42.731.502.855	34.608.407.281	52.380.888.000	48.880.888.000	49.380.888.000	49.880.888.000	50.380.888.000
- DAK Non Fisik	111.651.313.684	143.552.020.000	150.552.020.000	144.552.020.000	144.552.020.000	144.552.020.000	144.552.020.000

Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal	21.356.548.000	6.852.700.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Desa	65.431.087.000	65.159.887.000	65.159.887.000	65.159.887.000	65.159.887.000	65.159.887.000	65.159.887.000
Transfer Antar Daerah	40.509.124.283	26.832.604.000	34.832.604.000	29.832.604.000	30.832.604.000	31.832.604.000	32.832.604.000
Pendapatan Bagi Hasil	34.078.496.283	22.000.000.000	30.000.000.000	25.000.000.000	26.000.000.000	27.000.000.000	28.000.000.000
Bantuan Keuangan	6.430.628.000	4.832.604.000	4.832.604.000	4.832.604.000	4.832.604.000	4.832.604.000	4.832.604.000
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.986.305.256	-	-	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	4.986.305.256	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	1.000.332.884.417	1.014.578.257.281,49	1.090.054.915.000	1.050.285.006.000	1.055.685.006.000	1.061.085.006.000	1.066.485.006.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tren positif dengan total pendapatan yang diproyeksikan tumbuh dari Rp. 1.014,58 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 1.066,49 miliar pada tahun 2030. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat dari Rp. 100,67 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 110,88 miliar pada tahun 2030, meskipun mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2026 menjadi Rp. 113,38 miliar kemudian turun ke Rp. 105,78 miliar pada tahun 2027 sebelum kembali tumbuh stabil. Komponen PAD terbesar berasal dari retribusi daerah yang mencapai sekitar 54-56 persen dari total PAD, dengan retribusi jasa pelayanan sebagai kontributor utama yang diproyeksikan mencapai Rp. 53-58 miliar per tahun, menunjukkan potensi optimalisasi pelayanan publik berbayar. Pendapatan transfer mendominasi struktur pendapatan dengan kontribusi sekitar 90 persen dari total pendapatan, diproyeksikan relatif stabil dari Rp. 913,91 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 955,61 miliar pada tahun 2030. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar yakni sekitar Rp. 624-656 miliar per tahun, mencerminkan tingkat ketergantungan daerah kepulauan terhadap transfer pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah disusun berdasarkan prinsip proporsionalitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja. Belanja daerah difokuskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial. Prioritas belanja daerah mencakup pemenuhan *mandatory spending*, yakni Bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah, Bidang kesehatan, Bidang peningkatan sumber daya manusia sebesar 0,16 persen, Bidang pengawasan sebesar 0,75 persen, serta Pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 40 persen.

Proyeksi belanja daerah tersebut disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut:

1. Belanja pegawai cenderung meningkat setiap tahun akibat kebijakan kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, tunjangan perbaikan penghasilan, serta bertambahnya jumlah pegawai, baik ASN maupun PPPK;
2. Kebutuhan belanja publik semakin meningkat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2030;

3. Penyesuaian belanja terhadap inflasi, guna mengakomodasi kenaikan harga barang dan jasa;
4. Penyediaan cadangan pangan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat; dan
5. Prioritas belanja lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 90							
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030							
Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA DAERAH							
Belanja Operasi	746.613.203.925	765.967.085.481	829.882.848.200	789.711.846.946	792.711.846.946	795.711.846.946	798.711.846.946
Belanja Pegawai	421.856.354.597	455.610.470.765	483.015.846.946	485.015.846.946	487.015.846.946	489.015.846.946	491.015.846.946
Belanja Barang dan Jasa	285.017.989.323	300.466.120.510	336.976.507.047	297.696.000.000	298.696.000.000	299.696.000.000	300.696.000.000
Belanja Bunga	-						
Belanja Subsidi	-						
Belanja Hibah	37.489.026.005	8.312.074.207	8.312.074.207	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	2.249.834.000	1.578.420.000	1.578.420.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Modal	145.606.619.567	110.726.532.800	122.217.427.800	122.387.670.054	124.717.670.054	127.047.670.054	129.377.670.054
Belanja Tanah	512.154.500	1.886.605.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin	18.146.622.784	12.000.000.000	12.900.000.000	12.900.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	71.973.982.522	38.317.427.800	38.317.427.800	47.487.670.054	43.717.670.054	44.047.670.054	44.377.670.054
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.397.846.811	58.000.000.000	69.000.000.000	60.000.000.000	65.000.000.000	67.000.000.000	69.000.000.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	334.572.950	522.500.000	-				
Belanja Aset Lainnya	241.440.000	-					
Belanja Tidak Terduga	5.462.447.500	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.462.447.500	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Transfer	129.792.822.480	131.884.639.000	131.954.639.000	132.185.489.000	132.255.489.000	132.325.489.000	132.395.489.000
Belanja Bagi Hasil	1.641.045.485	2.499.150.000	2.569.150.000	2.800.000.000	2.870.000.000	2.940.000.000	3.010.000.000

Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Bantuan Keuangan	128.151.776.995	129.385.489.000	129.385.489.000	129.385.489.000	129.385.489.000	129.385.489.000	129.385.489.000
JUMLAH BELANJA	1.027.475.093.472	1.011.578.257.281,49	1.087.054.915.000	1.047.285.006.000	1.052.685.006.000	1.058.085.006.000	1.063.485.006.000
SURPLUS/ DEFISIT	(27.142.209.055)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Proyeksi belanja daerah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dengan total belanja yang diproyeksikan tumbuh dari Rp. 1.011,58 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 1.063,49 miliar pada tahun 2030. Belanja operasi mendominasi struktur belanja dengan porsi sekitar 75-76 persen dari total belanja, di mana belanja pegawai merupakan komponen terbesar yakni sekitar Rp. 455,61 miliar pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga Rp. 491,02 miliar pada tahun 2030, mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara. Belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat dari Rp. 300,47 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp. 336,98 miliar pada tahun 2026, kemudian turun menjadi sekitar Rp. 297-300 miliar pada periode 2027-2030, menunjukkan upaya efisiensi dalam pengelolaan operasional pemerintahan. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur diproyeksikan sebesar Rp. 110,73 miliar pada tahun 2025, meningkat menjadi Rp. 122,22 miliar pada tahun 2026, dan terus tumbuh bertahap hingga Rp. 129,38 miliar pada tahun 2030, dengan fokus utama pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang dialokasikan Rp. 58-69 miliar per tahun, vital untuk konektivitas wilayah kepulauan. Proyeksi anggaran menunjukkan surplus sebesar Rp. 3 miliar per tahun untuk periode 2025-2030, setelah mengalami defisit Rp. 27,14 miliar pada baseline tahun 2024.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya belanja daerah dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dan digunakan, antara lain, untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Target pembiayaan dalam lima tahun ke depan didasarkan pada asumsi berikut:

1. Menjaga stabilitas keuangan daerah agar tetap dalam kondisi surplus, dan apabila terjadi defisit, maka akan diupayakan untuk ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya;
2. Meningkatkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setiap tahun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Proyeksi pembiayaan daerah menunjukkan strategi pengelolaan keuangan yang bertransformasi menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Pada baseline tahun 2024, daerah masih memanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 45,85 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 45,81 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 33,10 juta untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp. 27,14 miliar pada tahun tersebut. Mulai tahun 2025 hingga 2030, proyeksi menunjukkan tidak ada lagi ketergantungan terhadap SILPA dengan penerimaan pembiayaan yang bernilai nol, yang mengindikasikan tercapainya keseimbangan fiskal melalui surplus anggaran sebesar Rp. 3 miliar per tahun. Surplus tersebut dialokasikan secara konsisten untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah senilai Rp. 3 miliar per tahun sepanjang periode 2025-2030, menghasilkan pembiayaan netto negatif Rp. 3 miliar per tahun. Strategi ini mencerminkan komitmen daerah untuk berinvestasi jangka panjang melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan aset produktif daerah. Transformasi dari ketergantungan terhadap SiLPA menuju kemandirian fiskal dengan alokasi investasi strategis menunjukkan arah pengelolaan keuangan daerah yang semakin matang dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian fiskal untuk menjamin stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

Tabel 2. 95

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN DAERAH							
Penerimaan Pembiayaan	45.846.626.145	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	45.813.525.076	-	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	33.101.069	-		-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	-	-		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		-					
Penyertaan Modal Daerah	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	45.846.626.145	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

2.2.7. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Bagian ini menguraikan perhitungan kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dan program lima tahun ke depan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini yang selanjutnya dialokasikan untuk mendukung program-program perangkat daerah guna mewujudkan Visi dan Misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029.

Dari Tabel 2.96 di atas terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan dinamika yang menarik selama periode proyeksi 2025-2030. Pada tahun 2025, kapasitas riil mencapai Rp. 1.011,58 miliar, yang dihitung dari total penerimaan sebesar Rp. 1.014,58 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3 miliar. Tahun ini menandai awal transformasi pengelolaan keuangan daerah dengan tidak lagi mengandalkan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun pencairan dana cadangan, mencerminkan upaya menuju kemandirian fiskal.

Tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dengan kapasitas riil mencapai puncaknya sebesar Rp. 1.087,05 miliar, meningkat Rp. 75,47 miliar atau sekitar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai Rp. 1.090,05 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap stabil pada Rp. 3 miliar. Tahun ini merupakan kondisi keuangan terbaik sepanjang periode perencanaan dan memberikan ruang fiskal yang luas untuk program-program pembangunan prioritas.

Memasuki tahun 2027, kapasitas riil mengalami penurunan menjadi Rp. 1.047,29 miliar, turun sebesar Rp. 39,76 miliar atau sekitar 3,7 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh koreksi pendapatan daerah yang turun menjadi Rp. 1.050,29 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap konsisten sebesar Rp. 3 miliar. Meskipun mengalami penurunan, kapasitas ini masih berada pada level yang sehat dan mencerminkan penyesuaian realistis terhadap proyeksi pendapatan.

Dimulai dari tahun 2028, kapasitas riil menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan nilai Rp. 1.052,69 miliar pada tahun 2028, kapasitas terus tumbuh secara bertahap mencapai Rp. 1.058,09 miliar pada tahun 2029 dan Rp. 1.063,49 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan linear dengan

rata-rata Rp. 5,4 miliar per tahun ini didorong oleh stabilisasi dan pertumbuhan moderat pendapatan daerah, sementara pengeluaran pembiayaan dijaga tetap konsisten pada level Rp. 3 miliar untuk penyertaan modal daerah.

Fluktuasi kapasitas riil ini memiliki implikasi strategis terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Tahun 2026, dengan kapasitas tertinggi mencapai Rp. 1,09 triliun, memberikan momentum optimal bagi pemerintah daerah untuk meluncurkan program-program pembangunan prioritas dan mempercepat pelaksanaan infrastruktur strategis.

Penyesuaian pada tahun 2027 mengharuskan pemerintah daerah melakukan prioritas yang lebih ketat dalam pemilihan program pembangunan. Penurunan kapasitas sebesar hampir Rp. 40 miliar memerlukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih tinggi, dengan fokus pada program-program yang memberikan dampak multiplier effect terbesar bagi masyarakat.

Fase pemulihan 2028-2030 memberikan kepastian yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan jangka menengah. Pertumbuhan yang konsisten dan terukur memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan program-program berkelanjutan dengan tingkat kepastian pembiayaan yang tinggi. Meskipun pertumbuhan tidak spektakuler, konsistensi ini justru memberikan fondasi yang solid untuk pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga komitmen investasi melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 3 miliar per tahun untuk pengembangan aset produktif daerah.

Tabel 2. 91
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan	1.014.578.257.281,49	1.090.054.915.000	1.050.285.006.000	1.055.685.006.000	1.061.085.006.000	1.066.485.006.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)		0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
Total Penerimaan		1.014.578.257.281,49	1.090.054.915.000	1.050.285.006.000	1.055.685.006.000	1.061.085.006.000	1.066.485.006.000
Dikurangi							
4	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Kapasitas riil kemampuan keuangan		1.011.578.257.281,49	1.087.054.915.000	1.047.285.006.000	1.052.685.006.000	1.058.085.006.000	1.063.485.006.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Setelah pemerintah daerah berhasil menentukan proyeksi kemampuan keuangan riil yang dapat digunakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun kerangka strategis untuk mendistribusikan sumber daya finansial tersebut. Distribusi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan dua komponen utama pengeluaran daerah, yaitu belanja operasional yang bersifat rutin dan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam konteks keterbatasan anggaran yang menjadi realitas hampir semua pemerintah daerah, proses pengalokasian dana harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Pemerintah daerah menerapkan metodologi distribusi yang berlandaskan pada dua prinsip fundamental, yaitu prinsip prioritas dan prinsip urgensi kebutuhan pembangunan.

Sistem pengelolaan anggaran daerah menerapkan mekanisme alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan melalui tiga tingkatan prioritas yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi nasional. Struktur prioritas ini dirancang untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan strategis pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158, pengelompokan prioritas anggaran ditetapkan sebagai berikut: Prioritas pertama diperuntukkan bagi pembiayaan belanja langsung yang memiliki sifat kewajiban dan mengikat, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan standar pelayanan dasar kepada masyarakat. Prioritas kedua dialokasikan untuk mendanai implementasi program-program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Prioritas ketiga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan lainnya yang mendukung fungsi administrasi dan pelayanan publik.

Dalam implementasinya di Kabupaten Kepulauan Selayar, **alokasi prioritas pertama** diarahkan pada pemenuhan kewajiban belanja dan pencapaian standar pelayanan minimal di berbagai sektor strategis. Sektor-sektor tersebut meliputi bidang pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia, bidang kesehatan untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung infrastruktur dasar, bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk menyediakan hunian layak, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, dan bidang sosial untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Seluruh alokasi ini harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi prioritas kedua difokuskan pada program pembangunan daerah yang mengangkat tema atau program unggulan kepala daerah, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan nasional yang wajib diimplementasikan di tingkat daerah. Program-program dalam kategori ini memiliki karakteristik khusus berupa relevansi langsung dengan kepentingan publik, memiliki nilai monumental yang signifikan, berskala besar dalam cakupan pelaksanaan, serta memberikan manfaat dan dampak yang luas bagi masyarakat. Program prioritas kedua ini juga diharapkan dapat menjadi pengungkit utama dalam pencapaian target-target strategis yang tercantum dalam visi dan misi kepala daerah.

Alokasi prioritas ketiga merupakan inisiatif yang dikembangkan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran operasional dari berbagai urusan pemerintahan yang belum tercakup dalam dua prioritas sebelumnya. Program dalam kategori ini memiliki fokus pada segmentasi masyarakat tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing OPD, disesuaikan dengan prioritas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, program prioritas ketiga juga mencakup upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat secara optimal.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah akan efektif apabila bertujuan menyelesaikan masalah utama atau isu daerah. Oleh karena itu, penting untuk lebih mengenali dan merumuskan isu serta permasalahan utama yang akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, maka isu dan masalah utama perlu diidentifikasi pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, meskipun sebenarnya keduanya berbeda. Permasalahan merupakan kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau ekspektasi. Sementara itu, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu dapat berupa peristiwa yang terjadi di dalam atau di luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif terhadap organisasi dan berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang. Oleh karena itu,

pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan perlu dilakukan untuk menyamakan langkah penyelesaian masalah secara terpadu dan berorientasi ke depan.

Secara konseptual, proses pembangunan memiliki titik awal dan titik akhir. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan yang tertata secara sistematis menuju pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya dalam kerangka tersebut, pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan daerah menjadi langkah awal yang penting. Perencanaan sebagai panduan aksi masa depan hanya dapat terwujud apabila terdapat pemahaman yang baik atas isu dan permasalahan. Pemahaman merupakan modal utama dalam upaya menyusun arahan perencanaan pada masa datang.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang melekat dan terus berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika didukung oleh proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan adalah kemampuan untuk mengenali dan merumuskan isu serta permasalahan utama di suatu daerah.

Permasalahan daerah dianggap prioritas ketika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk prioritas kebijakan nasional maupun provinsi yang bersifat *mandatory*. Perumusan masalah pembangunan daerah dapat digunakan pendekatan akar masalah, yaitu dengan memetakan masalah melalui identifikasi masalah pokok, masalah utama, dan akar masalah.

Masalah utama merupakan persoalan yang bersifat makro bagi daerah dan dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, serta sasaran pembangunan. Masalah pokok adalah penyebab dari masalah utama dapat diselesaikan melalui rumusan strategi. Adapun akar masalah merupakan penyebab rinci dari masalah pokok yang pemecahannya dilakukan melalui perumusan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Berikut pemetaan permasalahan utama untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah :

1. *Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat*, Derajat kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat dari: Umur Harapan Hidup yang masih pada angka 73,48 tahun, Indeks Kesehatan pada angka 82,83 poin. Prevalensi stunting masih tinggi masih

pada angka 25,70 persen. Kasus *Tuberculosis* yang masih tinggi dari tahun ke tahun.

Kondisi ini disebabkan : Upaya promotif, prevalentif dan pola hidup sehat belum barjalan maksimal; Sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan belum memadai dan sesuai kebutuhan; Pelayanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan masih dilaksanakan dua kali dalam setahun; Ketersediaan dokter dan dokter ahli belum tercukupi , tenaga kesehatan terlatih dan terakreditasi belum terpenuhi di layanan kesehatan

2. *Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas pendidikan.* Dapat dilihat dari angka melek huruf, rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Kompetensi literasi dan numerasi berdasarkan asesmen nasional masih pada peringkat rendah (literasi : 1,63 numerasi 1,62). Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah (15,15 persen)

Kondisi ini disebabkan belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun keatas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi; Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas dan memenuhi standard kompetensi antara perdesaan dan perkotaan, serta antara daratan dan kepulauan; Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan, sehingga perangkat lunak dan perangkat keras proses pembelajaran juga mengalami ketimpangan yang tajam antara masyarakat perkotaan dengan perdesaan, antara daratan dengan daerah kepulauan; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah.

3. *Tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan sosial.* Berdasarkan data BPS, pada 2024, tercatat persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten kepulauan Selayar sebesar 10,79 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 2,15. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,11 poin atau naik menjadi 0,57 pada tahun 2023. Kenaikan kedua indeks, yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar. Indeks Gini setiap tahun menurun dan masih cukup tinggi (Tahun 2024 : 0,329).

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih pada angka 36,72 persen di tahun 2024.

Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan yang memerlukan perhatian khusus; Peningkatan beban tanggungan bagi usia produktif akibat rasio ketergantungan penduduk meningkat; Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif; Lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor primer (perikanan, pertanian dan perkebunan); Pengembangan sektor jasa masih bertumpu di perkotaan; Rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal; serta Terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal dan informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak.

4. *Belum optimalnya penerapan teknologi digital dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.*

Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya upaya penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata; Masih rendahnya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat; Masih terdapat desa *blank spot* tanpa BTS; Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

5. *Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah.* Dapat dilihat, penurunan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Menurunnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB jika dilihat dari data tahun 2020 dan tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata masih sekitar 17 Miliar Rupiah (0,23 persen dari PDRB).

Kondisi ini disebabkan : tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan disebabkan tenaga kerja sektor pertanian bergeser pada sektor manufaktur dan jasa; Kelembagaan usaha nelayan dan jenis usaha yang beragam menjadikan usaha penangkapan ikan sangat parsial; Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih

rendah akibat kewenangan pengelolaan laut yang sudah menjadi kewenangan provinsi; Potensi pariwisata dengan potensi wisata bahari dengan hamparan atol terbesar ketiga Dunia yang ada di kawasan Taman Nasional Takabonerate dan sekitarnya, potensi wisata alam dan wisata budaya dengan berbagai kearifan lokal belum terkelola secara maksimal.

6. *Belum optimalnya produktivitas sumberdaya alam*

Dilihat dari penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Menurunnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan jika dilihat dari data tahun 2020 dan tahun 2024.

Kondisi ini disebabkan : Penggunaan alsintan modern dan bibit unggul yang belum merata; Pengembangan budidaya dengan penerapan teknologi dan inovasi yang belum optimal terutama budidaya rumput laut, tambak dan ikan karang; Masih lemahnya penanganan hama dan penyakit ikan; Logistik penangkapan ikan modern yang belum terpenuhi secara maksimal.

7. *Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan regional*, Berdasarkan data BPS Net Ekspor Barang dan Jasa masih rendah (Tahun 2024 : -14,23 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB masih rendah pada angka 45,33 persen.

Kondisi ini disebabkan : Belum tersedianya Pelabuhan Peti Kemas dan operator yang dapat mengekspor komoditi unggulan perikanan, perkebunan dari Kepulauan Selayar langsung ke tujuan ekspor.

8. *Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi*, Dapat dilihat, proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil (1,20 persen di tahun 2024), Indeks Infrastruktur masih rendah (Tahun 2024 : 3,26 persen). Tahun 2024, jumlah desa mandiri masih sebanyak 22 desa dan masih terdapat 4 desa dengan kategori tertinggal.

Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan sebagai penghubung koridor utama pedesaan dan perkotaan mendukung integrasi dan distribusi penghubung antar pusat kegiatan; Belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur wilayah antara daratan Selayar dan wilayah kepulauan; Belum meratanya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik di perdesaan dan perkotaan, khususnya air bersih dan sanitasi aman dan layak; Cakupan dan jangkauan pelayanan

jaringan telekomunikasi yang belum merata; Belum terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau; Belum meratanya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan di perdesaan, serta ketersediaan dan reliabilitas listrik yang masih kurang di perkotaan; dan belum optimalnya layanan reforma agraria; serta Lambatnya penuntasan RDTR sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.

9. *Belum optimal pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan*, Tata kelola pemerintahan merupakan aspek sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicerminkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik. Data menunjukkan, sampai dengan tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada predikat “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu ditingkat ke level “Sangat Baik”.

Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi yang ditandai dengan Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 masih pada kategori “Baik”; Belum optimalnya perkembangan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan Indeks Inovasi Daerah yang masih belum optimal dan dibawah rata-rata capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja dan keuangan: serta Belum optimalnya penguatan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dua faktor ini ditandai oleh capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah serta nilai SAKIP yang belum optimal dan masih perlu perbaikan, Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP yang masing-masing masih pada level 2,84; Faktor lain yang turut berkontribusi adalah belum optimalnya sistem penataan manajemen SDM; Selanjutnya, belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini ditandai oleh capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 yang walaupun membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun belum mencapai kategori “Sangat Baik”.

10. *Belum optimalnya keamanan dan ketertiban serta perlindungan hukum*, Dapat dilihat dari angka kriminalitas yang masih tinggi, persentase gangguan tantribun yang dapat diselesaikan belum mencapai 100 persen.

Kondisi ini disebabkan : Kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; Ketidaksetaraan akses ke hukum di masyarakat; Konflik dan ketidakstabilan politik; Teknologi keamanan siber masih kurang; Tingkat Pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas; Peredaran narkoba yang belum terselesaikan.

11. *Masih rendahnya stabilitas ekonomi makro daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah*, Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan program strategis dari pemerintah provinsi dan arahan *mandatory* oleh Pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat mengandalkan transfer dari pusat

12. *Masih rendahnya daya saing daerah*. Dapat dilihat kinerja investasi dan sektor ekonomi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai investasi PMDN/PMA pada tahun 2024 semakin menurun, dengan nilai investor PMDN / PMA Rp. 28,46 milyar.

Kondisi ini disebabkan : Belum terbentuknya kawasan / sentra industri / industri terpadu dan perdagangan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mampu bersaing di tataran regional, nasional, bahkan global. Demikian pula perkembangan koperasi dan UKM cenderung menurun

13. *Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, demokrasi dan kewaspadaan nasional*, Kondisi ini disebabkan letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan gugusan kepulauan yang terpisahkan oleh laut, serta kondisi demografi yang beragam, hampir semua suku dan agama dari masing-masing provinsi di Indonesia ada di Kepulauan Selayar. Melihat kondisi ini, menyebabkan masyarakat kurang pemahaman terhadap ideologi negara, berbangsa dan bernegara; Masyarakat yang sering merantau ke luar daerah dalam waktu yang cukup lama dikhawatirkan membawa budaya dan/atau paham dari luar serta rawan disusupi paham radikal yang dapat meresahkan

masyarakat dan/atau berperilaku ekstrim; Kolompok masyarakat yang heterogen dapat memicu gesekan horisontal

14. *Belum optimalnya penguatan nilai keagamaan, sosial dan budaya*, Hal dapat dilihat dari rendahnya solidaritas sosial dan kerjasama pada tingkatan masyarakat. Kedua dimensi ini merupakan dimensi yang diukur pada Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat, yang tahun 2024 masih pada angka 77,87.
15. *Masih rendahnya kualitas ketahanan keluarga, kesetaraan dan keadilan gender*, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 baru mencapai 92,64 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 69,07. Dilihat capaian masing-masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
16. *Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim*, lingkungan hidup yang berkualitas sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampai tahun 2024, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal yang dapat diukur dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 67,65 yang masih kategori “Sedang”. Jika dilihat dari komposit pembentuk kualitas lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Air juga belum optimal karena masih pada kategori sedang dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingginya pencemaran sumber-sumber air baku oleh limbah. Jika dilihat dari kualitas air sungai sebagai sumber air baku pada tahun 2024 mengalami penurunan. Demikian juga dengan kualitas tutupan lahan yang menggambarkan kondisi vegetasi hutan dan vegetasi non hutan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh terus menurunnya proporsi hutan terhadap luas seluruh lahan serta menurunnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitas terhadap luas seluruh lahan.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat penting untuk mengurangi dan menangani produksi sampah baik itu sampah rumah tangga ataupun industri. Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai tahun 2024 belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 masih berada pada angka 2,60 persen. Capaian dimaksud masih tergolong rendah walaupun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena fasilitas pengelolaan sampah yang masih kurang, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang belum optimal serta kebijakan/regulasi pengelolaan persampahan yang belum berjalan secara optimal.

Dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana (IRB) yang masih pada kelas risiko “sedang” (133,58 : tahun 2024). Curah hujan dan jumlah hari hujan yang tiap tahun semakin menurun.

Kondisi ini disebabkan : Frekuensi bencana angin kencang, abrasi pantai, banjir, cuaca ekstrim dan gempa bumi dengan skala rendah yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar; Penurunan daya dukung dan tampung lingkungan akibat pembangunan yang massif; Pencemaran air dan pencemaran pada wilayah pesisir/laut.

17. *Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.* Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dilihat dengan belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

Kondisi ini disebabkan : Belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan industri; Belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; Terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil khususnya pada daerah kepulauan.

Sedangkan permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; Masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk

untuk meningkatkan derajat kesehatan; Masih terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; Masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; Masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan, dan permasalahan utama di atas, maka digambarkan permasalahan pokok di Kabupaten Kepulauan Selayar (**Tabel 2.92**).

Tabel 2. 92
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
1.	Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Belum optimalnya upaya promotif-preventif-kuratif-dan rehabilitative di seluruh kecamatan
		Belum optimalnya perilaku hidup sehat dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan sarana prasarana kesehatan serta penanganan limbah medis
		Masih tingginya prevalensi stunting
		Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan
		Masih rendahnya kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan terutama di daerah sulit akses
		Masih rendahnya kapasitas masyarakat lokal untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat.
		Belum optimalnya pelaksanaan sistem <i>telemedicine</i>
2.	Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas pendidikan	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
		Masih rendahnya pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk meningkatkan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi
		Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
		Masih rendahnya kualitas serta kuantitas

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
		sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha Masih rendahnya akses pendidikan melalui penguatan sekolah terbuka, pendidikan vokasi dan pendidikan kesetaraan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau dengan pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Belum tersedianya asrama siswa dan guru pada daerah kepulauan dan terpencil Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan <i>Internet of Things</i> (IoT).
3.	Tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan sosial	Belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil Belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan Belum optimalnya pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran Belum optimalnya cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Belum optimalnya pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial
4.	Belum optimalnya penerapan teknologi digital dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi	Belum terbentuknya ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Belum optimalnya pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja Belum optimalnya penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan. Masih terdapat daerah yang masih berada dalam titik <i>blank spot</i> Belum optimalnya literasi digital dan SDM digital Belum memadainya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Belum optimalnya penerapan literasi digital dan peningkatan SDM digital
5.	Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah	Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan, mineral Belum optimalnya pertumbuhan dan peningkatan kapasitas <i>emerging sectors</i>

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
		(bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya).
		Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata andalan dan penerapan pariwisata berkelanjutan
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah dan berorientasi ekspor
		Belum optimalnya produktivitas dan standar kelayakan produksi sentra IKM komoditi unggulan
		Belum optimalnya industrialisasi koperasi
		Belum optimalnya UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		Belum optimalnya produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		Belum optimalnya penguatan koperasi dan UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
6.	Belum optimalnya produktivitas sumberdaya alam	Belum maksimalnya angka kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan
		Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
		Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas perkebunan
		Belum optimalnya produksi peternakan
		Belum optimalnya peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif
7.	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan regional	Belum optimalnya pengembangan pembiayaan inovatif
		Masih rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi kooperatif dan kompetitif daerah (ALKI II dan ALKI III)
8.	Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Belum terlaksananya penerapan transportasi ramah lingkungan di kawasan perkotaan
		Belum optimalnya kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan sebagai penghubung koridor utama pedesaan dan perkotaan
		Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan
		Masih sedikit jumlah desa yang bersatutut desa

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
		mandiri
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan publik
		Belum meratanya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan
		Minimnya lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan publik
9.	Belum optimal pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi regulasi di daerah
		Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Belum optimalnya respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat yang responsive
		Belum optimalnya pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah
		Belum optimalnya tata kelola ASN
		Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi
		Belum optimalnya digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan SPBE
		Belum optimalnya penguatan integritas partai politik di daerah
10.	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban serta perlindungan hukum	Belum optimalnya ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial
		Belum optimalnya penegakan hukum implementasi tata ruang daerah
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
		Masih rendahnya peran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi
11.	Masih rendahnya stabilitas ekonomi makro daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah
		Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah
		Minimnya dana transfer daerah, keterbatasan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur dasar dan publik
12.	Masih rendahnya daya saing daerah	Belum optimalnya penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis daerah
		Belum optimalnya kerjasama daerah
		Belum optimalnya penerapan manajemen risiko

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
		Minimnya investasi
13.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, demokrasi dan kewaspadaan nasional	Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila
		Kondisi geografis yang merupakan gugusan pulau dan demografi masyarakat yang heterogen (agama dan suku)
14.	Belum optimalnya penguatan nilai keagamaan, sosial dan budaya	Belum optimalnya pembinaan kerukunan antar umat beragama
		Belum optimalnya pelestarian kearifan lokal dan perlindungan warisan budaya
		Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
		Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian kesenian daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan penjamin produk halal
15.	Masih rendahnya kualitas ketahanan keluarga, kesetaraan dan keadilan gender	Belum optimalnya penuhan hak dan perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas berbasis gender
		Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia di berbagai bidang pembangunan
		Belum optimalnya pelembagaan pengarusutamaan gender
		Belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga
		Masih rendahnya kompetensi, daya saing dan kapasitas kelembagaan pemuda
		Masih rendahnya kompetensi sumberdaya dan kapasitas kelembagaan keolaragaan
		Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam berpolitik
16.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi spesies terlindungi
		Belum optimalnya pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
		Belum optimalnya perlindungan keanekaragaman hayati
		Makin luasnya lahan kritis (luas hutan semakin menurun)
		Belum terkelolahnya sampah secara terintegrasi
		Belum optimalnya infastruktur dan manajemen kebencanaan
17.	Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Belum optimalnya diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan
		Belum terpenuhinya pasokan listrik
		Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan teknologi mendukung ketahanan air

No.	Masalah Utama	Masalah Pokok
		Masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

Sumber : Hasil Olahan, 2025

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu strategis bersifat antisipatif dan berorientasi pada masa mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan sesuai dengan kondisi objektif daerah serta perkembangan pelaksanaan pembangunan yang telah sejalan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 sebagai berikut :

2.3.2.1. Isu Strategis Global

a. Pembangunan Berkelanjutan dan Net Zero Emission

Prinsip pembangunan berkelanjutan sejalan dengan kerangka SDGs yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan melalui KLHS yang merupakan komitmen kuat terhadap target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *Net Zero Emission*. RPJMN tahun 2025-2029 secara eksplisit mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama : 1. Pilar Ekonomi : transformasi ekonomi hijau, hilirisasi berbasis SDA yang ramah lingkungan, transisi energi dan industrialisasi berkelanjutan; 2. Pilar Sosial : pengentasan kemiskinan, penguatan kesehatan, pendidikan, serta pengurangan kesenjangan; 3. Pilar Lingkungan : menjaga daya dukung lingkungan, konservasi biodiversitas, pengelolaan sumberdaya alam dan mitigasi bencana.

Indonesia telah berkomitmen mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2026. RPJMN menjadi tahap awal yang krusial untuk mengarahkan kebijakan menuju target tersebut dengan strategi sebagai berikut : 1. Transisi energi; 2. Pengelolaan lingkungan dan hutan; 3. Transportasi rendah emisi; 4. Industri dan ekonomi hijau; 5 Pendanaan hijau (*green finance*) melalui optimalisasi instrumen *green bond*, pajak karbon dan skema pembayaran inovatif.

b. Ketahanan Pangan dan Gizi Global

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu global sebagai kunci pembangunan manusia dan kedaulatan bangsa. Strateginya mencakup swasembada pangan, diversifikasi pangan lokal, perbaikan gizi serta sistem pangan tangguh iklim. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan ketahanan pangan sebagai isu dengan fokus utama sebagai berikut : 1. Kemandirian dan swasembada pangan; 2. Peningkatan dan hilirisasi pangan; 3. Penguatan rantai pasok dan infrastruktur; 4. Ketahanan gizi dan SDM sehat; 5. Pertanian berkelanjutan dan tangguh iklim. Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan impor agar lebih tahan terhadap krisis global dan menyesuaikan sistem pangan agar lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

c. Pariwisata Berkelanjutan (Blue Green Circular Economy)

Pariwisata merupakan penyumbang devisa utama Indonesia, tetapi menghadapi tantangan pariwisata global, seperti *overtourism*, degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, strategi pariwisata berkelanjutan mencakup : 1. Pengembangan destinasi hijau berkelanjutan; 2. Infrastruktur pariwisata rendah karbon; 3. Penguatan ekonomi lokal dan budaya; 4. Digitalisasi dan *smart tourism*; dan 5. *Blue economy* dalam pariwisata. Pariwisata berkelanjutan (*Blue Green Circular Economy*) sebagai arah baru pembangunan pariwisata Indonesia, bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan tetapi meningkatkan mutu, keberlanjutan lingkungan, melibatkan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

d. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi

Era globalisasi digital mendorong akselerasi digitalisasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (Ai), big data, riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan efisien dan transparan. RPJMN tahun 2025-2029 mendorong transformasi digital di seluruh sektor, mencakup : 1. Infrastruktur digital melalui perluasan jaringan serat optik, akselerasi 5G dan persiapan menuju 6G; 2. Ekonomi digital melalui penguatan UMKM Go Digital, dukungan *startup* teknologi berbasis inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif digital; 3. Pemerintahan digital melalui implementasi SPBE, integrasi data layanan publik (Satu Data Indonesia) dan digitalisasi pelayanan publik

(kesehatan, pendidikan dan perpajakan); 4. Inovasi riset dan teknologi melalui riset inovasi, hilirisasi hasil riset, energi terbarukan, bioteknologi pangan dan kesehatan; dan 5. SDM digital melalui program literasi digital nasional untuk semua usia, penciptaan talenta digital, penguatan kurikulum *coding*, data *science* Ai di sekolah dan kampus.

e. Industri dan Rantai Nilai Global

Peningkatan nilai tambah sumber daya alam merupakan strategi penting untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, Indonesia diarahkan untuk naik kelas dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai nilai global melalui hilirisasi, industrialisasi hijau, integrasi rantai pasok global dan inovasi teknologi industri.

f. Ketahanan Sosial, Pendidikan dan Transformasi Sosial

Indonesia menghadapi tantangan sosial (kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, stunting, disabilitas serta ancaman disrupsi sosial akibat digitalisasi dan globalisasi), pendidikan dan kualitas SDM Indonesia masih tertinggal dan ketahanan sosial untuk menjaga kohesi nasional dalam menghadapi perubahan ekonomi, iklim dan geopolitik. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang adaptif, layanan kesehatan merata, kesetaraan gender serta pemberdayaan kelompok rentan (pemuda, difabel) merupakan respon terhadap tren global ketimpangan manusia.

g. Ketahanan Wilayah dan Infrastuktur Global

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di jalur perdagangan global (Indo-pasifik). Tantangan utama yang dihadapi : ketimpangan pembangunan antar wilayah; ancaman bencana alam dan iklim; persaingan geopolitik global yang mempengaruhi infrastruktur strategis; dan konektivitas logistik domestik dan internasional yang masih mahal. Percepatan pembangunan infrastruktur digital dan fisik, pemerataan antar wilayah dan konektivitas regional merupakan strategi menghadapi tantangan global ketimpangan dan integrasi ekonomi. Dalam RPJMN tahun 2025-2029 isu ini diarahkan untuk : 1. Menjaga kedaulatan dan ketahanan wilayah (maritim, perbatasan, bencana dan kohesi nasional); 2. Menghadirkan infrastruktur global dan berketahanan iklim (transportasi, digital dan energi); dan 3. Mengintegrasikan

Indonesia ke rantai nilai global melalui konektivitas logistik dan kawasan strategis.

h. Kebijakan fiskal dan Pendanaan Inovatif

Tantangan global meliputi gejolak ekonomi, suku bunga tinggi, risiko utang, transisi hijau dan digitalisasi pajak. Merespon kebutuhan global pendanaan pembangunan dalam RPJMN tahun 2025-2029 kebijakan fiskal diarahkan untuk : 1. Meningkatkan penerimaan melalui pajak digital dan pajak hijau; 2. Mengalihkan belanja ke sektor produktif dan inklusif; 3. Menghadirkan pendanaan inovatif (Pembiayaan dan Kemitraan Pemerintah-Swasta / PPP, *sovereign fund*, *green bond*, *blended finance*); Menjaga keberlanjutan fiskal dengan memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan global.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

a. Bonus Demografi

Bonus demografi menggambarkan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan usia tidak produktif lagi (>64 tahun). Berdasarkan proyeksi BPS, bonus demografi nasional diperkirakan mencapai puncak pada tahun 2025, dan kemudian akan mengalami penurunan, meskipun dari komposisi penduduk usia produktif tetap berada di atas 65 persen dari total populasi. Di Provinsi Sulawesi Selatan tren yang sama juga terjadi. Pada tahun 2020, proporsi penduduk usia produktif tercatat sebesar 68,57 persen dan diproyeksikan menurun menjadi 66,29 persen pada tahun 2045. Meskipun terjadi penurunan, penduduk usia produktif masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terdidik, akibat pertumbuhan lulusan perguruan tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing secara global menjadi tantangan utama dalam memanfaatkan bonus demografi ini.

b. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Guna menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan, terdapat beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan antara lain:

(1) **Peningkatan aktivitas pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang**

Peningkatan aktivitas pembangunan perlu disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai kondisi ideal, yaitu:

- a) 70 persen daerah terbangun dan 30 persen daerah terbuka hijau serta 10 persen daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman;
- b) Alih fungsi lahan harus dikendalikan sehingga 60-70 persen wilayah merupakan kawasan lindung dan sisanya 30 persen merupakan kawasan budidaya;
- c) Capaian Indeks kualitas lingkungan hidup ideal yang meliputi : (i) Indeks Kualitas Air (IKA) : diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) : diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) : diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar di kawasan hutan dan kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) : diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00.

(2) **Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah,**

Penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) mencerminkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana. Indikator yang dinilai antara lain :

- a) Kemampuan aparaturnya daerah dalam memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80 persen,
- b) Pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70 persen,
- c) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80 persen, dan
- d) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan sebesar 80 persen.

(3) **Ketahanan pangan dan ketahanan energi.**

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencakup tiga aspek utama : ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pemilihan indikator IKP didasarkan pada:

- a) Hasil reviu terhadap Indeks Ketahanan Pangan global;
- b) Tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi;
- c) Keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan
- d) ketersediaan data rutin tahunan.

Sedangkan Indeks Ketahanan Energi mencakup 4 parameter utama:

- a) *Availability* (ketersediaan energi domestik dan impor);
- b) *Accessibility* (aksesibilitas jaringan energi dan tantangan geografis dan geopolitik);
- c) *Affordability* (keterjangkauan biaya investasi energi, dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi);
- d) *Acceptability* (penggunaan energi ramah lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat).

(4) **Indeks Ketahanan Air**

Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Parameter ini mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas sumber daya air untuk mendukung kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secara cepat parameter keamanan air yang menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan investasi, khususnya bagi para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan regional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait, indikator ketahanan air Indonesia dibangun berdasarkan lima pilar pengelolaan sumber daya air, yaitu: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Target capaian yang

diharapkan adalah terpenuhinya 70–80 persen kebutuhan distribusi jaringan air.

Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sumber daya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

c. Transformasi Teknologi Digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai Indeks Literasi Digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam

melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar Program Nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran.

Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian Indeks Literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada di bawah capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan Indeks Literasi Digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

d. IKN dan Pemerataan Pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). Peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang

konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan visual arts, kuliner).

e. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization (2024)*, rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah diantaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan, seperti : sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain : norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *day care* berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen

f. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah

menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak Pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

g. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

h. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

i. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

j. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Penguatan Fondasi Sosial dan Kualitas SDM dalam Menghadapi Bonus Demografi serta Tantangan Global

Provinsi Sulawesi Selatan tengah berada pada momentum strategis untuk memanfaatkan bonus demografi yang ditandai oleh tren penurunan angka ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan pada tahun 2024 mencapai 44,78, yang mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia produktif. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan dasar yang merata, khususnya di wilayah perdesaan dan kepulauan. Ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah *hinterland* menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Di tengah tekanan global akibat urbanisasi, transformasi digital, serta perubahan struktur penduduk dunia yang menua (*aging population*), Sulawesi Selatan menghadapi tantangan daya saing tenaga kerja yang masih rendah. Partisipasi pemuda dalam

kewirausahaan juga relatif terbatas, tercermin dari persentase wirausaha baru yang masih di bawah 3 persen angkatan kerja, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga lebih rendah (53 persen dibanding laki-laki 81 persen), menunjukkan masih kuatnya kesenjangan gender. Sektor sektor unggulan daerah belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal karena keterbatasan kompetensi dan keterampilan. Ketidaksiapan talenta digital di tengah percepatan transformasi teknologi global menambah kompleksitas persoalan ini. Sementara itu, sistem pendidikan vokasional belum mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, terutama pada sektor-sektor berbasis industri dan teknologi.

Perubahan struktur demografi juga menuntut penguatan sistem perlindungan sosial. Meningkatnya jumlah lansia, disabilitas, dan anak-anak memerlukan respons kebijakan yang adaptif dalam bidang jaminan sosial, layanan kesehatan, serta ketahanan keluarga. Isu perlindungan anak juga menjadi tantangan penting. Angka kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih relatif tinggi, yang tidak hanya mengancam tumbuh kembang anak tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas generasi mendatang. Tanpa perlindungan yang memadai, bonus demografi dapat terdistorsi oleh tingginya jumlah anak yang rentan secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Ketahanan sosial masyarakat juga diuji oleh perubahan nilai dan tekanan sosial yang muncul akibat urbanisasi dan disrupti budaya lokal.

Urbanisasi yang tidak diiringi dengan perencanaan spasial yang terpadu dan berkelanjutan telah mendorong alih fungsi lahan, meningkatkan beban infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, transportasi), serta memicu potensi konflik sosial akibat persaingan ruang hidup dan kesempatan kerja. Lebih jauh, migrasi penduduk dari desa ke kota memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Isu strategis ini menuntut intervensi kebijakan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data, untuk memastikan bahwa potensi demografi dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

b. Optimalisasi Stabilitas Sosial, Politik, dan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Daerah

Stabilitas sosial, politik, dan budaya merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di Provinsi Sulawesi Selatan kondisi ini belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka pelanggaran ketertiban umum, fluktuasi kasus kejahatan, serta rendahnya rasa aman masyarakat mencerminkan masih lemahnya sistem keamanan dan perlindungan hukum. Di sisi lain, kualitas demokrasi substantif masih berada pada kategori sedang, yang ditandai oleh rendahnya partisipasi publik yang bermakna, literasi politik yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan politik yang belum merata.

Situasi tersebut semakin kompleks dengan adanya pasang surut kesadaran moderasi beragama dan melemahnya ketahanan budaya lokal. Kerukunan antar umat beragama masih rentan terhadap gesekan horizontal, sementara arus informasi digital tanpa filter kerap memperkuat polarisasi, intoleransi, dan radikalisme. Di bidang budaya, melemahnya pewarisan nilai kearifan lokal, menurunnya vitalitas bahasa daerah, serta rendahnya kontribusi ekonomi budaya menunjukkan rapuhnya fondasi identitas dan kohesi sosial masyarakat.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, risiko terjadinya konflik sosial, disintegrasi nilai, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi akan semakin besar. Hal ini bukan hanya menghambat pembangunan manusia yang berkarakter, tetapi juga menurunkan daya tarik investasi dan mengurangi daya saing daerah. Oleh karena itu, penguatan stabilitas sosial, politik, dan budaya melalui penegakan hukum yang adil, peningkatan literasi politik dan hukum, penguatan moderasi beragama, serta revitalisasi kebudayaan lokal merupakan agenda strategis yang harus dijalankan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.

c. Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi strategis dalam sistem ketahanan pangan nasional. Selain sebagai *lumbung pangan* utama Indonesia, provinsi ini juga berperan sebagai *hub logistik* Kawasan Timur Indonesia yang menopang distribusi komoditas pangan lintas wilayah. Posisi ini menjadikan ketahanan dan kedaulatan pangan Sulawesi Selatan tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan daerah, tetapi juga secara signifikan memengaruhi stabilitas pangan nasional. Namun demikian, peran strategis ini belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pangan daerah yang tangguh, adaptif, dan merata.

Permasalahan utama yang dihadapi mencakup tantangan struktural, ekologis, dan sosial ekonomi yang kompleks. *Pertama*, tekanan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi ke sektor non-pertanian terus meningkat, terutama di kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengancam keberlanjutan produksi pangan dan mempersempit basis produksi komoditas strategis. Selain itu, sebagian besar lahan pertanian yang tersisa mengalami degradasi, keterbatasan akses irigasi, dan minim penerapan teknologi pertanian modern. *Kedua*, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana semakin memperburuk situasi ketahanan pangan. Variabilitas cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta intrusi air laut berdampak langsung pada keberhasilan musim tanam, menurunkan produktivitas, dan memunculkan ketidakpastian pasokan pangan. Adaptasi terhadap perubahan iklim masih terbatas, baik dari sisi teknologi budidaya, kelembagaan petani, maupun sistem peringatan dini bencana. *Ketiga*, struktur pelaku utama produksi pangan yakni petani kecil masih didominasi oleh rumah tangga dengan kapasitas terbatas. Lebih dari 50 persen petani di Sulawesi Selatan merupakan petani kecil dengan keterbatasan dalam akses terhadap pembiayaan, teknologi, informasi pasar, dan kelembagaan usaha tani yang lemah. Ketimpangan daya saing ini menyebabkan rendahnya efisiensi produksi dan lemahnya posisi tawar dalam rantai pasok pangan. *Keempat*, akses dan distribusi pangan belum merata. Wilayah kepulauan, perdesaan

terpencil, dan daerah pegunungan masih menghadapi kesenjangan pasokan dan harga pangan yang tinggi, akibat keterbatasan infrastruktur distribusi, logistik, dan rantai pasok yang belum efisien. Situasi ini turut berkontribusi terhadap kerentanan pangan rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. *Kelima*, dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat masih kurang beragam dan tidak bergizi seimbang. Rendahnya literasi gizi, terbatasnya ketersediaan pangan lokal bergizi, serta belum optimalnya edukasi publik menyebabkan permasalahan gizi ganda: stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro, hingga obesitas. Indeks Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan memang berada pada posisi keempat nasional (2024), namun tingginya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) serta rendahnya capaian skor Pola Pangan Harapan menunjukkan bahwa tantangan ketahanan konsumsi pangan masih signifikan. *Keenam*, peran Sulawesi Selatan sebagai simpul logistik pangan nasional belum optimal. Sistem logistik belum terintegrasi, sarana penyimpanan dan pasca-panen seperti *cold storage* dan *distribution center* masih terbatas, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam manajemen stok dan distribusi pangan belum berjalan efektif.

Oleh karena itu, pembangunan sistem pangan Sulawesi Selatan perlu diarahkan pada transformasi menyeluruh, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup perlindungan dan optimalisasi lahan pangan berkelanjutan, disertai peningkatan produktivitas berbasis teknologi ramah lingkungan; penguatan kapasitas dan kelembagaan petani kecil, termasuk akses pembiayaan, perlindungan harga, dan integrasi dalam rantai nilai; pembangunan sistem logistik pangan yang terintegrasi dan berkeadilan wilayah, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar); diversifikasi konsumsi pangan dan penguatan ketahanan gizi, melalui peningkatan literasi gizi dan pemanfaatan pangan lokal; adaptasi sistem pangan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, termasuk sistem peringatan dini, konservasi sumber daya, dan pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*); peningkatan tata kelola pangan lintas sektor dan lintas wilayah, untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Harapannya, Sulawesi Selatan akan mampu mengokohkan

perannya sebagai penyangga utama ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan petani serta keadilan konsumsi masyarakat

d.Ketimpangan dan Kerentanan Struktur Ekonomi Daerah terhadap Krisis Iklim dan Dinamika Global

Sulawesi Selatan menunjukkan tren pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan pertumbuhan mencapai 5,02 persen pada tahun 2024. Namun di balik capaian tersebut, struktur ekonomi daerah masih menghadapi dua tantangan mendasar yang saling terkait: tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kerentanan terhadap guncangan eksternal, baik dari aspek iklim maupun dinamika global. Ketimpangan pendapatan per kapita dan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan seperti Makassar menandakan bahwa proses pertumbuhan belum berlangsung secara inklusif dan merata. Kondisi ini diperburuk oleh masih belum optimalnya pembangunan perdesaan sebagai basis penggerak ekonomi lokal yang terlihat dari persentase desa mandiri yang baru mencapai 32,88 persen pada 2024, ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer (pertanian dan perikanan) yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, krisis iklim, serta terbatasnya nilai tambah dan produktivitas sektor tersebut.

Di sisi lain, upaya industrialisasi dan hilirisasi belum menunjukkan hasil signifikan, dengan kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 13,02 persen. Kelemahan dalam integrasi ekonomi antar wilayah maupun dengan pasar global menambah kompleksitas permasalahan struktural. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia yang masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal, menyebabkan rendahnya daya saing daerah di tengah tuntutan transformasi menuju ekonomi hijau dan berbasis teknologi tinggi.

Tingginya tingkat inklusi keuangan secara agregat belum cukup untuk menjamin akses yang merata, terutama di wilayah terpencil yang masih tertinggal dari segi infrastruktur keuangan dan literasi masyarakat. Ketimpangan dalam akses pembiayaan turut memperlemah kapasitas ekonomi lokal dalam menghadapi tekanan eksternal maupun membangun kemandirian.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Sulawesi Selatan membutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga memperkuat resiliensi struktur ekonomi, mendorong transformasi sektoral menuju nilai tambah yang lebih tinggi, mengatasi ketimpangan wilayah, serta memperkuat kualitas SDM dan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim dan tantangan global. Tanpa agenda transformasi yang terarah dan inklusif, daerah akan tetap berada dalam siklus pertumbuhan rendah, ketergantungan tinggi, dan ketimpangan yang kronis.

e. Optimalisasi Posisi Strategis Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam mendukung Pemerataan dan Akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), menjadi peluang besar yang harus direspons secara strategis oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu titik krusialnya Adalah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penetapan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan memainkan peran vital sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan timur.

Sulawesi Selatan, dengan letak geografis yang sangat strategis dan memiliki faktor *endowmen* sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, seharusnya mampu mengambil peran sebagai *regional hub* utama dan episentrum pertumbuhan baru bagi KTI. Perekonomian Sulawesi Selatan berpotensi menjadi jangkar utama pembangunan di timur Indonesia dengan memperkuat nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat daya saing melalui iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, terdapat dua momentum penting yang harus dioptimalkan. Pertama, percepatan realisasi investasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam sebagai basis hilirisasi industri yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai ekspor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, posisi Sulawesi Selatan sebagai simpul penghubung logistik antara

Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN dan kawasan KSN lainnya harus diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

Pengembangan wilayah berbasis poros konektivitas, seperti Poros Selatan-Selatan, Selatan-Bagian Tengah, Selatan-Utara, Utara-Utara, dan Utara-Bagian Tengah, merupakan strategi spasial yang harus dioptimalkan untuk membentuk jaringan pusat-pusat pertumbuhan baru yang merata dan berbasis potensi lokal. Tiap poros memiliki kekuatan sektoral dan peran geopolitik-ekonomi yang strategis. Misalnya, Poros Selatan-Selatan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan kawasan pariwisata strategis Selayar-Takabonerate, mengusung potensi besar di bidang industri, pertanian, perikanan, pariwisata, serta tambang dan energi. Poros Selatan-Utara yang menghubungkan Mamminasata dengan Parepare berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi yang terintegrasi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), sekaligus mendukung peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas baru

Namun demikian, pemanfaatan atas peluang tersebut masih belum optimal. Lemahnya integrasi perencanaan sektoral dan spasial, terbatasnya daya dukung infrastruktur, rendahnya daya saing kawasan, serta belum maksimalnya sinergi antar kabupaten/kota dan pelaku usaha menjadi tantangan utama dalam mendorong Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu perumusan kebijakan pembangunan wilayah berbasis koridor dan klaster ekonomi unggulan, peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan infrastruktur strategis yang mendukung hilirisasi industri, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Seluruh upaya ini harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta penguatan peran Sulawesi Selatan dalam ekosistem pembangunan nasional, khususnya dalam konteks akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

f. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif

Pemerintahan yang efektif dan tata kelola fiskal yang andal merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, responsif, dan berdaya saing. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan penting dalam reformasi birokrasi, ditandai dengan peningkatan Indeks SPBE, capaian Indeks Reformasi Hukum yang tinggi, serta penguatan pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, efektivitas birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti : efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya potensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rendahnya efisiensi pengelolaan aset daerah, serta terbatasnya inovasi pembiayaan alternatif. Belanja daerah juga belum cukup produktif dalam mendorong transformasi struktural ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan porsi belanja pegawai yang masih mendominasi dibandingkan belanja pembangunan.

Tekanan global dan nasional terhadap reformasi fiskal dan digitalisasi pemerintahan menuntut kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, tangkas, dan terbuka terhadap perubahan. Tantangan lain juga datang dari ketidakstabilan ekonomi makro, krisis lapangan pekerjaan, inflasi, serta ketertinggalan dalam transformasi digital hampir di seluruh sektor. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kemandirian fiskal melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah, serta mendorong efektivitas belanja publik yang berbasis kinerja.

Isu ini menuntut pendekatan integratif yang menghubungkan reformasi kelembagaan, digitalisasi pemerintahan, kemandirian fiskal, serta pelibatan masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pembangunan, guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah,

mendorong efisiensi pembangunan, serta memastikan pembangunan yang adil dan inklusif.

g. Kesiapan Daerah Menghadapi Disrupsi Teknologi dalam Agenda Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi digital di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan positif, terlihat dari meningkatnya Indeks Teknologi Digital Nasional (TDN) serta tumbuhnya ekosistem digital seperti *start up* dan layanan publik berbasis elektronik. Kecepatan internet yang memadai, meningkatnya tingkat konektivitas di sekolah dan puskesmas, serta digitalisasi layanan pemerintahan menunjukkan bahwa provinsi ini telah berada di jalur yang tepat dalam membangun infrastruktur digital yang mendukung transformasi.

Namun demikian, perkembangan ini belum dibarengi dengan kesiapan struktural dan kultural dalam menghadapi dampak disrupsi teknologi, terutama yang dipicu oleh kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, big data, dan *internet of things* (IoT). Disrupsi teknologi telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial secara fundamental, termasuk menggeser jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan, menuntut keterampilan baru, serta menantang sistem layanan publik konvensional. Sementara itu, SDM di Sulawesi Selatan secara umum masih menghadapi kendala dalam hal literasi digital dan kesiapan kerja berbasis teknologi. Hal ini diperparah oleh kesenjangan akses digital di wilayah perdesaan dan kawasan tertinggal yang masih mengalami *blank spot* hingga 37,12 persen.

Dalam konteks pembangunan, disrupsi teknologi menjadi pisau bermata dua: di satu sisi membuka peluang baru dalam efisiensi, inovasi, dan perluasan layanan; namun di sisi lain dapat memperdalam ketimpangan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Ketidadaan kebijakan protektif terhadap pekerja terdampak otomatisasi, lemahnya regulasi etika dan perlindungan data pribadi, serta belum terintegrasinya sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja digital, menjadi tantangan serius yang perlu segera dijawab.

Secara nasional, arah transformasi digital diarahkan untuk mendorong efisiensi layanan publik, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Secara regional, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai simpul digital di Kawasan Timur

Indonesia, serta sebagai wilayah penyangga bagi pertumbuhan Ibu Kota Negara (IKN), yang menuntut kesiapan teknologi dan SDM digital yang mumpuni.

Oleh karena itu, upaya transformasi digital Sulawesi Selatan harus difokuskan pada penutupan kesenjangan digital antar daerah, peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan masa depan (*future skills*), pengembangan ekosistem digital inklusif untuk UMKM, koperasi, dan sektor informal, perlindungan sosial terhadap dampak otomatisasi, serta penyusunan kerangka kebijakan dan regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi disruptif.

Dengan langkah tersebut, transformasi digital bukan hanya menjadi sarana modernisasi, tetapi juga instrumen utama dalam menciptakan pemerataan, keadilan sosial, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

h. Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Mengancam Ketahanan Sumber Daya Esensial dan Keberlanjutan Pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menghadapi peningkatan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang berimplikasi langsung pada penurunan kualitas ekosistem, keterbatasan pemanfaatan sumber daya esensial (air, energi, dan lahan), serta munculnya risiko ekologis yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Tekanan ini diperparah oleh pertumbuhan penduduk, pesatnya alih fungsi lahan untuk permukiman dan industri, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan lintas sektor dan wilayah.

Daya dukung air di beberapa kawasan perkotaan telah menunjukkan tanda-tanda kritis, yang tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap air tanah dan air isi ulang. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan, tetapi juga mengindikasikan potensi kerusakan lingkungan jangka panjang, seperti intrusi air laut, penurunan muka tanah, dan hilangnya fungsi kawasan resapan.

Di sisi lain, disrupsi iklim dan teknologi semakin mempercepat perubahan tata ruang dan penggunaan lahan yang tidak selaras dengan prinsip berkelanjutan. Praktik pemanfaatan sumber daya

alam yang belum mengedepankan prinsip konservasi dan rendah karbon juga menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Sementara itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi daerah perlu dilandaskan pada pertimbangan ekologis dan keterbatasan kapasitas lingkungan. Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan potensi SDA yang besar, tidak cukup hanya mengandalkan cadangan alamnya. Diperlukan dukungan sistemik dalam bentuk kebijakan pelestarian daya dukung lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau, dan penguatan sistem peringatan dini serta mitigasi risiko lingkungan.

Penanganan isu ini juga menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan daerah. Transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan harus didukung oleh pengembangan kapasitas SDM yang adaptif terhadap teknologi lingkungan, sistem pengelolaan air terpadu, serta pembangunan sistem informasi daya dukung dan daya tampung yang terkini dan berbasis spasial.

Dengan demikian, fokus pada pemulihan dan penguatan daya dukung serta daya tampung lingkungan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah. Isu ini bersifat lintas sektor dan memerlukan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, lintas kewenangan wilayah, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk memastikan terwujudnya ketahanan sumber daya esensial dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

i. Meningkatnya Ancaman Perubahan Iklim dan Risiko Bencana terhadap Ketahanan Wilayah

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang kaya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dengan garis pantai sepanjang ±1.979 km, hutan tropis, cadangan air tanah, dan potensi energi baru terbarukan. Ekosistem pesisirnya yang terdiri dari mangrove, terumbu karang, dan padang lamun memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, pertanian, dan perikanan. Namun, potensi ini kini berada dalam tekanan serius akibat ancaman krisis lingkungan global yang kian nyata dan kompleks.

Dunia saat ini tengah menghadapi **Triple Planetary Crisis**: perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, serta peningkatan limbah dan polusi. Ketiganya saling berkaitan dan memberikan tekanan kuat terhadap sistem alam dan sosial. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, peningkatan kejadian kekeringan dan banjir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dampak ini tidak hanya menjadi isu global, tetapi telah dirasakan nyata di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor-sektor kunci. Bencana banjir, kekeringan, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem telah mengganggu stabilitas wilayah, menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan, serta memicu kerentanan sosial-ekonomi. Posisi strategis provinsi sebagai lumbung pangan nasional terancam akibat meningkatnya kegagalan panen dan menurunnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang disebabkan oleh kenaikan suhu laut, perubahan arus, dan degradasi ekosistem pesisir.

Di sisi lain, resiliensi daerah terhadap perubahan iklim dan bencana masih rendah. Ketidaksiapan peruntukan ruang di wilayah rawan bencana, ketimpangan kesiapsiagaan antar wilayah, belum optimalnya integrasi pengelolaan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan, dan lemahnya perlindungan kawasan pesisir menjadi hambatan utama. Ketidakseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan pun semakin memperparah kondisi, terutama pada wilayah padat penduduk dan kawasan pesisir yang terdegradasi. Krisis ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu dan perubahan curah hujan mendorong penyebaran penyakit berbasis vektor dan air, seperti malaria dan diare, serta memperbesar tekanan terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan ke depan tidak hanya harus memperkuat perlindungan ekosistem dan infrastruktur adaptif, tetapi juga mengedepankan **pendekatan inklusif, berbasis komunitas, dan lintas sektor** dalam upaya mitigasi dan adaptasi.

Dengan demikian, penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada semua level, mulai dari level komunitas, kabupaten/kota, hingga provinsi, adalah keniscayaan. Upaya ini harus ditopang oleh kebijakan daerah yang integratif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan global, selaras dengan komitmen nasional seperti Perjanjian Paris, target pengurangan emisi GRK, SDGs (khususnya Tujuan 13, 14, dan 15), serta pembangunan rendah karbon dan transisi energi bersih.

j. Penurunan Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengukur kapasitas suatu wilayah dalam menciptakan fondasi ekonomi yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan capaian IDSD sebesar 3,61 pada tahun 2024, yang masih berada di atas rata-rata nasional (3,43). Namun, penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,70 menjadi sinyal penting bahwa struktur fundamental daya saing daerah menghadapi tantangan serius yang perlu segera direspons secara strategis.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya struktur dan ketidakterpaduan antar pilar pengungkit daya saing daerah. Meskipun Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi domestik yang besar, tercermin dari skor ukuran pasar yang tinggi (4,71), potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat ketimpangan kinerja pilar-pilar lainnya. Pilar efisiensi pasar produk menunjukkan penurunan skor dari 2,61 menjadi 2,41, yang menggambarkan masih rendahnya daya saing pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar dan berinovasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya keterkaitan antarsektor dan belum terbangunnya rantai nilai yang terintegrasi, khususnya pada komoditas unggulan ekspor.

Masalah struktural lainnya adalah rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja. Skor 2,66 menandakan bahwa sistem ketenagakerjaan di daerah belum mampu merespons kebutuhan industri secara dinamis. Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan sektor produktif menyebabkan *mismatch* yang berdampak langsung pada produktivitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja melalui program pelatihan vokasi dan *link and match*.

Di sisi lain, sistem keuangan daerah juga belum inklusif dan responsif. Skor 2,80 mencerminkan keterbatasan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM, serta rendahnya literasi dan inklusi keuangan. Ketidaksiapan sistem keuangan ini menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan dunia usaha yang produktif dan berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, sektor-sektor strategis tidak mendapatkan dukungan modal yang cukup untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Kondisi ini diperumit oleh belum optimalnya kerja sama antar wilayah dan antar pelaku pembangunan. Kerja sama yang selama ini terjalin masih bersifat administratif dan belum diarahkan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kolaborasi multipihak.

Berbagai kelemahan ini menimbulkan dampak yang nyata. Potensi pasar domestik yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal karena tidak didukung oleh struktur produksi, tenaga kerja, dan sistem keuangan yang efisien. Turunnya kontribusi investasi produktif terhadap PDRB, dari 39,45 persen pada tahun 2020 menjadi 36,65 persen di tahun 2024, menandakan penurunan aktivitas investasi riil dan melemahnya fondasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menurun sebesar 8,09 persen, dan volumenya merosot hingga 15,23 persen. Hal ini disebabkan dominasi bahan mentah dalam komoditas ekspor dan belum berkembangnya industri pengolahan berbasis keunggulan daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah penanganan strategis perlu difokuskan pada lima agenda utama. Pertama, penguatan efisiensi pasar melalui pengembangan industri pengolahan dan integrasi rantai nilai sektor unggulan. Kedua, revitalisasi sistem ketenagakerjaan daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penguatan keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, reformasi sistem keuangan daerah untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Keempat, optimalisasi kerja sama pembangunan yang bersifat produktif, kolaboratif, dan inovatif antar wilayah, pelaku usaha, dan institusi pengetahuan. Kelima, penguatan ketahanan sosial budaya melalui internalisasi nilai-nilai

produktif, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, serta akselerasi transformasi digital yang inklusif.

Melalui pendekatan yang holistik dan lintas sektor dapat memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing daerah harus diarahkan pada perbaikan struktural yang menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan pasar produk dan tenaga kerja, penguatan sistem keuangan yang inklusif, hingga pembentukan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Langkah-langkah ini penting untuk menjadikan daya saing daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berdaya tahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

k. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Daerah yang Berbasis Keberlanjutan dan Berdaya Saing Global

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang sangat besar, meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, garam rakyat, pariwisata, hingga industri kreatif dan UKM. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diolah dan dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk hilirisasi industri yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.

Hilirisasi di sektor pertanian dan hortikultura, misalnya : masih terbatas pada pengolahan sederhana, belum berkembang menjadi industri pangan modern, seperti : tepung olahan, produk beku, atau minuman herbal siap saji. Demikian pula di sektor perkebunan dan perikanan, proses pengolahan masih menghadapi tantangan rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, dan lemahnya infrastruktur pendukung, khususnya di luar kota-kota utama.

Secara global, terdapat dorongan kuat menuju transisi industri hijau (*green industry*) dan *traceability* rantai pasok yang menuntut proses hilirisasi ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Namun, pemanfaatan SDA di tingkat lokal masih belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, serta menimbulkan risiko

peningkatan limbah dan tekanan terhadap ekosistem, terutama di sektor industri pengolahan primer, seperti : sawit, kopi, dan produk perikanan.

Sementara itu, pada level nasional, dorongan untuk pengembangan teknologi dan penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas daerah dalam inovasi industri berbasis SDA. Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah, lemahnya SDM dan teknologi pengolahan di tingkat lokal, serta belum berkembangnya pusat-pusat industri hilir.

Secara regional, posisi Sulawesi Selatan yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan motor pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seharusnya menjadi peluang besar untuk mempercepat transformasi hilirisasi industri lokal. Namun integrasi ekonomi regional dan global masih lemah, ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita, belum meratanya manfaat SDA antar kelompok masyarakat, serta terbatasnya kapasitas koperasi, UMKM, dan wirausaha lokal dalam masuk ke rantai nilai industri global.

Olehnya itu, hilirisasi SDA di Sulawesi Selatan perlu didorong secara terintegrasi dan inklusif, melalui peningkatan produktivitas ekonomi lokal, penguatan kapasitas teknologi dan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur industri hilir lintas wilayah, pemanfaatan kawasan industri secara berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan komunitas lokal).

Isu strategis ini bersifat lintas sektor dan menjadi kunci bagi terwujudnya transformasi ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika global.

2.3.2.4. Isu Strategis Daerah

a. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia

Kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing dalam banyak hal akan melahirkan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan, serta

melahirkan dampak lain berupa peningkatan jumlah pengangguran. Berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani kemiskinan yang dibutuhkan dalam hal ini memberikan kesempatan dan fasilitasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha. Keberdayaan masyarakat khususnya masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didasarkan pada pemahaman harapan masyarakat miskin dan adanya perlindungan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kabupaten Kepulauan Selayar akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, Namun berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan menurunnya angka stunting. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif sehingga tingkat kemiskinan tidak meningkat.

Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* harus menjadi agenda utama.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Pencegahan terhadap peningkatan penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang merupakan prioritas utama. Peningkatan kualitas SDM aparatur di kecamatan kepulauan khususnya yang melakukan pelayanan pemerintahan dan pelayanan langsung ke masyarakat saat ini sangat perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan dalam rangka mempersiapkan pemekaran daerah.

b. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran dreinasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi, ketersediaan akses air minum layak dan sanitasi aman memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembangunan dan upaya peningkatan dan perbaikan sudah dilakukan selama ini, namun masih tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang.

Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama akses jalan, transportasi laut terutama pembangunan pelabuhan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke kabupaten tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan pariwisata, kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran. Pemerataan infrastruktur khususnya konektivitas wilayah kecamatan daratan dengan kecamatan kepulauan, antar pulau dan atau kabupaten lain sangat diperlukan sebagai salah satu syarat teknis dalam rangka mempersiapkan pemekaran daerah.

c. *Pengelolaan sumberdaya alam*

Menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.

Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif ke perumahan, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Disisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan tanpa pengawasan intensif akan mengancam keberadaan kawasan hutan dan terganggunya keseimbangan tata guna air tanah.

Memburuknya kondisi wilayah konservasi tangkapan air yang meningkat pesat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air waduk/embung/bendung dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat. Akses terhadap air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan optimalisasi. Kerawanan air bersih masih mengancam Kabupaten Kepulauan Selayar yang disebabkan ketersediaan sumber baku dan air permukaan tergantung yang pada musim.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan residu atau sampah perlu ditangani secara komprehensif, sinergi dan berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari.

d. Tata kelola pemerintahan

Capaian Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada nilai 60,55 dengan predikat “B” (data tahun 2024) dengan nilai tersebut masih perlu upaya perbaikan pada setiap komponen penilaian. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal, seperti belum adanya *grand design* pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi. Kondisi geografis ini menyebabkan adanya tantangan serius dalam hal jangkauan pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan pemerintahan yang merata khususnya di kecamatan kepulauan

e. Pemenuhan pangan dan energi

Ancaman krisis pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Alih fungsi lahan dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Akibat dari *illegal fishing* dan *destructive fishing* menyebabkan berkurangnya terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan. Di sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani dan nelayan adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan keuntungan yang makin sedikit, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi rendah.

Keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan dampak terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan (Energi Baru Terbarukan).

f. Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tantangan yang dihadapi dalam bidang Iptek adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemampuan Iptek daerah menuju masyarakat dan pemerintahan yang maju dan mandiri perlu membangun keterpaduan dalam pengembangan Iptek yang melibatkan secara intensif pelaku peneliti dari perguruan tinggi, perusahaan maupun pemerintah daerah, terutama untuk menciptakan kontribusi Iptek daerah dalam mengantisipasi globalisasi serta berbagai persoalan dasar dalam masyarakat.

g. Keamanan, ketertiban, politik dan hukum

Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dalam kehidupan sosial budaya yang kondusif. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan

partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemendirian masyarakat untuk mengelolah kemandirian dan ketertiban.

Perkembangan dalam bidang politik dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran politik dan kedewasaan politik bagi masyarakat serta perkembangan budaya politik sehingga lebih transparan serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung tata pemerintahan yang baik.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Disamping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.

h. Perubahan iklim, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan risiko bencana alam

Pemanasan global, perubahan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan terumbu karang sebagai tempat hidup biota laut. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti: sumberdaya air, pertanian, perikanan, infrastruktur permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana alam gempa bumi yang terjadi di tahun 2021 yang berdampak pada kerusakan fisik. Bencana angin kencang, banjir, abrasi pantai yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah dengan resiko bencana yang tinggi jika dilihat dari Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 140,18 dengan kategori “Sedang”.

i. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Polusi dan kerusakan lingkungan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Pencemaran air, tanah dan udara semakin meningkat. *Food loss and waste*. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *over capacity* akibat semakin tidak terkendalinya timbulan sampah. Kapasitas daya tampung dan

daya dukung lingkungan semakin berkurang disebabkan laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan pendukung kehidupan masyarakat.

Hasil identifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan isu KLHS RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 2.93**.

Tabel 2. 93
Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah		Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029		Isu Lingkungan Dinamis						Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar				
					Global		Nasional		Regional						
Lolasi strategis diapit dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) : ALKI II dan ALKI III, jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional	1.	Tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan sosial	1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	6	Ketahanan Sosial, Pendidikan dan Transformasi SDM	1.	Bonus Demografi	1.	Penguatan Fondasi Sosial dan Kualitas SDM dalam Menghadapi Bonus Demografi serta Tantangan Global	1	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia			
	2.	Masih rendahnya stabilitas ekonomi makro daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah	8		Kebijakan Fiskal dan Pendanaan Inovatif		2.	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2.				Ketimpangan dan Kerentanan Struktur Ekonomi Daerah terhadap Krisis Iklim dan Dinamika Global		
							3.	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	3.					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif	
Potensi sektor pariwisata (destinasi bahari, Taman Nasional Takabonerate/Cagar Biosfer, Daerah Prioritas Pariwisata (DPP) Selayar-Makassar-Toraja)	3.	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan regional					4.	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	2.	Ketimpangan dan Kerentanan Struktur Ekonomi Daerah terhadap Krisis Iklim dan Dinamika Global					
	4.	Masih rendahnya daya saing daerah							3.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif					
	5.	Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	2	Pemenuhan pelayanan dasar											
	6.	Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas pendidikan								4.			Penurunan Daya Saing Daerah		
	7.	Masih rendahnya kualitas ketahanan keluarga, kesetaraan dan keadilan gender													
	8.	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	3	Perubahan iklim dan mitigasi bencana	1	Pembangunan Berkelanjutan dan <i>Net Zero Emissions</i>	5.	Krisis Lingkungan	5.	Meningkatnya Ancaman Perubahan Iklim dan Risiko Bencana terhadap Ketahanan Wilayah	2	Perubahan iklim, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan risiko bencana alam			
			4	Lingkungan hidup dan sumber daya alam								6.	Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Mengancam Ketahanan Sumber Daya Esensial dan Keberlanjutan Pembangunan	3	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah		Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029		Isu Lingkungan Dinamis						Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar	
					Global		Nasional		Regional			
Sektor ekonomi (pertanian, perkebunan dan perikanan)	9.	Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah			2	Ketahanan Pangan dan Gizi Global	6.	Rendahnya Produktivitas	7.	Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Sulawesi Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan	4	Pengelolaan sumberdaya alam
	10	Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan			3	Pariwisata Berkelanjutan (<i>Blue-Green Circular Economy</i>)			8.	Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Daerah yang Berbasis Keberlanjutan dan Berdaya Saing Global	5	Pemenuhan pangan dan energi
	11	Belum optimalnya produktivitas sumberdaya alam				5						
Infrastruktur terkoneksi (darat, laut dan Udara)	12	Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan	5	Infrastruktur	7	Ketahanan Wilayah dan Infrastruktur Global	7.	Pembangunan belum berkelanjutan	9.	Optimalisasi Posisi Strategis Sulawesi Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam mendukung Pemerataan dan Akselerasi Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	6	Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
			6	Air bersih dan sanitasi		8.	IKN dan pemerataan pembangunan					
	13	Belum optimalnya penerapan teknologi digital dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi			4	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi	9..	Transformasi teknologi digital	10.	Kesiapan Daerah Menghadapi Disrupsi Teknologi dalam Agenda Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan	7	Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Daerah otonomi	14	Belum optimal pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	7	Tata kelola pemerintahan	4	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi	10	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	11.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Inklusif	8	Tata kelola pemerintahan
	15	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban serta perlindungan hukum							12.	Optimalisasi Stabilitas Sosial, Politik, dan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Daerah	9	Keamanan, ketertiban, politik dan hukum
	16	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, demokrasi dan kewaspadaan nasional										
	17	Belum optimalnya penguatan nilai keagamaan, sosial dan budaya										

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBAGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah : **“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”**.

Pernyataan visi mengandung makna, yaitu

Bersama, artinya bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah, dengan prinsip pembangunan :

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Membawa, artinya pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maju, artinya kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan **digitalisasi dan teknologi industri** pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan **hilirisasi** sumber daya alam berbasis UMKM dan **huluisasi** pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal.

Sejahtera, artinya hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran** dan **kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli** masyarakat.

Kondisi akhir yang diharapkan dari terwujudnya Visi pada tahun 2029 yaitu :

1. Kesempatan berusaha terbuka;
2. Lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2025-2045. Tahapan implementasi periode pertama pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar difokuskan pada *Penataan dan Penguatan Landasan Transformasi*. Tahapan ini bertujuan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sasaran peningkatan pendapatan per kapita yang tercermin dari capaian PDRB perkapita sebesar 146,13 juta rupiah (penyesuaian 74,07 juta rupiah), Indeks Ekonomi Biru Indonesia sebesar 151,93 (penyesuaian 91,93), dan kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 4,80 persen. Selain itu, tujuan lainnya adalah mewujudkan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, yang tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi 6,31 (penyesuaian 5,90 persen), tingkat kemiskinan menurun pada angka 9,25 persen (penyesuaian 8,67 – 7,67 persen), Indeks Gini sebesar 0,317 (penyesuaian 0,298), dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,34 persen (penyesuaian 1,27). Sasaran lainnya adalah peningkatan daya saing daerah yang tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 44,26 (Inovatif)

(penyesuaian 67,91) dan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,99 (penyesuaian 4,62). Peningkatan daya saing sumber daya manusia juga menjadi sasaran, dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,43. Terakhir sasaran penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang diharapkan tercapai, yang dapat dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK tahunan sebesar 41,27 persen (penyesuaian 37,97 persen) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,32 (Baik) (Penyesuaian 75,71 (Baik)). Berdasarkan indikator sasaran tahap pertama dan kondisi daerah yang diharapkan pada tahun 2029, namun terdapat beberapa penyesuain target pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diuraikan di atas. Rumusan sasaran Visi RPJPD dan kondisi yang diharapkan di tahun 2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
 Keterkaitan Sasaran Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi RPJMD 2025-2029	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045	Indikator	Target	
				Baseline 2025*	Tahun 2029
1.	Daya beli masyarakat meningkat	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	63,96	146,13
2.	Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	106,35	151,93
			3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,89	4,80
3.	Angka kemiskinan menurun	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	10,24	9,25
4.	Angka pengangguran menurun		5. Indeks Gini (Indeks)	0,341	0,331
			6. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1,22	1,34
			7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,84	6,31
5.	Kesempatan berusaha terbuka	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	44,26 (Inovatif)	44,26 (Inovatif)
6.	Lapangan kerja tersedia		9. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,85	2,99
7.	Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	72,61	75,43
8.	Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan	Penurunan emisi GRK menuju <i>Net Zero Emission</i>	11.Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan (%)	23,66	41,27
			12.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	67,61 (Baik)	72,32 (Baik)

Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045. Dalam upaya menjamin konsistensi dan sinergitas dengan perencanaan pada tingkat pusat dan provinsi. Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3. 2

Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi RPJMN tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029	Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045	Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera

3.1.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, ditetapkan Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif*, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui ”Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah.
2. *Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja melalui “Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat” yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

3. *Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah*, untuk membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui “Program Hilirisasi Sumber Daya Alam” atau petik-olah-jual dengan **teknologi industri**, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin.; dan untuk meningkatkan produk daerah melalui “Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan **digitalisasi pemasaran** bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
4. *Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan*, untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) pada masing-masing desa melalui “Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah.
5. *Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah*, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui “Program Pengembangan Prasarana Transportasi” dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antar pulau dan kesatuan wilayah kabupaten.
6. *Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama*, untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial.
7. *Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*, untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui program “Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup”,

dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

Keterkaitan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, tertera pada **Tabel 3.3** berikut.

Tabel 3. 3

Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029

Misi RPJMN tahun 2025-2029 / Asta Cita	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani	3. Mewujudkan pengembangan tata kelola yang <i>good governance</i>	1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif
		8. Mewujudkan daya saing daerah yang tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi	
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tangguh dan berkualitas	2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)			
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan	3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi			

Misi RPJMN tahun 2025-2029 / Asta Cita	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	4.Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4.Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang terkoneksi	5.Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1.Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berdaya saing	5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi	6.Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan			
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			

Misi RPJMN tahun 2025-2029 / Asta Cita	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan	7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Selayar tahun 2025-2029 berdasarkan misi sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Tujuan 1 (T1) : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran 1 (S1) : Meningkatkan birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif

Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan 2 (T2) : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Sasaran 2 (S2) : Meningkatkan mutu dan akses pendidikan

Sasaran 3 (S3) : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan

Sasaran 4 (S4) : Meningkatkan kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender

Misi 3 Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

Tujuan 3 (T3) : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing

Sasaran 5 (S5) : Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah

Sasaran 6 (S6) : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan

Sasaran 7 (S7) : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor

Sasaran 8 (S8) : Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah

Sasaran 9 (S9) : Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif

Sasaran 10 (S10) : Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan

Misi 4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan

Tujuan 4 (T4) : Meningkatkan kemandirian perdesaan

Sasaran 11 (S11) : Meningkatkan kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran 12 (S12) : Meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi digital

Sasaran 13 (S13) : Meningkatkan status desa

Misi 5 Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Tujuan 5 (T5) : Meningkatkan konektivitas wilayah

Sasaran 14 (S14) : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata

Misi 6 Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama

Tujuan 6 (T6) : Meningkatnya kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun

Sasaran 15 (S15) : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran 16 (S16) : Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, toleran, dan harmonis

Sasaran 17 (S17) : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial

Misi 7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Tujuan 7 (T7) : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan

Sasaran 18 (S18) : Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan

Sasaran 19 (S19) : Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Tabel 3. 4
Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

NO.	VISI	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA												
1.	Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif											
			Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,55	62,54	64,91	68,41	70,32	72,97	74,81
			Sasaran 1 : Meningkatkan birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,58	2,66	2,75	2,83	2,92	3,00	3,10
				Nilai SAKIP Daerah	Angka	61,68 (Cukup Baik)	63,56 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)	64,50 (Cukup Baik)	65,52 (Cukup Baik)	66,39 (Cukup Baik)	67,01 (Cukup Baik)
				Indeks SPBE	Angka	2,57 (Cukup)	2,66 (Cukup)	2,74 (Cukup)	2,83 (Cukup)	2,91 (Cukup)	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)
				Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	59,76	61,91	63,86	66,79	67,91	68,40
2.	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat											
			Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,38	72,90	73,39	73,97	74,39	74,90
			Sasaran 2 : Meningkatkan mutu dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	63,97	64,76	65,56	66,35	67,15	67,94	68,78
			Sasaran 3 : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka	82,28	82,52	82,87	83,21	83,55	83,89	84,36
			Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	63,58 (Berkembang)	63,95 (Berkembang)	64,74 (Berkembang)	65,72 (Berkembang)	66,69 (Berkembang)	67,00 (Berkembang)	68,64 (Berkembang)
				Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,47 (2023)	60,74	61,00	61,27	61,99	63,30	65,05
				Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,379	0,367	0,355	0,344	0,333	0,323	0,313
				Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	66,75 (2023)	73,14	75,60	78,30	80,45	83,53	85,95

NO.	VISI	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah											
			Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,33	3,50	4,20	5,20	5,50	5,90	6,20
				Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,49	3,77	4,05	4,36	4,62	4,91
				Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316	0,310	0,304	0,298	0,291
			Sasaran 5 : Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah	PDRB per Kapita	Rp. Juta	58,29	60,49	63,03	66,31	69,95	74,07	78,66
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,29	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59	3,61
			Sasaran 6 : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,93	3,01	3,08	3,26	3,45	4,80	5,11
			Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-14,23	-9,72	-9,66	-9,11	-8,57	-8,22	-8,03
			Sasaran 8 : Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	45,33	45,47	45,69	45,92	46,14	46,37	46,59
			Sasaran 9 : Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
			Sasaran 10 : Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77	9,47-8,70	9,07-8,67	8,67-7,67	8,28-7,53
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,05	1,96	1,87	1,78	1,69	1,60	1,50
4.	Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan											
			Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian perdesaan	Indeks Desa	Angka	IDM : 0,7190 (Maju)	70,86 (Maju)	75,75 (Maju)	77,17 (Maju)	79,62 (Maju)	81,42 (Mandiri)	82,23 (Mandiri)

NO.	VISI	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Sasaran 11 : Meningkatkan kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,03	77,39	79,15	80,90	82,66	84,42	86,17
				Indeks Ekonomi Hijau	Angka	22,46 (2022)	23,51	24,07	24,44	24,81	26,41	26,55
				Indeks Ekonomi Biru	Angka	83,60 (2023)	86,35	87,75	89,14	90,53	91,93	93,32
			Sasaran 12 : Meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	44,34	46,56	48,88	51,33	53,90	56,59	59,42
			Sasaran 13 : Meningkatkan status desa	Persentase Desa Mandiri	%	27,16 (22 Desa)	28,40 (23 Desa)	29,63 (24 Desa)	32,10 (26 Desa)	37,04 (30 Desa)	43,21 (35 Desa)	48,15 (39 Desa)
5.	Misi 5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah											
			Tujuan 5 : Meningkatkan konektivitas wilayah	Indeks Infrastruktur	Angka	3,26	3,31	3,33	3,34	3,36	3,38	3,39
			Sasaran 14 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Angka	4,32	4,36	4,40	4,45	4,49	4,54	4,58
				Indeks Layanan Infrastruktur Pelabuhan	Angka	3,37	3,40	3,43	3,47	3,50	3,54	3,57
6.	Misi 6 : Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama											
			Tujuan 6 : Meningkatkan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun	Indeks Harmoni	Angka	6,61	6,63	6,66	6,69	6,71	6,75	6,75
			Sasaran 15 : Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah	%	5,65*	8,70	14,11	21,52	25,22	32,63	40,04
			Sasaran 16 : Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, toleran dan harmonis	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	77,87	78,29	78,74	79,19	79,63	80,08	80,08

NO.	VISI	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun perekonomian masyarakat	%	2,5	4,5	6,6	8,6	10,7	12,7	15,8
			Sasaran 17 : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	%	0,39*	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31
7.	Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan											
			Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65 (Baik)	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)	75,29 (Baik)	75,50 (Baik)	75,71 (Baik)	75,92 (Baik)
				Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	18,02*	23,66	28,06	32,47	36,87	37,97	41,27
			Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks Kualitas Udara	Angka	72,45	79,75	80,05	80,35	80,65	80,95	81,25
				Indeks Kualitas Air	Angka	68,09	75,29	75,49	75,69	75,89	76,09	79,26
				Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,02	65,09	65,16	65,23	65,30	65,37	65,44
			Sasaran 19 : Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Angka	133,58 (Sedang)	132,24 (Sedang)	130,92 (Sedang)	129,61 (Sedang)	128,32 (Sedang)	127,03 (Sedang)	125,76 (Sedang)

Keterangan : *) Data Perkiraan

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan tahapan atau langkah-langkah perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan. Strategi juga mengarahkan implementasi sasaran pembangunan melalui serangkaian arah kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan agar pencapaian sasaran lebih terarah. Strategi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang tertera pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3. 5

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA				
1. Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi
			Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	Peningkatan kualitas, tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
				Peningkatan tata kelola kinerja pemerintahan daerah dan penatausahaan kinerja keuangan
				Pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
			Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif dan aplikatif
			Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN
				Peningkatan sistem manajemen organisasi pemerintahan dan manajemen SDM aparatur
			Menata SDM wilayah kepulauan dalam rangka persiapan pemekaran daerah	Penyiapan kuantitas dan kualitas SDM aparatur untuk oprasionalisasi persiapan pemekaran daerah
Meningkatkan dan menata kerjasama daerah	Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global			
2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Sasaran 2 : Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pemerataan layanan guna mencapai wajib belajar 13 tahun	Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Pendidikan Non formal
				Penanganan anak tidak sekolah secara kolaboratif
				Pengembangan kurikulum pendidikan karakter
				Penataan distribusi guru yang merata dan berkesesuaian antar sekolah

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dengan pelatihan yang berkesinambungan Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan literasi dan kegemaran membaca di lingkungan pendidikan formal dan non formal Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pelaksanaan dan dukungan Sekolah Rakyat
		Sasaran 3 : Meningkatnya mutu dan akses kesehatan	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan melalui pemerataan layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan pencapaian target SPM kesehatan Peningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya Peningkatan dan pemantapan BLUD RS dan Puskesmas Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata dan berkeadilan Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). Pemberdayaan masyarakat peningkatan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat Peningkatan deteksi dini, pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular dan penyakit menular

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
				Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melaui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan dan berkelanjutan
				Peningkatan pelatihan dan distribusi tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil
				Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan program peningkatan gizi anak melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah dan fasilitas kesehatan
				Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil
				Peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital
				Perluasan pelayanan kesehatan gratis seluruh lapisan masyarakat
		Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas SDM produktif	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda
				Peningkatan pembinaan prestasi dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
				Pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif; Mendukung pelaksanaan event-event olahraga prestasi dan olahraga masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
3 Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah	Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Sasaran 5 : Meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah	Meningkatkan stabilitas fiskal yang adaptif dan menjaga stabilitas sektor keuangan; Meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan; dan Penataan tata kelola fiskal dan pendanaan pembangunan non pemerintah.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD).
				Pembangunan <i>Check Point</i> dalam rangka pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Pendelegasian kewenangan pengelolaan laut dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan sumberdaya laut yang lebih reponsif
				Pelaksanaan pengendalian inflasi daerah
		Sasaran 6 : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pembangunan pusat pertumbuhan baru	Peningkatan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, peternakan
		Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor	Hilirisasi sumber daya alam unggulan; Meningkatkan kapasitas riset inovasi	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan dan pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusi
				Peningkatan kualitas komoditi unggulan (perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan) daerah bernilai ekspor
		Sasaran 8 : Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah	Menciptakan iklim usaha untuk menarik investasi	Peningkatan investasi melalui promosi potensi daerah, dukungan regulasi kemudahan investasi di daerah
		Sasaran 9 : Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata pada kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pariwisata daerah
				Pengembangan daya tarik ekonomi kretif
				Peningkatan penerapan pariwisata berkelanjutan
		Sasaran 10 : Menurunkan angka pengangguran dan	Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial melalui peningkatan upaya	Peningkatan pemberdayaan keluarga
				Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
		kemiskinan	pemutakhiran data dan pemenuhan standar pelayanan minimal sosial Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah Pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia melalui perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, ekonomi, sosial, politik dan lapangan kerja formal Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat Peningkatan keberdayaan masyarakat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya yang efektif dan tepat sasaran Penataan akses dan informasi angkatan kerja termasuk bagi Kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penajaman data dan target intervensi penduduk yang termasuk kategori kemiskinan ekstrim Peningkatan rehabilitasi RTLH melalui program prioritas nasional (Program 3 juta rumah), DAK Perumahan, BSPS, Dana Desa dan CSR Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaran SPAM Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air bersih Peningkatan cakupan akses sanitasi aman Penataan dan peningkatan produktivitas koperasi dan usaha kecil mikro Mendorong program <i>reskilling</i> dan <i>upskillng</i> bagi angkatan kerja Pengembangan kegiatan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
4 Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan	Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian perdesaan	Sasaran 11 : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kemandirian pangan secara berkelanjutan mewujudkan swasembada pangan	Pengembangan kondisi prasarana sarana dan ketersediaan air baku dan irigasi menunjang peningkatan produktivitas pertanian
				Penanaman dan peremajaan lima juta kelapa dalam
				Peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) dan sektor perikanan
				Pengembangan sentra perikanan budidaya, rumput laut dan garam
				Pengembangan sentra peternakan dan peternakan Pulau Tanamalala
		Sasaran 12 : Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam menciptakan SDM yang mandiri, kreatif dan inovatif	Peningkatan akses internet dan literasi digital untuk mendorong ekonomi digital
		Sasaran 13 : Meningkatnya status desa	Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa mandiri	Fasilitas pemberdayaan <i>start up</i> dan marketplace lokal
				Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
				Peningkatan peran kecamatan
				Pemetaan dan identifikasi potensi wilayah persiapan pemekaran daerah, antara lain potensi sumber daya alam, ekonomi lokal dan sosial budaya.
				Optimalisasi BUMDes
5. Misi 5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Tujuan 5 : Meningkatnya konektivitas wilayah	Sasaran 14 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatkan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/ transportasi
				Peningkatan konektivitas antar pulau persiapan pemekaran daerah
			Meningkatkan pembangunan konektivitas laut sebagai <i>backbone</i>	Pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
6. Misi 6 : Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama			logistik domestik dan konektivitas udara, darat dan laut	Peningkatan akses ke kawasan strategis melalui peningkatan sarana dan parasarana jalan lingkar, jalan alternatif dan jembatan
			Meningkatkan pemanfaatan ALKI II dan ALKI III untuk menghubungkan rantai pasok barang dan jasa	Peningkatkan sistem jaringan distribusi barang dan jasa
	Tujuan 6 : Meningkatnya Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun	Sasaran 15 : Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan penguatan stabilitas hukum, politik; lembaga demokrasi yang kuat; parlemen modern, parpol yang berbasis nilai; dan penataan pendidikan politik masyarakat	Peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama
				Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi
		Sasaran 16 : Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, toleran, dan harmonis	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia	Peningkatan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat
				Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat, warisan budaya dan kearifan lokal
				Penguatan pendidikan keagamaan bagi generasi muda melalui jalur formal dan non formal
		Sasaran 17 : Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial
				Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
7. Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi baru terbarukan; Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				Mengimplementasikan pembangunan rendah karbon
				Mendorong program perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>) dalam rangka mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca)
				Pengembangan infrastruktur daur ulang sampah dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Peningkatan kinerja dan tata kelola pelayanan pengelolaan sampah
				Peningkatan fungsi Taman Nasional Taka Bonerate sebagai Cagar Biosfer
		Sasaran 19 : Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana	Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi)

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan disusun mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memiliki fokus yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya. Tema/fokus pembangunan setiap tahun dirancang berkesinambungan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema tahapan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2025-2030 tertera pada **Tabel 3.6** dan arah kebijakan pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3. 6
Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030

Tahapan Pembangunan				
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan Produktifitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik Berkualitas Menuju Selayar Maju dan Sejahtera	Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Pelayanan Publik, Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah serta Pembangunan Sumberdaya Manusia dalam Rangka Percepatan Mewujudkan Kemandirian Daerah	Pemantapan Pembangunan Ekonomi, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Keberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Produksi Sektor Unggulan	Akselerasi Peningkatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan yang Berdaya Saing, Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kualitas Sosial dan Budaya serta Pelestarian Lingkungan	Perwujudan Pembangunan Sektor Unggulan dan Sumberdaya Manusia Berkarakter untuk Selayar Berkemajuan

Tabel 3. 7
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2030

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif		
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 1 : Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi
		Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
		Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit
		Menata SDM wilayah kepulauan dalam persiapan pemekaran daerah
		Meningkatkan dan menata kerjasama daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Sasaran 2 : Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pemerataan layanan guna mencapai wajib belajar 13 tahun
	Sasaran 3 : Meningkatkan mutu dan akses kesehatan	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan melalui pemerataan layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas SDM produktif
Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah		
Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Sasaran 5 : Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	Meningkatkan stabilitas fiskal yang adaptif dan menjaga stabilitas sektor keuangan; Meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan; dan Penataan tata kelola fiskal dan pendanaan pembangunan non pemerintah.
	Sasaran 6 : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta pembangunan pusat pertumbuhan baru
	Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor	Hilirisasi sumber daya alam unggulan; Meningkatkan kapasitas riset inovasi
	Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Menciptakan iklim usaha untuk menarik investasi
	Sasaran 9 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata pada kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya
	Sasaran 10 : Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan	Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial melalui peningkatan upaya pemutakhiran data dan pemenuhan standar pelayanan minimal sosial
		Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar, permukiman dan lingkungan
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja		
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan		

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
2	3	4
Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian perdesaan	Sasaran 11 : Meningkatkan kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kemandirian pangan secara berkelanjutan mewujudkan swasembada pangan
	Sasaran 12 : Meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam menciptakan SDM yang mandiri, kreatif dan inovatif
	Sasaran 13 : Meningkatkan status desa	Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa mandiri
Misi 5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah		
Tujuan 5 : Meningkatkan konektivitas wilayah	Sasaran 14 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatkan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pembangunan infrastruktur yang merata
		Meningkatkan pembangunan konektivitas laut sebagai <i>backbone</i> logistik domestik dan konektivitas udara, darat dan laut
		Meningkatkan pemanfaatan ALKI II dan ALKI III untuk menghubungkan rantai pasok barang dan jasa
Misi 6 : Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama		
Tujuan 6 : Meningkatkan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun	Sasaran 15 : Meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan penguatan stabilitas hukum, politik; lembaga demokrasi yang kuat; parlemen modern, parpol yang berbasis nilai; dan penataan pendidikan politik masyarakat
	Sasaran 16 : Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, toleran, dan harmonis	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia
	Sasaran 17 : Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Sasaran 18 : Meningkatkan kualitas air, udara dan lahan	Meningkatkan pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi baru terbarukan; Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	Sasaran 19 : Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan dan bencana

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 di dukung dengan 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Membangun desa, menata kota

Membangun Desa merupakan lanjutan Program "Gerbang Sari" adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan

- a. Hulusasi SDA Berbasis Perwilayahan Komoditas; membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk: Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani dan Desa Koperasi
- b. Hilirisasi SDA Berbasis UMKM, berasaskan "Petik – Olah – Jual" sebagai produk akhir untuk dipasarkan
- c. Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Digital

Menata Kota adalah merupakan upaya pembangunan kawasan perkotaan dengan prioritas ibukota kabupaten dengan menata zona-zona peruntukan lahan, untuk mewujudkan kota tertib dan nyaman, melalui kegiatan :

- a. Menata kawasan permukiman, dengan :
 - 1) Menyusun Rencana Induk Drainase
 - 2) Menata pengelolaan limbah atau peta jalan pengelolaan sampah
 - 3) Membangun sumur resapan yang berfungsi untuk menahan intrusi air laut ke lahan permukiman
- b. Menata kegiatan UMKM Perkotaan, dengan :
 - 1) Menata sentra kuliner, pelengkap destinasi wisata perkotaan (Sapta Pesona)
 - 2) Membangun Sentra Ekonomi Kreatif (Pusat Karya Tanadoang) kerja sama dengan Dekranas Daerah
- c. Menata PSU Perkotaan, dengan :
 - 1) Menata jalur pantai Benteng
 - 2) Menata Lapangan Pemuda menjadi alun-alun kota, yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Menata layanan sanitasi dan limbah perkotaan;
 - 4) Menata kembali jaringan drainase perkotaan;
 - 5) Melakukan reklamasi Pantai Bonea (dengan kajian LH) pada bagian dalam *break water* yang berfungsi sebagai Hutan Kota;

2. Kemandirian pangan, melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah pusat;
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, dengan program pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis;
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT, melalui program bantuan gratis kepada peserta didik pada satuan PUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa;
5. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, dalam mendapatkan posisi yang sama di masyarakat, kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH, melalui program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan kemiskinan;
7. Pengentasan kemiskinan, dengan program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat;
8. Penguatan fiskal daerah, melalui program peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, melalui program pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan;
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, melalui program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi;

12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM, melalui program pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan;
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, melalui program pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antar suku dan antar agama;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, melalui program pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melalui program penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, melalui program penggalian dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni, budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi; dan
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui program pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3. 8
 Program Prioritas Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2025-2029

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”		
No.	Misi	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	8. Penguatan fiskal daerah
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.	3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS.
		4. Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT
		5. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas
3.	Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah	6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH
		7. Pengentasan kemiskinan
		8. Penguatan fiskal daerah
		9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah
		10.Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM
		12.Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM
		11.Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal
4.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan	1. Membangun desa, menata kota
		2. Kemandirian pangan
5.	Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah	1. Membangun desa, menata kota
6.	Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama	15.Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
		14.Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan
		16.Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga
		13.Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan
7.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	17.Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan.

Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah. Program ini merupakan agenda strategis kepala daerah dalam periode RPJMD, yang menjadi prioritas atau target selama lima tahun dan secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dalam implementasinya, prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, rincian cascading tujuan, sasaran outcome dan prioritas pembangunan daerah tertera pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3. 9
Program Kerja dan Kegiatan Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”				
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	1.Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	1.	Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta keimanan dan ketakwaan (Imtak) Aparatur
			2.	Peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis tupoksi
			3.	Pengembangan budaya kerja berbasis kinerja
			4.	Pembinaan karakter Aparatur berbasis integritas
			5.	Peningkatan fasilitas kerja berbasis beban kerja
			6.	Pendistribusian pegawai berbasis kompetensi
			7.	Penyiapan SDM Aparatur untuk pemekaran daerah
			8.	Pengembangan digitalisasi pemerintahan
			9.	Penetapan Standar, Operasional, dan Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja ASN
		2.Peningkatan Kualitas Birokasi	1.	Meningkatkan kinerja pelayanan di kabupaten dengan teknologi digital
			2.	Meningkatkan pelaksanaan digitalisasi pelayanan di desa
			3.	Meningkatkan kualitas SDM Operator pelayanan digital
			4.	Mengembangkan infrastruktur untuk penguatan jaringan internet
			5.	Membangun fasilitas internet gratis
			6.	Melakukan sosialisasi pemanfaatan layanan digital melalui internet gratis
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	4.Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	1.	Bantuan gratis perlengkapan sekolah peserta didik (pakaian, topi, sepatu, tas, dan alat tulis menulis) mulai PAUD sampai dengan SLTP
			2.	Menuntaskan wajib belajar 15 tahun
			3.	Melaksanakan bimbingan belajar singkat Paket A dan Paket B
			4.	Bantuan pemondokan mahasiswa di Makassar
			5.	Bantuan biaya pendidikan tertentu, peserta didik berprestasi dan/atau penyandang masalah sosial
			6.	Peningkatan kualitas guru dengan pendidikan ke jenjang yang tinggi, diklat, workshop, seminar pendidikan
			7.	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan
			8.	Penyempurnaan kurikulum belajar
			9.	Pelaksanaan pemerataan pendidikan
			10.	Pembentukan sarana pendidikan berkarakter keimanan dan ketaqwaan untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya, dengan pembinaan pendidikan berbasis pesantren di wilayah kepulauan melalui membentuk sekolah vokasi usia 12-15 tahun, pendidikan terpusat pada satu sekolah atau asrama dan

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”				
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan	
		5.Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan		pemberian materi tambahan (praktek hidup mandiri, membina siswa berprestasi, membina karakter moral)
			11.	Peningkatan minat baca masyarakat
			1.	Pelayanan kesehatan gratis dengan bantuan Iuran BPJS kesehatan
			2.	Bantuan rumah singgah dan Ambulans bagi keluarga pasien rujukan di Makassar, agar pasien taat mengikuti tindak lanjut perawatannya
			3.	Pemeriksaan kesehatan keliling gratis sebagai tindak lanjut program Pemerintah pusat
			4.	Peningkatan pelayanan kesehatan berisiko tinggi dengan pengadaan ruangan dan sarana perawatan khusus untuk penyakit jantung dan stroke dan pengadaan dokter spesialis parat time secara periodik melalui kerjasama
3.	Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah	3.Pemenuhan Kebutuhan Dasar	5.	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan
			1.	Pemenuhan pangan (Bansos dan/atau BLT) dengan melengkapi bansos APBN.
			2.	Rehabilitasi rumah layak huni (berdasar kriteria dan SOP)
		6.Keberdayaan Masyarakat	3.	Pengembangan prasarana dasar permukiman, berupa air bersih, penanganan limbah, dan penataan permukiman
			1.	Memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat perorangan dan kelompok berbasis potensi sumber daya lokal
			2.	Memberi pendampingan teknis dalam usaha masyarakat
			3.	Memberi bantuan sarana usaha
			4.	Memfasilitasi dalam mengakses perolehan permodalan
			5.	Perlindungan sosial (Asuransi nelayan, BPJS kesehatan, atau BPJS tenaga kerja)
		7.Hilirisasi Sumber Daya Alam	1.	Mengembangkan industri kecil dan UMKM serta memberi nilai tambah bagi produk perikanan, pertanian dan perkebunan, dengan :
				a. Industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya
				b. Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (padi/jagung).
				c. Industri pengolahan hasil tanaman hortikultura (jeruk asli Selayar).
		8.Pengembangan Sentra IKM		d. Industri pengolahan hasil perkebunan (jambu mete, kelapa, pala, cengkeh, kopi).
				Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagai berikut :
			1.	Pengembangan sentra industri kerajinan dan kuliner di Kecamatan Benteng

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”				
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan	
			2.	Pengembangan sentra pengolahan ikan di Kecamatan Bontoharu
			3.	Pengembangan sentra pengolahan emping dan kenari di Kecamatan Bontomanai
			4.	Pengembangan sentra pengolahan kelapa terpadu di Kecamatan Buki
			5.	Pengembangan sentra pandai besi (pengrajin) di Kecamatan Bontomatene
			6.	Pengembangan sentra industri perikanan terpadu di Kecamatan Bontosikuyu
			7.	Pengembangan sentra perikanan tangkap di Kecamatan Takabonerate
			8.	Pengembangan sentra pembuatan gula merah di Kecamatan Pasimasunggu
			9.	Pengembangan sentra pengolahan jambu mete di Kecamatan Pasimasunggu Timur
			10.	Pengembangan sentra peternakan kambing di Kecamatan Pasimarannu
			11.	Pengembangan sentra pengolahan pisang di Kecamatan Pasilambena
		9.Huluisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	1.	Fasilitasi peningkatan produksi tanaman pangan, perikanan, dan peternakan, yang diprioritaskan pada wilayah : a. Pulau Jampea sebagai “Lumbung Padi Selayar”. b. Pulau Kalaotoa sebagai “Sentra Tanaman Pisang”. c. Pulau Karumpa sebagai “Pusat Perikanan Tangkap”. d. Pulau Bonerate sebagai “Sentra Peternakan Kambing”
			2.	Pembinaan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
			3.	Pembinaan nelayan dan fasilitasi sarana perikanan tangkap
			4.	Pembinaan pelaku budidaya perikanan air payau
			5.	Pembinaan pelaku budidaya perikanan pantai
		10.Pengembangan Usaha Korporasi	1.	Peningkatan kualitas produksi UMKM, BUMDes, koperasi dan/atau BUMD
			2.	Peningkatan akses permodalan UMKM, BUMDes, koperasi dan/atau BUMD
			3.	Peningkatan layanan pemasaran produk UMKM dengan membangun Super Market di Makassar, yang berfungsi sebagai etalase produk
			4.	Peningkatan promosi produk berbasis elektronik (digitalisasi) UMKM, BUMDes, koperasi dan/atau BUMD
			5.	Peningkatan peran UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD dalam pengelolaan pasca panen dan pengendalian harga komoditas
4.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan	11.Kembang Emas Desa	1.	Pengembangan kawasan cepat tumbuh

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”			
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan
			a. Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan (koperasi, BUMDes dan kelompok usaha masyarakat b. Peningkatan keterampilan SDM masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal c. Pengembangan ekonomi kreatif d. Peningkatan akses terhadap permodalan e. Peningkatan promosi Investasi
			2. Penetapan wilayah potensial a. Pengembangan usaha perikanan berbasis desa (Desa Nelayan) b. Pengembangan usaha pariwisata berbasis desa (Desa Wisata) dengan Pulau-pulau BTP (Bahuluang-Tambolongan-Polassi) sebagai “Destinasi Wisata Super Prioritas” c. Pengembangan usaha pertanian berbasis desa (Desa Tani) d. Pengembangan usaha koperasi berbasis desa (Desa Koperasi)
			3. Pembinaan usaha perdesaan, dengan : a. Membina UMKM bidang usaha penyedia makanan (Caterine) pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis b. Membina kelompok masyarakat dan UMKM untuk menyediakan bahan makanan lokal c. Meningkatkan peran BUMD dalam pengelolaan pasca panen, dengan membentuk jejaring produksi dengan UMKM dan BUMDes yang mengelola usaha di desa, dan membangun jejaring pasar dengan Badan Usaha dan daerah lainnya d. Membina kerja sama usaha antar desa, dengan membentuk klaster jenis usaha kelompok dan BUMDes untuk mengelola komoditi atau produk tertentu
			4. Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur dasar a. Peningkatan prasarana air baku dan air bersih perdesaan b. Peningkatan prasarana listrik perdesaan
		12.Kemandirian Pangan Daerah	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi Baras Jampea 2. Peningkatan Produksi Peternakan 3. Peningkatan Produksi Buah dan Sayuran 4. Memasyarakatkan pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan untuk tanaman jagung, umbi-umbian, atau sayuran 5. Meningkatkan produksi dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, dengan : a. Peremajaan bagi tanaman perkebunan dan hortikultura b. Menggunakan bibit unggul c. Memberi pupuk berimbang

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”				
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan	
				d. Memberi perlindungan tanaman
				e. Menyediakan jaringan dan air irigasi
				f. Menggunakan teknologi pemicu buah
				g. Melakukan mekanisasi pertanian
			6.	Pengembangan kawasan “Kampong Munte” desa yang memiliki potensi tanaman jeruk
			7.	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan :
				a. Membina SDM nelayan dan memberi bantuan sarana perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi
				b. Membangun fasilitas kebutuhan nelayan, seperti : pabrik es, Cold Storage, dan SPBN
				c. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas) Pesisir, untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan
				d. Pengembangan usaha perikanan berbasis desa
5.	Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah	13.Pengembangan Prasarana Transportasi	1.	Pengembangan sistem transportasi terkoneksi dan terintegrasi dalam rangka pemekaran daerah
			2.	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten.
			3.	Peningkatan dan pemeliharaan jalan desa
			4.	Peningkatan dan pemeliharaan jalan permukiman
			5.	Pembangunan dan rehabilitasi jembatan
			6.	Peningkatan prasarana air baku dan jaringan irigasi
			7.	Pembangunan dan rehabilitasi tambatan perahu
6.	Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama	14.Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1.	Pembinaan kelembagaan sosial, seni, dan budaya
			2.	Pembinaan SDM dan kelembagaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak
			3.	Pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial dan berkebutuhan khusus
			4.	Pembinaan toleransi antar suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
			5.	Pengembangan budaya Gotong-Royong
		15.Pembinaan Keagamaan	1.	Pembinaan kelembagaan agama
			2.	Fasilitasi kegiatan keagamaan
			3.	Pembinaan toleransi dalam kehidupan beragama
			4.	Pengembangan sistem pengajaran

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”				
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan	
				baca-tulis Al Qur'an 5. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Hafidz Al-Qur'an
7.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	16.Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	1.	Peningkatan fasilitas penanganan limbah dan persampahan
			2.	Peningkatan fasilitas pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH)
			3.	Peningkatan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman
			4.	Peningkatan pelayanan jasa lingkungan hidup
			5.	Peningkatan kualitas lingkungan laut pada Kawasan TNL Takabonerate sebagai “Pusat Rehabilitasi Terumbu Karang”.
		17.Pencegahan Kerusakan Lingkungan	1.	Peningkatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
			2.	Peningkatan penerapan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
			3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lingkungan, melalui :
				a. Peningkatan pelibatan masyarakat, dengan :
				- Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mengawasi pantai dan terumbu karang
				- Mengikut sertakan masyarakat pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaa kegiatan pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup
				- Membangun embung mini dalam bentuk swadaya atau padat karya
				b. Peningkatan kepedulian masyarakat, dengan :
				- Membuat sumur resapan pada setiap rumah tangga
				- Melakukan penanaman pohon secara mandiri
				- Ikut serta melakukan penanaman terumbu karang
				- Memasyarakatkan penggunaan energi terbarukan
		18.Pengelolaan Kebencanaan	1.	Mitigasi bencana, dengan :
				a. Menyusun peta kawasan rawan bencana dan melakukan sosialisasi hasil pemetaan
				b. Menyusun rencana jalur evakuasi dan titik kumpul, bila terjadi bencana
				c. Menyiapkan logistik bantuan kedaruratan
			2.	Penanganan pasca bencana, dengan :
			a.	Membentuk “Pasukan Tagana” (Taruna Tanggap Bencana) dari

Visi : “Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”			
No.	Misi	Program Kerja	Kegiatan
			masyarakat
			b. Menyiapkan bantuan sosial atau santunan bagi korban bencana
			c. Menerapkan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, berupa relokasi dan penyediaan permukiman

Program lanjutan pembangunan pemerintah daerah periode tahun 2021-2025 sebagai modal pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode 2025-2030, sebagai berikut :

1. Melanjutkan pelayanan pendidikan gratis mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi;
2. Melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas sampai dengan rumah sakit rujukan;
3. Melanjutkan peningkatan produksi Padi Jampea terhadap kualitas dan kuantitasnya sebagai pilar kemandirian pangan daerah;
4. Melanjutkan pembinaan UMKM dengan melakukan hilirisasi perikanan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa nelayan sebagai modal investasi sektor perikanan;
5. Melanjutkan pembinaan UMKM dengan melakukan hilirisasi hasil bumi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa tani sebagai modal investasi sektor pertanian;
6. Melanjutkan pembinaan BUMDes yang mengelola destinasi pariwisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa wisata sebagai modal investasi sektor pariwisata;
7. Melanjutkan pembinaan koperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa, koperasi sebagai modal investasi dan sebagai bapak angkat;
8. Melanjutkan pembangunan pusat Kawasan Industri Perikanan Terpadu untuk menggerakkan perekonomian daerah, sebagai modal investasi sektor perikanan
9. Melanjutkan fasilitasi pemasaran / pengiriman produk hilirisasi hasil UMKM untuk menggerakkan perekonomian daerah, sebagai modal investasi
10. Melanjutkan pembinaan SDM masyarakat siap pakai diberbagai sektor lapangan kerja dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki melalui Balai Latihan Kerja;
11. Melanjutkan pengelolaan destinasi pariwisata untuk mengerakkan perekonomian daerah, sebagai modal investasi sektor pariwisata;

- 12. Melanjutkan rehabilitasi / perbaikan perumahan rakyat untuk membebaskan masyarakat dari hunian rumah tidak layak huni;
- 13. Melanjutkan program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah untuk menggerakkan perekonomian daerah;
- 14. Melanjutkan bantuan pembangunan dan pembinaan pengembangan agama Islam melalui pondok pesantren.

Keselarasan prioritas pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dengan prioritas pembangunan daerah tertera pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3. 10

Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT		Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah		
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan		Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga		
5. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas		
2. Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM		Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM		
8. Penguatan fiskal daerah	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Pengentasan kemiskinan		
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
1. Membangun desa, menata kota	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH		
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Tabel 3. 11
 Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Prioritas Pembangunan Daerah
 Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
Visi : Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera						
Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 1: Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	<i>Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional</i>	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8. Penguatan fiskal daerah
			<i>Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial</i>	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial		
			<i>Meningkatnya kualitas kinerja ASN</i>	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	Program Kepegawaian Daerah	
			<i>Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN</i>	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan		
			<i>Meningkatnya tata kelola dan pengembangan karir ASN</i>	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Anjab/ABK		
			<i>Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah</i>	Persentase capaian realisasi anggaran OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase capaian kinerja OPD		
			<i>Meningkatnya tata kelola perbendaharaan</i>	Rasio SiLPA terhadap total pendapatan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			<i>Meningkatnya tata kelola anggaran</i>	Penetapan APBD		
			<i>Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan</i>	Penetapan LKPD		
			<i>Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun</i>	Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada instansi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			proses dan kewenangan Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan APIP			
				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; bidang infrastruktur dan kewilayahan; bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
				Persentase penerapan inovasi daerah		
			Meningkatnya pengintegrasian program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi penganggaran, pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD		
			Meningkatnya layanan dan fasilitasi kinerja DPRD	Persentase program kerja DPRD tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftan penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk	
				Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		
				Cakupan kepemilikan KTP elektronik		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	Progran Pencatatan Sipil	
				Persentase cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		
				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun		
Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang						

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				perkawinannya dilaporkan		
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta program prioritas pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Sasaran 2: Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	4. Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT
			Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik	Persentase Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				Persentase warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional		
				Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional		
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B		
			Meningkatnya mutu satuan PAUD	Persentase ruang kelas PAUD kondisi bangunan baik		
				Persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik		
				Persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan			
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	
				Rasio guru terhadap rombongan belajar (PAUD dan SD)			
				Rasio guru terhadap mata pelajaran tingkat SMP			
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	Program Pengembangan Kurikulum		
			Meningkatnya kunjungan perpustakaan daerah Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa sesuai standar	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Program Pembinaan Perpustakaan		
		Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan					
		Sasaran 3: Meningkatnya mutu dan akses kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan						
	Persentase warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan						

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
				Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan		5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas
			Nilai Akreditasi Rumah Sakit			
		Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas generasi muda, keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (Angka)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pembinaan dan kemandirian organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah	Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Sasaran 5 : Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Rasio desentralisasi fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8. Penguatan fiskal daerah
				Realisasi pendapatan terhadap target pendapatan		
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian Meningkatnya kualitas kinerja BUMD dan BLUD Meningkatnya implementasi	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)		
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan		
				Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik		
				Persentase rumusan kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			kebijakan Sumber Daya Alam			
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Sasaran 6 : Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Meningkatnya kinerja usaha koperasi sektor produksi pasca pemberdayaan	Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	12.Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya kemandirian dan produktivitas UMKM binaan	Persentase UMKM binaan yang naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Persentase UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pasca panen		
				Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal	Program Pengembangan UMKM	
				Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital		
			Meningkatnya daya saing produk industri pengolahan	Nilai produksi industri pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	10.Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM
		Sasaran 7 : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. perkebunan.	Jumlah produksi sektor tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	
			serta peternakan				
				Jumlah produksi sektor tanaman hortikultura			
				Jumlah produksi sektor perkebunan			
				Jumlah produksi sektor peternakan			
			Meningkatnya jumlah kelompok tani dan ternak yang memperoleh dukungan sarana produksi	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Meningkatnya jumlah koperasi tani yang aktif dan beroperasi	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian		
				Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi			
			Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		10.Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor perdagangan	Program Pengembangan Ekspor		
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
				Persentase produk lokal UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran melalui kemitraan			
		Sasaran 8 : Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12.Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM	
			Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Program Promosi Penanaman Modal		
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, dan sesuai standar	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal		
		Sasaran 9 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	11.Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Sasaran 10 : Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	7. Pengentasan kemiskinan
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
				Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
				Persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Rasio rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			masyarakat		Kumuh	9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya akses tenaga kerja terhadap peluang kerja melalui fasilitasi pemerintah	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja		
			Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Tingkat produktivitas tenaga kerja		
			Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan tata kelola kerja yang layak melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial	
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan	Tujuan 4 : Meningkatkan kemandirian perdesaan	Sasaran 11 : Meningkatnya kemandirian pangan berbasis perdesaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama secara berkelanjutan	Persentase ketersediaan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2. Kemandirian pangan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		
		Menurunnya jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular dan tidak menular	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular			

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana longsor	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai dan wilayah pantai kewenangan kabupaten		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		
			Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah		
		Sasaran 12 : Meningkatnya akses dan pemanfaatan teknologi digital	Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses layanan publik berbasis digital yang terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Membangun desa, menata kota
		Sasaran 13 : Meningkatnya status desa	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Membangun desa, menata kota
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
				Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu		
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan		
		Sasaran 14 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang beroperasi dan layak fungsi	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Membangun desa, menata kota
Misi 5 : Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur	Tujuan 5 : Meningkatkan konektivitas wilayah	Sasaran 14 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang beroperasi dan layak fungsi	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Membangun desa, menata kota

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
Wilayah						
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase penanganan jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	
				Persentase penanganan jembatan kewenangan kabupaten		
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase jumlah rumah terlayani PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air		
Misi 6 : Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama	Tujuan 6 : Meningkatnya kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang rukun	Sasaran 15 : Meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila dan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam keberagaman	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	13.Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan
		Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan yang maslahat, toleran, dan harmonis	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Meningkatnya efektivitas fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama antar daerah Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan sosial	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik		
				Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu		
				Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti		
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang diimplementasikan			

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas fasilitas keagamaan	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik		
			Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya peran Forum Waspad untuk menjaga stabilitas daerah dari konflik sosial dalam kehidupan masyarakat	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	
				Persentase fasilitasi kegiatan Forkopimda		
			Meningkatnya peran koordinasi pimpinan daerah dalam rangka mencegah dan menangkal ATHG			
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
			Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun			
		Sasaran 17: Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap penyimpangan dan penyakit sosial	Meningkatnya kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya, serta kebebasan menganut kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekono mi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoti ka, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	15. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam menyampaikan bahaya pengaruh narkoba kepada kelompok sasaran pencegahan	Persentase kelompok sasaran pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dibina		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
			Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Misi 7 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tujuan 7 : Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas udara, air dan lahan	Meningkatnya persentase kualitas air pada titik pantau yang memenuhi baku mutu lingkungan secara berkelanjutan	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	17.Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan
			Meningkatnya persentase titik pemantauan udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu		
			Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Meningkatnya proporsi limbah B3 yang ditangani sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
			Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah Meningkatnya kemandirian desa/ kelurahan dalam pengelolaan sampah	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
				Persentase desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
		Sasaran 19 : Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penanganan pasca bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Penanganan Bencana	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di wilayah kabupaten	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran		

3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan

3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar

Kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 mengamanatkan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Penjabaran pembangunan wilayah Pulau Sulawesi dalam pencapaian jangka menengah untuk mengurangi kesenjangan wilayah yang diarahkan menjadi “Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA”.

Pendekatan pembangunan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMN tahun 2025-2029 merupakan prioritas pembangunan daerah afirmasi untuk mengurangi kesenjangan wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Highlight Intervensi tertera pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3. 12
Highlight Intervensi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMN
Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
D5. Kabupaten Kepulauan Selayar	Pemenuhan infrastruktur dan Pelayanan dasar di Kawassn Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan, melalui:
	Pemenuhan SPAM, sistem pncelolaan air limbah, dan sanitasi, dengan outpuf pemenuhan akses air minum aman dengan pengembangan spam terintegrasi hulu ke hilir, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan pemenuhan akses sanitasi aman
	Pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik hingga pedesaan serta penguatan implementasi transimi energi, dengan output pengendalian pembangunan jaringar transmisi dan gardu induk, peningkatan pcnyediaan dan layanan listrik bagi rumah tangga belum berlistrik serta penerapan meteran listrik pintar untuk taysnan yang akurat dan optimal 24 jam/hari, PLTS

Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir, dengan output : fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, pemantauan data dan informasi sampah laut, peningkatan pemahaman masyarakat terkait persampahan, pemenuhan dan pembinaan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
	Penguatan konektivitas laut, dengan output peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, pembangunan kapal patroli, peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa dan Jinato
	Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan output: sarana pendukung penyelenggaraan konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, Oceans Prosperity Project - LAUTRA
	Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan, dengan output : terpenuhinya sarana dan prasarana bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta implementasi layanan telemedicine

3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045, berdasarkan kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam arah pembangunan Kawasan Bulukumba, yang diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan. Peluang kontribusi ekonomi kawasan pembangunan Bulukumba sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru bersumber dari letak geografi yang terletak di Laut Flores dan merupakan bagian dari kawasan andalan. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Bulukumba yang diarahkan sebagai

kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui : **Pertama**, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital termasuk pembangunan RS lengkap berkualitas dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan Malaria, penguatan upaya eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, utamanya pada kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan;

Kedua, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan lokal sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta

pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis *rural heritage*;

Ketiga, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan perikanan guna mendukung penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi termasuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan yang didukung oleh jaringan irigasi yang berkualitas guna mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan sekitarnya serta pengembangan komoditas perkebunan unggulan termasuk pengembangan komoditas kelapa. Selain itu, pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap, pengembangan pangan akuatik (*blue food*), khususnya pengembangan budidaya komoditas unggulan utamanya udang, nila dan rumput laut termasuk pembangunan sentra perikanan dan rumput laut yang mencakup hilirisasi, teknologi, dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur kawasan budidaya, pengembangan kawasan sentra garam melalui dukungan terhadap pengembangan korporasi petambak garam, pengembangan garam industri terintegrasi serta penguatan sarana dan prasarana industri garam.

Sedangkan pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industri, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja. Selain itu dilakukan upaya penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk

perikanan, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan.

Selain itu pengembangan Kawasan Bulukumba, juga diprioritaskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi termasuk pengembangan *sea plane* yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industri penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat yang diprioritaskan pada Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik;

Keempat, peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi;

Kelima, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi berupa pengembangan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien, penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan.

Selain itu peningkatan pembangunan perdesaan di Kawasan Pembangunan Bulukumba, juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di Kawasan Swasembada pangan, air dan energi Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya melalui penguatan swasembada

pangan serta pengembangan ekonomi biru. Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan afirmasi kawasan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan melalui dukungan pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah, pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan serta penguatan konektivitas laut, termasuk dukungan pengembangan transportasi lokal berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah, penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal;

Keenam, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan publik, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Bulukumba juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; fasilitasi dan pembinaan serta penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah serta penguatan kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Bulukumba juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Ketujuh, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan

peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik termasuk di wilayah pesisir dan pulau pulau, fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antar moda transportasi transportasi darat, laut dan udara yang diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi, pengembangan angkutan umum massal, pembangunan dan pengembangan jaringan pelabuhan terpadu melalui pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan bandar udara perairan (*sea plane*), peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta penguatan konektivitas darat dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedelapan, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir serta pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, air laut, dan lahan, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah serta pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 tertera pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3. 13

Highlight Intervensi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2025-2029

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
20	Kepulauan Selayar		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, melalui : ▪ dukungan pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (<i>sea plane</i>); ▪ fasilitasi pengembangan jaringan bandar udara terpadu; ▪ pengembangan transportasi lokal berbasis kebutuhan yang terintegrasi dengan simpul transportasi; ▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah; serta ▪ pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; ▪ penanganan permukiman kumuh; ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten; ▪ pemenuhan kebutuhan air baku; ▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota; ▪ pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan PSU; ▪ penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; ▪ fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan; ▪ fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
			1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui : • pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pengembangan unit pelayanan bergerak dan digital; • peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan; • peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan; serta

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				• peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui : • penuntasan dan pengendalian penyakit menular termasuk TBC, HIV/AIDS, dan malaria; • eliminasi dan pengendalian penyakit tropis terabaikan termasuk penyakit kusta dan penyakit rabies; • penguatan intervensi spesifik stunting; • peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; • peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana; • pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; • pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular; • pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik; • penyehatan lingkungan; dan • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Program Makan Bergizi Gratis. KPU - 02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, melalui : ▪ pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi; serta ▪ penyediaan dan optimalisasi sarana rumah sakit Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan Pendidikan Tinggi dan pengembangan bidang STEAM, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dukungan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, melalui: • pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi; • penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis; • penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah; dan • fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri; serta • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
			masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	masyarakat yang adaptif, melalui : • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek; • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien; • penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial yang adaptif serta pelaksanaan bantuan energi dan pangan; dan • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan melalui : ▪ pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta sistem pengolahan air limbah; ▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik, ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir berbasis 3R dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, ▪ pengembangan transportasi lokal berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah; ▪ penataan aset pertanahan berupa fasilitasi pelaksanaan reforma agraria; dan ▪ pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal
			2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Penguatan ekosistem budaya berbasis <i>rural heritage</i> melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, ▪ peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; ▪ pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal; ▪ penguatan tata kelola data warisan budaya; ▪ pengelolaan desa pemajuan kebudayaan; ▪ penguatan kerukunan umat beragama; ▪ peningkatan ketangguhan keluarga; ▪ peningkatan kualitas perlindungan anak; ▪ peningkatan kualitas pemuda berupa pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga.
			8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; ▪ peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan; ▪ pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan ▪ peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. Pembangunan berketahanan iklim serta peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penyelenggaraan tata ruang berkualitas, melalui : ▪ pengelolaan keanekaragaman hayati; ▪ peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); ▪ penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan; ▪ penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup; ▪ penguatan upaya penyelenggaraan penataan ruang berkualitas termasuk pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, khususnya bencana hidrometeorologi; ▪ penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah; ▪ pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor; dan ▪ penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca
			3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ pengembangan industri produk unggulan sumber daya alam termasuk olahan hasil laut; ▪ fasilitasi pengembangan Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; ▪ penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir; ▪ jaminan ketersediaan bahan baku; ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				laut dan komoditas unggulan lainnya; dan ▪ peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri <i>medium-high technology</i>. Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: ▪ peningkatan produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan Indeks Pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi; ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ pengembangan pangan hewani; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; ▪ penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; ▪ peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; ▪ fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; dan ▪ peningkatan produktivitas komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui : • pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata; • pengembangan industri penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan • pengelolaan destinasi berbasis masyarakat. KPU - 10 - Pengembangan Pangan Hewani, melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani; ▪ peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan; serta ▪ pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak. 4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; ▪ penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; ▪ penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan ▪ penguatan ekosistem kuliner. 6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multi pihak dalam pembiayaan dan

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI PRIORITAS INTERVENSI DALAM RPJMN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	
			PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
			berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	pembangunan perkotaan melalui : ▪ penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital; ▪ pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara; ▪ transformasi digital layanan publik prioritas; serta ▪ penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui : ▪ peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik; ▪ penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta ▪ sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
		Kawasan Afirmasi- Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulsel	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kawasan Pulau-pulau Kecil Sulawesi Selatan, melalui dukungan dan fasilitasi : ▪ pemenuhan kebutuhan air minum aman dan layak melalui pembangunan SPAM terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi; ▪ pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik; ▪ penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir; ▪ penguatan konektivitas laut; ▪ pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta ▪ penguatan kapasitas dan sistem pelayanan Kesehatan.

Sumber data : RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029

3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, berdasarkan kecamatan sebagai berikut :

1. **Arah Pembangunan Kecamatan Bontomatene**, yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Industri Selayar dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau.
2. **Arah Pembangunan Kecamatan Buki**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau.
3. **Arah Pembangunan Kecamatan Bontomanai**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau
4. **Arah Pembangunan Kecamatan Benteng**, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi biru.
5. **Arah Pembangunan Kecamatan Bontoharu**, yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup berupa kawasan ekosistem mangrove dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
6. **Arah Pembangunan Kecamatan Bontosikuyu**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis

ekonomi biru dan ekonomi hijau.

7. **Arah Pembangunan Kecamatan Taka Bonerate**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai kawasan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
8. **Arah Pembangunan Kecamatan Pasimasunggu**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai kawasan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
9. **Arah Pembangunan Kecamatan Pasimasunggu Timur**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai kawasan pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
10. **Arah Pembangunan Kecamatan Pasimarannu**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.
11. **Arah Pembangunan Kecamatan Pasilambena**, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan yang berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan, diarahkan menjadi pusat konektivitas wilayah antar pulau untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dengan melihat visi dan misi serta prioritas pembangunan daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan wilayah, sebagai berikut :

Pertama, Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, diprioritaskan pada penguatan fiskal daerah melalui penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal,

Kedua, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di prioritaskan pada :

- (1) Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS melalui program pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis.
- (2) Penguatan pendidikan gratis PAUD– PT melalui: program bantuan

gratis kepada peserta didik pada satuan PAUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa. (3) Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, melalui: kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;

Ketiga, Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah di prioritaskan pada : (1) Pengentasan kemiskinan, melalui: program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat. (2) Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH, melalui program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan kemiskinan. (3) Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah, melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasiskan sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi. (4) Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, melalui program pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan. (5) Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM, melalui program pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan.

Keempat, Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan diprioritaskan pada : (1) Membangun desa, menata kota, melalui lanjutan Program "Gerbang Sari" adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan huluisasi SDA berbasis perwilayahan komoditas; membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk: Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani dan Desa Koperasi; Hilirisasi SDA berbasis UMKM, berasaskan "Petik – Olah – Jual" sebagai produk akhir untuk dipasarkan; Pemasaran produk UMKM berbasis teknologi digital. (2) Kemandirian pangan, melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah pusat. (3) Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, melalui melalui program

peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi.

Kelima, Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah di prioritaskan pada : Membangun desa, menata kota, melalui pembangunan kawasan perkotaan dengan prioritas ibukota kabupaten dengan menata zona-zona peruntukan lahan, untuk mewujudkan kota tertib dan nyaman.

Keenam, Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama di prioritaskan pada : (1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melalui program penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, melalui program pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. (3) Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, melalui program penggalan dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni, budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi. (4) Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, melalui program pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antar suku dan antar agama.

Ketujuh, Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan di prioritaskan pada : Pelestarian lingkungan hidup yg berkelanjutan melalui program pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kurun 5 tahun ke depan dengan melihat prioritas pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembangunan wilayah berdasarkan kecamatan daratan tertera pada **Tabel 3.15.** dan kecamatan kepulauan tertera pada **Tabel 3.16.**

Tabel 3. 14
Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Daratan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
1.	Membangun desa, menata kota	Huluisasi SDA berbasis perwilayahan komoditas desa nelayan, desa wisata, desa tani dan desa koperasi			Desa Nelayan : Desa Mekar Indah		Desa Nelayan : Desa Bontosunggu	Desa Nelayan : Desa Appatana	
			Desa Wisata : Desa Menara Indah, Desa Bungaiya	Desa Wisata : Desa Menara Indah, Desa Bungaiya	Desa Wisata : Desa Bontolempangan, Desa Balang Butung, Desa Buki, Desa Mekar Indah	Desa Wisata : Desa Barugaiya, Desa Bontomarannu	Desa Wisata : Desa Bontolebang, Desa Kahu-kahu, Desa Bontoborusu, Desa Bontosunggu	Desa Wisata : Desa Patilereng, Desa Appatana, Desa Bahuluang, Desa Polassi, Desa Tambolongan	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 227/IV/Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbais Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar
				Desa Tani : 1. Pengembangan Kampong Munte : Desa Bontona Saluk, Desa Maharayya, Desa Onto, Desa Tamalanrea, Desa Tanete, Kelurahan	Desa Tani : 1. Pengembangan Kampong Munte : Desa Kohala, Desa Bontolempangan, Desa Lalang Bata, Desa Buki	Desa Tani : 1. Pengembangan Kampong Munte : Desa Kaburu, Desa Mare-mare, Desa Parak, Desa Polebunging, Desa Barugaiya, Desa Bontomarannu; 2. Pengembangan	Desa Tani : 1. Pengembangan Kampong Munte : Desa Bontotangnga, Kelurahan Putabangun, Desa Bontobangun, Desa	Desa Tani : 1. Pengembangan Kampong Munte : Desa Lantibongan, Desa Laiyolo Baru, Desa Binanga Sombaiya, Desa harapan, Desa	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
				Batangmata Sapo, Kelurahan Batangmata, Desa Pamatata, Desa Bungaiya, Desa Barat Lambongan		Palawija : Desa Bonea Timur	Bontolebang	Lowa, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Appatana, Desa Laiyolo; 2. Pengembangan Palawija : Desa Lowa, Desa Binanga Sombaiya	
				Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bungaiya		Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bontomarannu	Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bontosunggu	Desa Koperasi dan UMKM : Desa Appatana, Desa Bahuluang	
		Hilirisasi SDA berbasis UMKM	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan pemasaran produk UMKM berbasis teknologi digital	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan prasarana dasar permukiman, berupa air bersih, sanitasi, penanganan limbah, dan penataan permukiman	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan prasarana penanganan limbah	IPAL domestik skala individual, Pelayanan angkutan lumpur tinja	Pembangunan sarana air limbah non domestik, IPAL domestik skala individual	IPAL domestik skala individual	IPAL domestik skala individual, IPLT Kaburu	IPAL domestik skala individual, Pelayanan angkutan lumpur tinja	IPAL domestik skala individual	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
		Pengembangan kuantitas, kualitas, kapasitas pengolahan sampah	Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS)			TPA sampah (TPA Kaburu)	Tempat Penampungan Sementara (TPS)		Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pengembangan sistem transportasi terkoneksi dan terintegrasi	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan desa	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan permukiman	√	√	√	√	√	√	
		Pembangunan dan rehabilitasi jembatan	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan prasarana air baku dan jaringan irigasi	-	√	√	√	√	√	
		Pembangunan dan rehabilitasi tambatan perahu	-	√	√	√	√	√	
		Peningkatan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan / dermaga		Pelabuhan Penyeberangan Pamatata, Pelabuhan Batang Mata, Pelabuhan Bone Lohe				Pelabuhan Penyeberangan Patumbukang	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pengembangan penataan kawasan pelabuhan pengumpul lokal	Pelabuhan Pengumpul Selayar/Benteng/Rauf Rahman						Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
									2025-2044
		Pengembangan penataan kawasan pelabuhan pengumpan lokal		Pelabuhan Pamatata, Pelabuhan Batang Mata, Pelabuhan Bone Lohe			Pelabuhan Padang	Pelabuhan Appatana, Pelabuhan Pulau Tambolongan	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas pokok serta penunjang pelabuhan perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Bonehalang						Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-20444
		Peningkatan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas pokok serta penunjang bandar udara pengumpan					Bandar Udara H. Aroepala		Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan kualitas, fasilitas penunjang dan kapasitas depo bahan bakar	-	√	-	-	-	-	
		Pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik	PLTMG Selayar, PLTMG Selayar 2	PLTD HSD Selayar, PLTB Selayar, PLTH Pulau Selayar		PLTD Selayar, PLTMG Selayar 1	PLTD Pulau Pasi, PLTS Terpusat Bontolebang, PLTH Pulau Selayar	PLTS Selayar, PLTS Terpusat Tambolongan	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan kualitas dan kapasitas pembangkitan tenaga listrik	√	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pembangkitan tenaga listrik	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan kabel telepon	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan kabel serat optik	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak terestrial	√	-	-	-	-	-	
		Peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya air dan jaringan irigasi			Jaringan irigasi primer, Jaringan irigasi sekunder, Jaringan irigasi tersier	Jaringan irigasi primer, Jaringan irigasi sekunder, Jaringan irigasi tersier	Jaringan irigasi sekunder	Jaringan irigasi primer, Jaringan irigasi sekunder	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan kualitas dan kapasitas instalasi pengolahan air minum	-	√	√	√	√	√	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Embung dan Dam jaringan air baku air minum		Embung Malelang		Bendung Posi, Bendungan Posi, Embung Bonea Timur	Bendungan Bontojaya, Bendungan Cinimabella, Embung Losong 2	Embung Baturapa, Embung Bonotoharu, Embung Kunyi	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri Pamatata	-	√	-	-	-	-	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
2.	Kemandirian pangan	Pematangan lahan kawasan peruntukan industri	-	√	-	-	-	√	
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata alam dan buatan	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah pusat	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi peternakan	-	√	-	-	-	-	
		Peningkatan produksi buah dan sayuran	-	√	√	√	√	√	
		Pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan kawasan “Kampung Munte” desa yang memiliki potensi tanaman jeruk	-	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	√	-	-	-	-	√	
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	-	√	-	√	√	√	
3.	Pelayanan kesehatan gratis	Pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis	√	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
		Pelayanan kesehatan gratis dengan bantuan Iuran BPJS kesehatan	√	√	√	√	√	√	
		Pemeriksaan kesehatan keliling gratis sebagai tindak lanjut program Pemerintah pusat	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan	√	√	√	√	√	√	
4.	Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT	Pelaksanaan program gratis kepada peserta didik pada satua PUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa	√	√	√	√	√	√	
		Penuntasan wajib belajar 15 tahun	√	√	√	√	√	√	
		Pelaksanaan bimbingan belajar singkat Paket A dan Paket B	√	√	√	√	√	√	
		Pelaksanaan bantuan biaya pendidikan tertentu, peserta didik berprestasi dan/atau penyandang masalah sosial	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas guru	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan minat baca masyarakat	√	√	√	√	√	√	
5.	Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas	Pembinaan SDM dan kelembagaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
		Pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial dan berkebutuhan khusus	√	√	√	√	√	√	
6.	Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak	√	√	√	√	√	√	
7.	Pengentasan kemiskinan	Penanggulangan penduduk miskin	√	√	√	√	√	√	
		Perlindungan sosial (Asuransi nelayan, BPJS kesehatan, atau BPJS tenaga kerja)	√	√	√	√	√	√	
		Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat perorangan dan kelompok berbasis potensi sumber daya lokal	√	√	√	√	√	√	
		Pemberian bantuan sarana usaha	√	√	√	√	√	√	
		Pemberian fasilitasi dalam mengakses perolehan permodalan	√	√	√	√	√	√	
		Pemberian perlindungan sosial dengan bantuan Iuran BPJS tenaga kerja	√	√	√	√	√	√	
8.	Penguatan fiskal daerah	Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak PBB dan pendapatan lain	√	√	√	√	√	√	
9.	Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah	Pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasiskan sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan promosi produk	√	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
		berbasis elektronik (digitalisasi).							
10.	Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Pengelolaan sumber daya alam oleh UMKM dan masyarakat	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan sentra pandai besi (pengrajin) di Kecamatan Bontomatene	-	√	-	-	-	-	
11.	Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan	√	√	√	√	√	√	
		Pembinaan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	√	√	√	√	√	√	
		Pembinaan nelayan dan fasilitasi sarana perikanan tangkap	√	√	√	√	√	√	
12.	Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM	Pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan peran UMKM, BUMDes, koperasi, dan/atau BUMD dalam pengelolaan pasca panen dan pengendalian harga komoditas	√	√	√	√	√	√	
13.	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila	√	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
14.	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan	Pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat	√	√	√	√	√	√	
		Pembinaan toleransi antar suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	√	√	√	√	√	√	
		Pembinaan kelembagaan agama	√	√	√	√	√	√	
		Fasilitasi kegiatan keagamaan	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan sistem pengajaran baca-tulis Al Qur'an	√	√	√	√	√	√	
		Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Hafidz Al-Qur'an	√	√	√	√	√	√	
15.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat	√	√	√	√	√	√	
16.	Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga	Penggalian dan pemeliharaan seni dan budaya	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kepedulian dan gotong royong	√	√	√	√	√	√	
		Pembinaan kelembagaan sosial, seni, dan budaya	√	√	√	√	√	√	
17.	Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan	√	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan						Keterangan
			Benteng (PKL)	Bontomatene (PPK Batangmata, PPL Batangmata Sapo, PPL Bungaiya, PPL Onto)	Buki (PPK Buki)	Bontomanai (PPK Polebunging, PPL Barugaiya, PPL Bonea Timur)	Bontoharu (PPK Bontobangun, PPL Bontosunggu)	Bontosikuyu (PPK Harapan, PPL Appatanah, PPL Lowa)	
		Peningkatan fasilitas pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan penerapan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	√	√	√	√	√	√	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lingkungan	√	√	√	√	√	√	
		Mitigasi bencana	√	√	√	√	√	√	
		Penanganan pasca bencana	√	√	√	√	√	√	

Keterangan :

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

3. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

Tabel 3. 15
Arah Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Kepulauan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
1.	Membangun desa, menata kota	Huluisasi SDA berbasis perwilayahan komoditas desa nelayan, desa wisata, desa tani dan desa koperasi			Desa Nelayan : Desa Ujung		Desa Nelayan : Desa Karumpa	
			Desa Wisata : Desa Kayuadi, Desa Jinato, Desa Rajuni, Desa Latondu, Desa Tarupa		Desa Wisata : Desa Bontobaru	Desa Wisata : Desa Majapahit	Desa Wisata : Desa Garaupa	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 227/IV/Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbais Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar
			Desa Tani : 1. Pengembangan Palawija : Desa Kayuadi, Desa Nyiur Indah	Desa Tani : 1. Pengembangan Padi : Desa Kembangragi, Desa Bontosaille, Desa Labuang Pamajang, Desa, Desa Ma'minasa, Desa Teluk Kampe; 3. Pengembangan Peternakan : Desa Tanamalala	Desa Tani : 1. Pengembangan Padi : Desa Ujung, Desa Bontobulaeng, Desa Bontomalling, Desa Lembang Baji, Desa Bontobaru	Desa Tani : 2. Pengembangan Palawija : Desa Bonerate; 2. Pengembangan Peternakan : Desa Sambali, Batu Bingkung	Desa Tani : 2. Pengembangan Palawija : Desa Kalaotoa	
		Hilirisasi SDA berbasis UMKM	√	√	√	√	√	
		Peningkatan pemasaran produk UMKM berbasis teknologi digital	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
		Pengembangan prasarana dasar permukiman, berupa air bersih, penanganan limbah, dan penataan permukiman	√	√	√	√	√	
		Pengembangan prasarana penanganan limbah	IPAL domestik skala individual	IPAL domestik skala individual	IPAL domestik skala individual	IPAL domestik skala individual	IPAL domestik skala individual	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pengembangan sistem transportasi terkoneksi dan terintegrasi	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan desa	√	√	√	√	√	
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan permukiman	√	√	√	√	√	
		Pembangunan dan rehabilitasi jembatan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan prasarana air baku dan jaringan irigasi	√	√	√	√	√	
		Pembangunan dan rehabilitasi tambatan perahu	√	√	√	√	√	
		Peningkatan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan / dermaga	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Kayuadi	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Jampea		Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Bonerate	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Kalaotoa	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pengembangan penataan kawasan pelabuhan pengumpan regional		Pelabuhan Pengumpan Regional Jampea				Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pengembangan penataan kawasan pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Kayuadi, Pelabuhan Jinato, Pelabuhan Pulau Tarupa,	Pelabuhan Jampea, Pelabuhan Pulau Bembe/Tanamalala, Pelabuhan Pulau Biropa	Pelabuhan Ujung Jampea	Pelabuhan Bonerate, Pelabuhan Pulau Kalao, Pelabuhan Pulau Komba-	Pelabuhan Kalaotoa, Pelabuhan Pulau Madu	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
			Pelabuhan Pulau Rajuni, Pelabuhan Pasitallu			komba, Pelabuhan Pulau Lambego		
		Peningkatan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas pokok serta penunjang pelabuhan perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan Kayuadi					Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan kualitas, fasilitas penunjang dan kapasitas depo bahan bakar	-	√	-	-	-	
		Pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik	PLTS Terpusat Latondu	PLTD Kembang Ragi			PLTS Terpusat Garaupa	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan kualitas dan kapasitas pembangkitan tenaga listrik	√	√			√	
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pembangkitan tenaga listrik	√	√	√	√	√	
		Pengembangan dan peningkatan kapasitas jaringan kabel serat optik	-	√	√	-	-	
		Peningkatan kualitas dan kapasitas bangunan sumber daya air dan jaringan irigasi		Jaringan irigasi primer, Jaringan irigasi sekunder, Jaringan irigasi tersier	Jaringan irigasi primer, Jaringan irigasi sekunder			Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Peningkatan kualitas dan kapasitas instalasi pengolahan air minum	√	√	√	√	√	Draft Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2044
		Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas Embung dan Dam jaringan air baku air minum		Embung Dolok				

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata alam dan buatan	√	√	√	√	√	
2.	Kemandirian pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah pusat	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi peternakan	-	√	-	√	-	
		Peningkatan produksi buah dan sayuran	√	√	√	√	√	
		Pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi	√	√	√	√	√	
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	√	-	-	-	√	
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	√	√	√	√	√	
		Pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis	√	√	√	√	√	
3.	Pelayanan kesehatan gratis	Pelayanan kesehatan gratis dengan bantuan iuran BPJS kesehatan	√	√	√	√	√	
		Pemeriksaan kesehatan keliling gratis sebagai tindak lanjut program pemerintah pusat	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan	√	√	√	√	√	
		Pelaksanaan program gratis kepada peserta didik pada satuan PUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa	√	√	√	√	√	
4.	Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT	Penuntasan wajib belajar 15 tahun	√	√	√	√	√	
		Pelaksanaan bimbingan belajar singkat Paket A dan Paket B	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
		Pelaksanaan bantuan biaya pendidikan tertentu, peserta didik berprestasi dan/atau penyandang masalah sosial	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas guru	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan minat baca masyarakat	√	√	√	√	√	
5.	Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas	Pembinaan SDM dan kelembagaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√	√	
		Pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial dan berkebutuhan khusus	√	√	√	√	√	
6.	Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH	Penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak	√	√	√	√	√	
7.	Pengentasan kemiskinan	Penanggulangan penduduk miskin	√	√	√	√	√	
		Perlindungan sosial (Asuransi nelayan, BPJS kesehatan, atau BPJS tenaga kerja)	√	√	√	√	√	
		Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat perorangan dan kelompok berbasis potensi sumber daya lokal	√	√	√	√	√	
		Pemberian bantuan sarana usaha	√	√	√	√	√	
		Pemberian fasilitasi dalam mengakses perolehan permodalan	√	√	√	√	√	
		Pemberian perlindungan sosial dengan bantuan Iuran BPJS tenaga kerja	√	√	√	√	√	
8.	Penguatan fiskal daerah	Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak PBB dan pendapatan lain	√	√	√	√	√	
9.	Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah	Pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
		kreatif dan/atau inovasi						
		Peningkatan promosi produk berbasis elektronik (digitalisasi).	√	√	√	√	√	
10.	Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Pengelolaan sumber daya alam oleh UMKM dan masyarakat	√	√	√	√	√	
11.	Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan	√	√	√	√	√	
		Pembinaan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	√	√	√	√	√	
		Pembinaan nelayan dan fasilitasi sarana perikanan tangkap	√	√	√	√	√	
12.	Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM	Pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan peran UMKM, BUMDes, koperasi, dan/atau BUMD dalam pengelolaan pasca panen dan pengendalian harga komoditas	√	√	√	√	√	
13.	Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila	√	√	√	√	√	
14.	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan	Pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat	√	√	√	√	√	
		Pembinaan toleransi antar suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	√	√	√	√	√	
		Pembinaan kelembagaan agama	√	√	√	√	√	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Highlight Intervensi	Kecamatan					Keterangan
			Takabonerate (PPK Batang, PPL Jinato, PPL Tambuna, PPL Rajuni)	Pasimasunggu (PPK Kembang Ragi)	Pasimasunggu Timur (PPK Bontobulaeng, PPL Bontomalling, PPL Bontobaru)	Pasimarannu (PPK Bonerate, PPL Lambego)	Pasilambena (PPK Kalaotoa, PPL Karumpa, PPL Pulo Madu, PPL Lembang Mate'ne)	
		Fasilitasi kegiatan keagamaan	√	√	√	√	√	
		Pengembangan sistem pengajaran baca-tulis Al Qur'an	√	√	√	√	√	
		Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Hafidz Al-Qur'an	√	√	√	√	√	
15.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat	√	√	√	√	√	
16.	Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga	Penggalan dan pemeliharaan seni dan budaya	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kepedulian dan gotong royong	√	√	√	√	√	
		Pembinaan kelembagaan sosial, seni, dan budaya	√	√	√	√	√	
17.	Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan	√	√	√	√	√	
		Peningkatan fasilitas pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	√	√	√	
		Peningkatan penerapan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	√	√	√	√	√	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lingkungan	√	√	√	√	√	
		Mitigasi bencana	√	√	√	√	√	
		Penanganan pasca bencana	√	√	√	√	√	

Keterangan : 1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
 2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
 3. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat indikasi program serta kerangka pendanaan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025–2029, yang di dalamnya berisi program-program dari organisasi perangkat daerah untuk menunjang keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah. Bab ini penting karena menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk lima tahun ke depan. Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam RPJMD diimplementasikan melalui program perangkat daerah yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak, sehingga perlu dirumuskan ke dalam kebijakan umum, program prioritas, serta kebutuhan pendanaannya. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta sumber pendanaan penunjang lainnya.

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, berbasis pada permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, perencanaan program juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2025-2030 yang merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan, dan unsur pemerintahan umum pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4. 1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).				
TOTAL ANGGARAN				1.011.578.257.281,49		1.087.054.915.000		1.047.285.006.000		1.052.685.006.000		1.058.085.006.000		1.063.485.006.000				
Urusan Pemerintahan Bidang XX				578.929.773.247		613.154.531.289		524.881.283.000		513.567.413.900		500.795.376.935		503.738.679.200				
X.XX.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <i>Outcome: Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah</i>	Persentase capaian realisasi anggaran OPD (%)	91,61	93,50	578.929.773.247	94,50	613.154.531.289	95,50	524.881.283.000	96,50	513.567.413.900	97,50	500.795.376.935	98,50	503.738.679.200	Semua OPD			
	Persentase capaian kinerja OPD (%)	85,68	88,50				89,50				90,50					91,50		92,50
1 - Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				233.107.035.889		265.859.698.171		315.856.250.100		332.013.917.400		336.708.460.100		354.168.152.900				
1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				68.558.136.400		71.833.856.000		89.830.962.400		92.864.774.500		91.422.768.400		96.358.022.900				
1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan <i>Outcome: Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah</i>	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	89,30	92,27	67.640.940.800	94,81	70.143.236.400	97,36	87.781.058.100	99,91	90.589.458.700	100	89.104.090.700	100	93.817.340.100	Disdikpo ra			
	Persentase warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98,25	98,88				99,52				100					100		100
	Persentase warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	48,49	56,70				63,19				69,68					76,17		76,93

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
<i>Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik</i> <i>Meningkatnya mutu satuan PAUD</i> <i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan</i>	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (%)	57,12	58,94		60,74		62,54		64,34		66,14		67,94		
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (%)	59,78	55,39		57,59		59,79		61,99		64,19		66,39		
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B (%)	75,57	82,11		87,91		95,65		100		100		100		
	Persentase ruang kelas PAUD kondisi bangunan baik (%)	47,75	47,75		48,30		48,87		49,46		50,07		50,70		
	Persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik (%)	43,76	43,76		44,31		44,88		45,47		46,08		46,71		
	Persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	42,22	44,20		44,75		45,32		45,91		46,52		47,15		
1.01.03 - Program Pengembangan Kurikulum Outcome: <i>Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan</i>	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal (%)	100	85,73	57.852.300	86,30	587.515.600	86,87	646.060.200	87,44	723.455.800	88,01	704.783.200	88,58	761.576.600	Disdikpo ra
1.01.04 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Outcome: <i>Meningkatnyam mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan</i>	Persentase guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (%)	77,36	73,18	620.040.700	73,75	754.594.000	74,34	903.095.000	74,95	1.000.546.100	74,94	1.043.500.700	75,57	1.154.137.600	Disdikpo ra
	Rasio guru terhadap rombongan belajar (PAUD dan SD)	1:1	1:1		1:1		1:1		1:1		1:1		1:1		
	Rasio guru terhadap mata pelajaran tingkat SMP	1:1	1:1		1:1		1:1		1:1		1:1		1:1		
1.01.05 - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Outcome:	Persentase satuan pendidikan berizin OSS yang terfasilitasi (%)	n.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disdikpo ra

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan																
1.01.06 - Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Outcome: Meningkatnya pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui satuan pendidikan	Persentase sekolah yang mengajarkan bahasa daerah dalam kurikulum (%)	100	100	239.302.600	100	348.510.000	100	500.749.100	100	551.313.900	100	570.393.800	100	624.968.600	Disdikpo ra	
1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				106.263.562.740		97.665.456.000		113.016.244.700		120.136.222.500		121.563.592.700		126.149.057.700		
1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100	89.568.863.440	100	82.303.309.800	100	89.693.600.100	100	93.767.832.100	100	93.649.042.200	100	94.862.905.100	Dinkes	
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	99,48	100				100				100					100
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100				100				100					100
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	94,03	100				100				100					100
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	92,23	100				100				100					100
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100				100				100					100

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara penderita <i>Hipertensi</i> yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	73,87	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Nilai akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama		Utama		Utama		Utama		Utama		Utama		
1.02.03 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan <i>Outcome: Meningkatnyam mutu dan distribusi tenaga kesehatan</i>	Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	0,66	0,68	16.068.732.300	0,70	14.746.330.200	0,71	22.660.356.400	0,74	25.655.967.900	0,76	27.201.297.800	0,80	30.476.297.400	Dinkes
	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 satuan penduduk	13,29	13,40		13,50		13,75		14,03		14,35		14,70		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1.02.04 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman <i>Outcome:</i> <i>Meningkatnya kepatuhan dan mutu pelayanan fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perizinan</i> <i>Outcome:</i> <i>Meningkatnya jumlah dan mutu tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar kesehatan dan persyaratan perizinan</i> <i>Meningkatnya jumlah dan mutu industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar keamanan pangan dan persyaratan perizinan</i>	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	75	77	463.583.000	80	400.000.000	85	439.533.900	90	478.661.100	95	471.125.500	100	543.527.200	
	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	27,24	32,24		42,24		52,24		72,24		82,24		92,24		
	Persentase industri makanan rumah tangga yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	64,80	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		
1.02.05 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan <i>Outcome:</i> <i>Meningkatnya kualitas layanan posyandu</i>	Persentase posyandu aktif (%)	98,40	98,66	162.384.000	98,92	215.816.000	99,18	222.754.300	99,44	233.761.400	99,70	242.127.200	100	266.328.000	Dinkes
1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				50.660.620.649		86.403.322.571		101.397.607.800		106.902.762.400		111.692.905.600		118.722.303.300	
1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) <i>Outcome:</i> <i>Meningkatnya perlindungan</i>	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	20,00	25,00	5.796.652.154,13	30,00	14.223.913.343	35,00	14.659.102.200	40,00	14.754.595.300	45,00	15.399.133.500	50,00	16.482.068.800	Dinas PUTR

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
masyarakat terhadap bencana longsor															
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai dan wilayah pantai kewenangan kabupaten (Angka, Ha)	0,113	0,1171		0,1171		0,1171		0,1171		0,1171		0,1171		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (Angka, Ha)	74,14	75,00		77,11		80,19		83,40		86,72		90,20		
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah (%)	2,27	2,40		2,50		2,58		2,63		2,69		2,78		
1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	43,20	44,50	1.378.250.842,13	44,50	4.054.388.983	45,60	1.537.202.200	51,00	1.521.738.600	53,00	1.744.276.800	55,00	1.860.611.400	Dinas PUTR
1.03.04 - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Outcome: Meningkatnya layanan persampahan regional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUTR
1.03.05 - Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air	100	100	10.258.923.000	100	200.000.000	100	5.265.066.400	100	5.443.008.500	100	5.111.526.700	100	5.155.669.800	Dinas PUTR

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Sistem Air Limbah <i>Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah</i>	limbah domestik (%)														
1.03.06 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem drainase</i>	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik (%)	97,22	97,33	1.362.766.000	97,43	5.797.480.000	97,51	6.371.086.200	97,56	7.090.560.500	97,63	7.439.324.700	97,71	7.741.897.700	Dinas PUTR
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (%)	27,00	30,00		33,00		36,00		39,00		42,00		45,00		
1.03.07 - Program Pengembangan Permukiman <i>Outcome: Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman</i>		n.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUTR
1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung <i>Outcome: Meningkatnya kualitas bagunan gedung</i>	Proporsi bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) kewenangan kabupaten yang laik fungsi (%)	34,29	34,80	7.185.211.442,13	35,00	5.344.554.630	36,00	10.021.643.900	37,00	14.118.698.700	38,00	17.136.450.400	39,00	18.027.232.100	Dinas PUTR
1.03.09 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya <i>Outcome: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata</i>	Rasio kepatuhan IMB kabupaten (Angka)	51,06	51,66	1.538.515.000	52,06	1.500.000.000	53,06	6.851.495.800	54,06	7.661.777.800	57,06	10.554.713.100	58,06	14.128.275.300	Dinas PUTR
1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan <i>Outcome: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman</i>	Persentase penanganan jalan kewenangan kabupaten (%)	47,20	48,00	22.812.883.026,37	49,00	54.250.000.115	51,00	55.686.483.900	53,00	55.171.700.600	55,00	53.219.241.300	57,00	54.205.361.500	Dinas PUTR

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
	Persentase penanganan jembatan kewenangan kabupaten (%)	78,00	78,50		79,00		80,00		81,00		82,00		83,00		
1.03.11 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi Outcome: Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Outcome: Menurunnya kecelakaan konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Angka)	10 : 1	10 : 1	138.705.842,13	10 : 1	325.000.000	10 : 1	212.574.500	10 : 1	233.911.900	10 : 1	225.043.900	10 : 1	238.389.400	Dinas PUTR
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Angka)	10 : 0	10 : 0		10 : 0		10 : 0		10 : 0		10 : 0		10 : 0		
1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang (%)	89,61	90,00	188.713.342,13	91,13	707.985.500	91,91	792.952.700	92,69	906.770.500	93,48	863.195.200	94,27	882.797.300	Dinas PUTR
1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				4.250.273.500		5.600.473.000		7.866.357.700		8.226.735.500		8.210.046.200		8.916.906.900	
1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	67.570.000	5	1.000.000.000	10	1.156.107.000	10	1.248.504.200	10	1.264.101.300	11	1.355.022.100	Dinas PKP
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	0		0		0		0		0		0		
1.04.03 - Program Kawasan Permukiman Outcome:	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang	6,320	7,202	83.155.500	7,202	741.000.000	7,321	810.087.500	7,439	792.570.000	7,557	746.073.500	7,675	752.237.600	Dinas PKP

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	ditangani (%)														
1.04.04 - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Outcome: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,86	0	0	0,608	350.000.000	0,611	1.056.547.600	0,614	1.165.431.200	0,618	1.242.989.000	0,621	1.300.839.100	Dinas PKP
1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase jumlah rumah terlayani PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	n.a	0,31	4.079.780.000	0,31	3.479.473.000	0,63	4.814.422.300	0,94	4.988.981.100	1,26	4.925.174.600	1,57	5.474.516.000	Dinas PKP
1.04.06 - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Outcome: Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian standar teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rekemondasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan (%)	100	100	19.768.000	100	30.000.000	100	29.193.300	100	31.249.000	100	31.707.800	100	34.292.100	Dinas PKP
1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan				1.657.502.300		1.972.827.600		2.056.507.000		2.119.594.700		2.104.049.800		2.229.716.900	

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Masyarakat															
1.05.02 - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Outcome: Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Outcome: Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Outcome: Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	50,00	75,00	378.155.400	80,00	482.470.000	80,00	493.665.200	90,00	504.220.900	90,00	482.624.600	100	507.380.600	Satpol PP, Damkar
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	97,00	75,00		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan perlindungan masyarakat (%)	0,63	0,63		0,63		0,63		0,63		0,63		0,63		
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	50		50		50		50		50		50		
1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan informasi rawan bencana Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	99,83	100	1.046.454.500	100	1.188.319.000	100	1.229.481.400	100	1.278.578.500	100	1.298.282.500	100	1.388.701.400	BPBD
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (%)	99,23	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	99,23	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
penyelamatan dan evakuasi korban bencana	bencana (%)														
Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penanganan pasca bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanganan pasca bencana (%)	99,93	100		100		100		100		100		100		
1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	85,00	75,00	232.892.400	75,00	302.038.600	80,00	333.360.400	85,00	336.795.300	90,00	323.142.700	100	333.634.900	Satpol PP, Damkar
Outcome: Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di wilayah kabupaten	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran (menit)	8,35	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		
1.06 - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				1.716.940.300		2.383.763.000		1.688.570.500		1.763.827.800		1.715.097.400		1.792.145.200	
1.06.02 - Program Pemberdayaan Sosial Outcome: Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	22,5	23,6	48.925.000	24,7	75.000.000	25,8	75.928.600	26,9	76.568.100	28,00	75.228.800	28,00	76.942.300	Dinsos
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	0	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1.06.03 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan <i>Outcome: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan</i>	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinsos
1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial <i>Outcome: Meningkatnya rehabilitasi sosial</i>	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	936.031.600	100	1.521.600.000	100	794.267.900	100	783.243.100	100	734.015.500	100	741.346.900	Dinsos
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	53,6	56,1		58,6		60,1		62,6		64,1		64,1		
1.06.05 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	73,28	76,4	554.622.000	78,5	377.163.000	80,6	396.355.300	82,7	442.226.800	84,8	426.042.000	84,8	435.776.400	Dinsos

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Outcome: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,63	1,16		1,74		2,32		2,61		2,90		2,90		
1.06.06 - Program Penanganan Bencana Outcome: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	134.141.700	100	160.000.000	100	182.785.700	100	188.173.200	100	187.537.200	100	208.730.400	Dinsos
1.06.07 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Outcome: Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	1	1	43.220.000,	1	250.000.000	1	239.233.000	1	273.616.600	1	292.273.900	1	329.349.200	Dinsos
2 - Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				25.656.931.886		19.872.846.700		20.467.193.100		20.543.107.400		20.967.862.700		22.648.830.800	
2.07 - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				1.136.542.000		1.485.416.500		1.482.972.300		1.502.761.800		1.432.488.900		1.462.644.300	
2.07.02 - Program Perencanaan Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya efektivitas implementasi kebijakan ketenagakerjaan sesuai arah perencanaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	0	0	100	21.279.500	100	22.166.600	100	22.394.000	100	22.510.100	100	23.264.000	Dinperid TK
2.07.03 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Outcome: Meningkatnya kualitas dan	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	3,01	3,20	111.520.000	3,55	350.000.000	3,80	359.493.300	4,09	362.952.700	4,36	350.051.800	4,63	362.079.500	Dinperid TK
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	56.955.917, 80	57.750.000, 80		58.817.959, 80		59.748.980, 80		60.680.001, 80		61.611.022, 80		62.542.043, 80		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
<i>produktivitas tenaga kerja</i>															
2.07.04 - Program Penempatan Tenaga Kerja <i>Outcome: Meningkatnya akses tenaga kerja terhadap peluang kerja melalui fasilitasi pemerintah</i>	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)	11,57	12,00	25.022.000	12,46	55.000.000	13,34	60.939.000	14,23	83.006.800	15,11	81.686.500	16,00	85.848.500	Dinperid TK
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	72,5	73,0		74,0		75,5		77,0		78,5		80,0		
2.07.05 - Program Hubungan Industrial <i>Outcome: Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan tata kelola kerja yang layak melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan</i>	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	36,72	36,92	1.000.000.000	37,72	1.059.137.000	38,72	1.040.373.400	39,72	1.034.408.300	40,72	978.240.500	41,72	991.452.300	Dinperid TK
2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				457.225.000		338.835.200		451.339.650		430.953.600		463.676.600		496.097.600	
2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan</i>	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	26,00	27,00	362.950.000	30,00	29.961.000	35,00	272.326.900	40,00	246.946.700	45,00	280.607.800	60,00	304.697.800	DP3AP2 KB

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2.08.03 - Program Perlindungan Perempuan <i>Outcome: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan</i>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	43,40	43,40	0	44,80	108.423.200	45,00	6.970.000	46,50	7.642.200	46,60	7.839.100	46,60	9.229.600	DP3AP2 KB
	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100		100		100		100		100		100		
2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga <i>Outcome: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak</i>	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (Angka)	0	0	7.274.200	0	49.828.000	1	11.302.800	1	11.833.900	1	16.335.900	1	18.693.200	DP3AP2 KB
2.08.05 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak <i>Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pembangunan responsif gender</i>	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan (%)	0,60	0,60	9.836.000	0,60	25.290.000	0,60	22.924.400	0,60	23.846.200	0,60	23.618.200	0,60	25.019.800	DP3AP2 KB
2.08.06 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) <i>Outcome: Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif</i>	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Angka)	40,00	40,00	0	50,00	55.943.000	60,02	58.255.750	60,10	61.728.000	60,15	59.872.900	60,20	61.604.500	DP3AP2 KB

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
2.08.07 - Program Perlindungan Khusus Anak <i>Outcome: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak</i>	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	77.164.800	100	69.390.000	100	79.559.800	100	78.956.600	100	75.402.700	100	76.852.700	DP3AP2 KB
2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				783.940.400		522.970.000		480.866.100		482.328.600		461.732.300		491.227.500	
2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan <i>Outcome: Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</i>	Persentase cadangan pangan (%)	0,19	0,19	0	0,19	0	0,20	7.604.800	0,20	7.865.200	0,21	8.616.100	0,21	9.874.800	Distan KP
2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat <i>Outcome: Meningkatnya ketersediaan pangan utama secara berkelanjutan</i>	Persentase ketersediaan pangan (%)	111,1	111,1	768.408.900	109,8	457.970.000	108,4	455.434.300	107,1	455.087.700	105,7	434.219.200	104,5	460.216.300	Distan KP
2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan <i>Outcome: Meningkatnya penanganan</i>	Persentase desa/ kelurahan rentan rawan pangan (%)	19,32	17,04	7.362.500	15,90	30.000.000	14,77	9.676.600	13,64	9.721.700	12,50	9.190.500	11,36	10.700.800	Distan KP

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
kerawanan pangan															
2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	100	8.169.000	100	35.000.000	100	8.150.400	100	9.654.000	100	9.706.500	100	10.435.600	Distan KP
2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				2.795.705.984		1.192.234.000		647.008.200		647.377.700		585.925.500		741.592.800	
2.10.02 - Program Pengelolaan Izin Lokasi Outcome: -	-	n.a	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	Dinas PUTR
2.10.03 - Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Outcome: Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUTR
2.10.04 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	0	0	0	0	60,00	6.540.900	70,00	6.273.900	80,00	7.662.600	90,00	4.166.600	Dinas PUTR
2.10.05 - Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan (%)	67,00	68,50	2.765.446.984,25	70,00	1.175.680.000	73,00	560.845.200	76,00	556.789.200	79,00	493.301.800	83,00	646.176.200	Dinas PUTR

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
santunan tanah untuk pembangunan															
2.10.06 - Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luas Tanah Obyek Land reform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee (Hektar)	0	2,00	9.905.000	2,50	5.888.000	3,00	12.129.100	3,50	13.947.900	4,00	15.035.300	4,50	17.135.100	Dinas PUTR
2.10.07 - Program Penetapan Tanah Ulayat Outcome: Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase luas lahan ulayat yang di tetapkan (%)	0	0	0	0	0	1	5.507.000	2	5.416.900	2	5.189.700	2	5.338.800	Dinas PUTR
2.10.08 - Program Pengelolaan Tanah Kosong Outcome: Meningkatnya aset tanah pemda yang bersertifikat Outcome: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase aset tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disertifikatkan (%)	0	0	20.354.000	12	10.666.000	14	12.367.500	16	12.684.800	18	12.411.100	20	14.485.500	Dinas PUTR
	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	68,00	69,50		71,00		74,00		78,00		83,00		86,00		
2.10.09 - Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Outcome: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase penyelesaian dan penerbitan izin membuka tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (%)	0	0	0	0	0	60,00	8.370.500	65,00	11.248.100	70,00	13.323.300	75,00	14.479.800	Dinas PUTR
2.10.10 - Program Penatagunaan Tanah Outcome: Meningkatnya tertib pertanahan dan	Persentase pemanfaatan tanah sesuai peruntukan tanahnya di atas izin lokasi (%)	71,00	71,00	0	0	0	77,00	41.248.000	81,00	41.016.900	86,00	39.001.700	92,00	39.810.800	Dinas PUTR

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
kepastian hukum bagi pemegang ha katas tanah															
2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				6.475.239.500		2.167.934.500		4.410.490.100		4.131.023.800		3.769.959.400		3.661.595.000	
2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup Outcome: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	n/a	terinte grasi	21.557.400	terinte grasi	211.932.500	terinte grasi	210.392.200	terinte grasi	227.402.100	terinte grasi	269.290.200	terinte grasi	263.996.600	DLH
2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Outcome: Meningkatnya persentase kualitas air pada titik pantau yang memenuhi baku mutu lingkungan secara berkelanjutan	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan (%)	n/a	75,49	473.826.900	75,49	556.750.000	75,69	197.122.200	75,89	205.575.200	76,09	193.741.800	76,09	249.350.900	DLH
	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu (%)	n/a	80,05		80,05		80,35		80,65		80,95		80,95		
2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Outcome: Meningkatnya luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan (%)	1,4	1,38	2.142.220.300	1,38	614.713.000	1,38	651.616.200	1,38	627.400.700	1,38	609.903.900	1,38	628.957.300	DLH

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
2.11.05 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <i>Outcome: Meningkatnya proporsi limbah B3 yang ditangani sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan</i>	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya (%)	100	100	5.450.600	0	0	100	7.639.500	100	8.403.700	100	8.689.300	100	9.469.200	DLH
2.11.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) <i>Outcome: Meningkatnya persentase kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup</i>	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	47,14	48,00	5.008.900	48,00	111.759.000	50,00	44.536.800	52,00	45.705.200	55,00	53.082.300	57,00	54.414.100	DLH
2.11.07 - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH <i>Outcome: Meningkatnya kepastian MHA dan kearifan lokal, pengetahuan</i>	Persentase MHA dan kearifan lokal yang terkait PPLH, yang difasilitasi (%)	n/a	0	0	1,14	32.682.000	2,27	19.811.100	3,41	21.625.300	4,55	25.828.300	5,68	31.451.100	DLH

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
<i>tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>															
2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Outcome: <i>Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup</i>	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup (%)	20	20	6.182.000	20	65.374.000	20	27.634.200	20	40.018.900	20	49.320.300	20	52.935.400	DLH
2.11.09 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Outcome: <i>Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan (%)	33,33	33,33	18.508.000	33,33	16.646.000	33,33	24.958.700	33,33	25.115.600	33,33	24.059.800	33,33	24.638.200	DLH
2.11.10 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Outcome: <i>Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup</i>	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah daerah kabupaten yang ditangani (%)	100	100	2.652.000	100	38.128.000	100	4.816.900	100	5.242.800	100	6.238.300	100	6.634.200	DLH
2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan Outcome: <i>Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah</i>	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah (%)	n/a	2	3.799.833.400	2	519.950.000	3	3.221.962.300	4	2.924.534.300	5	2.529.805.200	6	2.339.748.000	DLH

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Outcome: Meningkatnya kemandirian desa/ kelurahan dalam pengelolaan sampah	Persentase desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (%)	n/a	3,97		3,97		6,32		8,86		11,39		13,92		
2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				168.441.400		303.000.000		216.196.600		247.033.000		263.405.300		300.932.100	
2.12.02 - Program Pendaftaran Penduduk Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (%)	4,43	9,50	88.329.100	15,00	160.000.000	17,00	112.817.300	20,00	125.512.000	25,00	131.904.300	30,00	147.425.200	Disdukc apil
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	52,64	52,70		53,00		53,50		54,00		54,50		55,00		
	Cakupan kepemilikan KTP elektronik (%)	94,31	94,50		95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		
2.12.03 - Program Pencatatan Sipil Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan (%)	100	100	33.042.200	100	60.000.000	100	36.404.400	100	43.774.100	100	51.875.200	100	62.666.800	Disdukc apil
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	99,66	99,66		99,69		99,70		99,70		99,80		100		
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	93,25	93,25		93,50		94,00		95,00		96,00		97,00		
	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
2.12.04 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <i>Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan</i>	Persentase OPD yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan (%)	62,96	63,00	42.101.200	63,00	72.000.000	63,50	47.701.000	64,00	57.056.900	64,50	58.582.900	70,00	68.037.600	Disdukc apil
2.12.05 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan <i>Outcome: Meningkatnya kualitas profil kependudukan</i>	Persentase data profil kependudukan yang disusun tepat waktu (%)	100	100	4.968.900	100	11.000.000	100	19.273.900	100	20.690.000	100	21.042.900	100	22.802.500	Disdukc apil
2.13 – Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				710.533.500		1.125.000.000		1.113.358.200		1.106.180.400		1.052.252.200		1.170.482.100	
2.13.02 – Program Penataan Desa <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penataan desa</i>	Persentase fasilitasi penataan desa (%)	0	100	2.700.000	0	0	100	10.485.800	100	11.212.200	100	10.504.300	100	11.117.700	Dinas PMD
2.13.03 – Program Peningkatan Kerja Sama Desa <i>Outcome: Meningkatnya efektivitas kerja sama desa</i>	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa (%)	0	0	0	4,97	35.000.000	4,97	47.765.900	4,97	52.646.300	4,97	54.868.900	4,97	63.559.800	Dinas PMD
2.13.04 – Program Administrasi Pemerintahan Desa <i>Outcome: Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan anggota BPD</i>	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	0	5,67	190.143.200	5,67	595.000.000	5,67	524.395.300	5,67	514.882.100	5,67	483.676.600	5,67	488.001.400	Dinas PMD

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Outcome: Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset desa	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik (%)	97,75	100		100		100		100		100		100		
2.13.05 – Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Outcome: Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	4,93	9,88	517.690.300	9,88	495.000.000	9,88	530.711.200	9,88	527.439.800	9,88	503.202.400	9,88	607.803.200	Dinas PMD
2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3.162.330.000		3.066.167.500		3.873.888.300		3.750.789.800		4.295.554.300		4.451.528.400	
2.14.02 - Program Pengendalian Penduduk Outcome: Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	27,30	26,10	655.200.000	26,10	180.512.500	25,50	658.360.200	25,30	647.699.800	25,10	607.711.700	25,20	701.210.400	DP3AP2 KB
	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	2,10	2,05		2,10		2,10		2,10		2,10				
2.14.03 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	27,70	24,00	1.715.255.000	22,00	2.094.655.000	22,00	2.277.671.800	21,91	2.170.488.500	21,70	2.801.062.000	21,25	2.845.143.300	DP3AP2 KB

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Angka prevalensi kontrasepsi modern / <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	65,35	56,15		57,75		58,05		58,50		59,00		59,50		
2.14.04 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) <i>Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	82,99	83,45	791.875.000	84,50	791.000.000	85,90	937.856.300	86,50	932.601.500	87,90	886.780.600	88,90	905.174.700	DP3AP2 KB
2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				4.426.948.000		2.825.000.000		1.542.567.100		1.683.511.500		1.744.890.700		2.564.319.700	
2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) <i>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat</i>	Kinerja lalu lintas (<i>VC Ratio</i>)	0,28	0,28	989.536.000	0,32	1.325.000.000	0,37	538.768.000	0,43	616.400.500	0,49	662.431.400	0,56	753.663.200	Dishub
2.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran <i>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut</i>	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang beroperasi dan layak fungsi (%)	44,83	44,83	3.437.412.000	52,29	1.500.000.000	56,90	1.002.921.100	62,07	1.066.262.600	67,24	1.081.674.800	72,41	1.809.877.100	Dishub
2.15.04 - Program Pengelolaan Penerbangan <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pembangunan fasilitas pendaratan dan lepas landas</i>	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan (%)	0	0	0	0	0	100	878.000	100	848.400	100	784.500	100	779.400	Dishub

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
helikopter															
2.15.05 - Program Pengelolaan Perkeretaapian Outcome: Meningkatnya jumlah dokumen perkeretaapian	Jumlah dokumen perkeretaapian yang tersusun (dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dishub
2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				863.128.052		769.000.000		683.190.900		625.479.300		751.074.600		751.809.200	
2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Outcome: Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta program prioritas pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (%)	68,9	70,0	507.774.750	72,0	472.000.000	75,0	228.742.000	75,0	223.054.300	75,0	412.881.000	80,0	449.553.200	Diskomi nfo SP
2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Outcome: Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses layanan publik berbasis digital yang terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	355.353.302	100	297.000.000	100	454.448.900	100	402.425.000	100	338.193.600	100	302.256.000	Diskomi nfo SP
2.17 - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				754.517.000		966.826.000		1.587.881.300		1.734.441.100		1.899.479.400		2.123.244.100	
2.17.02 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Outcome: Meningkatnya	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) (%)	46	46	0	70	5.378.500	80	6.003.400	90	7.133.000	100	11.742.400	100	12.442.400	Disdag KUKM

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
<i>kualitas dan kuantitas koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)</i>															
2.17.03 - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi</i>	Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dibanding tahun sebelumnya (%)	47	47	0	50	28.447.500	50	89.000.000	50	110.000.600	50	120.000.000	50	150.000.000	Disdag KUKM
2.17.04 - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi <i>Outcome: Meningkatnya kesehatan dan kualitas kelembagaan KSP/USP koperasi</i>	Persentase koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi (%)	24	24	0	24	0	60	28.698.200	65	38.435.900	70	45.442.000	70	54.977.700	Disdag KUKM
2.17.05 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian <i>Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian</i>	Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial koperasi (%)	17	17	0	17	0	50	103.279.000	60	125.614.800	70	165.266.400	70	191.876.200	Disdag KUKM
2.17.06 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi <i>Outcome: Meningkatnya kinerja usaha koperasi sektor produksi pasca pemberdayaan</i>	Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan (%)	20	20	287.517.000	30	25.000.000	40	225.468.400	50	241.432.600	60	245.050.600	60	265.089.100	Disdag KUKM
2.17.07 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) <i>Outcome: Meningkatnya</i>	Persentase UMKM binaan yang naik kelas (%)	6	7	100.000.000	8	121.000.000	9	341.626.900	10	427.497.500	10	445.039.400	11	446.895.700	Disdag KUKM
	Persentase UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pasca panen (%)	63	63		64		64		65		65		70		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
<i>kemandirian dan produktivitas UMKM binaan</i>	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya (%)	1	2		3		5		5		6		7		
2.17.08 - Program Pengembangan UMKM Outcome: <i>Meningkatnya daya saing UMKM</i>	Persentase UMKM yang mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (%)	0,5	1	367.000.000	2	787.000.000	4	793.805.400	5	784.326.700	6	866.938.600	7	1.001.963.000	Disdag KUKM
	Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital (%)	0,5	1,5		2		2,5		3		5		10		
2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				326.430.500		676.040.000		649.761.350		660.671.600		641.932.400		671.190.600	
2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Outcome: <i>Meningkatnya kemudahan berinvestasi</i>	Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal (%)	0	1	4.601.000	1	50.000.000	1	58.862.250	1	62.745.700	1	63.448.800	1	68.422.600	Dinas PTSP
2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal Outcome: <i>Meningkatnya jumlah investor</i>	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Orang/Lembaga)	359	368	131.186.100	381	125.000.000	403	215.627.500	425	213.205.000	447	201.638.500	469	204.766.800	Dinas PTSP
2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal Outcome: <i>Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, dan sesuai standar</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	100	100	75.986.100	100	125.000.000	100	59.065.300	100	64.253.800	100	66.304.500	100	72.992.200	Dinas PTSP
2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Outcome:	Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman	26,74	32,42	99.677.300	38,10	351.040.000	49,45	303.538.800	60,81	307.715.600	72,17	298.263.900	83,53	310.445.000	Dinas PTSP

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha	Modal (LKPM) (%)														
2.18.06 - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Outcome: Meningkatnya pemanfaatan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal (%)	100	100	14.980.000	100	25.000.000	100	12.667.500	100	12.751.500	100	12.276.700	100	14.564.000	Dinas PTSP
2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				2.228.539.200		3.599.839.000		2.191.439.400		2.337.596.500		2.395.240.300		2.476.778.000	
2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Outcome: Meningkatnya pembinaan dan kemandirian organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang dibina (%)	30,00	29,80	495.000.000	30,00	220.059.000	30,20	328.391.600	30,40	377.532.600	30,60	368.735.300	30,80	375.997.600	Disdikpo ra
2.19.03 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Outcome: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun (Orang)	17	16	1.572.539.200	17	2.942.395.000	18	1.627.829.100	19	1.676.722.800	20	1.712.615.200	21	1.773.673.100	Disdikpo ra
	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun (Medali)	19	18		19		20		21		22		23		
2.19.04 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Outcome:	Cakupan pembinaan organisasi kepramukaan (%)	33,33	33,49	161.000.000	33,84	437.385.000	34,37	235.218.700	34,92	283.341.100	35,49	313.889.800	36,08	327.107.300	Disdikpo ra

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Meningkatnya pembinaan, kualitas dan kemandirian organisasi kepramukaan															
2.20 - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				109.376.950		170.000.000		104.717.400		102.414.200		96.231.500		98.021.900	
2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Outcome: Meningkatnya kualitas tata kelola data statistik daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia	Persentase pemenuhan data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia (%)	21,39	45,00	109.376.950	50,00	170.000.000	60,00	104.717.400	77,00	102.414.200	83,00	96.231.500	100	98.021.900	Diskomi nfo SP
2.21 - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				224.683.700		200.000.000		243.459.000		128.776.530		102.854.160		176.931.790	
2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Outcome: Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintahan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	74,5	77,5	224.683.700	80,0	200.000.000	82,5	243.459.000	85,0	241.888.900	90,0	239.398.400	100	246.465.500	Diskomi nfo SP
2.22 - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				929.694.100		360.000.000		588.547.400		631.317.200		632.441.800		676.864.000	
2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	0	20,00	117.498.300	20,00	100.000.000	20,00	123.972.600	20,00	123.978.000	20,00	117.974.300	20,00	119.947.500	Disparb ud
2.22.03 - Program Pengembangan	Persentase kesenian tradisional yang	0	0	0	10	100.000.000	6	24.730.100	7	25.125.400	8	24.384.200	9	25.384.400	Disparb ud

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Kesenian Tradisional <i>Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional</i>	dilestarikan dan dikembangkan (%)														
2.22.04 - Program Pembinaan Sejarah <i>Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah</i>	Tingkat partisipasi masyarakat terhdap tinjauan sejarah lokal (%)	0	0	0	0	0	20,00	57.180.400	20,00	64.006.200	20,00	67.092.600	20,00	75.088.900	Disparb ud
2.22.05 - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya <i>Outcome: Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan</i>	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan (%)	84,21	84,21	0	86,84	100.000.000	86,84	130.719.900	89,47	142.878.100	89,47	138.774.700	92,11	144.655.800	Disparb ud
	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	30,00	30,00		30,00		40,00		40,00		50,00		50,00		
2.22.06 - Program Pengelolaan Permuseuman <i>Outcome: Meningkatnya tata kelola museum</i>	Persentase kunjungan wisatawan ke museum (%)	110,16	110	812.195.800	110	60.000.000	110	251.944.400	110	275.329.500	110	284.216.000	110	311.787.400	Disparb ud
2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				53.311.600		54.239.000		63.151.700		77.434.800		86.782.600		92.995.700	
2.23.02 - Program Pembinaan Perpustakaan <i>Outcome: Meningkatnya kunjungan perpustakaan daerah Outcome: Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa sesuai standar</i>	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	14.421	14.471	53.311.600	14.521	54.239.000	14.621	59.063.600	14.721	71.509.400	14.831	79.476.800	14.921	83.923.400	DPK
	Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan (%)	40,69	50,22		50,47		61,51		73,82		86,75		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
2.23.03 - Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno <i>Outcome: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno</i>	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (%)	0	0	0	0	0	40	4.088.100	60	5.925.400	80	7.305.800	100	9.072.300	DPK
2.24 - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				50.345.000		50.345.000		136.358.100		149.903.600		155.396.500		171.042.300	
2.24.02 - Program Pengelolaan Arsip <i>Outcome: Meningkatnya tata kelola arsip yang baku bagi Perangkat Daerah</i>	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	26,0	15,7	24.473.800	28,9	30.345.000	42,1	97.635.100	55,2	107.247.300	73,6	111.106.700	100	122.230.800	DPK
2.24.03 - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip <i>Outcome: Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK</i>	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	0	10,0	25.871.200	10,0	20.000.000	40,0	38.723.000	60,0	42.656.300	80,0	44.289.800	100	48.811.500	DPK
2.24.04 - Program Perizinan Penggunaan Arsip <i>Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup</i>	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPK
3 - Urusan Pemerintahan Pilihan				10.090.201.422		11.895.863.700		14.524.764.100		16.241.209.000		17.634.327.900		19.132.740.700	
3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				2.544.121.972		2.995.898.700		2.117.168.750		2.405.446.500		2.586.668.400		3.019.261.000	
3.25.03 - Program Pengelolaan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	25.610,40	27.519,34	2.254.948.772	29.720,89	1.281.511.700	31.801,35	1.012.031.350	33.709,43	1.089.393.000	35.394,91	1.140.187.700	36.810,70	1.354.300.300	Disper

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Perikanan Tangkap <i>Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap</i>															
3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <i>Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya</i>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	507,97	558,77	225.855.900	642,58	715.570.000	738,97	407.265.700	849,81	615.583.100	977,29	774.577.200	1.123,88	973.469.700	Disper
3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan <i>Outcome: Meningkatnya kepatuhan izin usaha perikanan</i>	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	15,84	16,58	13.279.800	17,94	38.675.000	19,30	15.943.500	20,67	18.160.300	22,03	19.340.400	23,40	21.743.600	Disper
3.25.06 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan <i>Outcome: Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan</i>	Jumlah produksi hasil olahan perikanan (ton)	248,00	272,80	50.037.500	300,08	960.142.000	330,09	681.928.200	363,09	682.310.100	417,56	652.563.100	480,19	669.747.400	Disper
3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				785.191.000		950.000.000		1.206.846.050		1.352.103.600		1.690.238.300		1.955.288.400	
3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata <i>Outcome: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata</i>	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	9,04	10,00	468.812.000	10,00	300.000.000	10,00	559.950.200	10,00	587.495.300	10,00	743.476.000	10,00	902.874.100	Disparbud
3.26.03 - Program Pemasaran Pariwisata <i>Outcome: Meningkatnya jangkauan</i>	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%)	42,00	25,00	274.968.000	25,00	300.000.000	33,30	453.376.600	42,00	537.180.600	50,00	588.506.900	50,00	675.820.700	Disparbud

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
<i>pemasaran pariwisata</i>															
3.26.04 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual <i>Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif</i>	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual (%)	0	0	0	1	100.000.000	2	29.676.150	3	28.990.900	4	27.093.500	5	27.197.500	Disparb ud
3.26.05 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <i>Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</i>	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	8,00	15,00	41.411.000	15,00	250.000.000	23,00	163.843.100	31,00	198.436.800	38,00	331.161.900	46,00	349.396.100	Disparb ud
3.27- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				5.753.198.450		6.157.981.000		7.232.568.200		8.223.347.600		9.440.129.800		10.003.368.500	
3.27.02 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <i>Outcome: Meningkatnya jumlah kelompok tani dan ternak yang memperoleh dukungan sarana produksi</i>	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan (%)	4,32	4,32	4.208.809.200	4,36	3.712.291.000	4,41	4.777.669.200	4,45	4.935.411.000	4,50	4.858.719.400	4,54	5.119.679.400	Distan KP
3.27.03 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi sektor tanaman pangan (Ton)	18.949,22	18.949,22	595.555.000	19.138,71	2.000.000.000	19.330,10	1.818.050.700	19.523,40	2.634.373.400	19.718,63	3.954.155.800	19.915,82	4.249.013.100	Distan KP

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Outcome: Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan	Jumlah produksi sektor tanaman hortikultura (Ton)	7.139,75	7.139,75		7.211,15		7.283,26		7.356,09		7.429,65		7.503,95		
	Jumlah produksi sektor perkebunan (Ton)	33.154,35	33.154,35		33.485,89		33.820,75		34.158,96		34.500,55		34.845,56		
	Jumlah produksi sektor peternakan (Kg)	525.264,00	525.264,00		530.516,64		535.821,81		541.180,02		546.591,82		552.057,74		
3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Outcome: Menurunnya jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular dan tidak menular	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular (%)	30,86	30,86	326.935.450	31,17	260.000.000	31,48	288.248.900	31,80	287.030.200	32,11	273.283.800	32,43	279.296.500	Distan KP
	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular (%)	30,86	31,00		31,31		31,62		31,94		32,26		32,58		
3.27.05 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Outcome: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian (%)	59,69	59,69	55.469.000	59,95	60.690.000	60,22	52.420.400	60,49	62.363.300	60,76	64.467.000	61,03	59.608.500	Distan KP
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	59,69	59,69		60,29		60,89		61,50		62,11		62,73		
3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian Outcome: Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian dan peternakan	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan (%)	n.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Distan KP
3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	1,52	3,03	566.429.800	4,55	125.000.000	6,06	296.179.000	7,58	304.169.700	9,09	289.503.800	10,61	295.771.000	Distan KP

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian															
Outcome: Meningkatnya jumlah koperasi tani yang aktif dan beroperasi	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi (%)	0	1,14		5,68		11,36		17,05		22,73		28,41		
3.30 - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				50.000.000		796.984.000		554.383.400		627.065.300		628.609.000		784.963.000	
3.30.02 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Outcome: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi (%)	100	0	0	0	0	25	3.813.000	25	5.526.700	25	6.814.200	25	8.461.800	Disdag KUKM
3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (%)	100	0	0	25	60.984.000	25	144.972.900	25	154.293.000	25	155.816.800	25	167.845.000	Disdag KUKM
3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	100	25	50.000.000	25	435.500.000	25	224.902.500	25	235.239.100	25	227.474.000	25	324.666.600	Disdag KUKM

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor <i>Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor</i>	Nilai ekspor perdagangan	75	0	0	25	159.500.000	25	54.657.500	25	55.432.000	25	53.679.600	25	55.731.300	Disdag KUKM
3.30.06 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen <i>Outcome: Meningkatnya kualitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sesuai standar</i>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	75,2	0	0	25	141.000.000	25	45.884.000	25	72.586.300	25	72.473.200	25	100.561.000	Disdag KUKM
3.30.07 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri <i>Outcome: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</i>	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan (%)	25	0	0	0	0	25	80.153.500	25	103.988.200	25	112.351.200	25	127.697.300	Disdag KUKM
	Persentase produk lokal UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran melalui kemitraan (%)	25	0	0	0	0	25	80.153.500	25	103.988.200	25	112.351.200	25	127.697.300	
3.31 - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				957.690.000		995.000.000		3.413.797.700		3.633.246.000		3.288.682.400		3.369.859.800	
3.31.02 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri <i>Outcome: Meningkatnya daya saing produk industri pengolahan</i>	Nilai produksi industri pengolahan (Rupiah)	1.079.665.000	1.100.000.000	937.064.000	1.133.648.250	880.000.000	1.187.631.500	2.703.361.800	1.241.614.750	2.817.736.400	1.295.598.000	2.422.849.100	1.349.581.250	2.307.866.800	Disperind TK
3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri <i>Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor</i>	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan (%)	2,5	0	0	3,5	0	4,5	584.837.000	5,5	641.692.700	6,5	656.596.600	7,5	805.946.300	Disperind TK

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
perindustrian															
3.31.04 - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	24	25	20.626.000	27	115.000.000	30	125.598.900	33	173.816.900	36	209.236.700	40	256.046.700	Disperind TK
4 - Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				15.067.437.200		19.384.239.600		17.138.064.400		17.084.929.900		16.769.690.600		17.104.708.900	
4.01 - Sekretariat Daerah				4.853.309.200		6.367.629.000		6.005.406.600		6.057.153.600		6.310.173.800		6.261.140.200	
4.01.02 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Outcome: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Outcome: Meningkatnya efektivitas fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama antar daerah Outcome: Meningkatnya implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan sosial Outcome: Meningkatnya kualitas fasilitas keagamaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik (%)	57,14	58,00	3.274.323.700	60	4.036.829.000	62	3.283.251.400	64	3.337.650.900	66	3.606.246.200	68	3.477.550.600	Setda
	Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu (%)	83,33	100		100		100		100		100		100		
	Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang diimplementasikan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik (%)	55,02	56,00		58,44		63,01		67,57		71,46		74,88		
4.01.03 - Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana (%)	94	95	1.578.985.500	95	2.330.800.000	95	2.722.155.200	96	2.719.502.700	96	2.703.927.600	97	2.783.589.600	Setda

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
<i>Outcome: Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah</i> <i>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa</i> <i>Outcome: Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian</i> <i>Outcome: Meningkatnya kualitas kinerja BUMD dan BLUD</i> <i>Outcome: Meningkatnya implementasi kebijakan Sumber Daya Alam</i>															
	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level III (Proaktif)	Level III (Proakt if)		Level III (Proakt if)		Level III (Proakt if)		Level III (Proakt if)		Level III (Proakt if)		Level IV (Strate gis)		
	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (%)	60	60		60		90		90		90		90		
	Persentase rumusan kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
4.02 - Sekretariat DPRD				10.214.128.000		13.016.610.600		11.132.657.800		11.027.776.300		10.459.516.800		10.843.568.700	
4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD <i>Outcome: Meningkatnya pengintegrasian program kerja DPRD dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD</i> <i>Outcome: Meningkatnya</i>	Tersedianya Rencana Kerja DPRD	Ada	Ada	10.214.128.000	Ada	13.016.610.600	Ada	11.132.657.800	Ada	11.027.776.300	Ada	10.459.516.800	Ada	10.843.568.700	Setwan
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi penganggaran, pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	Persentase program kerja DPRD	100	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
layanan dan fasilitasi kinerja DPRD	terselesaikan tepat waktu														
5 - Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				137.898.282.584		140.319.021.500		138.462.637.900		137.704.167.400		130.122.378.500		131.965.243.500	
5.01 - Perencanaan				840.136.100		1.502.750.000		986.376.000		1.104.653.700		1.075.204.000		942.060.500	
5.01.02 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	95	482.985.600	95	802.750.000	95	570.899.000	95	634.057.400	95	664.498.100	95	558.358.200	Bapperid a
5.01.03 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; bidang infrastruktur dan kewilayahan; bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (%)	100	95	357.150.500	95	700.000.000	95	415.477.000	95	470.596.300	95	410.705.900	95	383.702.300	Bapperid a
5.02 - Keuangan				135.710.613.984		136.369.273.000		135.910.319.300		134.828.322.800		127.145.034.400		128.873.419.100	
5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome: Meningkatnya tata kelola perbendaharaan Outcome: Meningkatnya tata	Rasio SiLPA terhadap total pendapatan (%)	0,0389	0,04	133.111.284.900	0,04	134.559.273.000	0,04	133.585.458.300	0,04	132.529.882.300	0,04	124.969.458.500	0,05	126.660.406.700	BPKAD
	Penetapan APBD	Tepat waktu/	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
kelola anggaran		tidak tepat waktu													
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Penetapan LKPD	Tepat waktu / tidak tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome: Meningkatnya tata kelola asset daerah	Manajemen aset	Ada/Tid ak ada	Ada	995.300.200	Ada	400.000.000	Ada	900.418.100	Ada	859.385.300	Ada	784.823.800	Ada	769.861.200	BPKAD
5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Outcome: Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Rasio desentralisasi fiskal (%)	10,19	11,53	1.604.028.884	11,51	1.410.000.000	11,56	1.424.442.900	11,61	1.439.055.200	11,66	1.390.752.100	11,71	1.443.151.200	BPKAD
	Realisasi pendapatan terhadap target pendapatan (%)	74	70		72		75		78		81		85		
5.03 - Kepegawaian				589.197.500		843.276.000		506.225.500		497.913.100		470.488.600		479.724.100	
5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah Outcome: Meningkatnya kualitas kinerja ASN Outcome: Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Outcome: Meningkatnya tata kelola dan pengembangan karir ASN	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik (%)	93,33	94,00	589.197.500	94,00	843.276.000	94,00	506.225.500	95,00	497.913.100	95,00	470.488.600	95,00	479.724.100	BKPSDM
	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan (%)	93,2	93,5		94,0		95,0		95,0		96,0		96,0		
	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Anjab/ABK (%)	100	100		100		100		100		100		100		
5.04 - Pendidikan dan Pelatihan				441.269.500		1.203.722.500		427.158.700		432.797.600		442.448.100		465.032.900	

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>Outcome: Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional</i>	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional (%)	66	35	441.269.500	40	1.203.722.500	45	427.158.700	50	432.797.600	55	442.448.100	60	465.032.900	BKPSDM
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial (%)	49,79	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		
5.05 - Penelitian dan Pengembangan				317.065.500		400.000.000		632.558.400		840.480.200		989.203.400		1.205.006.900	
5.05.02 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah <i>Outcome: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan; kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian, pengembangan,</i>	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bapperid a

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
<i>pengkajian dan penerapan di daerah</i>															
5.05.03 - Program Riset dan Inovasi Daerah <i>Outcome: Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan</i>	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan (%)	100	100	317.065.500	100	400.000.000	100	632.558.400	100	840.480.200	100	989.203.400	100	1.205.006.900	Bapperid a
	Persentase penerapan inovasi daerah (%)	50	50		50		50		50		50		50		
6 - Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				3.714.305.800		5.065.575.884		5.537.110.900		5.690.693.700		5.576.979.600		5.852.921.500	
6.01 - Inspektorat Daerah				3.714.305.800		5.065.575.884		5.537.110.900		5.690.693.700		5.576.979.600		5.852.921.500	
6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan <i>Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan</i>	Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada instansi Pemerintah Daerah (%)	81,29	81,92	3.375.439.000	82,54	4.397.388.000	83,79	4.526.746.300	85,04	4.595.397.600	86,29	4.454.093.800	87,54	4.628.098.900	Itda
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP (%)	60,67	67,26		67,49		67,92		68,35		68,78		69,21		
6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pendampingan dan</i>	Tingkat Kapabilitas APIP	2,52	3,0	338.866.800	3,1	668.187.884	3,2	1.010.364.600	3,3	1.095.296.100	3,4	1.122.885.800	3,5	1.224.822.600	Itda
		2	3			3		3		3		3			

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
asistensi															
7 - Unsur Kewilayahan				5.277.976.853		9.641.838.756		8.534.401.100		7.970.501.600		7.224.063.865		7.034.851.500	
Kecamatan Bontomatene				1.323.581.100		2.706.348.500		2.316.557.500		2.149.980.900		1.903.208.700		1.802.732.500	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	80	85	15.350.000	85	27.020.000	90	65.742.000	95	67.854.300	95	68.070.200	100	70.865.000	Kec. Bontoma tene
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	88,00	91,50	791.978.200	92,00	2.150.854.500	92,00	1.677.196.200	95,00	1.505.784.400	95,00	1.286.219.500	95,00	1.172.250.700	Kec. Bontoma tene
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	85	85		85		87		87		90		95		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	85	85		85		85		88		90		90		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	85	85		80		85		85		90		90		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	2,0	2,1	19.200.000	2,0	18.525.000	2,0	39.534.200	2,0	45.436.500	1,5	44.266.100	1,5	44.658.400	Kec. Bontoma tene

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
wilayah kecamatan															
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	1	1	128.985.000	1	141.489.000	1	144.980.400	1	147.340.100	0	142.951.200	0	148.670.100	Kec. Bontoma tene
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah Kecamatan Buki	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	80	80	368.067.900	80	368.460.000	83	389.104.700	85	383.565.600	85	361.701.700	90	366.288.300	Kec. Bontoma tene
				102.822.000		161.772.000		190.228.000		205.364.000		216.151.765		235.185.700	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	97,20	97,22	1.350.000	97,25	2.250.000	97,30	22.016.200	97,35	27.126.300	97,40	27.788.700	97,45	33.551.200	Kec. Buki
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	66,6	67,0	28.152.000	70,0	69.090.000	72,0	55.200.700	75,0	57.773.700	80,0	57.525.000	85,0	61.220.400	Kec. Buki
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	91,26	91,28		91,35		91,50		91,75		92,00		92,10		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	62,85	62,90		63,00		63,50		64,00		64,50		65,00		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	3,50	3,50		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <i>Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan</i>	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	1	1	3.300.000	0,9	8.100.000	0,8	11.489.000	0,7	15.236.600	0,6	17.913.300	0,5	21.594.200	Kec. Buki
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <i>Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan</i>	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	5	5	56.520.000	4	67.332.000	3	36.480.300	2	41.523.600	1	44.205.400	0	49.685.400	Kec. Buki
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah</i>	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	47,67	47,67	13.500.000	47,68	15.000.000	47,69	65.041.800	47,70	63.703.800	47,71	68.719.365	47,72	69.134.500	Kec. Buki
Kecamatan Bontomanai				66.276.100		90.028.000		130.065.100		140.709.600		143.766.500		157.822.900	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	n/a	60	1.352.200	70	1.941.000	70	12.816.700	80	12.707.200	80	12.048.900	90	12.266.100	Kec. Bontoma nai

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
yang akuntabel dan transparan															
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	99,98	99,98	18.072.500	99,98	6.555.000	99,99	33.561.900	99,99	35.811.600	100	36.242.600	100	39.110.700	Kec. Bontoma nai
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	n/a	40		50		60		70		80		80		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	60	62		65		70		75		80		85		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	4,55	4,56		4,56		4,57		4,58		4,59		5,00		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	0,10	0,08	1.610.500	0,07	8.105.000	0,05	13.196.300	0,02	11.335.400	0	8.923.300	0	8.757.900	Kec. Bontoma nai
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	n/a	1	45.240.900	1	55.518.000	1	60.511.700	1	67.746.600	1	71.223.800	0	79.276.300	Kec. Bontoma nai

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah</i>	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	n/a	50	0	50	17.909.000	60	9.978.500	70	13.108.800	80	15.327.900	80	18.411.900	Kec. Bontoma nai
Kecamatan Benteng				2.317.888.304		3.855.332.100		2.917.167.700		2.572.487.600		2.151.061.300		1.910.644.900	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	94	95	52.728.200	95	66.857.900	96	83.340.700	97	91.082.700	98	93.983.900	99	103.059.700	Kec. Benteng
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <i>Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</i>	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	95	97	2.080.259.104	100	3.624.729.200	100	2.557.280.400	100	2.190.832.900	100	1.766.786.600	100	1.497.752.100	Kec. Benteng
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	75	80		80		85		90		95		100		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	80	80		80		85		90		95		98		
7.01.04 - Program Koordinasi	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000	0,49	0,45	162.261.000	0,41	155.105.000	0,32	200.601.900	0,20	207.656.700	0,12	204.803.300	0,04	216.151.600	Kec. Benteng

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Ketentraman dan Ketertiban Umum <i>Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan</i>	penduduk														
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <i>Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan</i>	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	0	0	22.640.000	0	8.640.000	0	75.944.700	0	82.915.300	0	85.487.500	0	93.681.500	Kec. Benteng
Kecamatan Bontoharu				866.850.349		2.084.482.956		1.938.715.000		1.791.313.500		1.666.427.500		1.660.374.000	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	95	96	42.504.300	96	29.930.000	97	89.089.400	98	93.655.300	99	94.928.000	100	100.526.000	Kec. Bontoharu
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <i>Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan</i>	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	66,6	70,0	656.668.799	77,7	1.862.860.456	77,7	1.348.709.300	88,8	1.171.088.300	88,8	960.734.500	88,8	833.026.200	Kec. Bontoharu
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	75	80		80		80		85		90		95		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	98	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	75	80		80		85		90		95		100		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <i>Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan</i>	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	1,10	0,80	28.129.200	0,75	39.631.000	0,70	272.965.400	0,60	293.607.500	0,50	392.289.400	0,40	503.361.100	Kec. Bontoha ru
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <i>Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan</i>	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	2	2	54.057.150	2	60.875.500	2	82.134.100	1	79.063.300	1	73.714.900	0	72.465.500	Kec. Bontoha ru
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah Kecamatan Bontosikuyu</i>	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	60	62	85.490.900	65	91.186.000	70	145.816.800	75	153.899.100	80	144.760.700	85	150.995.200	Kec. Bontoha ru
				88.680.800		185.955.200		194.415.600		206.275.700		208.392.600		228.634.800	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	90	91	5.450.400	92	5.512.000	95	21.711.500	95	22.068.700	97	21.412.500	97	22.269.800	Kec. Bontosik uyu
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	67	68	34.538.900	70	32.697.200	72	43.124.800	75	46.892.800	76	48.191.800	77	52.672.300	Kec. Bontosik uyu

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan															
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	80	83		85		85		90		93		95		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	96	97		97		97		98		98		99		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	77	78		78		80		85		90		95		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	n/a	1	0	0,75	49.616.000	0,62	26.124.000	0,50	25.715.100	0,40	24.833.500	0	29.801.100	Kec. Bontosik uyu
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	0	0	28.744.000	0	78.450.000	0	74.005.700	0	80.821.500	0	83.347.700	0	91.353.500	Kec. Bontosik uyu
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	63	75	19.947.500	96	19.680.000	96	29.449.600	97	30.777.600	97	30.607.100	98	32.538.100	Kec. Bontosik uyu

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Kecamatan Pasimasunggu				127.182.700		149.000.000		127.972.500		132.285.400		129.201.400		134.507.600	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	94	0	0	0	0	96	20.524.500	97	20.909.100	98	19.425.600	99	19.368.800	Kec. Pasimasunggu
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <i>Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan</i>	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	95	95	48.005.900	100	52.500.000	100	43.420.600	100	42.699.000	100	40.171.300	100	40.589.300	Kec. Pasimasunggu
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	75	80		80		85		90		95		100		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	80	80		80		85		90		95		98		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <i>Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan</i>	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	0,49	0,45	9.375.000	0,41	9.500.000	0,32	11.427.100	0,20	13.732.800	0,12	15.185.300	0,04	17.554.900	Kec. Pasimasunggu
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah	0	0	58.031.000	0	68.500.000	0	32.595.700	0	33.990.600	0	33.742.500	0	35.816.800	Kec. Pasimasunggu

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab					
			2025		2026		2027		2028		2029		2030							
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)						
Umum Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	kecamatan																			
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	47,67	47,68	11.770.800	47,68	18.500.000	47,69	20.004.600	47,70	20.953.900	47,71	20.676.700	47,72	21.177.800	Kec. Pasimasunggu					
Kecamatan Pasimasunggu Timur				99.666.000		97.500.000		207.139.400		226.849.700		236.525.000		260.869.500						
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	94	95	12.000.000	95	12.000.000	96	17.516.100	97	18.202.100	98	19.702.500	99	21.442.700	Kec. Pasimasunggu Timur					
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	95	95	0	100	5.000.000	100	42.044.400	100	54.169.000	100	62.614.000	100	74.642.800	Kec. Pasimasunggu Timur					
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	75	75				80				85					90		95		100
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100				100				100					100		100		100

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	80	80		80		85		90		95		98		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	0,49	0,45	10.450.000	0,41	13.000.000	0,32	31.338.100	0,20	31.236.600	0,12	30.136.400	0,04	31.485.100	Kec. Pasimasunggu Timur
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	0	0	46.398.000	0	37.000.000	0	64.956.700	0	67.597.700	0	66.985.500	0	70.993.500	Kec. Pasimasunggu Timur
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah Kecamatan Pasimarannu	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	47,6	47,6	30.818.000	47,7	30.500.000	47,8	51.284.100	47,9	55.644.300	48,0	57.086.600	48,1	62.305.400	Kec. Pasimasunggu Timur
				140.338.700		171.456.000		210.921.700		214.177.900		215.771.700		254.237.700	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	92,16	0	0	0	0	93,30	20.676.500	93,74	26.285.100	94,35	30.141.900	94,82	35.741.500	Kec. Pasimarannu
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	66,66	70,00	128.338.700	77,00	151.693.000	77,77	93.733.500	88,00	86.864.500	88,88	76.896.200	88,88	107.393.400	Kec. Pasimarannu

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan															
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	91,26	91,30		91,35		91,50		91,75		92,00		92,10		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	64,4	65,0		67,3		70,6		72,5		75,4		79,2		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	3,00	3,20		3,50		3,80		4,20		4,55		4,96		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	1,00	0,90	12.000.000	0,90	12.000.000	0,80	19.408.000	0,70	19.684.400	0,60	19.573.400	0,50	20.513.100	Kec. Pasimar annu
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	0	0	0	0	7.763.000	0	28.659.800	0	28.109.200	0	28.074.300	0	29.882.900	Kec. Pasimar annu
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	34,40	34,40	0	34,40	0	35,00	48.443.900	35,26	53.234.700	36,70	61.085.900	37,20	60.706.800	Kec. Pasimar annu

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Kecamatan Pasilambena				91.712.300		59.887.500		150.445.400		169.357.900		178.962.900		200.847.600	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	94	0	0	0	0	96	21.138.000	97	20.820.100	98	19.617.900	99	19.851.600	Kec. Pasilambena
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <i>Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan</i>	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	97	98	32.839.900	100	36.289.000	100	41.721.100	100	52.643.900	100	60.296.900	100	71.425.500	Kec. Pasilambena
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	75	75		80		85		90		95		100		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	80	80		80		85		90		95		98		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <i>Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan</i>	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	0,43	0,42	800.100	0,41	8.593.500	0,32	20.173.600	0,20	21.739.100	0,12	22.139.000	0,04	24.885.200	Kec. Pasilambena
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah	0	0	51.094.500	0	0	0	48.443.900	0	53.234.700	0	55.167.900	0	60.706.800	Kec. Pasilambena

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
Umum <i>Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan</i>	kecamatan														
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah</i>	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	47,6	47,6	6.977.800	47,7	15.005.000	47,8	18.968.800	47,9	20.920.100	48	21.741.200	48,1	23.978.500	Kec. Pasilambena
Kecamatan Takabonerate				52.978.500		80.076.500		150.773.200		161.699.400		174.594.500		188.994.300	
7.01.02 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <i>Outcome: Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan</i>	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP (%)	97,00	97,50	10.349.400	97,60	14.399.000	97,75	22.683.600	97,80	25.706.000	97,95	27.170.800	98,00	31.178.900	Kec. Takabonerate
7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <i>Outcome: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan</i>	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	80,00	80,30	33.262.000	80,50	50.311.000	80,65	56.955.800	80,75	61.466.600	80,85	72.003.500	90,00	77.903.700	Kec. Takabonerate
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	80,00	80,30		80,40		80,50		80,60		80,75		90,00		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	75,00	75,40		75,50		75,60		75,70		80,00		80,50		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	80,00	80,20		80,30		80,40		80,50		90,00		90,00		
7.01.04 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <i>Outcome: Menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah kecamatan</i>	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	3	2,5	6.385.800	2,4	6.385.500	2,3	15.282.900	2,2	18.296.300	2,1	20.179.900	2,0	23.286.300	Kec. Takabon erate
7.01.05 - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <i>Outcome: Menurunnya konflik sosial dan keagamaan</i>	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	1	1	0	1	0	0,5	23.626.500	0,4	23.493.300	0,3	23.163.200	0,2	24.383.300	Kec. Takabon erate
7.01.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Outcome: Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah</i>	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah (%)	75,00	75,30	2.981.300	75,40	8.981.000	75,50	32.224.400	75,60	32.737.200	75,75	32.077.100	80,00	32.242.100	Kec. Takabon erate
8 - Unsur Pemerintahan Umum				1.836.312.400		1.861.299.400		1.883.301.400		1.869.065.700		22.285.865.800		1.838.877.000	
8.01 - Kesatuan Bangsa dan Politik				1.836.312.400		1.861.299.400		1.883.301.400		1.869.065.700		22.285.865.800		1.838.877.000	
8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan <i>Outcome: Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam</i>	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	3,33	3,33	1.052.978.000	4,62	1.063.120.000	5,82	1.071.384.600	6,93	1.057.594.500	7,97	993.841.200	8,98	1.004.548.100	Badan Kesbang pol

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
<i>menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam keberagaman</i>															
8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik <i>Outcome: Meningkatnya peran kader partai politik kepada masyarakat dalam memahami dan menerima perbedaan, serta menjaga keutuhan bangsa dalam berkehidupan yang demokratis</i>	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)	5,71	5,71	712.482.800	9,65	717.720.400	13,67	713.518.700	17,72	712.699.000	21,89	21.192.726.500	25,98	725.467.600	Badan Kesbang pol
8.01.04 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan <i>Outcome: Meningkatnya pemahaman aktifis pemuda dalam berorganisasi</i>	Persentase Ormas yang aktif (%)	44,44	44,44	12.392.600	47,29	15.000.000	50,00	23.442.500	52,59	23.385.800	55,07	25.014.400	57,45	25.391.600	Badan Kesbang pol
<i>Outcome: Meningkatnya kebebasan berkumpul dan berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</i>	Persentase Ormas ter daftar yang mendapat kan pembinaan	3,87	3,87		7,75		11,36		14,81		18,12		21,28		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya <i>Outcome: Meningkatnya kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya, serta kebebasan menganut kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing</i> <i>Outcome: Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam menyampaikan bahaya pengaruh narkoba kepada kelompok sasaran pencegahan</i>	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekono mi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoti ka, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	12,50	12,50	5.000.000	50,00	5.000.000	50,00	7.192.700	75,00	8.392.700	75,00	7.983.300	100	8.406.100	Badan Kesbang pol
	Persentase kelompok sasaran pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dibina (%)	8,70	8,70		26,09		34,78		43,48		52,17		65,22		
8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial <i>Outcome: Meningkatnya peran Forum Waspad untuk menjaga stabilitas daerah dari konflik sosial dalam kehidupan masyarakat</i> <i>Outcome: Meningkatnya peran koordinasi pimpinan daerah dalam rangka mencegah dan</i>	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	100	53.459.000	100	60.459.000	100	67.762.900	100	66.993.700	100	66.300.400	100	75.063.600	Badan Kesbang pol
	Persentase fasilitasi kegiatan Forkopimda	100	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.).	
menangkal ATHG															

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dan kemajuan daerah. Indikator tersebut terdiri atas : (1) Indikator Kinerja Makro; (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah; (3) Indikator Kinerja Daerah (IKD); (4) Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan (4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

4.2.1. Indikator Makro

Penetapan indikator makro bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum melalui capaian kinerja makro. Indikator makro terdiri dari sembilan indikator tertera pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4. 2
Penetapan Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	3,50	4,20	5,20	5,50	5,90	6,20	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,05	1,96	1,87	1,78	1,69	1,60	1,50	
3	Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77	9,47-8,70	9,07-8,67	8,67-7,67	8,28-7,53	
4	Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316	0,310	0,304	0,298	0,291	
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	18,02*	23,66	28,06	32,47	36,87	37,97	41,27	
6	PDRB Perkapita	Juta Rp.	58,29	60,49	63,03	66,31	69,95	74,07	78,99	
7	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%	1,20	1,22	1,22	1,24	1,26	1,27	1,29	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,98	72,38	72,90	73,39	73,97	74,39	74,90	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65 (Baik)	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)	75,29 (Baik)	75,50 (Baik)	75,71 (Baik)	75,92 (Baik)	

4.2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih dari indikator tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Target IKU selama lima tahun masa jabatan pemerintah daerah tertera pada **Tabel 4.3**

Tabel 4. 3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,55	62,54	64,91	68,41	70,32	72,97	74,81	
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,38	72,90	73,39	73,97	74,39	74,90	
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,33	3,50	4,20	5,20	5,50	5,90	6,20	
4.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,49	3,77	4,05	4,36	4,62	4,91	
5.	Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316	0,310	0,304	0,298	0,291	
6.	Indeks Desa	Angka	IDM : 0,7190 (Maju)	70,86 (Maju)	75,75 (Maju)	77,17 (Maju)	79,62 (Maju)	81,42 (Mandiri)	82,23 (Mandiri)	
7.	Indeks Infrastruktur	Angka	3,26	3,31	3,33	3,34	3,36	3,38	3,39	
8.	Indeks Harmoni	Angka	6,61	6,63	6,66	6,69	6,71	6,75	6,75	
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65 (Baik)	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)	75,29 (Baik)	75,50 (Baik)	75,71 (Baik)	75,92 (Baik)	
10.	Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	18,02*	23,66	28,06	32,47	36,87	37,97	41,27	

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa lima tahun yang disusun berdasarkan aspek pembangunan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten dengan mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan memuat Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Kunci, target IKD tertera pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025-2030

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1			ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	1		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,03	77,39	79,15	80,90	82,66	84,42	86,17	IUP / Indikator Sasaran
1	2		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	8,45	8,75	8,81	9,00	9,25	9,41	9,57	IUP
1	3		Skor Pola Pangan Harapan	Angka	77,50	88,51	89,64	90,77	91,90	93,03	94,16	IUP
1	4		Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	63,72	64,62	64,71	64,81	65,90	66,99	68,08	IUP
1	5		Konsumsi Listrik Per kapita	kWh/Kapita	311,14	327,62	340,63	353,64	366,65	379,66	392,68	IUP
1	6		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	41,88	42,05	43,75	46,31	48,03	50,13	52,31	IUP
1	7		Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	280,87*	293,37	305,88	318,38	330,89	343,39	355,90	IUP
1	8		Indeks Pertanaman (IP) Padi	Angka	200	200	200	200	200	200	200	IUP
1	9		Proporsi Sawah Irigasi	%	42,28*	43,57	43,76	44,07	44,39	44,84	45,01	IUP
1	10		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	507,97	612,99	1.328,82	555,06	571,71	588,86	606,53	IUP
1	11		Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita	50,18 (2023)	70,78	70,98	71,49	72,01	72,45	73,04	IUP
1	12		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,65 (Baik)	74,86 (Baik)	75,07 (Baik)	75,29 (Baik)	75,50 (Baik)	75,71 (Baik)	75,92 (Baik)	IUP / Indikator Tujuan
1	13		Indeks Kualitas Udara	Angka	72,45	79,75	80,05	80,35	80,65	80,95	81,25	Indikator Sasaran
1	14		Indeks Kualitas Air	Angka	68,09	75,29	75,49	75,69	75,89	76,09	79,26	Indikator Sasaran
1	15		Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,02	65,09	65,16	65,23	65,30	65,37	65,44	Indikator Sasaran
1	16		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,16	3,68	3,73	3,78	3,83	4,00	4,05	IUP
1	17		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	2,60	5,23	6,39	7,67	9,05	10,00	11,81	IUP
1	19		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	5,45 (2023)	20,00	38,74	48,56	61,64	80,00	91,09	IUP
1	20		Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan	%	18,02*	23,66	28,06	32,47	36,87	37,97	41,27	IUP/ Indikator

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												Tujuan
1	21		Indeks Risiko Bencana	Angka	133,58 (Sedang)	132,24 (Sedang)	130,92 (Sedang)	129,61 (Sedang)	128,32 (Sedang)	127,03 (Sedang)	125,76 (Sedang)	IUP / Indikator Sasaran
1	22		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,86	1,43	1,50	1,65	1,65	1,84	1,87	Non IUP
1	23		Rasio Penduduk	%	97	97	97	97	97	97	97	Non IUP
1	24		Kepadatan Penduduk	Orang/Km ²	105	107	108	109	110	111	112	Non IUP
2			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
2	1		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,33	3,50	4,20	5,20	5,50	5,90	6,20	IUP/ Indikator Tujuan
2	2		Tingkat Kemiskinan	%	10,79	10,26-9,67	9,67-8,77	9,47-8,70	9,07-8,67	8,67-7,67	8,28-7,53	IUP/ Indikator Sasaran
2	3		PDRB per kapita	Rp. Juta	58,29	60,49	63,03	66,31	69,95	74,07	78,66	IUP/ Indikator Sasaran
2	4		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,05	1,96	1,87	1,78	1,69	1,60	1,50	IUP/ Indikator Sasaran
2	5		Indeks Gini	Angka	0,329	0,323	0,316	0,310	0,304	0,298	0,291	IUP/ Indikator Tujuan
2	6		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,98	72,38	72,90	73,39	73,97	74,39	74,90	IUP/ Indikator Tujuan
2	7		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,48	73,64	72,98	73,39	73,81	74,22	74,63	IUP
2	8		Indeks Kesehatan	Angka	82,28	82,52	82,87	83,21	83,55	83,89	84,36	Indikator Sasaran
2	9		Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	95,13	77,86	78,96	80,06	81,16	82,26	83,36	IUP
2	10		Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Orang	5	4	4	3	3	3	3	IUP
2	11		Prevalensi Stunting	%	25,70	22,31	21,86	17,95	14,79	12,80	10,25	IUP
2	12		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	96,78	97,30	97,71	97,88	98,04	98,20	98,37	IUP
2	13		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	77,75	78,57	78,74	78,90	79,06	80,22	81,39	IUP
2	14		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IUP
2	15		Indeks Pendidikan	Angka	63,97	64,76	65,56	66,35	67,15	67,94	68,78	Indikator Sasaran

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	16		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun	Tahun	8,49	8,73	8,91	9,10	9,28	9,46	9,65	IUP
2	17		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,88	12,94	13,00	13,06	13,12	13,18	IUP
2	18		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk Literasi Membaca	%	41,75	45,00	47,24	49,06	50,88	52,70	54,52	IUP
2	19		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten untuk Numerasi	%	29,90	35,00	37,56	39,34	41,11	42,89	44,67	IUP
2	20		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	15,15	20,27	21,26	22,26	23,25	24,25	25,24	IUP
2	21		Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	%	19,38	23,28	23,74	24,20	24,66	25,13	25,59	IUP
2	22		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	36,72	53,45	53,97	56,15	58,32	64,48	64,83	IUP
2	23		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,008	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33	IUP
2	24		Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP
2	25		Indeks Kesalehan Sosial	Angka	77,87	78,29	78,74	79,19	79,63	80,08	80,08	Indikator Sasaran
2	26		Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	%	79,49	82,05	82,05	82,05	82,05	84,62	84,62	IUP
2	27		Tingkat kemanfaatan nilai budaya dalam membangun perekonomian masyarakat	%	2,5	4,5	6,6	8,6	10,7	12,7	15,8	Indikator Sasaran
2	28		Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,47 (2023)	60,47	61,00	61,27	61,99	63,30	65,05	IUP / Indikator Sasaran
2	29		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	63,58 (Berkembang)	63,95 (Berkembang)	64,74 (Berkembang)	65,72 (Berkembang)	66,69 (Berkembang)	67,00 (Berkembang)	68,64 (Berkembang)	IUP / Indikator Sasaran
2	30		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,379	0,367	0,355	0,344	0,333	0,323	0,313	IUP / Indikator Sasaran

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	31		Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,64	92,78	92,94	93,12	93,24	93,41	93,56	IUP / Indikator Sasaran
2	32		Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	66,75 (2023)	73,14	75,60	78,30	80,45	83,53	85,95	Indikator Sasaran
3			ASPEK DAYA SAING DAERAH									
3	1		Angka Ketergantungan	%	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	IUP
3	2		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,93	3,01	3,08	3,26	3,45	4,80	5,11	IUP / Indikator Sasaran
3	3		Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	IUP / Indikator Sasaran
3	4		Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara	orang	14.210	21.441	23.525	25.780	28.036	30.291	32.542	IUP
3	5		Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Industri	1.048*	1069	1108	1228	1348	1.584	1669	IUP
3	6		Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Industri	1.436	1.480	1.495	1.539	1.584	1.629	1.674	IUP
3	7		Persentase Koperasi Sehat	%	16,89	17,00	18,00	20,00	25,00	27,00	31,00	IUP
3	8		Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,33	0,65	0,71	0,72	0,73	0,81	0,82	IUP
3	9		Produktivitas Padi	kw/ha	119,18	113,39	123,68	139,24	154,87	159,24	174,95	IUP
3	10		Jumlah Produksi Perikanan	Ton	26.118,37	28.584,04	31.049,71	32.356,41	34.281,14	35.983,77	37.417,23	IUP
3	11		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,26	61,34	62,53	63,75	64,97	68,54	68,63	IUP
3	12		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,19	74,19	75,29	76,21	77,12	77,91	78,04	IUP
3	13		Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	1,80	1,92	2,35	2,47	2,59	2,76	2,84	IUP
3	14		Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	59,76	61,91	63,86	66,79	67,91	68,40	IUP / Indikator Sasaran
3	15		Indeks Ekonomi Hijau	Angka	22,46 (2022)	23,51	24,07	24,44	24,81	26,41	26,55	IUP / Indikator Sasaran
3	16		Indeks Ekonomi Biru	Angka	83,60 (2023)	86,35	87,75	89,14	90,53	91,93	93,32	IUP / Indikator Sasaran
3	17		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	36,44	36,63	38,66	41,69	44,72	47,74	50,77	IUP

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	18		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	44,34	46,56	48,88	51,33	53,90	56,59	59,42	Indikator Sasaran
3	19		Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	%	0,88	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	IUP
3	20		Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	45,33	45,47	45,69	45,92	46,14	46,37	46,59	IUP / Indikator Sasaran
3	21		Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-14,23	-9,72	-9,66	-9,11	-8,57	-8,22	-8,03	IUP / Indikator Sasaran
3	22		Indeks Infrastruktur	Angka	3,26	3,31	3,33	3,34	3,36	3,38	3,39	IUP / Indikator Tujuan
3	23		Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Angka	4,32	4,36	4,40	4,45	4,49	4,54	4,58	IUP / Indikator Sasaran
3	24		Indeks Layanan Infrastruktur Pelabuhan	Angka	3,37	3,40	3,43	3,47	3,50	3,54	3,57	IUP / Indikator Sasaran
3	25		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%	1,20	1,22	1,22	1,24	1,26	1,27	1,29	IUP
3	26		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,76	78,41	82,55	83,29	84,03	84,78	85,52	IUP
3	27		Persentase Desa Mandiri	%	27,16 (22 Desa)	28,40 (23 Desa)	29,63 (24 Desa)	32,10 (26 Desa)	37,04 (30 Desa)	43,21 (35 Desa)	48,15 (39 Desa)	IUP / Indikator Sasaran
3	28		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,564	0,614	0,629	0,635	0,641	0,646	0,652	IUP
3	29		Tingkat Inflasi Gabungan	%	0,91	2,84	2,77	2,7	2,63	2,56	2,49	IUP
3	30		Pertumbuhan Investasi Daerah	%	-168,03	9,09	10,94	11,3	12,21	13,04	14,41	IUP
3	31		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	72,320	72,736	73,187	73,637	74,088	74,539	74,989	IUP
3	32		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,29	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59	3,61	Indikator Sasaran
4			ASPEK PELAYANAN UMUM									
4	1		Indeks Reformasi Hukum	Angka	77,92	80,36 (Baik)	82,80 (Baik)	85,24 (Baik)	87,68 (Baik)	90,12 (Baik)	92,56 (Baik)	IUP
4	2		Nilai SAKIP Daerah	Angka	61,68 (Cukup Baik)	63,56 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)	64,50 (Cukup Baik)	65,52 (Cukup Baik)	66,39 (Cukup Baik)	67,01 (Cukup Baik)	Indikator Sasaran

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	3		Indeks SPBE	Angka	2,57 (Cukup)	2,66 (Cukup)	2,74 (Cukup)	2,83 (Cukup)	2,91 (Cukup)	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)	IUP / Indikator Sasaran
4	4		Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,58	2,66	2,75	2,83	2,92	3,00	3,10	IUP / Indikator Sasaran
4	5		Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	71,95	72,24	72,35	72,58	72,88	73,70	73,82	IUP
4	6		Nilai MCP KPK	Angka	67,07	72,22	73,11	74,00	74,89	75,78	76,66	IUP
4	7		Indeks Maturitas SPIP	Angka	2,84	3,1 (terdefinisi)	3,2 (terdefinisi)	3,3 (terdefinisi)	3,4 (terdefinisi)	3,5 (terdefinisi)	3,6 (terdefinisi)	IUP
4	8		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	IUP
4	9		Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	%	20	20	20	20	20	20	20	IUP
4	11		Peraturan Daerah yang Merupakan Inisiatif DPRD	Perda	0	0	1	1	1	1	1	IUP
4	12		Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	%	38,66	38,66	38,66	38,66	38,66	40,26	40,26	IUP
4	13		Persentase penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah daerah	%	5,65*	8,70	14,11	21,52	25,22	32,63	40,04	Indikator Sasaran
4	14		Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	11,05	14,53	15,21	15,70	16,41	17,34	17,56	IUP
4	15		Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	%	0,39*	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	Indikator Sasaran
4	16		Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister Province/ Sister City</i>)	Kerjasama	4*	4	4	4	4	4	4	IUP
4	17		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,49	3,77	4,05	4,36	4,62	4,91	IUP / Indikator Tujuan
5			INDIKATOR KINERJA KUNCI									
5	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									
5	0	1	Persentase capaian realisasi anggaran OPD	%	91,61	93,50	94,50	95,50	96,50	97,50	98,50	
5	0	2	Persentase capaian kinerja OPD	%	85,68	88,50	89,50	90,50	91,50	92,50	93,50	
5	1		URUSAN WAJIB									
5	1		PELAYANAN DASAR									
			PENDIDIKAN									

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	1	1	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	89,30	92,27	94,81	97,36	99,91	100	100	
5	1	2	Persentase warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,25	98,88	99,52	100	100	100	100	
5	1	3	Persentase warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	48,49	56,70	63,19	69,68	76,17	76,93	77,69	
5	1	4	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	57,12	58,94	60,74	62,54	64,34	66,14	67,94	
5	1	5	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,78	55,39	57,59	59,79	61,99	64,19	66,39	
5	1	6	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	%	75,57	82,11	87,91	95,65	100	100	100	
5	1	7	Persentase ruang kelas PAUD kondisi bangunan baik	%	47,75	47,75	48,30	48,87	49,46	50,07	50,70	
5	1	8	Persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	43,76	43,76	44,31	44,88	45,47	46,08	46,71	
5	1	9	Persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	42,22	44,2	44,75	45,32	45,91	46,52	47,15	
5	1	10	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal	%	100	85,73	86,30	86,87	87,44	88,01	88,58	
5	1	11	Persentase guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik	%	77,36	73,18	73,75	74,34	74,95	74,94	75,57	
5	1	12	Rasio guru terhadap rombongan belajar (PAUD dan SD)	Angka	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	1	13	Rasio guru terhadap mata pelajaran tingkat SMP	Angka	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	1	14	Persentase satuan pendidikan berizin OSS yang terfasilitasi	%	n.a	0	0	0	0	0	0	
5	1	15	Persentase sekolah yang mengajarkan bahasa daerah dalam kurikulum	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2		KESEHATAN									
5	2	1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			kehatan									
5	2	2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,48	100	100	100	100	100	100	
5	2	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	94,03	100	100	100	100	100	100	
5	2	5	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92,23	100	100	100	100	100	100	
5	2	6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	8	Persentase warga negara penderita <i>Hipertensi</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	9	Persentase warga negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	11	Persentase warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	%	73,87	100	100	100	100	100	100	
5	2	12	Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	2	13	Nilai akreditasi Rumah Sakit	Nilai	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
5	2	14	Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	Angka (per 1000 satuan penduduk)	0,66	0,68	0,70	0,71	0,74	0,76	0,80	
5	2	15	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 satuan penduduk	Angka (per 1000 satuan penduduk)	13,29	13,40	13,50	13,75	14,03	14,35	14,70	
5	2	16	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	75	77	80	85	90	95	100	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	2	17	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	27,24	32,24	42,24	52,24	72,24	82,24	92,24	
5	2	18	Persentase industri makanan rumah tangga yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	64,80	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
5	2	19	Persentase posyandu aktif	%	98,40	98,66	98,92	99,18	99,44	99,70	100	
5	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
5	3	1	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
5	3	2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai dan wilayah pantai kewenangan kabupaten	Angka (Ha)	0,113	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	0,1171	
5	3	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka (Ha)	74,14	75,00	77,11	80,19	83,40	86,72	90,20	
5	3	4	Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah	%	2,27	2,40	2,50	2,58	2,63	2,69	2,78	
5	3	5	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	43,20	44,50	44,50	45,60	51,00	53,00	55,00	
5	3	6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	3	7	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	97,22	97,33	97,43	97,51	97,56	97,63	97,71	
5	3	8	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air	%	27	30	33	36	39	42	45	
5	3	9	Proporsi bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) kewenangan kabupaten yang laik fungsi	%	34,29	34,80	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	
5	3	10	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Angka	51,06	51,66	52,06	53,06	54,06	57,06	58,06	
5	3	11	Persentase penanganan jalan kewenangan kabupaten	%	47,20	48,00	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00	
5	3	12	Persentase penanganan jembatan kewenangan kabupaten	%	78,00	78,50	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	3	13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	10 : 1	10 : 1	10 : 1	10 : 1	10 : 1	10 : 1	10 : 1	
5	3	14	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	10 : 0	10 : 0	10 : 0	10 : 0	10 : 0	10 : 0	10 : 0	
5	3	15	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	%	89,61	90,00	91,13	91,91	92,69	93,48	94,27	
5	4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
5	4	1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	5	10	10	10	11	
5	4	2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0	0	0	
5	4	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	6,320	7,202	7,202	7,321	7,439	7,557	7,675	
5	4	4	Rasio rumah layak huni	Angka	0,860	0,636	0,608	0,611	0,614	0,618	0,621	
5	4	5	Persentase jumlah rumah terlayani PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	n.a	0,31	0,31	0,63	0,94	1,26	1,57	
5	4	6	Persentase rekondansi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5	5	1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	99,83	100	100	100	100	100	100	
5	5	2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	99,23	100	100	100	100	100	100	
5	5	3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	99,23	100	100	100	100	100	100	
5	5	4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penanganan pascabencana	%	99,93	100	100	100	100	100	100	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	5	5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50,00	75,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100	
5	5	6	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	97,00	75,00	100	100	100	100	100	
5	5	7	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
5	5	8	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	50	50	50	50	50	50	
5	5	9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	85,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100	
5	5	10	Waktu tanggap (Respon time) penanganan kebakaran	Menit	8,35	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
5	6		SOSIAL									
5	6	1	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	22,5	23,6	24,7	25,8	26,9	28,0	28,0	
5	6	2	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	0	100	100	100	100	100	100	
5	6	3	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi	%	0	0	0	0	0	0	0	
5	6	4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	6	5	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	6	6	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	6	7	Persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	6	8	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	53,6	56,1	58,6	60,1	62,6	64,1	64,1	
5	6	10	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	73,28	76,4	78,5	80,6	82,7	84,8	84,8	
5	6	11	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0,63	1,16	1,74	2,32	2,61	2,90	2,90	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	6	12	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	6	13	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
6			NON PELAYANAN DASAR									
6	1		TENAGA KERJA									
6	1	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	1	2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3,01	3,20	3,55	3,80	4,09	4,36	4,63	
6	1	3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp.	56.955.917,80	57.750.000,80	58.817.959,80	59.748.980,80	60.680.001,80	61.611.022,80	62.542.043,80	
6	1	4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	11,57	12,00	12,46	13,34	14,23	15,11	16,00	
6	1	5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	72,5	73,0	74,0	75,5	77,0	78,5	80,0	
6	1	6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	36,72	36,92	37,72	38,72	39,72	40,72	41,72	
6	2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
6	2	1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	26,00	27,00	30,00	35,00	40,00	45,00	60,00	
6	2	2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	%	43,40	43,40	44,80	45,00	46,50	46,60	46,60	
6	2	3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	2	4	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Angka	0	0	0	1	1	1	1	
6	2	5	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan	%	0,60	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	
6	2	6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	40,00	40,00	50,00	60,02	60,10	60,15	60,20	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	2	7	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	3		PANGAN									
6	3	1	Persentase cadangan pangan	%	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	
6	3	2	Persentase ketersediaan pangan	%	111,1	111,1	109,8	108,4	107,1	105,7	104,5	
6	3	3	Persentase desa/ kelurahan rentan rawan pangan	%	19,32	17,04	15,90	14,77	13,64	12,50	11,36	
6	3	4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	4		PERTANAHAN									
6	4	1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	0	60,00	70,00	80,00	90,00	
6	4	2	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	%	67,00	68,50	70,00	73,00	76,00	79,00	83,00	
6	4	3	Luas Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee	Hektar	0	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	
6	4	4	Persentase luas lahan ulayat yang di tetapkan	%	0	0	0	1	2	2	2	
6	4	5	Persentase aset tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disertifikatkan	%	0	0	12	14	16	18	20	
6	4	6	Persentase tanah kosong yang dikelola	%	68,00	69,50	71,00	74,00	78,00	83,00	86,00	
6	4	7	Persentase penyelesaian dan penerbitan izin membuka tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	%	0	0	0	60,00	65,00	70,00	75,00	
6	4	8	Persentase pemanfaatan tanah sesuai peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	%	71,00	71,00	71,00	77,00	81,00	86,00	92,00	
6	5		LINGKUNGAN HIDUP									
6	5	1	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	Terintegrasi/ tidak terintegrasi	n/a	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	
6	5	2	Persentase titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	n/a	75,49	75,49	75,69	75,89	76,09	76,09	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	5	3	Persentase pemantauan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	%	n/a	80,05	80,05	80,35	80,65	80,95	80,95	
6	5	4	Proporsi luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan	%	1,4	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	
6	5	5	Proporsi limbah B3 yang ditangani berdasarkan jenis penanganannya	%	100	100	0	100	100	100	100	
6	5	6	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	%	47,14	48,00	48,00	50,00	52,00	55,00	57,00	
6	5	7	Persentase MHA dan kearifan lokal yang terkait PPLH yang difasilitasi	%	n/a	0	1,14	2,27	3,41	4,55	5,68	
6	5	8	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	20	20	20	20	20	20	20	
6	5	9	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
6	5	10	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	5	11	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	%	n/a	2	2	3	4	5	6	
6	5	12	Persentase desa/kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah	%	n/a	3,97	3,97	6,32	8,86	11,39	13,92	
6	6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
6	6	1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	4,43	9,50	15,00	17,00	20,00	25,00	30,00	
6	6	2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	52,64	52,70	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00	
6	6	3	Cakupan kepemilikan KTP elektronik		94,27	94,50	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
6	6	4	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	93,25	93,25	93,50	94,00	95,00	96,00	97,00	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	6	5	Persentase cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,66	99,66	99,69	99,70	99,70	99,80	100	
6	6	6	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	6	7	Persentase cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	6	8	Persentase OPD yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan	%	62,96	63,00	63,00	63,50	64,00	64,50	70,00	
6	6	9	Persentase data profil kependudukan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
6	7	1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	0	100	100	100	100	100	100	
6	7	2	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	%	0	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	
6	7	3	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	
6	7	4	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	%	9,75	100	100	100	100	100	100	
6	7	5	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	4,93	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	
6	8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
6	8	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Angka	27,30	26,10	26,10	25,50	25,30	25,10	25,20	
6	8	2	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,10	2,05	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
6	8	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	27,70	24,00	22,00	22,00	21,91	21,70	21,25	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	8	4	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	%	65,35	56,15	57,75	58,05	58,50	59,00	59,50	
6	8	5	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	82,99	83,45	84,50	85,90	86,50	87,90	88,90	
6	9		PERHUBUNGAN									
6	9	1	Kinerja lalu lintas (VC Ratio)	Angka	0,28	0,28	0,32	0,37	0,43	0,49	0,56	
6	9	2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang beroperasi dan Layak Fungsi	%	44,83	44,83	52,29	56,90	62,07	67,24	72,41	
6	9	3	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	%	0	0	0	100	100	100	100	
6	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
6	10	1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	68,9	70,0	72,0	75,0	75,0	75,0	80,0	
6	10	2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
6	11	1	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	%	46	46	70	80	90	100	100	
6	11	2	Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dibanding tahun sebelumnya	%	47	47	50	50	50	50	50	
6	11	3	Persentase koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi	%	24	24	24	60	65	70	70	
6	11	4	Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	%	17	17	17	50	60	70	70	
6	11	5	Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	%	20	20	30	40	50	60	60	
6	11	6	Persentase UMKM binaan yang naik kelas	%	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	11	7	Persentase UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pasca panen	%	63	63	64	64	65	65	70	
6	11	8	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya	%	1	2	3	5	5	6	7	
6	11	9	Persentase UMKM yang mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal	%	0,5	1	2	4	5	6	7	
6	11	10	Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital	%	20	20	30	40	50	60	60	
6	12		PENANAMAN MODAL									
6	12	1	Persentase penanam modal/ investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	%	0	1	1	1	1	1	1	
6	12	2	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Orang/ Lembaga	359	368	381	403	425	447	469	
6	12	3	Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	12	4	Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	26,74	32,42	38,10	49,45	60,81	72,17	83,53	
6	12	5	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
6	13	1	Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	30,00	29,80	30,00	30,20	30,40	30,60	30,80	
6	13	2	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional, nasional dan internasional dalam satu tahun	Orang	17	16	17	18	19	20	21	
6	13	3	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	19	18	19	20	21	22	23	
6	13	4	Cakupan pembinaan organisasi kepramukaan	%	33,33	33,49	33,84	34,37	34,92	35,49	36,08	
6	14		STATISTIK									

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	14	1	Persentase pemenuhan data statistik yang memenuhi kaidah Satu Data Indonesia	%	21,39	45,00	50,00	60,00	77,00	83,00	100	
6	15		PERSANDIAN									
6	15	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	74,5	77,5	80,0	82,5	85,0	90,0	100	
6	16		KEBUDAYAAN									
6	16	1	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
6	16	2	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	0	0	10	6	7	8	9	
6	16	3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	0	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	
6	16	4	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	84,21	84,21	86,84	86,84	89,47	89,47	92,11	
6	16	5	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan		30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	
6	16	6	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	110,16	110	110	110	110	110	110	
6	17		PERPUSTAKAAN									
6	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang pengunjung	14.421	14.471	14.521	14.621	14.721	14.831	14.921	
6	17	2	Persentase perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang mendapatkan pembinaan	%	40,69	50,22	50,47	61,51	73,82	86,75	100	
6	17	3	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	0	0	0	40	60	80	100	
6	18		KEARSIPAN									
6	18	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	26,0	15,7	28,9	42,1	55,2	73,6	100	
6	18	2	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	0	10	10	40	60	80	100	
7			PELAYANAN URUSAN PILIHAN									
7	1		PERIKANAN									

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	1	1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	25.610,40	27.519,34	29.720,89	31.801,35	33.709,43	35.394,91	36.810,70	
7	1	2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	507,97	558,77	642,58	738,97	849,81	977,29	1.123,88	
7	1	3	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	15,84	16,58	17,94	19,30	20,67	22,03	23,40	
7	1	4	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Ton	248,00	272,80	300,08	330,09	363,09	417,56	480,19	
7	2		PARIWISATA									
7	2	1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	9,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
7	2	2	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	42,00	25,00	25,00	33,30	42,00	50,00	50,00	
7	2	3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	%	0	0	1	2	3	4	5	
7	2	4	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	8,00	15,00	15,00	23,00	31,00	38,00	46,00	
7	3		PERTANIAN									
7	3	1	Cakupan kelompok tani dan kelompok ternak yang memperoleh bantuan sarana pertanian/ peternakan	%	4,32	4,32	4,36	4,41	4,45	4,50	4,54	
7	3	2	Jumlah Produksi sektor tanaman pangan	Ton	18.949,22	18.949,22	19.138,71	19.330,10	19.523,40	19.718,63	19.915,82	
7	3	3	Jumlah Produksi sektor tanaman hortikultura	Ton	7.139,75	7.139,75	7.211,15	7.283,26	7.356,09	7.429,65	7.503,95	
7	3	4	Jumlah Produksi sektor perkebunan	Ton	33.154,35	33.154,35	33.485,89	33.820,75	34.158,96	34.500,55	34.845,56	
7	3	5	Jumlah Produksi sektor peternakan	Kg	525.264,00	525.264,00	530.516,64	535.821,81	541.180,02	546.591,82	552.057,74	
7	3	6	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	%	30,86	30,86	31,17	31,48	31,80	32,11	32,43	
7	3	7	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan tidak menular		30,86	31,00	31,31	31,62	31,94	32,26	32,58	
7	3	8	Persentase penanganan bencana pertanian	%	59,69	59,69	59,95	60,22	60,49	60,76	61,03	
7	3	9	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	59,69	59,69	60,29	60,89	61,50	62,11	62,73	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	3	10	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang diterbitkan	%	n.a	0	0	0	0	0	0	
7	3	11	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	1,52	3,03	4,55	6,06	7,58	9,09	10,61	
7	3	12	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	0	1,14	5,68	11,36	17,05	22,73	28,41	
7	4		PERDAGANGAN									
7	4	1	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	0	0	25	25	25	25	
7	4	2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	100	0	0	25	25	25	25	
7	4	3	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	25	25	25	25	25	25	
7	4	4	Nilai ekspor perdagangan	Juta Rupiah	75	0	25	25	25	25	25	
7	4	5	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75,2	0	25	25	25	25	25	
7	4	6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	%	25	0	0	25	25	25	25	
7	4	7	Persentase produk lokal UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran melalui kemitraan	%	25	0	0	25	25	25	25	
7	5		PERINDUSTRIAN									
7	5	1	Nilai produksi industri pengolahan	Rupiah	1.079.665.000	1.100.000.000	1.133.648.250	1.187.631.500	1.241.614.750	1.295.598.000	1.349.581.250	
7	5	2	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	%	2,5	0	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	
7	5	3	Persentase jumlah industri Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdaftar atau terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	24	26	27	30	33	36	40	
8			PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
8	1		Sekretariat Daerah									
8	1	1	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik	%	57,14	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	
8	1	2	Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan tepat waktu	%	83,33	100	100	100	100	100	100	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	1	3	Persentase kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	1	4	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	1	5	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	%	55,02	56,00	58,44	63,01	67,57	71,46	74,88	
8	1	6	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	%	94	95	95	95	96	96	97	
8	1	7	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	%	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)	Level III (Proaktif)	Level IV (Strategis)	
8	1	8	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	1	9	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik	%	60	60	60	90	90	90	90	
8	1	10	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	2		Sekretariat DPRD									
8	2	1	Tersedianya Rencana Kerja DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	2	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Penganggaran, Pembentukan Perda dan pengawasan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	2	3	Persentase program kerja DPRD terselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
9			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
9	1		Perencanaan									
9	1	1	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100	95	95	95	95	95	95	
9	1	2	Persentase keselarasan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	%	100	95	95	95	95	95	95	
9	2		Keuangan									
9	2	1	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	%	0,0389	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	2	2	Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
9	2	3	Penetapan LKPD	Tepat waktu/ tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
9	2	4	Manajemen aset	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9	2	5	Rasio desentralisasi fiskal	%	10,19	11,53	11,51	11,56	11,61	11,66	11,71	
9	2	6	Realisasi pendapatan terhadap target pendapatan	%	74	70	72	75	78	81	85	
9	3		Kepegawaian									
9	3	1	Persentase aparatur yang berkinerja baik dan/atau sangat baik	%	93,33	94,00	94,00	94,00	95,00	95,00	95,00	
9	3	2	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan	%	93,2	93,5	94,0	95,0	95,0	96,0	96,0	
9	3	3	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Anjab/ABK	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	4		Pendidikan dan Pelatihan									
9	4	1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	%	66	35	40	45	50	55	60	
9	4	2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar dan manajerial	%	49,79	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
9	5		Penelitian dan Pengembangan									
9	5	1	Persentase pemanfaatan hasil riset pada dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	5	2	Persentase penerapan inovasi daerah	%	50	50	50	50	50	50	50	
10			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
10	1		Inspektorat Daerah									

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	1	1	Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada instansi Pemerintah Daerah	%	81,29	81,92	82,54	83,79	85,04	86,29	87,54	
10	1	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	67,06	67,26	67,49	67,92	68,35	68,78	69,21	
10	1	3	Tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	Nilai	2,52	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
				Level	2	3	3	3	3	3	3	
11			UNSUR KEWILAYAHAN									
11	1		Kecamatan Benteng									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	95	95	96	97	98	99	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	95	97	100	100	100	100	100	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80	85	90	95	100	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80	85	90	95	98	
11	1	6	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,49	0,45	0,41	0,32	0,20	0,12	0,04	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
11	1		Kecamatan Bontomatene									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	80	85	85	90	95	95	100	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	88,00	91,50	92,00	92,00	95,00	95,00	95,00	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	85	85	85	87	87	90	95	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	85	85	85	85	88	90	90	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	85	85	85	85	85	90	90	
11	1	6	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	0	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	80	80	80	83	85	85	90	
11	1		Kecamatan Bontoharu									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	95	96	96	97	98	99	100	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	66,6	70,0	77,7	77,7	88,8	88,8	88,8	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80	80	85	90	95	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	98	100	100	100	100	100	100	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	75	80	80	85	90	95	100	
11	1	6	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	1,10	0,80	0,75	0,70	0,60	0,50	0,40	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	2	2	2	2	1	1	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	60	62	65	70	75	80	85	
11	1		Kecamatan Bontomanai									
11	1	1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan	%	n/a	60	70	70	80	80	90	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP									
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	100	100	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	n/a	40	50	60	70	80	80	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	60	62	65	70	75	80	85	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	4,55	4,56	4,56	4,57	4,58	4,59	5,00	
11	1	6	Tingkat Kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,10	0,08	0,07	0,05	0,02	0	0	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	n/a	1	1	1	1	1	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	n/a	50	50	60	70	80	80	
11	1		Kecamatan Buki									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	97,20	97,22	97,25	97,30	97,35	97,40	97,45	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	66,6	67,0	70,0	72,0	75,0	80,0	85,0	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	91,26	91,28	91,35	91,50	91,75	92,00	92,10	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	62,85	62,90	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	3,50	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	
11	1	6	Tingkat Kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	5	5	4	3	2	1	0	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,67	47,67	47,68	47,69	47,70	47,71	47,72	
11	1		Kecamatan Bontosikuyu									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	90	91	92	95	95	97	97	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	67	68	70	72	75	76	77	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80	83	85	85	90	93	95	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	96	97	97	97	98	98	99	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	77	78	78	80	85	90	95	
11	1	6	Tingkat Kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	n/a	1	0,75	0,62	0,50	0,40	0	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	63	75	96	96	97	97	98	
			Kecamatan Pasimasunggu									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	0	0	96	97	98	99	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	95	95	100	100	100	100	100	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	80	80	85	90	95	100	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80	85	90	95	98	
11	1	6	Tingkat Kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,49	0,45	0,41	0,32	0,20	0,12	0,04	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,67	47,68	47,68	47,69	47,70	47,71	47,72	
			Kecamatan Pasimasunggu Timur									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	95	95	96	97	98	99	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	95	95	100	100	100	100	100	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	75	80	85	90	95	100	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80	85	90	95	98	
11	1	6	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,49	0,45	0,41	0,32	0,20	0,12	0,04	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
11	1	8	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,6	47,6	47,7	47,8	47,9	48,0	48,1	
			Kecamatan Pasimarannu									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	92,16	0	0	93,30	93,74	94,35	94,82	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	66,66	70,00	77,00	77,77	88,00	88,88	88,88	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	91,26	91,30	91,35	91,50	91,75	92,00	92,10	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	64,4	65,0	67,3	70,6	72,5	75,4	79,2	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	3,00	3,20	3,50	3,80	4,20	4,55	4,96	
11	1	6	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	1,00	0,90	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	34,40	34,40	34,40	35,00	35,26	36,70	37,20	
			Kecamatan Pasilambena									
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	94	0	0	96	97	98	99	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	97	98	100	100	100	100	100	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	75	75	80	85	90	95	100	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80	80	80	85	90	95	98	
11	1	6	Tingkat Kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,43	0,42	0,41	0,32	0,20	0,12	0,04	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	0	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	47,6	47,6	47,7	47,8	47,9	48,0	48,1	
			Kecamatan Takabonerate									

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	1	1	Persentase penyelesaian pelayanan kelengkapan perizinan dan non perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	%	97,00	97,50	97,60	97,75	97,80	97,95	98,00	
11	1	2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	80,00	80,30	80,50	80,65	80,75	80,85	90,00	
11	1	3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80,00	80,30	80,40	80,50	80,60	80,75	90,00	
11	1	4	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	%	75,00	75,40	75,50	75,60	75,70	80,00	80,50	
11	1	5	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	%	80,00	80,20	80,30	80,40	80,50	90,00	90,00	
11	1	6	Tingkat kriminalitas di kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	3,0	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	
11	1	7	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	1	1	1	0,5	0,4	0,3	0,2	
11	1	8	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	%	75,00	75,30	75,40	75,50	75,60	75,75	80,00	
12			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
12	1		Kesatuan Bangsa dan Politik									
12	1	1	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	3,33	3,33	4,62	5,82	6,93	7,97	8,98	
12	1	2	Persentase pendidikan politik pada kader Partai Politik	%	5,71	5,71	9,65	13,67	17,72	21,89	25,98	
12	1	3	Persentase Ormas yang aktif	%	44,44	44,44	47,29	50,00	52,59	55,07	57,45	
12	1	4	Persentase Ormas terdaftar yang mendapatkan pembinaan	%	3,87	3,87	7,75	11,36	14,81	18,12	21,28	
12	1	5	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	12,50	12,50	50,00	50,00	75,00	75,00	100	

NO			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	1	6	Persentase kelompok sasaran pencegahan penyalagunaan narkoba yang dibina	%	8,70	8,70	26,09	34,78	43,48	52,17	65,22	
12	1	7	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	1	8	Persentase fasilitasi kegiatan Forkopimda	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mutu pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan wajib yang harus diperoleh setaip warga negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator SPM tertera pada **Tabel 4.5**

Tabel 4. 5
 Penetapan Target Indikator SPM kabupaten Kepulauan SeLayar tahun 2025-2030

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar / Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Nasional	Target Tahun						PD Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pendidikan									
1.1	Pelayanan Pendidikan Dasar									
	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,25%	100%	98,88%	99,52%	100%	100%	100%	100%	Disdikpora
1.2	Pelayanan Pendidikan Kesenjangan									
	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan / atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	48,49%	100%	56,70%	63,19%	69,68%	76,17%	76,93%	77,69%	Disdikpora
1.3	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini									
	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	89,30%	100%	92,27%	94,81%	97,36%	99,91%	100%	100%	Disdikpora
2.	Kesehatan									
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	98,48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.4	Pelayanan kesehatan balita									
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	94,03%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar									
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	92,23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,									
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut									

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar / Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Nasional	Target Tahun						PD Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi									
	Persentase warga negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus									
	Persentase warga negara penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat									
	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis									
	Persentase warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	73,87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)									
	Persentase warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
3.	Pekerjaan Umum									
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari									
	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	43,20%	74.05%	44,50%	44,50%	45,60%	51,00%	53,00%	55,00%	Dinas PUTR
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik									
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	5.87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUTR
4.	Perumahan Rakyat									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten									
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PKP
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah kabupaten									
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PKP

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar / Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Nasional	Target Tahun						PD Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Trantibumlinmas									
5.1	Pelayanan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP Damkar
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana									
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	99,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana									
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana									
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran									
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85,00%	100%	75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	100%	Satpol PP Damkar
6.	Sosial									
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti									
	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti									
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti									
	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti									
	Persentase warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten									

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar / Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Nasional	Target Tahun						PD Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos

4.2.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan instrumen yang memuat tujuan dan sasaran global.

TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, melestarikan kualitas lingkungan hidup, mendorong pembangunan yang inklusif, serta menerapkan tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, yang mencakup 17 tujuan utama. Penetapan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep 87/M.PPN/HK/10/2024 : Penetapan Metadata Indikator TPB/SDGS), sebagaimana tertera pada **Tabel 4.6**

Tabel 4. 6
 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN											
1.1.1.*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	BPS	%	0,93	0,83	0,73	0,73	0,53	0,43	0,33	Bapperida	
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS/Dinas Sosial	%	10,79	10,44	10,21	9,71	9,10	8,51	8,19	Dinas Sosial	
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	98,81	99,00	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
1.3.1.(b)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	%	36,72	41,00	46,42	47,76	49,45	50,38	54,75	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Dinas PUPR	%	10	13	16	20	26	27	31	Dinas PUPR	
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN											
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.1*	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehaan	%	18,30	17,10	16,55	11,81	8,34	7,92	5,08	Dinas Kesehaan	

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.2*	Prevalensi Wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehaan	%	11,7	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	Dinas Kesehaan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Angka	77,5	78,0	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Dinas Kesehaan	%	8,94	8,53	8,12	7,95	6,51	5,23	5,05	Dinas Kesehaan
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	287	200	117	106	84	40	26	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	10,3	9,50	9,32	8,32	7,24	6,08	5,60	Dinas Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/DOTS)	334	200	159	158	335	334	292	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0,009	0,12	0,10	0,08	0,07	0,01	0,07	Dinas Kesehatan
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	16,10	15,00	15,00	14,63	12,77	10,56	10,44	Dinas Kesehatan
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi metode modern	Dinas P3AP2KB	%	54,27	57,30	60,29	62,80	67,14	75,02	76,44	Dinas P3AP2KB
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1.000 perempuan di kelompok umur yang sama	Dinas P3AP2KB	%	3,75	4,00	4,45	5,24	6,57	7,30	7,83	Dinas P3AP2KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P3AP2KB	%	2,10	2,11	2,13	3,11	4,83	5,49	5,89	Dinas P3AP2KB
3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Dinas P3AP2KB	%	13,50	15,30	18,97	23,20	28,67	33,24	36,31	Dinas P3AP2KB
3.8.2.(a)	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	98,81	99,00	99,63	99,79	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA											
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
4.1.2.(a)	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Orang	1656	1456	1256	1056	856	656	456	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	(1) APM SD sederajat		%	85,69	81,70	83,36	81,70	83,97	78,14	78,77		
	(2) APK SMP sederajat		%	63,04	60,10	54,98	51,41	51,41	44,95	42,43		
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	93,08	93,50	94,04	94,26	93,82	94,41	94,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	SDGs 05 : MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN											
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun											
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Dinas DP3AP2KB	Jumlah Regulasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas DP3AP2KB	

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	Dinas P3AP2KB	%	10,03	9,94	9,90	9,45	9,35	9,28	9,25	Dinas P3AP2KB
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) Parlemen Tingkat Pusat	KPUD	%	0	0	0	0	0	1	1	KPUD
	(b) Parlemen Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	%	20	20	20	20	20	20	20	Sekretariat DPRD
	Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Dinas PUPR	%	83,45	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	Dinas PUPR
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan denga air dan sabun	Dinas Kesehatan	%	65,10	65,21	65,31	65,42	65,53	65,63	65,74	Dinas Kesehatan
	Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA										
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.7.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	96,40	97,20	98,31	99,02	99,38	100,00	100,00	SETDA
7.7.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	PLN	Kwh	284.187	289.871	295.554	301.238	306.922	312.606	318.289	SETDA
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Juta/Jiwa	58,29	60,49	64,73	67,66	70,30	74,07	78,66	BPS
8.2	Mencapai tingkat produktifitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	%	-	1,00	1,10	1,18	1,25	1,33	1,41	BPS, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Dinas Perdagkum	%	12,16	12,92	13,68	14,44	15,20	15,96	16,72	Dinas Perdagkum
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	%	8,27	8,48	8,69	9,60	10,21	11,08	11,40	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya.										
8.8.1.(a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	%	5,32	5,62	5,93	6,23	6,38	6,54	6,69	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	0,24	0,89	1,55	1,79	1,97	1,84	2,53	Dinas Pariwisata dan

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											Kebudayaan
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Org	394	484	573	681	785	917	1.002	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Org	13.816	17.235	20.653	22.505	21.628	24.440	26.882	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI											
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan	BPS	%	0,08	0,13	0,18	0,19	0,23	0,28	0,33	BPS
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA											
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1 (a)	Rasio Gini.	BPS	Poin	0,329	0,323	0,316	0,310	0,304	0,298	0,292	BPS
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	%	10,79	10,44	10,21	9,71	9,10	8,51	8,19	Dinas Sosial
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Dinas PMD	Desa	6	5	4	2	0	0	0	Dinas PMD
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD	Desa	22	23	37	44	53	60	68	Dinas PMD

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar											
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Kesehatan	%	36,72	41,05	45,38	46,19	47,24	48,65	52,15	Dinas Kesehatan	
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	17,74*	20,00	38,74	48,56	61,64	80,00	91,09	Dinas Lingkungan Hidup	
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN											
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.											
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Ton/Tahun	14,24		2897,51	3302,87	3272,80	3026,74	4424,75	Dinas Lingkungan Hidup	
12.6	Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan tradisional untuk mengdopsi praktek-[raktek erkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka											
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Unit	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional											
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup	Produk	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA											
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH dan Disdikpora	Unit	1	1	1	2	2	3	3	DLH dan Disdikpora	
	Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN											

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The World Trade Organization.										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	Dinas Perikanan	%	15,84	17,06	18,28	19,50	20,72	21,94	23,16	Dinas Perikanan
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumberdaya laut dan pasar										
14.b.1.(a)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dinas Perikanan	Orang	7.824	7.919	8.015	8.110	8.206	8.301	8.397	Dinas Perikanan
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI										
15.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan	Dinas Lingkungan Hidup	%	13,73 (2023)	13,80	13,87	13,94	14,00	14,07	14,14	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KEEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN										
16.2	Menghentikan perlakuan kejam,eksploitasi perdagangan,dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak										
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Dinas P3AP2KB	%	0,018	0,020	0,017	0,014	0,011	0,008	0,005	Dinas P3AP2KB
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas P3AP2KB	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas P3AP2KB
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat	Poin	3,85	3,90	4,02	4,09	4,12	4,14	4,23	Inspektorat
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel,dan transparan disemua tingkat										
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	Inspektorat	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Inspektorat	%	65	67	69	71	73	75	77	Inspektorat

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemerintah (SAKIP) ≥ B										
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Sekretariat Daerah	%	66	68	70	72	74	76	78	Sekretariat Daerah
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di : (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Dinas P3AP2KB	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas P3AP2KB
	(b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Dinas P3AP2KB	%	20	20	20	20	20	20	20	Dinas P3AP2KB
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas P3AP2KB	%	25,00	25,50	26,53	27,68	28,69	29,80	30,63	Dinas P3AP2KB
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Disdukcapil	%	94,13 (2022)	94,50	94,50	95,00	95,50	96,00	97,00	Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	%	93,25	93,25	93,50	94,00	95,00	96,00	97,00	Disdukcapil
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Dinas P3AP2KB	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P3AP2KB
	Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BPKAD	%	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,27	BPKAD
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),										

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global										
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Diskominfo SP	%	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100,00	100,00	Diskominfo SP
17.8	Mengoperasinalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi hyang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi										
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo SP	%	53,28	54,72	56,24	57,76	59,28	60,80	62,32	Diskominfo SP

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, Metadata Bappenas, Diolah

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, pada dasarnya menjabarkan perencanaan strategis yang mengarahkan apa yang hendak dicapai Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun mendatang (2025-2029). Dokumen ini memuat langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar visi : **“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”**, misi dan program Kepala daerah dapat tercapai

RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar serta kajian lingkungan yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun

5.1. Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 diperlukan pendanaan pembangunan yang memadai bertujuan untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, interaktif dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan untuk peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan

sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Dalam rangka menyikapi perubahan kebijakan pendanaan nasional, maka pemerintah daerah perlu melakukan Upaya mitigasi fiskal dengan tetap memperhatikan program prioritas pembangunan daerah.

5.2. Komunikasi Publik

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 guna mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi public dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.3. Pedoman Transisi

RPJMD kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2026 hingga 2030. Hal ini didasarkan pada tahun 2030 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD tahun 2025-2029 dengan RPJMD tahun 2030-2034, dimana pada tahun 2030 masih dalam proses penyusunan RPJMD baru untuk periode 2030-2034.

5.4. Kaidah Pelaksanaan

Selama kurun waktu lima tahun ke depan diasumsikan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan konsisten oleh Perangkat Daerah dengan dukungan peran aktif seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat. Hasil kinerja yang diperoleh diharapkan menjadi fondasi kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah periode berikutnya.

5.5. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan, diperlukan pengendalian baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan secara kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Manajemen risiko perlu diterapkan karena adanya risiko-risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani agar gangguan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dapat diminimalkan atau apabila terjadi dampaknya tidak signifikan.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan tahunan sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) dimaksud mulai tahun 2025 sampai tahun 2030.

 **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

MUHAMMAD NATSIR ALI